



LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH
KABUPATEN
KEPULAUAN
MERANTI

2024

AUDITED



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

008

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 6.1.2.a.2. atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyajikan nilai Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp340,26 miliar. Pejabat Pengelola Keuangan pada empat SKPD mempertanggungjawabkan belanja sebesar Rp6,18 miliar tidak sesuai ketentuan, antara lain terdapat bukti pertanggungjawaban belanja tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya, penyedia yang tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa, serta selisih nilai belanja pemeliharaan, suku cadang, dan bahan bakar yang diterima penyedia. Hal tersebut berdampak pada lebih saji atas penyajian realisasi Belanja Barang dan Jasa yang tidak dapat dikoreksi.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 6.1.2.b.4. atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyajikan nilai Belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp68,48 miliar. Dari nilai tersebut, terdapat pelaksanaan lima paket pekerjaan jalan pada Dinas PUPR melalui katalog elektronik tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya terdapat penunjukan penyedia sebelum proses *e-purchasing*, waktu proses yang tidak wajar, kesamaan harga hasil negosiasi dengan HPS, serta penggunaan metode negosiasi harga yang tidak tepat. Pelaksanaan yang tidak sesuai tersebut menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp5,39 miliar. Hal tersebut berdampak pada lebih saji atas penyajian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak dapat dikoreksi.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal Lain

Dalam LHP BPK Nomor 17.A/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 diantaranya karena: (1) Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mempertanggungjawabkan belanja sebesar Rp42,05 miliar tidak sesuai dengan ketentuan, diantaranya tidak membuat bukti pertanggungjawaban sesuai dengan kondisi yang senyatanya; (2) Sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) oleh Bendahara Pengeluaran atas realisasi kegiatan Belanja Barang Jasa pada Diskominfo senilai Rp64,59 juta tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban belanja oleh PPTK; (3) Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah sebesar Rp602 juta, diantaranya dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi senyatanya; dan (4) Belanja Tak Terduga kegiatan penanggulangan bencana banjir pada Dinsos P3AP2KB sebesar Rp644,78 juta, tidak terdapat bukti pertanggungjawaban sesuai dengan kondisi yang senyatanya.

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan upaya perbaikan dengan melakukan evaluasi penerapan ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh PA, KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 21.B/LHP/XVIII.PEK/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Riau

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Binsar Karyanto P., S.T., M.M., CSFA, GRCA, GRCP
Nomor Sertifikat R.0121.2022



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	Reff	ANGGARAN (Audited)	REALISASI 2024 (Audited)	%	REALISASI 2023 (Audited)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	6.1.1.				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.1.1.a.				
Pendapatan Pajak Daerah	6.1.1.a.1	41.100.000.000,00	18.679.998.295,01	45,45	16.671.383.937,45
Pendapatan Retribusi Daerah	6.1.1.a.2	95.120.124.097,00	64.919.566.355,04	68,25	1.337.128.750,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.1.1.a.3	80.548.000.000,00	9.524.546.677,00	11,82	12.246.453.249,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.1.1.a.4	45.506.882.285,00	4.817.826.258,31	10,59	114.535.387.021,87
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		262.275.006.382,00	97.941.937.585,36	37,34	144.790.352.958,32
PENDAPATAN TRANSFER	6.1.1.b.				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	6.1.1.b.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	6.1.1.b.1.a.a	79.052.417.000,00	92.098.608.000,00	116,50	86.789.666.959,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.1.1.b.1.a.b	107.488.959.000,00	88.305.177.000,00	82,15	143.216.165.923,00
Dana Alokasi Umum	6.1.1.b.1.a.c	437.522.368.000,00	433.071.545.428,00	98,98	422.381.067.892,00
Dana Alokasi Khusus	6.1.1.b.1.a.d	264.047.242.000,00	254.597.179.433,00	96,42	184.803.753.182,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan		888.110.986.000,00	868.072.509.861,00	97,74	837.190.653.956,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6.1.1.b.1.b				
Dana Insentif Daerah	6.1.1.b.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	6.1.1.b.1.b	97.240.042.000,00	97.240.042.000,00	100,00	98.162.430.900,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		97.240.042.000,00	97.240.042.000,00	100,00	98.162.430.900,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.1.1.b.2				
Pendapatan Bagi Hasil	6.1.1.b.2.1	92.300.000.000,00	75.528.250.652,00	81,83	94.461.552.676,00
Bantuan Keuangan	6.1.1.b.2.2	7.029.400.000,00	1.056.240.000,00	15,03	5.518.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		99.329.400.000,00	76.584.490.652,00	77,10	99.979.552.676,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.084.680.428.000,00	1.041.897.042.513,00	96,06	1.035.332.637.532,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.1.1.c				

URAIAN	Reff	ANGGARAN (Audited)	REALISASI 2024 (Audited)	%	REALISASI 2023 (Audited)
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Hibah	6.1.1.c	0,00	69.825.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	6.1.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	6.1.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	69.825.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan		1.346.955.434.382,00	1.139.908.805.098,36	84,63	1.180.122.990.490,32
BELANJA	6.1.2.				
BELANJA OPERASI	6.1.2.a				
Belanja Pegawai	6.1.2.a.1.	502.813.618.853,00	402.888.874.978,77	80,13	414.521.101.134,61
Belanja Barang dan Jasa	6.1.2.a.2.	404.214.424.230,00	340.262.540.010,53	84,18	377.920.490.812,65
Belanja Bunga	6.1.2.a.3.	2.000.000.000,00	922.890.122,00	46,14	3.281.890.320,00
Belanja Subsidi	6.1.2.a..	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	6.1.2.a.4.	81.074.951.700,00	65.002.572.619,51	80,18	45.352.775.246,12
Belanja Bantuan Sosial	6.1.2.a.5.	16.188.573.950,00	4.003.002.385,23	24,73	10.141.094.940,69
Jumlah Belanja Operasi		1.006.291.568.733,00	813.079.880.116,04	80,80	851.217.352.454,07
BELANJA MODAL	6.1.2.b.				
Belanja Modal Tanah	6.1.2.b.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.1.2.b.2.	55.568.572.943,00	44.748.275.224,00	80,53	21.521.539.986,91
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.1.2.b.3.	78.835.756.313,00	59.476.677.697,29	75,44	34.372.784.234,70
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.1.2.b.4.	82.088.407.250,00	68.476.709.950,53	83,42	70.281.954.225,84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.1.2.b.5.	3.270.772.300,00	4.116.234.600,00	125,85	3.104.440.200,00
Belanja Modal Aset Lainnya	6.1.2.b.6.	51.500.000,00	12.478.342,00	24,23	0,00
Jumlah Belanja Modal		219.815.008.806,00	176.830.375.813,82	80,45	129.280.718.647,45
BELANJA TAK TERDUGA	6.1.2.c.				
Belanja Tak Terduga	6.1.2.c.	1.000.000.000,00	912.403.803,00	91,24	746.785.200,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		1.000.000.000,00	912.403.803,00	91,24	746.785.200,00
TRANSFER	6.1.2.d.				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.1.2.d.	1.980.965.900,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	Reff	ANGGARAN (Audited)	REALISASI 2024 (Audited)	%	REALISASI 2023 (Audited)
1	2	3	4	5	6
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	6.1.2.d.	159.646.416.336,00	135.404.042.000,00	84,81	161.183.742.900,00
Jumlah Transfer		161.627.382.236,00	135.404.042.000,00	83,78	161.183.742.900,00
Jumlah Belanja dan Transfer		1.388.733.959.775,00	1.126.226.701.732,86	81,10	1.142.428.599.201,52
Surplus/Defisit	6.1.3.	(41.778.525.393,00)	13.682.103.365,50	(32,75)	37.694.391.288,80
PEMBIAYAAN	6.1.4.				
Penerimaan Pembiayaan	6.1.4.a.				
Penggunaan SILPA	6.1.4.a.	63.511.323.400,00	9.657.327.481,76	15,21	12.212.900.270,04
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		63.511.323.400,00	9.657.327.481,76	15,21	12.212.900.270,04
Pengeluaran Pembiayaan	6.1.4.b.				
Penyertaan Modal Pemerintah	6.1.4.b.	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	6.1.4.b.	21.000.000.000,00	20.775.896.319,38	98,93	35.233.807.450,08
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		21.000.000.000,00	20.775.896.319,38	98,93	40.233.807.450,08
Pembiayaan Netto		42.511.323.400,00	(11.118.568.837,62)	(26,15)	(28.020.907.180,04)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	6.1.5.	732.798.007,00	2.563.534.527,88	349,83	9.673.484.108,76

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


BUPATI KEPULAUAN MERANTI

AKBP (Parr) H. ASMAR



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	6.2.1.	9.673.484.108,76	12.212.900.270,04
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	6.2.2.	9.657.327.481,76	12.212.900.270,04
3	Sub Total (1-2)		16.156.627,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	6.2.3	2.563.534.527,88	9.673.484.108,76
5	Sub Total (3+4)		2.579.691.154,88	9.673.484.108,76
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	6.2.4.	(16.156.627,00)	0,00
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	6.2.5.	2.563.534.527,88	9.673.484.108,76

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

AKEP (Puri) H. ASMAR



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
	ASET	6.3.1.		
I	ASET LANCAR	6.3.1.a.		
	Kas di Kas Daerah	6.3.1.a.1.	79.033.064,53	7.797.367.769,45
	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.3.1.a.2.	156.551.674,00	191.798.271,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	6.3.1.a.3.	0,00	17.763.100,00
	Kas di BLUD	6.3.1.a.4.	1.246.854.896,35	712.563.260,31
	Kas Dana BOS	6.3.1.a.5.	0,00	0,00
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	6.3.1.a.6.	0,00	0,00
	Kas Lainnya	6.3.1.a.7.	785.845.815,40	328.060.815,40
	Setara Kas	6.3.1.a.8.	0,00	0,00
	Kas Dana BOSP	6.3.1.a.9.	98.474.268,00	1.745.740,00
	Kas Dana BOK Puskesmas	6.3.1.a.10.	982.620.625,00	936.089.955,00
	Investasi Jangka Pendek	6.3.1.a.11.	0,00	0,00
	Piutang Pajak	6.3.1.a.12.	27.027.122.389,92	24.624.015.548,92
	Piutang Retribusi	6.3.1.a.13.	2.136.467.143,00	2.083.813.589,00
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.3.1.a.14.	0,00	0,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.3.1.a.15.	100.274.127,00	280.430.800,00
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	6.3.1.a.16.	0,00	0,00
	Piutang Transfer Antar Daerah	6.3.1.a.17.	30.751.329.088,00	0,00
	Piutang Lainnya	6.3.1.a.18.	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang	6.3.1.a.19.	(21.811.438.354,84)	(20.495.301.737,59)
	Beban dibayar dimuka	6.3.1.a.20.	4.486.851.564,00	0,00
	Persediaan	6.3.1.a.21.	16.467.500.937,47	16.027.361.598,56
	Jumlah Aset Lancar		62.507.487.237,83	32.505.708.710,05
II	INVESTASI JANGKA PANJANG	6.3.1.b.		
	Investasi Non Permanen	6.3.1.b.1.		
	Investasi Non Permanen Lainnya – Dana Bergulir	6.3.1.b.1.a.	0,00	0,00
	Penyisihan Dana Bergulir	6.3.1.b.1.b.	0,00	0,00
	Jumlah Investasi Non Permanen		0,00	0,00
	Investasi Permanen	6.3.1.b.2.		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.3.1.b.2.a.	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00
	Jumlah Investasi Permanen		65.000.000.000,00	65.000.000.000,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		65.000.000.000,00	65.000.000.000,00

NO	URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
III	ASET TETAP	6.3.1.c.		
	Tanah	6.3.1.c.1.	302.563.067.306,27	312.834.556.533,44
	Peralatan dan Mesin	6.3.1.c.2.	580.822.126.386,11	590.398.619.847,77
	Gedung dan Bangunan	6.3.1.c.3.	928.269.251.776,94	883.584.342.966,95
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.3.1.c.4.	2.807.667.597.548,36	2.694.332.289.297,32
	Aset Tetap Lainnya	6.3.1.c.5.	57.017.436.313,42	51.637.794.539,58
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.3.1.c.6.	289.607.530.032,26	269.249.838.965,46
	Akumulasi Penyusutan	6.3.1.c.7.	(2.589.554.116.722,49)	(2.461.957.500.060,68)
	Jumlah Aset Tetap		2.376.392.892.640,87	2.340.079.942.089,83
IV	DANA CADANGAN			
	Dana Cadangan		0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
V	ASET LAINNYA	6.3.1.d.		
	Tagihan Penjualan Angsuran	6.3.1.d.1.	0,00	0,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	6.3.1.d.2.	4.137.101.736,29	2.714.000.424,76
	Aset Tak Berwujud	6.3.1.d.3.	3.551.100.232,94	3.381.816.150,94
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	6.3.1.d.4.	(2.954.257.659,01)	(2.733.492.635,88)
	Aset Lain-lain	6.3.1.d.5.	235.587.162.753,11	202.741.823.815,98
	Akumulasi Aset Lain-lain	6.3.1.d.6.	(114.492.996.691,49)	0,00
	Jumlah Aset Lainnya		125.828.110.371,84	206.104.147.755,80
	TOTAL ASET		2.629.728.490.250,54	2.643.689.798.555,68
	KEWAJIBAN	6.3.2.		
VI	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.3.2.a.		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.3.2.a.1.	785.845.815,40	328.060.815,40
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	6.3.2.a.2.	0,00	20.775.896.319,38
	Pendapatan diterima dimuka	6.3.2.a.3.	275.472.198,61	350.393.556,54
	Utang Belanja	6.3.2.a.4.	156.354.522.902,75	35.795.794.081,72
	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.3.2.a.5.	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		157.415.840.916,76	57.250.144.773,03
VII	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	6.3.2.b.		
	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank	6.3.2.b.1.	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
	TOTAL KEWAJIBAN		157.415.840.916,76	57.250.144.773,03

NO	URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
	EKUITAS	6.3.3.		
VIII	Ekuitas	6.3.3.		
	Ekuitas	6.3.3.	2.472.312.649.333,78	2.586.439.653.782,65
	TOTAL EKUITAS		2.472.312.649.333,78	2.586.439.653.782,65
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.629.728.490.250,54	2.643.689.798.555,68

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

AKBP (Purn) H. ASMAR



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
KEGIATAN OPERASIONAL	6.4.		
PENDAPATAN	6.4.1.		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.4.1.a.		
Pendapatan Pajak Daerah	6.4.1.a.1.	21.515.603.909,01	18.386.872.542,90
Pendapatan Retribusi Daerah	6.4.1.a.2.	64.795.152.801,51	1.348.036.110,59
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.4.1.a.3.	9.524.546.677,00	12.246.453.249,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.4.1.a.4.	4.820.486.769,77	112.105.504.201,68
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		100.655.790.157,29	144.086.866.104,18
PENDAPATAN TRANSFER	6.4.1.b.		
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	6.4.1.b.1.		
Dana Bagi Hasil Pajak	6.4.1.b.1.1.	82.523.053.000,00	92.491.120.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.4.1.b.1.2.	70.488.959.000,00	146.034.325.000,00
Dana Alokasi Umum	6.4.1.b.1.3.	433.071.545.428,00	422.381.067.892,00
Dana Alokasi Khusus	6.4.1.b.1.4.	254.597.179.433,00	184.803.753.182,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		840.680.736.861,00	845.710.266.074,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	6.4.1.b.2.		
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Dana Penyesuaian	6.4.1.b.2.	0,00	98.162.430.900,00
Jumlah Pendapatan Transfer - Lainnya		0,00	98.162.430.900,00
Transfer Pemerintah Provinsi	6.4.1.b.3.		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.4.1.b.3.	105.971.579.740,00	87.760.079.486,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		105.971.579.740,00	87.760.079.486,00
Bantuan Keuangan	6.4.1.b.4.		
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	6.4.1.b.4.	1.364.240.000,00	5.518.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan		1.364.240.000,00	5.518.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer		948.016.556.601,00	1.037.150.776.460,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.4.1.c.		
Pendapatan Hibah	6.4.1.c.1.	4.863.554.291,60	6.076.848.008,33
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		4.863.554.291,60	6.076.848.008,33
Jumlah Pendapatan		1.053.535.901.049,89	1.187.314.490.572,50

URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
BEBAN	6.4.2.		
BEBAN OPERASI	6.4.2.a.		
Beban Pegawai	6.4.2.a.1.	448.746.704.829,94	414.548.726.007,61
Beban Persediaan	6.4.2.a.2.	94.408.426.228,39	104.522.771.557,99
Beban Jasa	6.4.2.a.3.	176.195.374.395,93	180.304.767.491,42
Beban Pemeliharaan	6.4.2.a.4.	26.423.802.057,57	30.104.203.078,00
Beban Perjalanan Dinas	6.4.2.a.5.	42.742.782.705,00	57.487.820.490,00
Beban Bunga	6.4.2.a.6.	922.890.122,00	3.281.890.320,00
Beban Hibah	6.4.2.a.7.	70.061.248.625,48	44.004.436.246,12
Beban Bantuan Sosial	6.4.2.a.8.	8.199.485.379,91	9.462.055.940,69
Beban Penyusutan	6.4.2.a.9.	167.110.683.339,74	263.535.064.492,84
Beban Amortisasi	6.4.2.a.10.	214.765.023,14	238.078.972,38
Beban Penyisihan	6.4.2.a.11.	1.753.870.546,47	1.539.505.338,52
Beban Transfer	6.4.2.a.12.	63.906.374.400,00	161.183.742.900,00
Beban Lain-lain	6.4.2.a.13.	0,00	1.157.248,25
Jumlah Beban Operasi		1.100.686.407.653,57	1.270.214.220.083,81
Jumlah Beban		1.100.686.407.653,57	1.270.214.220.083,81
Surplus/(Defisit) dari Operasi		(47.150.506.603,68)	(82.899.729.511,31)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	6.4.3.		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	6.4.3.a.	0,00	14.540.333,33
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.4.3.b.	(15.677.856.031,39)	(53.197.374.930,02)
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		(15.677.856.031,39)	(53.182.834.596,69)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(62.828.362.635,07)	(136.082.564.108,00)
POS LUAR BIASA	6.4.4.		
Pendapatan Luar Biasa	6.4.4.	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	6.4.4.a.	912.393.832,00	746.785.200,00
Jumlah Pos Luar Biasa		912.393.832,00	746.785.200,00
SURPLUS/DEFISIT LO	6.4.5.	(63.740.756.467,07)	(136.829.349.308,00)

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


BUPATI KEPULAUAN MERANTI
AKBP (Purn) H. ASMAR



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	6.5.1.		
Arus Masuk Kas	6.5.1.a.		
Penerimaan Pajak Daerah	6.5.1.a.	18.679.998.295,01	16.671.383.937,45
Penerimaan Retribusi Daerah	6.5.1.a.	64.919.566.355,04	1.337.128.750,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.5.1.a.	9.524.546.677,00	12.246.453.249,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	6.5.1.a.	4.817.826.258,31	114.496.582.021,87
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	6.5.1.a.	92.098.608.000,00	86.789.666.959,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.5.1.a.	88.305.177.000,00	143.216.165.923,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	6.5.1.a.	433.071.545.428,00	422.381.067.892,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	6.5.1.a.	254.597.179.433,00	184.803.753.182,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	6.5.1.a.	97.240.042.000,00	98.162.430.900,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	6.5.1.a.	75.528.250.652,00	94.461.552.676,00
Penerimaan Dana Bantuan Keuangan	6.5.1.a.	1.056.240.000,00	5.518.000.000,00
Penerimaan Hibah	6.5.1.a.	69.825.000,00	0,00
Penerimaan dan Pendapatan Lainnya	6.5.1.a.	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.139.908.805.098,36	1.180.084.185.490,32
Arus Keluar Kas	6.5.1.b.		
Pembayaran Pegawai	6.5.1.b.	402.888.874.978,77	414.521.101.134,61
Pembayaran Barang dan Jasa	6.5.1.b.	340.262.540.010,53	377.920.490.812,65
Pembayaran Bunga	6.5.1.b.	922.890.122,00	3.281.890.320,00
Pembayaran Hibah	6.5.1.b.	65.002.572.619,51	45.352.775.246,12
Pembayaran Bantuan Sosial	6.5.1.b.	4.003.002.385,23	10.141.094.940,69
Pembayaran Tak Terduga	6.5.1.b.	912.403.803,00	746.785.200,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	6.5.1.b.	135.404.042.000,00	161.183.742.900,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Lainnya – Partai Politik	6.5.1.b.	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		949.396.325.919,04	1.013.147.880.554,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		190.512.479.179,32	166.936.304.936,25
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	6.5.2.		
Arus Masuk Kas	6.5.2.a.		
Pencairan Dana Cadangan	6.5.2.a.	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	6.5.2.a.	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	6.5.2.a.	0,00	24.357.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	6.5.2.a.	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.5.2.a.	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	6.5.2.a.	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	6.5.2.a.	0,00	14.448.000,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.5.2.a.	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	6.5.2.a.	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	38.805.000,00

URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Arus Keluar Kas	6.5.2.b.		
Perolehan Tanah	6.5.2.b.	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	6.5.2.b.	44.748.275.224,00	21.521.539.986,91
Perolehan Gedung dan Bangunan	6.5.2.b.	59.476.677.697,29	34.372.784.234,70
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.5.2.b.	68.476.709.950,53	70.281.954.225,84
Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.5.2.b.	4.116.234.600,00	3.104.440.200,00
Perolehan Aset Lainnya	6.5.2.b.	12.478.342,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.5.2.b.	0,00	5.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		176.830.375.813,82	134.280.718.647,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(176.830.375.813,82)	(134.241.913.647,45)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	6.5.3.		
Arus Masuk Kas	6.5.3.a.		
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	6.5.3.a.	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	6.5.3.a.	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	6.5.3.a.	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	6.5.3.a.	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	6.5.3.a.	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	6.5.3.a.	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	6.5.3.a.	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	6.5.3.a.	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.5.3.a.	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas	6.5.3.b.		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	6.5.3.b.	20.775.896.319,38	35.233.807.450,08
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.5.3.b.	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		20.775.896.319,38	35.233.807.450,08
Arus kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(20.775.896.319,38)	(35.233.807.450,08)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	6.5.4.		
Arus Masuk Kas	6.5.4.a.		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.5.4.a.1.	68.260.858.373,00	59.644.462.253,60
Pemindahbukuan	6.5.4.a.2.	616.245.717,00	31.111.264.411,00
Penerimaan Biaya Administrasi	6.5.4.a.3.	15.554.648,15	17.813.903,85

URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya	6.5.4.a.4	0,00	348.133.918,00
Jumlah Arus Masuk Kas		68.892.658.738,15	91.121.674.486,45
Arus Keluar Kas	6.5.4.b.		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6.5.4.b.1.	67.803.073.373,00	59.320.564.438,60
Pemindahbukuan	6.5.4.b.2.	616.245.717,00	21.113.497.663,00
Biaya biaya Administrasi	6.5.4.b.3.	15.554.648,15	17.938.045,85
Pengeluaran PFK Tahun Sebelumnya	6.5.4.b.4.	0,00	79.669.926,28
Koreksi Kas Kasda	6.5.4.b.5.	614,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		68.434.874.352,15	80.531.670.073,73
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		457.784.386,00	10.590.004.412,72
Kenaikan/Penurunan Kas	6.5.5.	(6.636.008.567,88)	8.050.588.251,45
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas BOS, FKTP dan BLUD	6.5.6.	9.985.388.911,16	1.934.800.659,71
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas BOS, FKTP dan BLUD	6.5.7.	3.349.380.343,28	9.985.388.911,16
Kas di Kas Daerah		79.033.064,53	7.797.367.769,45
Kas Setara Kas	6.5.8.	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	6.5.9.	156.551.674,00	191.798.271,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	6.5.10.	0,00	17.763.100,00
Saldo Akhir Kas	6.5.11.	3.349.380.343,28	9.985.388.911,16

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

AKBP (Purn) H. ASMAR



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
EKUITAS AWAL	6.6.1	2.586.439.653.782,65	2.724.187.270.096,02
SURPLUS/DEFISIT LO	6.6.2	(63.740.756.467,07)	(136.829.349.308,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	6.6.3	(50.386.247.981,80)	(918.267.005,37)
Koreksi Kas	6.6.3.a	(614,00)	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	6.6.3.b	1.236.831.777,68	1.820.677.473,00
Koreksi Piutang Pajak	6.6.3.c	(371.249.292,00)	(5.795.087.887,00)
Koreksi Piutang Retribusi	6.6.3.d	(48.400,00)	0,00
Koreksi Piutang Lainnya	6.6.3.e	0,00	(30.000,00)
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak	6.6.3.f	424.296.907,23	3.288.535.813,04
Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi	6.6.3.g	7.437.022,00	26.730.000,00
Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya	6.6.3.h	6.000.000,00	18.642.020,50
Koreksi Nilai Aset tetap dan Aset Lainnya	6.6.3.i	23.454.721.581,60	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Tahun Sebelumnya	6.6.3.j	(76.744.544.055,12)	(1.579.614.243,83)
Koreksi Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi	6.6.3.k	1.431.101.311,53	0,00
Koreksi Utang tahun Sebelumnya	6.6.3.l	169.205.779,28	1.329.547.826,52
Koreksi Pendapatan diterima dimuka Tahun Sebelumnya	6.6.3.m	0,00	(27.668.007,59)
EKUITAS AKHIR	6.6.4	2.472.312.649.333,78	2.586.439.653.782,65

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

AKBP (Purn) H. ASMAR



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan SAL, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BUPATI KEPULAUAN MERANTI



AKBP (Purn) H. ASMAR



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Umum

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Meranti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, tambahan Lembaga Negara Nomor 2574).

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Kabupaten hasil pemekaran yang paling muda diwilayah Provinsi Riau. Dasar hukum pembentukan Kabupaten ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009. Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas 9 Kecamatan, 96 Desa dan 5 Kelurahan terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara 1025°36" Lintang Utara - 0° 42' 30" - 1° 28' 0" Lintang Utara dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 3.707,84 km² yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak empat pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa

No	Kecamatan	Ibukota	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah per Km ²
1.	Kec.Tebing Tinggi	Selatpanjang	4	5	89,38
2	Kec.Tebing Tinggi Barat	Alai	0	14	489,46
3.	Kec.Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	0	10	800,47
4.	Kec.Rangsang	Tanjung Samak	0	14	420,73
5.	Kec.Rangsang Barat	Bantar	0	12	116,38
6.	Kec.Rangsang Pesisir	Telesung	0	11	381,35
7.	Kec.Merbau	Teluk Belitung	1	9	553,82
8.	Kec.Pulau Merbau	Semukut	0	11	216,14
9.	Kec.Tasik Putri Puyu	Bandul	0	10	556,22
Jumlah			5	96	3 623,93

Sumber: BPS Kab. Kepulauan Meranti dalam angka 2025

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2024 adalah 211,997 jiwa (BPS, 2024). Pendudukan Kabupaten Kepulauan Meranti bersifat heterogen dengan mayoritas penganut agama Islam. Selain Suku Melayu yang merupakan mayoritas, terdapat juga suku-suku lainnya seperti Suku Minang, Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Batak, Tionghoa, dan sebagainya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki Visi yaitu :

"MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MAJU, CERDAS, DAN BERMARTABAT DI PROVINSI RIAU INDONESIA"

Misi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur;
2. Meningkatkan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia beriman dan bertakwa yang memiliki daya saing;
3. Meningkatkan mutu dan layanan kesehatan masyarakat;
4. Menciptakan produktivitas perekonomian masyarakat;
5. Membangun harmonisasi sosial budaya masyarakat; dan
6. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta memberikan pelayanan prima.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah 3.646 orang dan 3.568 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024

Golongan	2024	2023
PNS Golongan IV	283	299
PNS Golongan III	1885	1864
PNS Golongan II	455	539
PNS Golongan I	7	10
P3K	1016	856
Total	3646	3568

Sumber BPKSDM Kabupaten Kepulauan Meranti

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami secara keliru oleh para pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang memuat penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Arus Kas, serta informasi pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang meliputi:

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target;
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
3. Kebijakan akuntansi yang penting; dan
4. Penjelasan pos-pos laporan keuangan;

Pengungkapan pos-pos laporan keuangan menggunakan *accrual* dan informasi tambahan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan oleh Kepala Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan OPD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur atas pertanggungjawaban OPD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Secara umum penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, sedangkan tujuan spesifiknya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4971);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Nomor 1425, Tambahan Berita Negara Nomor 4609);



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2020 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi yang Dihentikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1640);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan SOTK Baru Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. (Lembaran Daerah Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

1.4.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terdiri dari SKPKD, OPD, dan BLUD. LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA SKPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir.

3. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca SKPKD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Kewajiban dan Ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024, disusun berdasarkan penggabungan antara Laporan Keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan Keuangan SKPKD. Laporan Keuangan OPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan Keuangan SKPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.4.2. Entitas

Pada tahun 2024, terdapat entitas yang mengalami perubahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun entitas yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Meliput:

a. Entitas Akuntansi :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Dinas Perikanan;
 18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 19. Sekretariat Daerah;
 20. Sekretariat DPRD;
 21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 22. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 23. Badan Pendapatan Daerah;
 24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 25. Inspektorat Daerah;
 26. Kecamatan Tebing Tinggi;
 27. Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 28. Kecamatan Rangsang;
 29. Kecamatan Rangsang Barat;
 30. Kecamatan Merbau;
 31. Kecamatan Pulau Merbau;
 32. Kecamatan Rangsang Pesisir;
 33. Kecamatan Tasik Putri Puyu;
 34. Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. LKPD ini tidak mencakup entitas:
1. Pemerintah Pusat; dan
 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Moneter dan Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan (Fiskal)
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2. Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.3. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Entitas Pelapor

- 4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Entitas Pelapor
- 4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Bab V Kebijakan Akuntansi

- 5.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- 5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 5.3. Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 5.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada

Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 6.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - 6.1.1. Pendapatan
 - 6.1.2. Belanja
 - 6.1.3. Pembiayaan
- 6.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 6.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
- 6.2.2. Penggunaan SAL dari Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
- 6.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
- 6.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- 6.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 6.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 6.3.1. Aset
 - 6.3.1.a Aset Lancar
 - 6.3.1.b Investasi Jangka Panjang
 - 6.3.1.c Aset Tetap
 - 6.3.1.d Aset Lainnya
 - 6.3.2. Kewajiban
 - 6.3.2.a Kewajiban Jangka Pendek
 - 6.3.2.b Kewajiban Jangka Panjang
 - 6.3.3. Ekuitas
- 6.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 6.4.1. Pendapatan- LO
 - 6.4.2. Beban
 - 6.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
 - 6.4.4. Pos Luar Biasa
 - 6.4.5. Surplus/Defisit Laporan Operasional
- 6.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - 6.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
 - 6.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
 - 6.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
 - 6.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
 - 6.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas
 - 6.5.6. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas FKTP, BLUD dan BOS
 - 6.5.7. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas FKTP, BLUD dan BOS
 - 6.5.8. Setara Kas
 - 6.5.9 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 6.5.10 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
- 6.5.11 Saldo Akhir Kas Lainnya BOS
- 6.5.12 Saldo Akhir Kas
- 6.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
 - 6.6.1. Ekuitas Awal
 - 6.6.2. Surplus/Defisit LO
 - 6.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
 - 6.3.3.a. Koreksi Kas
 - 6.6.3.b. Koreksi Nilai Persediaan
 - 6.6.3.c. Koreksi Piutang Pajak
 - 6.6.3.d. Koreksi Piutang Retribusi
 - 6.6.3.e. Koreksi Piutang Lainnya
 - 6.6.3.f. Koreksi Penyisihan Piutang Pajak
 - 6.6.3.g. Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi
 - 6.6.3.h. Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya
 - 6.6.3.i. Penilaian Aset Tetap
 - 6.6.3.j. Koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya
 - 6.6.3.k. Koreksi Akumulatif Penyusutan dan Amortisasi Tahun Sebelumnya
 - 6.6.3.l. Koreksi Utang Tahun Sebelumnya
 - 6.6.3.m. Koreksi Pendapatan Diterima di Muka Tahun Sebelumnya
 - 6.6.4. Ekuitas Akhir

Bab VII Pengungkapan Informasi Lainnya

- 7.1. Sejarah Pembentukan
- 7.2. Pengungkapan Penting Lainnya
 - 7.2.1. Rekening Pemerintah
 - 7.2.2. Rekening Satuan Pendidikan Dana BOS
- 7.3. Basis dalam Pencatatan laporan keuangan
- 7.4. Struktur Organisasi

Bab VIII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 8.1. Permasalahan
- 8.2. Pemecahannya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan suatu istilah dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

Terdapat beberapa informasi terkait indikator ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 yang diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan tahun 2024 sebesar 23,15%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 sebesar 4,51%;
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 69,64;
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2024 sebesar 3,33%;
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Harga Berlaku tahun 2024 sebesar 27,46 triliun rupiah.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah persentasi jumlah warga masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Sedangkan kedalaman dan keparahan kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Keparahen kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 adalah Rp661.863/kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 44,34 ribu jiwa atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

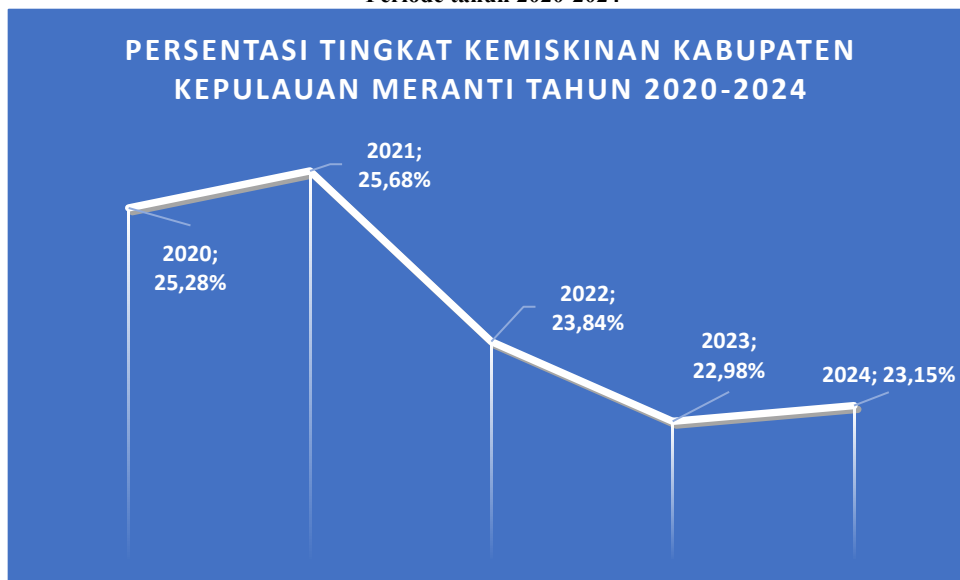
sebesar 23,15% dari total penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 211.997 jiwa. Berikut ini disajikan data tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti periode tahun 2021-2024 pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti 2020–2024

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kabupaten Kepulauan Meranti (%)	25,28	25,68	23,84	22,98	23,15	
2	Kabupaten Kepulauan Meranti (Ribuan Orang)	47,10	48,50	45,25	43,82	44,34	

Sumber: BPS, 2024

Grafik 2.1
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Provinsi Riau
Periode tahun 2020-2024



Jika dilihat dari grafik 2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar 1,84 di tahun 2022 dan 0,86 di tahun 2023 serta terdapat kenaikan persentase penduduk miskin di tahun 2024 sebesar 0,17%.

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Meranti dan Provinsi Riau 2020-2024

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat kedalaman Kemiskinan Kab. Kepulauan Meranti	4,32	4,46	3,54	3,86	3,59
2	Tingkat keparahan Kemiskinan Kab. Kepulauan Meranti	1,11	1,22	0,87	1,06	0,88

Sumber : BPS, 2024

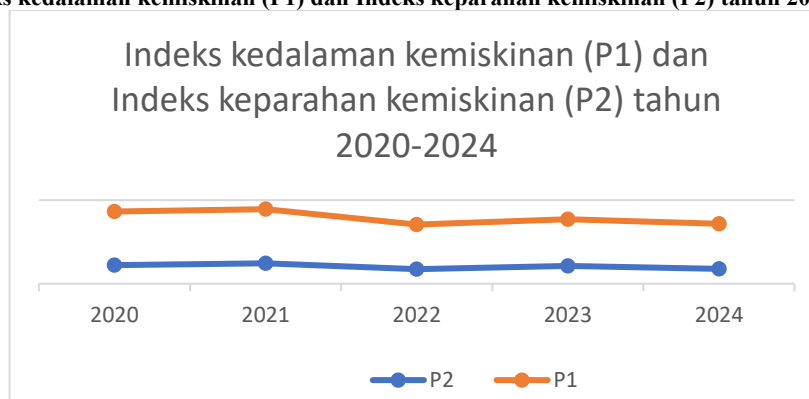


PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2020-2024, secara umum P1 menunjukkan tren penurunan. Meskipun demikian, pada tahun 2024 P1 di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan dari 4,32 di tahun 2020 menjadi 3,59. Nilai P1 yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Diharapkan nilai P1 dapat terus menunjukkan penurunan sehingga penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Selain Indeks kedalaman kemiskinan (P1), ada juga indikator Indeks keparahan kemiskinan (P2) yang menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 di Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengalami penurunan di tahun 2024 dari 1,11 di tahun 2020 menjadi 0,88.

Grafik 2.2
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) tahun 2020-2024



2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran (*unemployment*) adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja/mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari:

- Angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- d. Angkatan kerja yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 adalah sebesar 4,51%, sebagaimana dapat dijelaskan pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Kepulauan Meranti dan Provinsi Riau (%)
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Kepulauan Meranti	7,94	4,43	5,50	5,17	4,51
2	Provinsi Riau	4,37	4,42	4,37	4,23	3,7

Sumber : BPS, 2024

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Kepulauan Meranti dan Provinsi Riau
Tahun 2020-2024



Dari data di atas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 adalah sebesar 4,51% atau 0,66 poin lebih rendah dari data tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil Pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan dan Pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur Panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (<60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} \leq 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$)
- Sangat Tinggi (>80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti pencapaian IPM Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 adalah sebesar 69,64 poin dengan kategori “Sedang” sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau
Tahun 2022-2024

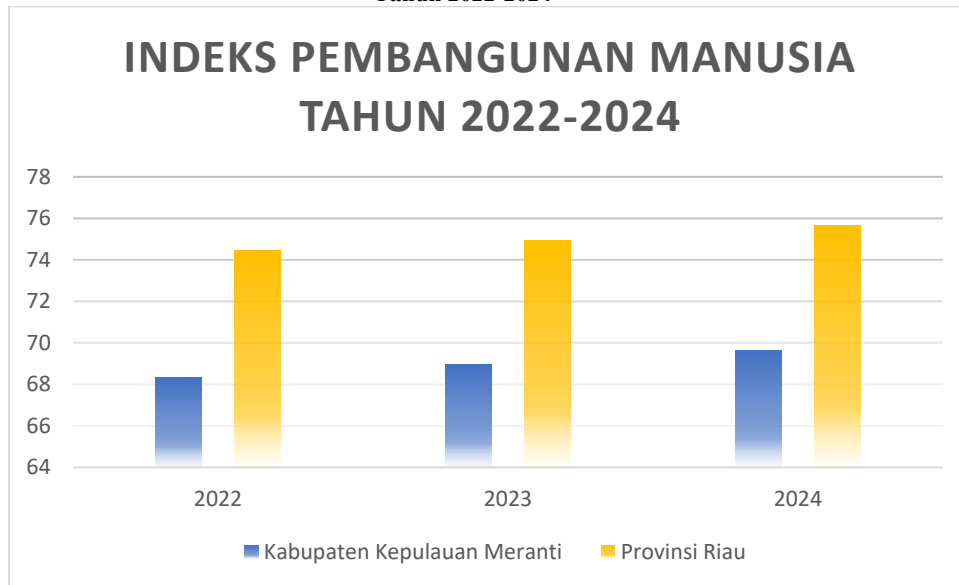
No	IPM (Tingkat)	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Kuantan Singingi	72,78	73,35	74,00
2	Indragiri Hulu	71,69	72,28	72,75
3	Indragiri Hilir	69,12	69,64	70,07
4	Pelalawan	74,15	74,69	75,25
5	Siak	75,53	75,97	76,52
6	Kampar	75,21	75,59	76,29
7	Rokan Hulu	71,7	72,28	73,07
8	Bengkalis	75,38	75,96	76,37
9	Rokan Hilir	71,35	71,98	72,46
10	Kepulauan Meranti	68,31	68,96	69,64
11	Pekanbaru	83,38	83,67	84,26
12	Dumai	76,2	76,45	77,03
13	RIAU	74,45	74,95	75,67

Sumber : BPS, 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Grafik 2.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti dan Provinsi Riau
Tahun 2022-2024



Jika dilihat pada informasi di atas, indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami tren kenaikan pada periode tahun 2022 s.d 2024. Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat sebesar 0,65 poin dan IPM Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022. Pada tahun 2024 IPM Kabupaten Kepulauan Meranti Meningkat menjadi 69,64 atau 0,68 poin lebih tinggi dari tahun 2023.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 didukung oleh semua komponen penyusunnya. Untuk penjelasan atas komponen penyusun IPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti
Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2021-2023

Dimensi/Indikator	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	68,09	68,41	68,48
Pengetahuan				
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,84	12,86	12,87
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,88	7,99	8,12
Standar Hidup Layak				
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	8.246	8.613	8.988
Indeks Pembangunan Manusia		66,52	67,28	67,92

Sumber : BPS, 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 Umur Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat peningkatan sebesar 0,32 dan 0,07 poin menjadi 68,41 dan 68,48. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2023 adalah sebesar 12,86 atau mengalami peningkatan sebanyak 0,04 poin dan pada tahun 2023 angka HLS Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebesar 12,87 atau mengalami peningkatan sebanyak 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 adalah sebesar 7,99 atau mengalami peningkatan sebanyak 0,11 poin dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2024 RLS Kabupaten Kepulauan Meranti adalah senilai 8,12 atau mengalami peningkatan sebanyak 0,13 poin dari tahun sebelumnya. Untuk Pengeluaran Riil per Kapita Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2023 adalah senilai Rp8.613.000 atau mengalami peningkatan senilai 367.000 dan pada tahun 2024 Pengeluaran Riil per Kapita Kabupaten Kepulauan Meranti adalah senilai Rp8.988.000 atau meningkat sebanyak 375.000 dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Kegiatan Penunjang IPM
Tahun 2024

No	Uraian / OPD	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir			
	- Dinas Kesehatan	107.930.539.838,00	85.046.301.167,29	78,80%
2	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah			
	- Dinas Pendidikan	81.389.078.900,00	76.045.403.644,00	93,43%
3	Pengeluaran Riil per Kapita			
	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.544.999.650,00	677.908.428,00	43,88%
	- Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	3.759.997.000,00	3.052.675.040,00	81,19%
	- Dinas Perikanan	9.011.307.942,00	6.653.094.241,00	73,83%

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan Pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas harga konstan 2010.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	PDRB (harga konstan 2010)(Milyar Rp)	12.683,87	13.008,81	13.421,78	14.530,00
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,56	3,17	4,81	3,33

Sumber : BPS, 2024

Selama kurun waktu tahun 2021-2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat 2,56% sedangkan pada tahun 2022 terdapat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi 3,17%, pada tahun 2023 terdapat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,81% dan pada tahun 2024 Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,33%.

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti bisa diukur salah satunya adalah dengan angka PDRB. PDRB menggambarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu menjadi dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Harga Berlaku sebesar 25,6 triliun rupiah dengan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai penyumbang terbesar. Untuk informasi terperinci terkait PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kepulauan Meranti (dalam Miliar rupiah), 2020–2024

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.191,11	8.302,55	9.046,51	9.846,06	11.126,18
2	Pertambangan dan Penggalian	2.499,74	3.433,13	5.272,25	4.543,85	4.292,40
3	Industri Pengolahan	4.738,17	5.414,28	6.092,70	6.075,03	6.459,33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,00	9,29	10,68	11,80	12,67
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,77	0,77	0,77	0,83	0,89
6	Konstruksi	919,33	1.017,92	1.167,94	1.499,50	1.685,52
7	Pedagang Besar dan Eceran	1.717,66	1.867,21	2.104,37	2.329,42	2.488,48
8	Transportasi dan Pergudangan	246,38	280,30	362,44	409,81	446,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50,15	57,82	67,20	74,96	83,76
10	Informasi dan Komunikasi	113,61	122,21	132,89	145,25	156,64
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	55,19	59,31	67,13	72,57	75,68
12	Real Estate	82,88	87,05	95,58	103,63	110,21
13	Jasa Perusahaan	0,55	0,56	0,69	0,77	0,81
14	Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	333,66	327,01	351,03	355,20	380,45
15	Jasa Pendidikan	44,10	45,84	48,09	51,02	53,82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,15	15,68	16,20	17,85	19,02
17	Jasa Lainnya	49,74	52,19	62,94	71,03	3 76,37
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		18.066,19	21.093,09	24.899,41	25.608,59	27.468,84

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT LAPANGAN USAHA 2020-2024, BPS, 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Kepulauan Meranti (miliar rupiah), 2020–2024

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.011,72	5.213,48	5.312,71	5.471,28	5.736,85
2	Pertambangan dan Penggalian	1.612,50	1.516,58	1.587,41	1.712,62	1.611,73
3	Industri Pengolahan	3.823,78	3.905,70	3.953,72	4.068,13	4.183,93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,04	5,21	5,79	6,21	6,67
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,67	0,66	0,66	0,68	0,71
6	Konstruksi	539,89	573,20	612,23	719,78	806,09
7	Pedagang Besar dan Eceran	979,43	1.058,34	1.137,40	1.233,96	1.284,33
8	Transportasi dan Pergudangan	167,29	182,93	219,67	234,27	246,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,05	29,27	32,84	35,16	37,76
10	Informasi dan Komunikasi	94,15	100,84	107,57	116,59	125,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	37,16	38,33	40,28	42,39	43,58
12	<i>Real Estate</i>	58,45	60,71	64,41	67,14	69,39
12	Jasa Perusahaan	0,38	0,38	0,46	0,49	0,51
13	Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	258,20	250,89	266,60	272,45	291,68
14	Jasa Pendidikan	25,51	26,32	27,22	28,54	29,65
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,96	9,81	9,94	10,69	11,24
16	Jasa Lainnya	34,72	36,14	42,88	47,34	50,18
P D R B		12.683,87	13.008,81	13.421,78	14.067,69	14.536,18

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT LAPANGAN USAHA 2020-2024, BPS, 2024

Apabila dilihat dari harga berlaku menurut lapangan usaha, PDRB tahun 2020 sebesar Rp18.066 miliar, pada tahun 2021 sebesar Rp21.093 miliar atau meningkat sebesar 0,17% dari tahun 2020, pada tahun 2022 sebesar Rp24.899 miliar atau sebesar 0,18% dari tahun 2021 dan pada tahun 2023 sebesar Rp25.608 miliar atau sebesar 0,03% dari tahun 2022. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha, PDRB tahun 2019 sebesar Rp12.629,43 miliar, pada tahun 2020 sebesar Rp12.683,87 miliar atau meningkat sebesar 0,0043% dari tahun 2019, pada tahun 2021 sebesar Rp13.008,81 miliar atau meningkat sebesar 0,03% dari tahun 2020, pada tahun 2022 sebesar Rp13.421,78 miliar atau meningkat sebesar 0,03% dari tahun 2021 dan pada tahun 2023 sebesar Rp14.067,69 atau meningkat sebesar 0,0481% dari tahun 2022. Pada tahun 2024 sebesar Rp27.468,84 miliar atau meningkat 0,0726% dari tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk nilai laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha pada tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2024

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,81	4,03	1,90	2,98	4,85
2	Pertambangan dan Penggalian	6,24	- 5,95	4,67	7,89	- 5,89
3	Industri Pengolahan	0,40	2,14	1,23	2,89	2,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,59	3,29	11,09	7,35	7,37
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,35	- 0,32	- 0,21	2,63	4,02
6	Konstruksi	- 3,28	6,17	6,81	17,57	11,99
7	Pedagang Besar dan Eceran	- 8,02	8,06	7,47	8,49	4,08
8	Transportasi dan Pergudangan	- 44,21	9,35	20,08	6,65	5,09
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	- 10,59	12,35	12,21	7,04	7,42
10	Informasi dan Komunikasi	8,55	7,11	6,67	8,39	7,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,88	3,16	5,09	5,23	2,81
12	<i>Real Estate</i>	1,86	3,87	6,10	4,23	3,35
12	Jasa Perusahaan	- 12,66	1,63	19,06	6,68	5,66
13	Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	- 2,40	- 2,83	6,26	2,19	7,06
14	Jasa Pendidikan	1,68	3,18	3,45	4,82	3,89
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,86	9,54	1,27	7,57	5,19
16	Jasa Lainnya	- 11,32	4,10	18,63	10,40	6,00
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		0,43	2,56	3,17	4,81	3,33

Sumber: BPS, 2024

2.2 Kebijakan Keuangan (Fiskal)

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar. Namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan diatas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Daerah juga diberi kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus Kas Daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagai suatu Rencana Kerja Tahunan Daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD Tahun 2024 didasarkan pada pendekatan kinerja yang mengutamakan *output*, *outcome* dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang direncanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai suatu instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

b. Disiplin Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan orientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara biaya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan APBD dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang ditargetkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai berdasarkan potensi dan dasar hukum yang memadai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap program dan kegiatan merupakan batas maksimum pengeluaran belanja.

c. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah yang pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut harapan masyarakat dan instansi Pemerintah Kabupaten, APBD dialokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok dan lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan.

d. Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, agar dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran maka dalam perencanaan daerah ditetapkan secara jelas arah, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang ada pada program dalam APBD.

Selanjutnya, dalam rangka pengambilan kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan berbagai langkah dan upaya antara lain:

a. Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan melalui peningkatan pendapatan daerah dengan upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi kewenangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta pertimbangan sosial politik di lingkungan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan dan Mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi untuk taat pajak dan retribusi. Fokus lainnya dalam kebijakan pendapatan adalah peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat, reformasi sistem perpajakan dan retribusi daerah serta penyesuaian dan penetapan regulasi atas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pendapatan Daerah diakui pada saat terjadinya penerimaan di Kas Umum Daerah.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Wajib yang terdiri dari 16 SKPD dengan rincian 7 SKPD Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 9 SKPD Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 2 SKPD urusan pilihan, 2 SKPD Pendukung, 4 SKPD urusan penunjang, 1 SKPD Pengawas Urusan Pemerintahan, 1 SKPD Urusan pemerintahan umum dan 9 SKPD urusan kewilayahan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta pengembangan sistem jaminan sosial. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PPK-SKPD.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Maka, dalam rangka menjaga kelancaran proses penyelenggaraan pemerintah dan pemberian layanan pada publik, perlu adanya upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal APBD dalam menutup defisit anggaran yang ada. Untuk itu, guna mewujudkan kesinambungan fiskal tersebut maka perlu dilakukan alternatif pembiayaan yang paling mungkin untuk dapat dengan cepat dalam rangka memenuhi kebutuhan defisit anggaran belanja daerah yang ada, dan alternatif pembiayaan yang sangat mungkin untuk diterapkan pada saat ini adalah dengan lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Target kinerja APBD sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024. Secara keseluruhan mencakup unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk unsur pendapatan, target kinerja terlihat pada sub komponen PAD. Sedangkan unsur belanja target kinerja utama terlihat dari program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Tabel 2.11
Perbandingan APBD dan Pergeseran ke-5 APBD Tahun 2024

URAIAN	APBD	Pergeseran 5 APBD	BERTAMBAH / BERKURANG
Pendapatan	1.337.397.004.382,00	1.346.955.434.382,00	9.558.430.000,00
- Pendapatan Asli Daerah	262.275.006.382,00	262.275.006.382,00	0,00
- Pendapatan Transfer	1.075.121.998.000,00	1.084.680.428.000,00	9.558.430.000,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00
Belanja	1.376.808.277.875,00	1.388.733.959.775,00	11.925.681.900,00
- Belanja Operasi	997.614.700.583,00	1.006.291.568.733,00	8.676.868.150,00
- Belanja Modal	217.595.225.056,00	219.815.008.806,00	2.219.783.750,00
- Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	-1.500.000.000,00
- Belanja Transfer	159.098.352.236,00	161.627.382.236,00	2.529.030.000,00
Surplus/(Defisit)	-39.411.273.493,00	-41.778.525.393,00	-2.367.251.900,00
Pembiayaan	42.511.323.400,00	42.511.323.400,00	0,00
- Penerimaan Pembiayaan	63.511.323.400,00	63.511.323.400,00	0,00
- Pengeluaran Pembiayaan	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	0,00
S I L P A	3.100.049.907,00	732.798.007,00	-2.367.251.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Pendapatan Daerah

Estimasi total pendapatan pada Pergeseran ke-5 APBD tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp1.346.955.434.382,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,714% dari APBD Tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pada Pergeseran ke-5 APBD Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan.

2) Pendapatan Transfer

Pada Pergeseran ke-5 APBD Tahun 2024, Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp9.558.430.000,00 dari anggaran murni APBD Tahun 2024 atau sebesar 0,889% menjadi Rp1.084.680.428.000,00.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2024 tidak membuat anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

b. Belanja Daerah

Target kinerja belanja terutama terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Belanja menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak Terduga dan Belanja Transfer. Secara keseluruhan anggaran belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengalami peningkatan sebesar 0,8661% dari anggaran semula sebesar Rp1.376.808.277.875,00 menjadi Rp1.388.733.959.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Pada Pergeseran ke-5 APBD Tahun 2024, Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 0,8697% atau senilai Rp8.676.868.150,00 dari anggaran semula Rp997.614.700.583,00 menjadi Rp1.006.291.568.733,00.

2) Belanja Modal

Pada Pergeseran ke-5 APBD Tahun 2024, Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 1,0201% atau senilai Rp2.219.783.750,00 dari anggaran semula Rp217.595.225.056,00 menjadi Rp219.815.008.806,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Belanja Tidak Terduga

Pada Pergeseran ke-5 APBD Tahun 2024, Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar 60% atau senilai Rp1.500.000.000,00 dari anggaran semula Rp2.500.000.000,00 menjadi Rp1.000.000.000,00.

4) Belanja Transfer

Pada Pergeseran ke-5 APBD Tahun 2024, Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar 1,5896% atau senilai Rp2.529.030.000,00 dari anggaran semula Rp159.098.352.236,00 menjadi Rp161.627.382.236,00.

Posisi dan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2024 tergambar dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Perkembangan LRA Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020 s.d 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	1.110.416.409.032,96	1.039.668.744.227,68	1.065.125.815.255,57	1.180.122.990.490,32	1.139.908.805.098,36
- Pendapatan Asli Daerah	68.885.900.802,09	96.649.421.816,55	93.063.901.444,57	144.790.352.958,32	97.941.937.585,36
- Dana Perimbangan	1.009.836.747.046,00	0,00	0,00	837.190.653.956,00	868.072.509.861,00
- Pendapatan Transfer	0,00	912.648.207.793,13	972.061.913.811,00	198.141.983.576,00	173.824.532.652,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	31.693.761.184,87	30.371.114.618,00	-	-	69.825.000,00
Belanja	1.112.506.030.850,21	1.007.821.806.082,89	1.141.714.039.656,40	1.142.428.599.201,52	1.126.226.701.732,86
- Belanja Operasi	731.922.399.315,02	747.621.769.945,70	756.734.028.283,12	851.217.352.454,07	813.079.880.116,04
- Belanja Modal	215.085.256.948,69	105.168.333.984,19	246.191.078.890,28	129.280.718.647,45	176.830.375.813,82
- Belanja Tidak Terduga	16.486.723.916,00	10.987.192.304,00	5.703.883.757,00	746.785.200,00	912.403.803,00
- Belanja Transfer	149.011.650.670,50	144.044.509.849,00	133.085.048.726,00	161.183.742.900,00	135.404.042.000,00
Surplus/ (Defisit)	-2.089.621.817,25	31.846.938.144,79	-76.588.224.400,83	37.694.391.288,80	13.682.103.365,50

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Pembiayaan	5.381.497.376,87	3.282.906.226,62	88.801.124.670,87	-28.020.907.180,04	-11.118.568.837,62
- Penerimaan Pembiayaan	5.381.497.376,87	3.282.906.226,62	92.151.124.670,87	12.212.900.270,04	9.657.327.481,76
- Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	3.350.000.000,00	40.233.807.450,08	20.775.896.319,38
SILPA	3.291.875.559,62	35.129.844.371,41	12.212.900.270,04	9.673.484.108,76	2.563.534.527,88

Sumber : Perda Pertanggungjawaban APBD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2020-2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.13
Perkembangan Neraca Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ASET	2.937.618.721.611,37	2.746.743.944.997,66	2.823.204.528.780,41	2.643.689.798.555,68	2.629.728.490.250,53
Aset Lancar	30.273.251.271,53	62.165.440.786,45	45.455.054.491,25	32.505.708.710,05	62.507.487.237,83
Investasi Jangka Panjang	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00
Aset Tetap	2.733.681.699.633,50	2.427.299.805.483,41	2.469.697.997.273,90	2.340.079.942.089,83	2.376.392.892.640,86
Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Aset Lainnya	113.663.770.706,34	197.278.698.727,80	248.051.477.015,26	206.104.147.755,80	125.828.110.371,84
KEWAJIBAN	100.709.847.349,65	99.804.211.487,24	99.017.258.684,39	57.250.144.773,03	157.415.840.916,75
Kewajiban Jangka Pendek	100.709.847.349,65	99.804.211.487,24	78.241.362.365,08	57.250.144.773,03	157.415.840.916,75
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	20.775.896.319,31	0,00	0,00
EKUITAS	2.836.908.847.261,73	2.646.939.733.510,42	2.724.187.270.096,02	2.586.439.653.782,65	2.472.312.649.333,78
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0	0
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0	0
Ekuitas	2.836.908.847.261,73	2.646.939.733.510,42	2.724.187.270.096,02	2.586.439.653.782,65	2.472.312.649.333,78
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.937.618.694.611,38	2.746.743.944.997,66	2.823.204.528.780,41	2.643.689.798.555,68	2.629.728.490.250,53

Sumber : Perda Pertanggungjawaban APBD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2020-2023

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membagi kekuasaan pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan ini kemudian: (a). dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal & Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; (b). dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; (c). diserahkan kepada Kepala Daerah (gubernur/walikota/bupati) selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah & mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jika kekuasaan pengelolaan keuangan Negara oleh Presiden kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal & Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan & kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, dikuasakan, maka kekuasaan pengelolaan keuangan Negara oleh Presiden kepada Kepala Daerah selaku



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah & mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, diserahkan. Konsepsi diserahkan, berkesesuaian dengan asas desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pendapatan daerah dari pendapatan transfer pemerintah pusat baik dana perimbangan (DAU, DBH dan DAK), DID & dana desa sudah terbagi dalam belanja pemerintah pusat dalam mandatory spending. *Mandatory Spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory Spending* dalam tata Kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Dari total APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 sebesar Rp1.388.733.959.775,00, terdapat Rp359.582.871.191,00 atau sebesar 25,83% dianggarkan untuk Pendidikan.

Tabel 2.14
Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	2024	
		Anggaran	Realisasi
1	a Urusan Bidang Pendidikan:	346.529.794.007,00	299.868.611.420,00
	1) Belanja Operasi	327.811.578.507,00	280.348.502.394,00
	2) Belanja Modal	18.718.215.500,00	19.520.109.026,00
	b Urusan Bidang Kebudayaan :	904.286.500,00	555.376.200,00
	1) Belanja Operasi	904.286.500,00	555.376.200,00
	2) Belanja Modal	-	-
	c Urusan Bidang Perpustakaan :	5.872.108.694,00	2.769.870.485,00
	1) Belanja Operasi	3.420.354.344,00	2.685.654.485,00
	2) Belanja Modal	2.451.754.350,00	84.216.000,00
	d Urusan Bidang Kepemudaan & Olahraga :	6.276.681.990,00	4.495.180.621,00
	1) Belanja Operasi	6.240.481.990,00	4.495.180.621,00
	2) Belanja Modal	36.200.000,00	-
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	-	-
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	359.582.871.191,00	307.689.038.726,00
3	Total Belanja Daerah	1.388.733.959.775,00	1.126.158.714.332,86
4	Ratio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	25,89%	27,32%



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja (UU No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan). Dari total APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 sebesar Rp1.388.733.959.775,00, terdapat Rp274.291.578.296,00 atau sebesar 24,72% dianggarkan untuk Kesehatan.

Tabel 2.15
Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan dan RSUD :	274.291.578.296,00	230.735.558.134,29	84,12
	1) Belanja Operasi:	274.291.578.296,00	230.735.558.134,29	84,12
	a. belanja pegawai;	96.808.088.284,00	77.575.204.815,77	80,13
	b. Belanja barang dan jasa;	94.648.581.439,00	86.606.401.228,42	91,50
	c. Belanja hibah	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	82.834.908.573,00	66.553.952.090,10	80,35
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	0,00	0,00	0,00
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	274.291.578.296,00	230.735.558.134,29	84,12
3	Total Belanja Daerah	1.388.733.959.775,00	1.126.226.701.732,86	81,10
4	Gaji ASN	279.225.013.635,00	239.817.631.596,00	85,89
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.109.508.946.140,00	886.409.070.136,86	79,89
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	24,72	26,03	

- c. Berdasarkan Permendagri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti hanya menganggarkan 24,30% anggaran infrastruktur dan total anggaran belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah/desa. Untuk rincian anggaran dan realisasi belanja infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.16
Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Berasal dari Dana Transfer Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024

No	Komponen Perhitungan	Anggaran pada SIPD	Realisasi
1	Total Belanja Daerah	1.388.733.959.775,00	1.126.226.701.732,86
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah atau desa		
	a. Belanja Bagi Hasil	1.980.965.900,00	0
	b. Belanja Bantuan Keuangan	159.646.416.336,00	135.404.042.000,00
	Jumlah (a+b)	161.627.382.236,00	135.404.042.000,00
3	Selisih (1-2)	1.227.106.577.539,00	990.754.672.332,86
4	Minimal Belanja Infrastruktur (40% dari selisih)	490.842.631.015,60	396.301.868.933,14

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Modal :	272.661.344.194,00	221.869.919.002,72
	Tanah;	-	-
	Peralatan Dan Mesin;	55.568.572.943,00	44.748.275.224,00
	Bangunan Dan Gedung;	78.835.756.313,00	59.476.677.697,29
	Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;	82.088.407.250,00	68.476.709.950,53
	Aset Tetap Lainnya	3.270.772.300,00	4.116.234.600,00
	Aset Lainnya.	51.500.000,00	12.478.342,00
	Belanja Pemeliharaan	52.846.335.388,00	45.039.543.188,90
2	Belanja Hibah;	20.122.465.000,00	8.658.061.869,51
	Belanja Bantuan Sosial;	5.369.080.000,00	702.133.917,46
	Belanja Bantuan Keuangan.		
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah		
	(1 + 2)	298.152.889.194,00	231.230.114.789,69
	Jumlah Belanja Daerah yang diperhitungkan	1.227.106.577.539,00	990.754.672.332,86
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	24,30%	23,34%



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 disajikan sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.1.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Tahun 2024

Berikut disajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 setelah dikonversi sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 sebesar Rp1.139.908.805.098,36 atau 84,63% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.346.955.434.382,00.

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan (Pendapatan)
Tahun 2023 - 2024

No.	Uraian	APBD-2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
A	Pendapatan Asli Daerah	262.275.006.382,00	97.941.937.585,36	37,34%	144.790.352.958,32
1	Pendapatan Pajak Daerah	41.100.000.000,00	18.679.998.295,01	45,45%	16.671.383.937,45
2	Pendapatan Retribusi Daerah	95.120.124.097,00	64.919.566.355,04	68,25%	1.337.128.750,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	80.548.000.000,00	9.524.546.677,00	11,82%	12.246.453.249,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	45.506.882.285,00	4.817.826.258,31	10,59%	114.535.387.021,87
B	Pendapatan Transfer	1.084.680.428.000,00	1.041.897.042.513,00	96,06%	1.035.332.637.532,00
1	Dana Bagi Hasil	186.541.376.000,00	180.403.785.000,00	96,71%	230.005.832.882,00
2	Dana Alokasi Umum	437.522.368.000,00	433.071.545.428,00	98,98%	422.381.067.892,00
3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	150.463.081.000,00	143.879.146.253,00	95,62%	79.250.197.369,00
4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	113.584.161.000,00	110.718.033.180,00	97,48%	105.553.555.813,00
5	Dana insentif Daerah	-	-	0,00%	-
6	Dana Desa	97.240.042.000,00	97.240.042.000,00	100,00%	98.162.430.900,00
7	Pendapatan Bagi Hasil	92.300.000.000,00	75.528.250.652,00	81,83%	94.461.552.676,00
8	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	7.029.400.000,00	1.056.240.000,00	15,03%	5.518.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	APBD-2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	69.825.000,00	100%	0
1	Pendapatan Hibah	0	69.825.000,00	100%	0
2	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	1.346.955.434.382,00	1.139.908.805.098,36	84,63	1.180.122.990.490,32

Grafik 3.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun 2024



a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebesar Rp97.941.937.585,36 atau 37,34% dari anggaran PAD Rp262.275.006.382,00. Kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar 8,59%. Komposisi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Sebagaimana yang tertera dalam tabel 3.1 di atas. Dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini. Penerimaan terbesar berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp64.919.566.355,04 atau 66,28% dari total Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Diikuti hasil Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp18.679.998.295,01 atau sebesar 19,07% dari total Pendapatan Asli Daerah. Hasil Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp9.524.546.677,00 atau sebesar 9,72% dari total Pendapatan Asli



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp4.817.826.258,31 atau sebesar 4,92% dari total Pendapatan Asli Daerah.

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebesar Rp1.041.897.042.513,00 atau 96,06% dari Anggaran Pendapatan Transfer Rp1.084.680.428.000,00, yang terdiri dari:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-dana Perimbangan (Akumulasi dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus-Fisik dan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik) sebesar Rp868.072.509.861,00 atau sebesar 97,74% dari Anggaran Rp888.110.986.000,00;
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp97.240.042.000,00 atau sebesar 100% dari Anggaran Rp97.240.042.000,00;
- Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp76.584.490.652,00 atau 77,10% dari anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp99.329.400.000,00.

Dengan demikian, kontribusi masing-masing sumber penerimaan dari dana perimbangan cukup besar terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama yang berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus-Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp69.825.000,00 dari target sebesar Rp0,00 atau 100%.

3.1.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Tahun 2024

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga. Tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Struktur belanja dalam penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan terdiri dari urusan Wajib yang terdiri dari 14 SKPD dengan rincian 7 SKPD Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 7 SKPD Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 4 SKPD urusan pilihan, 2 SKPD Pendukung, 4 SKPD urusan penunjang, 1 SKPD Pengawas Urusan Pemerintahan, 1 SKPD Urusan pemerintahan umum dan 9 SKPD urusan kewilayahan. Setiap urusan ditandatangani oleh satu atau beberapa SKPD sehingga memudahkan pengukuran Indikator Kinerja SKPD bersangkutan.

Berikut disajikan realisasi target kinerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi Belanja disajikan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan (Belanja)
Tahun 2024 – 2023

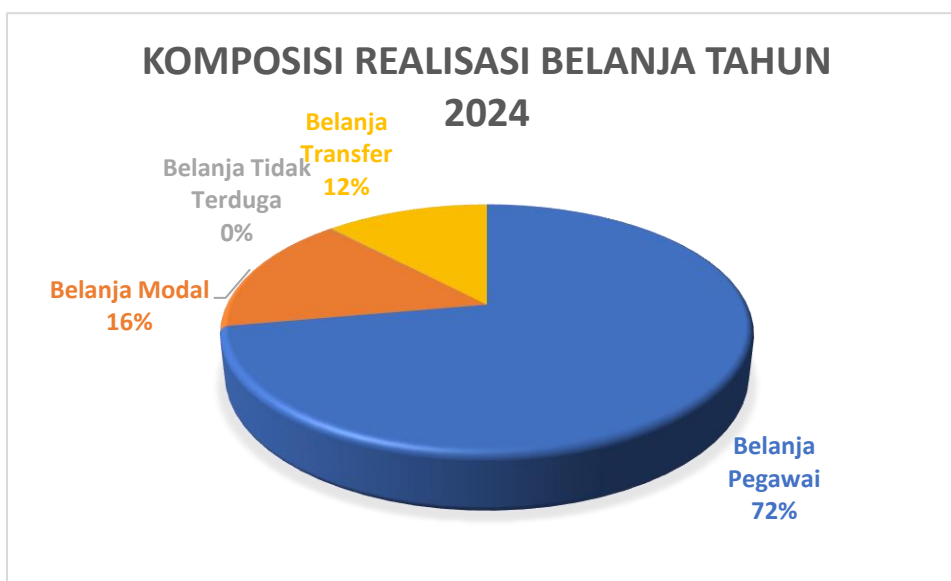
No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
5	BELANJA & TRANSFER	1.388.733.959.775,00	1.126.226.701.732,86	81,09%	1.142.428.599.201,52
5.1.	Belanja Operasi	1.006.291.568.733,00	813.079.880.116,04	80,79%	851.217.352.454,07
5.1.1.	Belanja Pegawai	502.813.618.853,00	402.888.874.978,77	80,13%	414.521.101.134,61
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.214.424.230,00	340.262.540.010,53	84,16%	377.920.490.812,65
5.1.3.	Belanja Bunga	2.000.000.000,00	922.890.122,00	46,14%	3.281.890.320,00
5.1.4.	Belanja Subsidi	0	0,00	0,00%	0
5.1.5.	Hibah	81.074.951.700,00	65.002.572.619,51	80,18%	45.352.775.246,12
5.1.6.	Bantuan Sosial	16.188.573.950,00	4.003.002.385,23	24,73%	10.141.094.940,69
5.2.	Belanja Modal	219.815.008.806,00	176.830.375.813,82	80,45%	129.280.718.647,45
5.2.1.	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	55.568.572.943,00	44.748.275.224,00	80,53%	21.521.539.986,91
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	78.835.756.313,00	59.476.677.697,29	75,44%	34.372.784.234,70
5.2.4.	Belanja Jalan. Irigasi. dan Jaringan	82.088.407.250,00	68.476.709.950,53	83,42%	70.281.954.225,84
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.270.772.300,00	4.116.234.600,00	125,85%	3.104.440.200,00
5.2.6.	Belanja Aset Lainnya	51.500.000,00	12.478.342,00	24,23%	0



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
5.3.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	912.403.803,00	91,24%	746.785.200,00
5.4.	Belanja Transfer	161.627.382.236,00	135.404.042.000,00	83,78%	161.183.742.900,00
5.4.1.	Bagi Hasil Pendapatan	1.980.965.900,00	0,00	0,00%	0,00
5.4.2.	Bantuan Keuangan	159.646.416.336,00	135.404.042.000,00	84,81%	161.183.742.900,00

Grafik 3.2 Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2024



Secara keseluruhan, realisasi belanja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebesar Rp1.126.226.701.732,86 atau 81,10% dari anggaran sebesar Rp1.388.733.959.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp813.079.880.116,04 atau 80,79% dari anggaran Rp1.006.291.568.733,00. Belanja Operasi terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp402.888.874.978,77 atau 80,13% dari anggaran Rp502.813.618.853,00;
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp340.262.540.010,53 atau 84,18% dari anggaran Rp404.214.424.230,00;
- Belanja Bunga sebesar Rp922.890.122,00 atau sebesar 46,14% dari anggaran Rp2.000.000.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
- Belanja Subsidi sebesar Rp0,00;
 - Belanja Hibah sebesar Rp65.002.572.619,51 atau 80,18% dari anggaran Rp81.074.951.700,00;
 - Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.003.002.385,23 atau 24,73% dari anggaran Rp16.188.573.950,00.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal secara keseluruhan adalah senilai Rp176.830.375.813,82 atau sebesar 80,45% dari anggaran Rp219.815.008.806,00. Belanja Modal terdiri dari:

- Belanja Tanah sebesar Rp00,00 atau 00,00% dari yang dianggarkan;
- Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp44.748.275.224,00 atau 80,53% dari anggaran Rp55.568.572.943,00;
- Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp59.476.677.697,29 atau 75,44% dari anggaran Rp78.835.756.313,00;
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp68.476.709.950,53 atau 83,42% dari anggaran Rp82.088.407.250,00;
- Belanja Aset Tetap Lainnya senilai Rp4.116.234.600,00 atau 125,85% dari anggaran Rp3.270.772.300,00;
- Belanja Aset lainnya sebesar Rp12.478.342,00 atau 24,23% dari anggaran Rp51.500.000,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp912.403.803,00 atau 91,24% dari anggaran Rp1.000.000.000,00.

d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp135.404.042.000,00 atau 83,78% dari anggaran Rp161.627.382.236,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Realiasi Belanja Bagi Hasil sebesar 0% dari anggaran Rp1.980.965.900,00;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Daerah senilai Rp135.404.042.000,00 atau 84,81% dari anggaran Rp159.646.416.336,00;

3.1.3 Ikhtisar Realisasi Pembiayaan Tahun 2024

Realisasi Pembiayaan disajikan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan (Pembiayaan)
Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Pergeseran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
A	Penerimaan Pembiayaan	63.511.323.400,00	9.657.327.481,76	15,21%	12.212.900.270,00
1	Penggunaan SiLPA	63.511.323.400,00	9.657.327.481,76	15,21%	12.212.900.270,00
2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
B	Pengeluaran Pembiayaan	21.000.000.000,00	20.775.896.319,38	98,93%	40.233.807.450,08
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	-	-	5.000.000.000,000
2	Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bank	21.000.000.000,00	20.775.896.319,38	98,93%	35.233.807.450,08

Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun 2024 APBD Kabupaten Kepulauan Meranti menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp63.511.323.400,00 dan terealisasi 15,21% atau sebesar Rp9.657.327.481,76. Realisasi pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2024 sebesar Rp20.775.896.319,38 atau 98,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.000.000.000,00.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 9 huruf Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Sementara itu, ketentuan penyajian prestasi kerja dinyatakan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga" Istilah prestasi kerja yang dimaksud pada kedua undang-undang tersebut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Kinerja sebagai "keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur."



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mempertegas kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan prestasi kerja yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sedangkan hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

3.2 Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Pemda

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan Daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

$$\text{Rasio A} = \text{Total Pendapatan Asli Daerah} : \text{Total Pendapatan}$$

Tabel 3.4
Rasio Kemandirian Keuangan (A) tahun 2020 - 2024

Tahun	Realisasi PAD	Total Pendapatan	Rasio
2020	68.885.900.802,09	1.110.416.409.032,96	6,20%
2021	96.649.421.816,55	1.039.668.618.990,68	9,30%
2022	93.063.901.444,57	1.065.125.815.255,57	8,74%
2023	144.790.352.958,32	1.180.122.990.490,32	12,27%
2024	97.941.938.585,36	1.139.908.805.098,36	8,59%
Rata-Rata	100.266.303.121,38	1.107.048.527.773,58	9,06%

$$\text{Rasio B} = \text{Total Pendapatan Asli Daerah} : \text{Total Belanja}$$



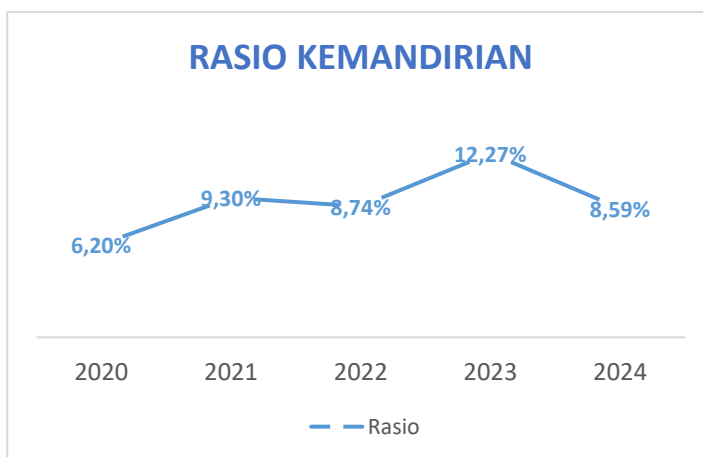
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.5
Rasio Kemandirian Keuangan (B) tahun 2020 - 2024

Tahun	Realisasi PAD	Total Belanja	Rasio
2020	68.885.900.802,09	963.494.380.179,71	7,15%
2021	96.649.421.816,55	1.010.160.229.552,89	9,57%
2022	93.063.901.444,57	1.141.714.039.656,40	8,15%
2023	144.790.352.958,32	1.142.428.599.201,52	12,67%
2024	97.941.937.585,36	1.126.226.701.732,86	8,70%
Rata-Rata	100.266.302.921,38	1.076.804.790.064,68	9,31%

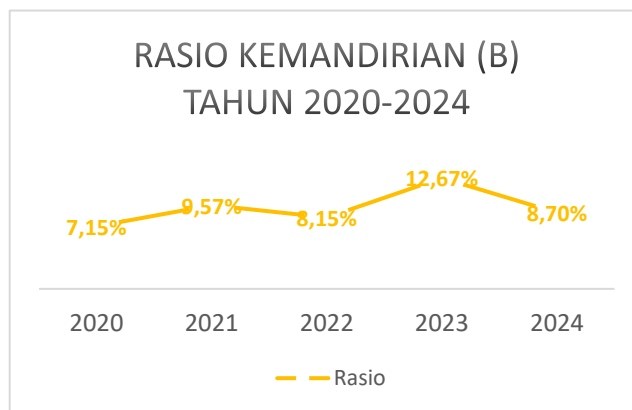
Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan di atas, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2020 s/d 2024 masih sangat rendah rata-rata 9,31%.

Grafik 3.3 Rasio Kemandirian (a) Pendapatan periode 2020-2024



Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti pada periode tahun 2020 s.d 2024. Rata-rata rasio kemandirian keuangan terhadap belanja daerah berada pada 9,31%.

Grafik 3.4 Rasio Kemandirian (b) Pendapatan periode 2020-2024





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.2.2. Rasio-Rasio Fleksibilitas Keuangan Pemda

Rasio A = $\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Belanja Pegawai}}{\text{Pembayaran Pokok Pinjaman} + \text{Belanja Bunga}}$

Tabel 3.6
Rasio Fleksibilitas Keuangan (A)

Tahun	Total Pendapatan- Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Belanja Pegawai	Pembayaran Pokok Pinjaman+Belanja Bunga	Rasio
2020	531.523.595.798,87	0	0%
2021	529.755.803.468,72	0	0%
2022	549.359.936.765,68	3.417.009.620,00	16077%
2023	580.798.136.173,71	38.515.697.770,08	1508%
2024	482.422.750.686,59	21.698.786.441,38	2223%
Rata-Rata	534.772.044.578,71	12.726.298.766,29	4202%

Rasio B = $\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Belanja Pegawai}}{\text{Jumlah Kewajiban}}$

Tabel 3.7
Rasio Fleksibilitas Keuangan (B)

Tahun	Total Pendapatan- Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Belanja Pegawai	Jumlah Kewajiban	Rasio
2020	531.523.595.798,87	100.709.847.349,65	528%
2021	529.755.803.468,72	98.600.554.896,24	537%
2022	549.359.936.765,68	99.017.258.684,39	555%
2023	580.798.136.173,71	57.250.144.773,03	1014%
2024	482.422.750.686,59	157.415.840.916,75	306%
Rata-Rata	534.772.044.578,71	102.598.729.324,01	521%

Rasio C = $\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Belanja Pegawai}}{\text{Jumlah Kewajiban Jangka Panjang}}$

Tabel 3.8
Rasio Fleksibilitas Keuangan (C)

Tahun	Total Pendapatan- Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Belanja Pegawai	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rasio
2020	531.523.595.798,87	0,00	0%
2021	529.755.803.468,72	0,00	0%
2022	549.359.936.765,68	20.775.896.319,31	2644%
2023	580.798.136.173,71	0,00	0%
2024	482.422.750.686,59	0,00	0%



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

$$\text{Rasio D} = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus})}{\text{Jumlah Kewajiban}}$$

Tabel 3.9
Rasio Fleksibilitas Keuangan (D)

Tahun	Total Pendapatan- Pendapatan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Kewajiban	Rasio
2020	896.432.455.375,96	100.709.847.349,65	890%
2021	795.827.824.165,68	98.600.554.896,24	807%
2022	898.592.936.840,57	99.192.598.102,38	906%
2023	995.319.237.308,32	57.250.144.773,03	1739%
2024	885.311.625.665,36	157.415.840.916,75	562%
Rata-Rata	894.296.815.871,18	102.633.797.207,61	871%

3.2.3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100, namun semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

Rasio efektivitas Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}}$$

Tabel 3.10
Rasio Efektivitas

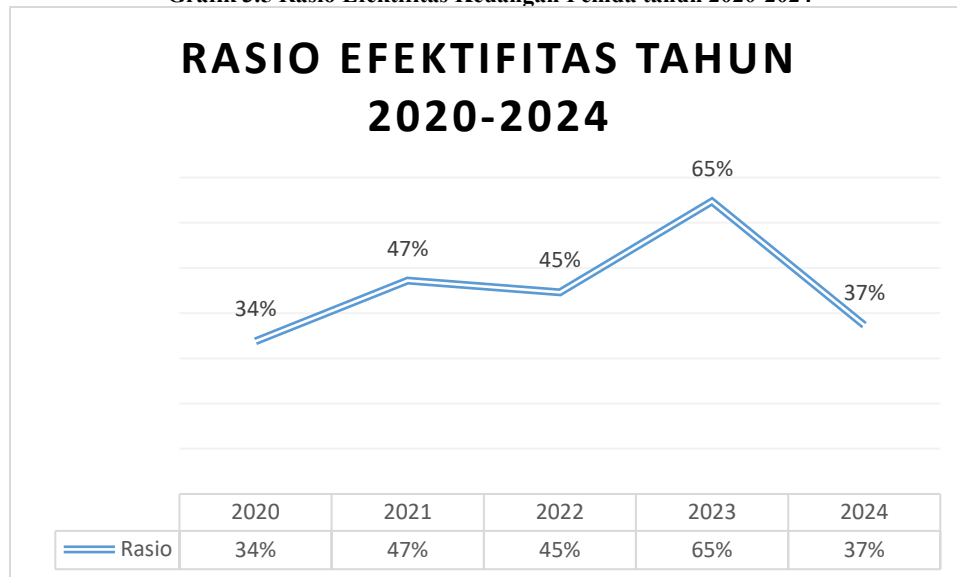
Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio
2020	203.882.065.832,00	68.885.900.802,09	34%
2021	204.634.605.072,00	96.649.421.816,55	47%
2022	208.698.842.017,00	93.063.901.444,57	45%
2023	223.692.732.201,00	144.790.352.958,32	65%
2024	262.275.006.382,00	97.941.937.585,36	37%
Rata-Rata	220.636.650.300,80	100.266.302.921,38	45%

Dari perhitungan rasio efektivitas dapat dilihat bahwa efektivitas rata-rata tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah 45%. Pada rentang tahun 2020-2023 rasio efektifitas mengalami kenaikan dari 34% menjadi 65% namun pada tahun 2024 rasio efektivitas turun menjadi 37%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Grafik 3.5 Rasio Efektifitas Keuangan Pemda tahun 2020-2024



3.2.4. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional dan belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

Rasio belanja operasional tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Rasio Belanja Operasional

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio
2020	731.922.399.315,02	215.085.256.948,69	963.297.574.379,71	75,98%
2021	747.621.769.945,70	105.168.333.984,19	1.010.160.229.552,89	74,01%
2022	756.734.028.283,12	246.191.078.890,28	1.141.714.039.656,40	66,28%
2023	851.217.352.454,07	129.280.718.647,45	1.142.428.599.201,52	74,51%
2024	813.079.880.116,04	176.830.375.813,82	1.126.226.701.732,86	0,72
Rata-rata	780.115.086.022,79	174.511.152.856,89	1.076.765.428.904,68	0,72

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

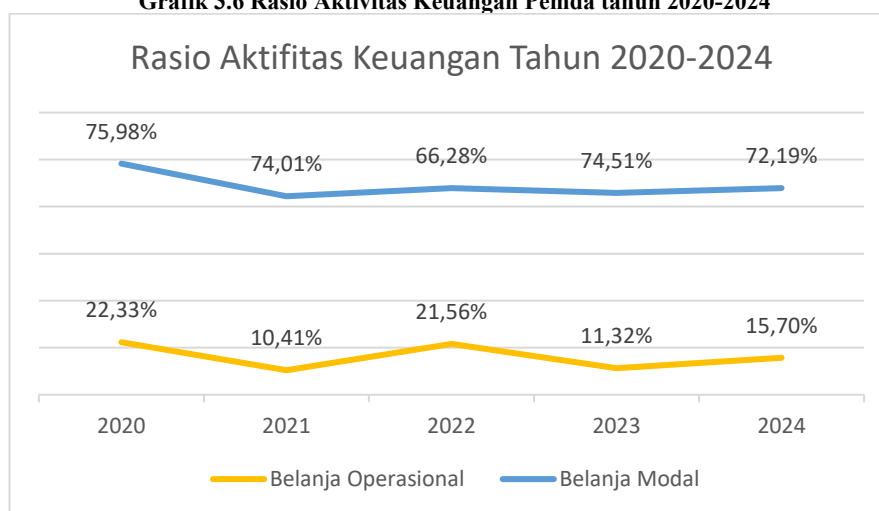


PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.12
Rasio Belanja Modal

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio
2019	731.922.399.315,02	215.085.256.948,69	963.297.574.379,71	22,33%
2020	747.621.769.945,70	105.168.333.984,19	1.010.160.229.552,89	10,41%
2021	756.734.028.283,12	246.191.078.890,28	1.141.714.039.656,40	21,56%
2022	851.217.352.454,07	129.280.718.647,45	1.142.428.599.201,52	11,32%
2023	813.079.880.116,04	176.830.375.813,82	1.126.226.701.732,86	15,70%
Rata-Rata	780.115.086.022,79	174.511.152.856,89	1.076.765.428.904,68	16,21%

Grafik 3.6 Rasio Aktivitas Keuangan Pemda tahun 2020-2024



Dari rasio di atas diketahui bahwa belanja operasional pemerintah masih mendominasi jumlah belanja APBD tahun 2020 sampai dengan 2024. Jika dilihat dari grafik di atas, dapat dilihat tren naik turun dari rasio aktifitas keuangan namun pada tahun 2024 rasio aktifitas terhadap belanja operasional mengalami penurunan sebesar 2,32% dan terhadap belanja modal mengalami kenaikan sebesar 4,39%.

3.2.5. Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.



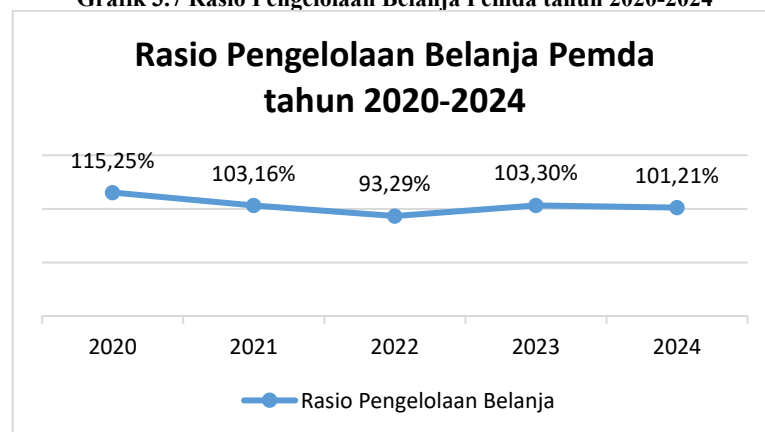
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

Tabel 3.13
Rasio Pengelolaan Belanja

Tahun	Total Pendapatan	Total Belanja	Rasio
2020	1.110.416.409.032,96	963.494.380.179,71	115,25%
2021	1.039.668.744.227,68	1.007.821.806.082,89	103,16%
2022	1.065.125.815.255,57	1.141.714.039.656,40	93,29%
2023	1.180.122.990.490,32	1.142.428.599.201,52	103,30%
2024	1.139.908.805.098,36	1.126.226.701.732,86	101,21%
Rata-Rata	1.107.048.552.820,98	1.076.337.105.370,68	102,85%

Grafik 3.7 Rasio Pengelolaan Belanja Pemda tahun 2020-2024



Rasio pengelolaan belanja tersebut menunjukkan bahwa jumlah belanja tahun 2020 sampai dengan 2024 rata-rata berada di atas 100% dan hanya turun di bawah 100% pada tahun 2022.

3.2.6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

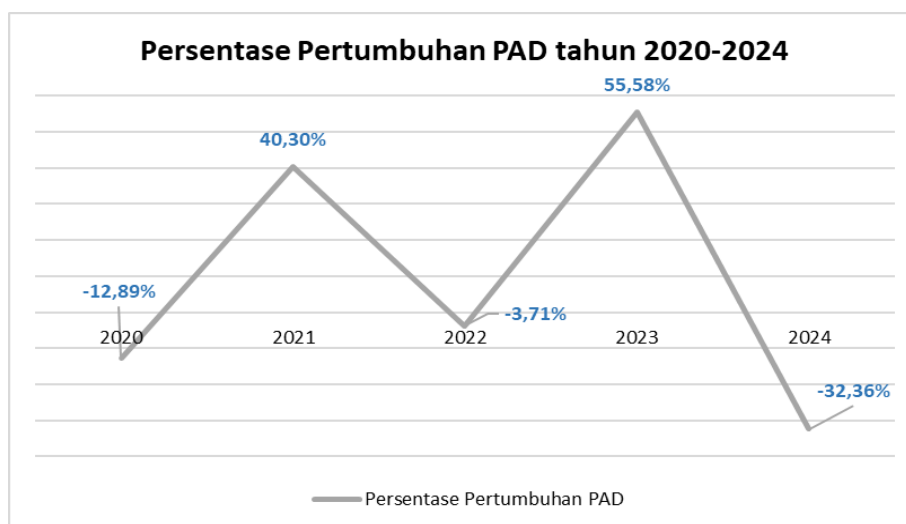
a. Persentase Pertumbuhan PAD

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1} \times 100$$

Tabel 3.14
Rasio Persentase Pertumbuhan PAD

Tahun	PAD tahun p-1	PAD tahun p	Rasio
1	2	3	4=(3-2)/2
2020	79.075.541.783,96	68.885.900.802,09	-12,89%
2021	68.885.900.802,09	96.649.421.816,55	40,30%
2022	96.649.421.816,55	93.063.901.444,57	-3,71%
2023	93.063.901.444,57	144.790.352.958,32	55,58%
2024	144.790.352.958,32	97.941.937.585,36	-32,36%
Rata-Rata	96.493.023.761,10	100.266.302.921,38	3,91%

Grafik 3.8 Rasio Pertumbuhan PAD tahun 2020-2024



b. Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

$$\frac{\text{Persentase Pertumbuhan}}{\text{Pendapatan}} = \frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{Pendapatan tahun } p - 1}{\text{Pendapatan tahun } p - 1} \times 100$$

Tabel 3.15
Rasio Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

Tahun	Pendapatan tahun p-1	Pendapatan tahun p	Rasio
1	2	3	4=(3-2)/2
2020	1.179.280.568.095,59	1.110.416.409.032,96	-5,84%
2021	1.110.416.409.032,96	1.039.668.744.227,68	-6,37%
2022	1.039.668.744.227,68	1.065.125.815.255,57	2,45%
2023	1.065.125.815.255,57	1.180.122.990.490,32	10,80%



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun	Pendapatan tahun p-1	Pendapatan tahun p	Rasio
2024	1.180.122.990.490,32	1.139.908.805.098,36	-3,41%
Rata-Rata	1.114.922.905.420,42	1.107.048.552.820,98	

Grafik 3.9 Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan tahun 2020-2024



c. Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional

$$\text{Persentase Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Belanja Operasi tahun } p - \text{Belanja Operasi tahun } p-1}{\text{Belanja Operasi tahun } p-1} \times 100$$

Tabel 3.16
Rasio Persentase Pertumbuhan Total Belanja Operasional

Tahun	Belanja Operasional tahun p-1	Belanja Operasional tahun p	Rasio
1	2	3	4=(3-2)/2
2020	768.878.266.025,65	731.922.399.315,02	-4,81%
2021	731.922.399.315,02	747.621.769.945,70	2,14%
2022	747.621.769.945,70	756.734.028.283,12	1,22%
2023	756.734.028.283,12	851.152.762.397,07	12,48%
2024	851.152.762.397,07	813.079.880.116,04	-4,47%
Rata-Rata	771.261.845.193,31	780.102.168.011,39	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

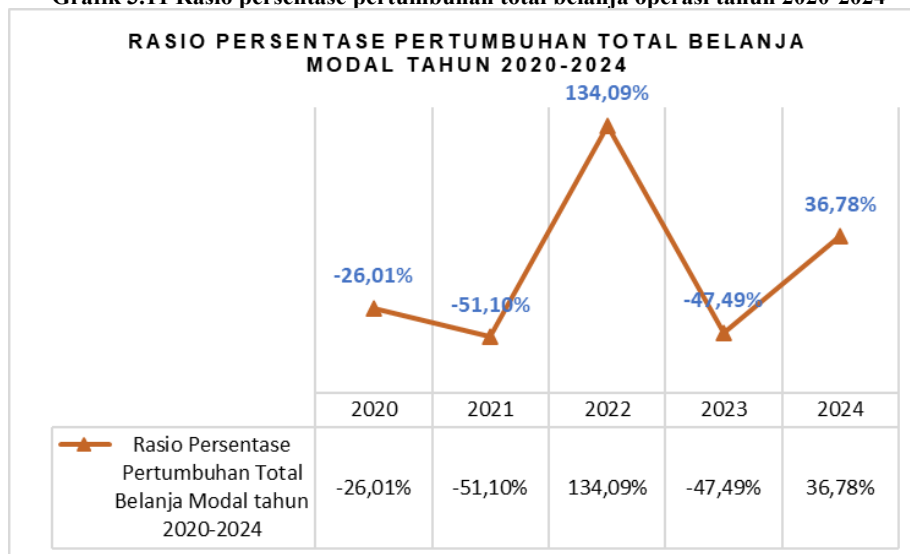
Grafik 3.10 Rasio persentase pertumbuhan total belanja operasi tahun 2020-2024



Tabel 3.17
Rasio Persentase Pertumbuhan Total Belanja Modal tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Modal tahun p-1	Belanja Modal tahun p	Rasio
1	2	3	4=(3-2)/2
2020	290.696.070.450,30	215.085.256.948,69	-26,01%
2021	215.085.256.948,69	105.168.333.984,19	-51,10%
2022	105.168.333.984,19	246.191.078.890,28	134,09%
2023	246.191.078.890,28	129.280.718.647,45	-47,49%
2024	129.280.718.647,45	176.830.375.813,82	36,78%
Jumlah	986.421.458.920,91	872.555.764.284,43	-11,54%
Rata-Rata	197.284.291.784,18	174.511.152.856,89	-11,54%

Grafik 3.11 Rasio persentase pertumbuhan total belanja operasi tahun 2020-2024





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.2.7. Rasio Solvabilitas

Rasio A = Total Ekuitas : Penduduk

Tabel 3.18
Rasio Solvabilitas (A)

Tahun	Total Ekuitas	Total Penduduk	Rasio
2020	2.836.908.874.261,73	209.190,00	13.561.398,13
2021	2.642.448.392.875,42	206.100,00	12.821.195,50
2022	2.724.187.270.096,02	190.032,00	14.335.413,35
2023	2.586.439.653.782,65	211.711,00	12.216.841,14
2024	2.472.312.649.333,78	211.997,00	11.662.017,15
Rata-Rata	2.652.459.368.069,92	205.806,00	12.888.153,74

Rasio B = Total Aset : Penduduk

Tabel 3.19
Rasio Solvabilitas (B)

Tahun	Total Aset	Total Penduduk	Rasio
2020	2.937.618.721.611,37	209.190,00	14.042.825,76
2021	2.741.074.152.362,66	206.100,00	13.299.729,03
2022	2.823.204.528.780,41	190.032,00	14.856.469,06
2023	2.643.689.798.555,68	211.711,00	12.487.257,62
2024	2.629.728.490.250,53	211.997,00	12.404.555,21
Rata-Rata	2.755.063.138.312,13	205.806,00	13.386.699,80

Rasio C = Total Aset Tetap : Penduduk

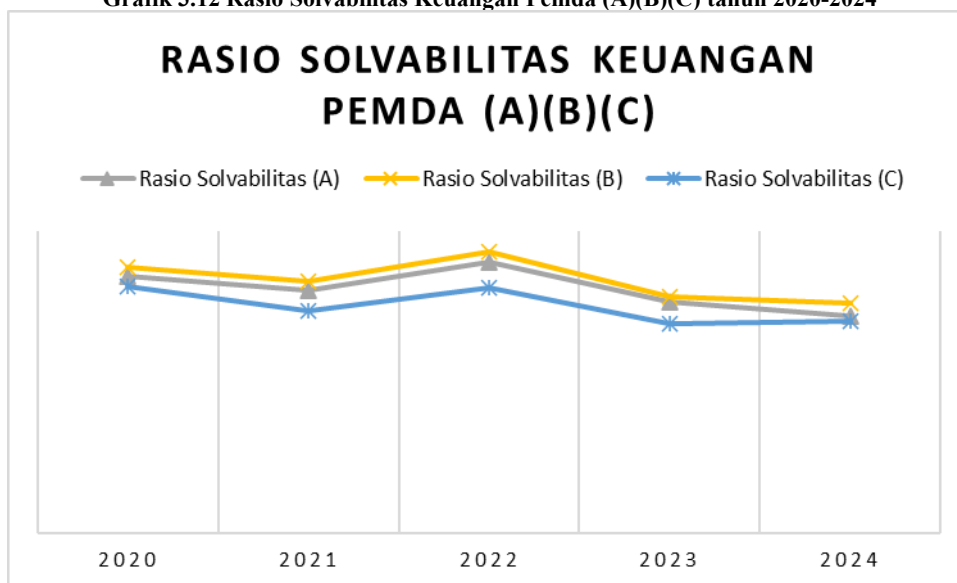
Tabel 3.20
Rasio Solvabilitas (C)

Tahun	Total Aset Tetap	Total Penduduk	Rasio
2020	2.733.681.699.633,50	209.190,00	13.067.936,80
2021	2.427.299.805.483,41	206.100,00	11.777.291,63
2022	2.469.697.997.273,90	190.032,00	12.996.221,67
2023	2.340.079.942.089,83	211.711,00	11.053.180,71
2024	2.376.392.892.640,86	211.997,00	11.209.559,06
Rata-Rata	2.469.430.467.424,30	205.806,00	11.998.826,41



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Grafik 3.12 Rasio Solvabilitas Keuangan Pemda (A)(B)(C) tahun 2020-2024

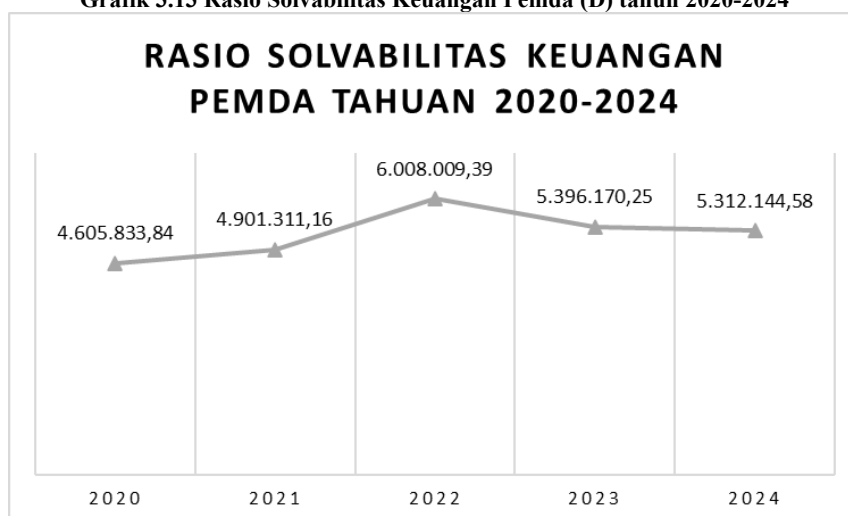


Rasio D = Total Belanja : Penduduk

Tabel 3.21
Rasio Solvabilitas (D)

Tahun	Total Belanja	Total Penduduk	Rasio
2020	963.494.380.179,71	209.190,00	4.605.833,84
2021	1.010.160.229.552,89	206.100,00	4.901.311,16
2022	1.141.714.039.656,40	190.032,00	6.008.009,39
2023	1.142.428.599.201,52	211.711,00	5.396.170,25
2024	1.126.226.701.732,86	211.997,00	5.312.465,28
Rata-Rata	1.076.804.790.064,68	205.806,00	5.232.135,07

Grafik 3.13 Rasio Solvabilitas Keuangan Pemda (D) tahun 2020-2024





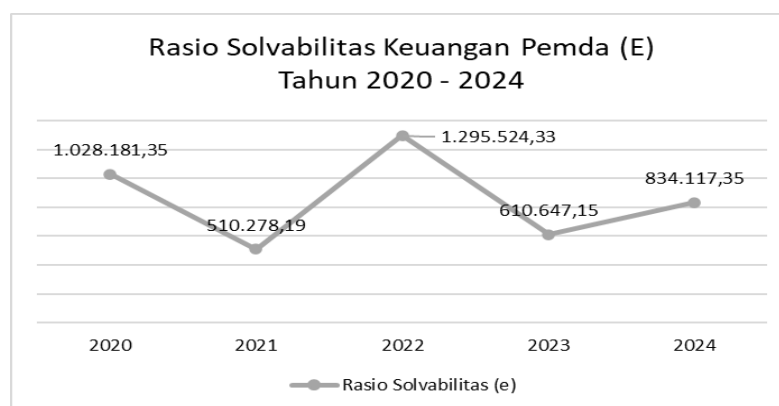
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rasio E = Total Belanja Modal : Penduduk

Tabel 3.22
Rasio Solvabilitas (E)

Tahun	Total Belanja Modal	Total Penduduk	Rasio
2020	215.085.256.948,69	209.190,00	1.028.181,35
2021	105.168.333.984,19	206.100,00	510.278,19
2022	246.191.078.890,28	190.032,00	1.295.524,33
2023	129.280.718.647,45	211.711,00	610.647,15
2024	176.830.375.813,82	211.997,00	834.117,35
Rata-rata	174.511.152.856,89	205.806,00	847.940,06

Grafik 3.14 Rasio Solvabilitas Keuangan Pemda (E) tahun 2020-2024



3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3.3.1. Permasalahan dan Solusi Penerimaan

Dalam upaya peningkatan PAD terdapat berbagai hambatan dan permasalahan terutama menyangkut,

- Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualifikasi dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- Kurangnya sosialisasi ke wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak;
- Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak akan pentingnya pajak sebagai sumber anggaran dalam pembangunan daerah;
- Tingginya faktor kesulitan yang dihadapi di lapangan sehingga pemungut pajak dan retribusi belum optimal dalam mencapai target; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan bagi pemungut pajak,

Solusi yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah adalah,

- a. Kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang bekerja sama dengan pihak yang kompeten untuk meningkatkan keterampilan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pajak dalam pengembangan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkajian jenis penerimaan daerah baru yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberikan pelayanan prima terhadap kepastian layanan waktu layanan, kenyamanan dan keamanan wajib pajak; dan
- e. Melakukan pemutakhiran data dan estimasi potensi pajak sehingga mampu menangkap objek dan subjek pajak.

3.3.2. Permasalahan dan Solusi Pengeluaran

Terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 antara lain:

- a. Terlambatnya pelaksanaan APBD yang disebabkan proses pelaksanaan anggaran yang belum sepenuhnya dapat mengikuti jadwal waktu (*time schedule*) yang ideal, akibatnya waktu yang tersedia untuk pelaksanaan APBD berkurang, selanjutnya dana yang ada dan telah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal;
- b. Keterbatasan SDM aparatur dikaitkan dengan beban kerja yang ada sehingga program dan kegiatan sebagian tidak tertangani secara optimal;
- c. Faktor eksternal yang sebenarnya dapat dikendalikan yaitu menyangkut kemampuan kontraktor dalam menyelesaikan kontrak/perjanjian;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Defisitnya kas negara yang menyebabkan tertundanya penyaluran Dana Bagi Hasil Pusat di setiap daerah; dan

Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, langkah strategis yang akan diambil adalah:

- a. Proses penganggaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan seoptimal mungkin untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas kinerja SDM aparatur;
- c. Membentuk tim evaluasi percepatan penyerapan APBD dengan terus melakukan evaluasi secara berkelanjutan guna mengetahui permasalahan yang terjadi dan mencari solusinya; dan
- d. Meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap kualifikasi dan kemampuan kontraktor sehingga kualitas pemilihan rekanan pelaksana pekerjaan menjadi lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menyempurnakan manajemen keuangan, mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia yang ada, melakukan efisiensi dan penghematan, mempertajam prioritas dan berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan meningkatkan penerimaan keuangan baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah sendiri.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp359.582.871.191,00 atau 25,89% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan terkait. Tabel 4.1 di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan.

Tabel 4.1
Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun 2024

URUSAN	ANGGARAN	REALISASI
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	805.478.698.107,00	665.297.953.997,61
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	346.529.794.007,00	299.866.773.820,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	274.291.578.296,00	230.735.558.134,29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	117.565.765.595,00	101.120.358.419,08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	34.229.702.271,00	13.021.483.680,24
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.674.527.781,00	15.939.653.704,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.187.330.157,00	4.614.126.240,00
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	92.305.423.625,00	63.176.342.630,47
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA	499.992.000,00	166.168.400,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	835.000.000,00	462.604.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	387.314.600,00	192.469.600,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	291.289.700,00	152.811.185,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.230.722.036,00	5.871.095.575,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URUSAN	ANGGARAN	REALISASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.583.098.034,00	5.673.942.371,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.853.477.320,00	3.133.518.499,82
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.409.278.000,00	4.104.592.327,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	31.559.288.074,00	21.684.678.895,65
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.569.226.238,00	5.674.378.376,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.226.465.662,00	5.608.402.126,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.444.140.747,00	2.431.459.789,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.276.681.990,00	4.495.180.621,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	123.069.000,00	76.243.400,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	150.000.000,00	47.362.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	904.286.500,00	555.376.200,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.872.108.694,00	2.769.870.485,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	89.985.030,00	76.188.780,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30.943.353.882,00	23.375.879.698,78
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.505.863.314,00	9.381.635.536,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	934.993.650,00	703.310.050,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	11.141.669.808,00	8.826.648.654,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.915.827.110,00	4.220.037.710,78
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	445.000.000,00	244.247.748,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	144.978.876.049,00	128.482.287.809,00
SEKRETARIAT DAERAH	79.565.737.144,00	66.069.512.675,00
SEKRETARIAT DPRD	65.413.138.905,00	62.412.775.134,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	223.925.359.658,00	170.614.532.850,00
PERENCANAAN	13.185.135.865,00	7.530.145.657,00
KEUANGAN	201.990.885.747,00	157.164.828.772,00
KEPEGAWAIAN	7.180.004.646,00	5.015.843.626,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	770.670.000,00	538.946.145,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	548.725.400,00	222.131.950,00
PENGELOLAAN PERBATASAN (UNTUK KABUPATEN – KOTA)	249.938.000,00	142.636.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URUSAN	ANGGARAN	REALISASI
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	12.960.866.587	6.548.083.742,00
INSPEKTORAT DAERAH	12.960.866.587,00	6.548.083.742,00
UNSUR KEWILAYAHAN	28.059.571.303	20.508.559.895,00
KECAMATAN	28.059.571.303,00	20.508.559.895,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	50.081.810.564	48.223.061.110,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.081.810.564,00	48.223.061.110,00
TOTAL	1.388.733.959.775,00	1.126.226.701.732,86

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024.

4.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait belanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan. Hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman Panitia Pengelola Kegiatan dalam memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah; dan
2. Tersedianya Dana Transfer untuk menunjang kegiatan yang mengakomodir aspirasi masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi:

5.1 Entitas Akuntansi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pengguna anggaran/pengguna barang merupakan entitas akuntansi oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan, yaitu Kepala Daerah. Laporan keuangan yang dimaksud berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

5.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dan basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA dan belanja.

Basis kas untuk penyusunan anggaran daerah berarti LRA pun disusun berdasarkan basis kas. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang disajikan dalam LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Sebaliknya belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berpedoman kepada PSAP Nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan Kebijakan Akuntansi perubahan Estimasi Akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan serta interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, menyajikan saldo akun-akun tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada LHP BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK. Dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

5.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan setara Kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah Kas dan setara Kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dipilih karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, digunakan nilai wajar Aset atau Kewajiban terkait.

5.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya penerimaan yang masih berada di rekening penerimaan maupun penerimaan kas/setara kas yang masih berada dalam penguasaan bendahara penerimaan.

a. Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan LRA diakui pada saat:

- (1) Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- (2) Diterima oleh SKPD; atau
- (3) Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- (1) Pengakuan Pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk Pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan;
- (2) Pengakuan Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO;
- (3) Pendapatan terkait Pendapatan Pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima. Penyesuaian Pendapatan LO dilakukan di akhir periode;
- (4) Pengakuan Pendapatan ini terkait Pendapatan Pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;

- (5) Pengakuan Pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan Pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah;
- (6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, maka pengakuan Pendapatan LO diakui per hari dengan perhitungan akumulasi pelayanan per transaksi dan Pendapatan LRA diakui pada saat disahkannya SP3B oleh BUD;
- (7) Pendapatan LO untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diakui pada saat verifikasi oleh pihak BPJS dan diterbitkannya surat klaim oleh RSUD dan Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di kas BLUD;
- (8) Pendapatan LO untuk Pendapatan dari Dana BOS diakui pada saat uang diterima oleh Satuan Pendidikan Negeri dan Pendapatan LRA diakui pada saat disahkannya SP2B oleh BUD;
- (9) Pengakuan pendapatan untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan memperhatikan rasio, manfaat ekonomi, sosial dan / atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu pengakuan pendapatan LO diakui pada saat pengumuman bagi hasil dilakukan. Pendapatan LRA diakui pada saat bagi hasil diterima di Kas Umum Daerah.
- (10) Untuk pendapatan yang sumber dari Pengelolaan Manajemen Kas Pendapatan LO dan Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Kas Umum Daerah; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (11) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA dari Dana Desa diakui pada saat diterbitkannya SP2DD (Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa).

b. Pengukuran Pendapatan

- (1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- (3) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (4) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
- (5) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Pengungkapan Pendapatan LRA

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- (1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

a. Pengakuan Belanja

- (1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD;
- (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (dengan SP2D-LS/GU/NIHIL atau format lain yang disamakan dengan surat tersebut);
- (3) Untuk Belanja yang menggunakan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi dan non Kapitasi pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
- (4) Untuk Belanja yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
- (5) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah; dan
- (6) Untuk Belanja yang menggunakan Dana Desa pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Pengukuran Belanja

- (1) Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- (2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- (3) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA; dan
- (4) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Penilaian Belanja

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja Operasi, belanja Modal dan Belanja tak terduga serta belanja transfer.

d. Pengungkapan Belanja

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- (1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- (3) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan klasifikasi yang didasarkan pada SAP. Konversi belanja tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Konversi Klasifikasi Belanja

Klasifikasi Belanja (Format APBD Permendagri 77 Tahun 2020)		Klafikasi Belanja (Format SAP)
A. Belanja Operasi		A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai	→	1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang	→	2. Belanja Barang
3. Bunga	→	3. Bunga
4. Subsidi	→	4. Subsidi
5. Hibah	→	5. Hibah
6. Bantuan Sosial	→	6. Bantuan Sosial
B. Belanja Modal		B. Belanja Modal
1. Belanja Tanah	→	1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin	→	2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Gedung dan Bangunan	→	3. Belanja Gedung dan Bangunan
4. Belanja Jalan dan irigasi	→	4. Belanja Jalan dan irigasi
5. Belanja Aset tetap lainnya	→	5. Belanja Aset tetap lainnya
6. Belanja Aset Lainnya	→	6. Belanja Aset Lainnya
C. Belanja Tak Terduga		C. Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga	→	Belanja Tak Terduga
D. Belanja Transfer		D. Belanja Transfer



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah kabupaten/Kota dan Desa		1. Bagi Hasil Pajak
2. Belanja Bantuan Keuangan antar daerah provinsi		2. Bagi Hasil Retribusi
3. Belanja Batuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten Kota		3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
4. Belanja Batuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa		4. Bantuan Keuangan
5. Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi/kepada Kabupaten Kota		

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Pengakuan Pembiayaan

- (1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
- (3) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Pengukuran Pembiayaan

- (1) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan; dan
- (2) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

c. Pengungkapan Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan / pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
- (3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset lancar

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset dapat segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

1) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas meliputi:

- 1) Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan;
- 2) Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran; dan
- 3) Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah; dan
- 4) Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Kas Dana BOS adalah digunakan untuk mencatat kas dana BOS sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.

Kas Dana Kapitasi pada FKTP adalah digunakan untuk mencatat dana kapitasi yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Kas Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) adalah digunakan untuk mencatat kas dana BOSP sebagai nilai akumulasi dari total dana BOSP yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOSP yang belum dibelanjakan.

Kas Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas adalah digunakan untuk mencatat kas dana BOK sebagai nilai akumulasi dari total dana BOK yang berada pada rekening puskesmas yang merupakan sisa dana BOK yang belum dibelanjakan.

Kas lainnya adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD.

Kas Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) adalah digunakan untuk mencatat kas dana BOSP sebagai nilai akumulasi dari total dana BOSP yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOSP yang belum dibelanjakan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas adalah digunakan untuk mencatat kas dana BOK sebagai nilai akumulasi dari total dana BOK yang berada pada rekening puskesmas yang merupakan sisa dana BOK yang belum dibelanjakan.

a. Pengakuan Kas dan Setara Kas

Kas setara kas diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan (JKN) dan Bendahara Bantuan Operasi Satuan Pendidikan (BOSP).

b. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Rincian kas dan setara kas;
- (2) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- (3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

d. Penyajian

i. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas, antara lain:

1. Saldo Kas di Kas Daerah
2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
4. Saldo Kas Badan Layanan Umum Daerah
5. Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi pada setiap FKTP



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Saldo Kas di Bendahara Bantuan Operasi Sekolah (BOS)
 7. Saldo Kas Lainnya
 8. Kas Setara Kas
 9. Saldo Kas Dana BOSP
 10. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas
- ii. Rincian Kas dan Setara kas, baik yang ada di Kas Daerah, di Bendahara Penerimaan, di Bendahara Pengeluaran maupun di Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP, Bendahara Dana BOS, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP dan Kas Dana BOK Puskesmas milik pemerintah diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan;
- iii. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK; dan
- iv. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
- v. Dalam hal bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas Dana BOS yang disimpan pada Rekening Dana BOSP. Bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya tersebut menjadi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- 1) Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat yang biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah sewaktu-waktu namun dapat dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;

- 2) Surat Utang Negara (SUN)/Obligasi adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya yang terdiri dari: Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
- 3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
- 4) Reksadana.

a. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atau suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
- (3) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak diakui sebagai belanja maupun pengeluaran pembiayaan didalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (4) Transaksi perolehan investasi jangka pendek hanya merupakan relaksifikasi dari akun kas ke akun investasi jangka pendek; dan
- (5) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash deviden*) dicatat sebagai pendapatan.

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

b. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- (1) Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.
 - (b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- (2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

c. Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (2) Jenis-jenis investasi;
- (3) Perubahan harga pasar;
- (4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- (5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- (6) Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
- (7) Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
- (8) Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah tanggung jawab hukum;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(9) Perubahan klasifikasi pos investasi; dan

(10) Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

3) Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

a. Pengakuan Piutang

(1) Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- (a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- (b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- (c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

(2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- (a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- (b) Jumlah piutang dapat diukur;
- (c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- (d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

(3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum di transfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan dan rencana transfer telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah hak daerah yang tertuang dalam rencana transfer tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

- (4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- (5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
- (7) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - (a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - (b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (8) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.
- (9) Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
- (10) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.
- (11) Bagian lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN/Perusahaan Daerah dicatat sebesar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (kelompok Investasi Non Permanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
- (12) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (Kelompok Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
- (13) Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah digunakan untuk mencatat piutang lainnya bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan piutang lainnya bagian lancar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat lain.

- (14) Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
- (15) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (16) Pengenaan denda keterlambatan diakui jika sudah terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Denda keterlambatan penyetoran pajak sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pokok dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan.

b. Pengukuran Piutang

- (1) Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
- (a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(c) Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan;

(2) Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

(a) Pemberian pinjaman

1) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

2) Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitmentfee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitmentfee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(c) Kemitraan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

(3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- i. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku yaitu rencana transfer dari Kementerian Keuangan;
- ii. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- iii. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

(4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

(5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

(6) Pemberhentian Pengakuan

- a. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*writedown*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus di perlukan secara terpisah.
- b. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomtabel* menjadi *ekstrakomtabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizablevalue*-nya. tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
- c. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggungjawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

c. Pengungkapan Piutang

- (1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - (b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - (c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - (d) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- (2) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.

a. Pengakuan Persediaan

- (1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah; dan
- (3) Pada akhir periode akuntansi (semester dan akhir tahun anggaran) persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Pengungkapan Persediaan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (3) Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- **Investasi Jangka Panjang Non permanen**

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- **Investasi Jangka Panjang Permanen**

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

a. Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (1) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi nonpermanen:

- a. Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
- b. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat di realisasikan;
- c. Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode ekuitas yaitu:

- (1) Metode Biaya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(2) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

d. Pengungkapan Investasi Non Permanen

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- (3) Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- (5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- (6) Perubahan pos investasi.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- 5) Aset Tetap Lainnya
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi. Aset Tetap Renovasi sebagaimana tersebut diatas merupakan renovasi atas aset tetap yang tidak dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap.
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- 7) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

a. Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan Handal.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penugasan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jualbeli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

**Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*)
Perolehan Awal Aset Tetap**

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Jaringan dan Instalasi serta Aset Tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- (1) Tanah dengan nilai Rp 1,00 atau lebih;
- (2) Peralatan dan Mesin sebesar Rp500.000,00;
- (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi (gedung dan Bangunan) sebesar Rp10.000.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
-
- (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai Rp10.000.000,00 kecuali untuk perolehan jalan, jaringan dan instalasi yang diperoleh melalui hibah dan/atau rampasan yang tidak diketahui nilai perolehan atau nilai wajarnya, maka diberikan nilai Rp1,00;
- (5) Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp100.000,00.
- (6) Aset Tetap Lainnya a seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp500.000,00.
- (7) Aset Tetap dalam Renovasi sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap.

Catatan :

Adanya batasan kapitalisasi akan membawa konsekuensi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan koreksi pencatatan jika tidak memenuhi batasan kapitalisasi tersebut maka aset tetap tersebut akan dipindahkan dari Daftar Aset Intra Comptable menjadi Daftar Aset Tetap/Inventaris ExtraComptable. Proses pemindahan dari Daftar Intra Comptable ke Daftar ExtraComptable akan disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Pengaturan lebih lanjut atas perubahan kebijakan akuntansi pengakuan aset ini akan diatur lebih lanjut oleh SKPKD dan atau Kepala Daerah.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Terkait adanya pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yaitu sebagai berikut:

- Peningkatan Mutu, contoh: penggantian atap yang sebelumnya seng menjadi multiroof;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Peningkatan volume;
- Peningkatan kapasitas;

Selain dari peningkatan diatas, tidak diakui sebagai penambah nilai aset tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap per unit untuk pengeluaran setelah perolehan adalah sebagai berikut :

- (1) Konstruksi meliputi Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp10.000.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*), nilai mana yang paling tinggi;
- (2) Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*), nilai mana yang paling tinggi;
- (3) Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp500.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*), nilai mana yang paling tinggi; dan
- (4) Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp100.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*), nilai mana yang paling tinggi;

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

Formula penyusutan aset tetap adalah:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Estimasi Nilai Sisa}}$$

Estimasi Masa Manfaat

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerapkan perhitungan penyusutan per tahun dan mengestimasi nilai sisa sebesar Rp. 0,00.

Beban penyusutan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelum tahun 2015 dihitung per tahun.

Beban penyusutan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2016 dihitung per bulan.

Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah:

1. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
2. Nilai yang dapat disusutkan; dan
3. Masa manfaat dan kapasitas aset tetap.

Prosedur penyusutan

1. Identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan;
2. Pengelompokan aset;
3. Penetapan nilai wajar aset tetap;
4. Penetapan nilai yang dapat disusutkan;
5. Penetapan metode penyusutan; dan
6. Perhitungan dan pencatatan penyusutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	7
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	10
1	3	2	14		Alat Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02	Alat bantu Produksi	5
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	5
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16		Alat Peraga	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17		Peralatan Proses / Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses / Produksi	4
1	3	2	18		Rambu – Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat	8
1	3	2	18	02	Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara	8
1	3	2	18	03	Rambu – Rambu Lalu Lintas Laut	8
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi / Tugu Peringatan / Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol / Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu / Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih / Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	5	07	02	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	2
1	3	5	07	03	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	15
1	3	5	07	04	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	5

b. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang di konstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

c. Pengungkapan Aset Tetap

Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (a) Penambahan;
 - (b) Pelepasan;
 - (c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - (d) Mutasi asset tetap lainnya.
- (3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (a) Nilai penyusutan;
 - (b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - (a) Eksistensi dan Batasan hak milik atas asset tetap;
 - (b) Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan asset tetap;
 - (c) Jumlah pengeluaran pada pos asset tetap dalam konstruksi;
 - (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi asset tetap.
- (5) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - (b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - (c) Jika ada, nama penilai independen;
 - (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

- (6) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

d. Aset Lainnya

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPKD meliputi:

- Tagihan Jangka Panjang;
- Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- Aset Tak Berwujud; dan
- Aset lain-lain.

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

- Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

- Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan pihak ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundangundangan. Kemitraan ini dapat berupa:

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga -Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraansewa.

- Kerja Sama Pemanfaatan(KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

- Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

- Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset lain-lain tersebut dapat dihapus dari neraca apabila telah terbitnya Keputusan Bupati.

d. Aset Tidak Berwujud (ATB)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Dapat diidentifikasi,
- 2) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- 3) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/nikmati oleh entitas; dan
- 4) Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB dapat berupa:

- 1) Perangkat Lunak (*Software*) Komputer

Perangkat lunak (*software*) komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flashdisk*, *compactdisk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (*software*) komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah *perangkat lunak (software)* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu.

Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

- 2) Lisensi

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

- 3) Waralaba (*Franchise*)

Waralaba (*franchise*) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

4) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- 5) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
- 6) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya
- 7) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

8) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Pengukuran Aset Lainnya

a. Tagihan Jangka Panjang

- Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan pihak ketiga

- Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- Kerjasama Pemanfaatan(KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

- Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset lain-lain



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lainlain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Penyusutan Aset Lain-lain berlaku untuk Aset Tetap Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Masa manfaat Aset Lain-lain yang di lakukan penyusutan berdasarkan masa manfaat Aset Tetap sebelum di lakukan reklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).

Formula penyusutan aset lain-lain adalah:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Estimasi Nilai Sisa}}{\text{Estimasi Masa Manfaat}}$$

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerapkan perhitungan estimasi nilai sisa sebesar Rp. 0,00.

Nilai aset lain-lain yang telah dikeluarkan dari neraca berdasarkan keputusan bupati maka nilai nya akan habis.

d. Aset tidak berwujud

Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dimaksudkan.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a) Tahap penelitian/riset; dan

(b) Tahap pengembangan.

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi.

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:

- a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
- e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
- f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (furtheradvance) atas tahap penelitian/riset. Namun apakah hasil pengembangan tersebut nantinya akan menjadi ATB atau tidak, harus terlebih dahulu memenuhi kriteria ATB.

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya Pengembangan Situs Web

Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai ATB apabila:

- a. dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; atau
- b. dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan.

Pengakuan Khusus Terhadap Perangkat Lunak (*Software*) Komputer

Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.

Perolehan Perangkat lunak (*software*) Komputer secara Internal

Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.

Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan:

- a. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu instansi pemerintah;
- b. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
- c. kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
- d. perangkat lunak (*software*) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.

Perolehan Perangkat lunak (*software*) Komputer secara Eksternal

Perolehan perangkat lunak (*software*) komputer secara eksternal dapat melalui pembelian, hibah, maupun tukar menukar. Perolehan secara pembelian dapat melalui kontrak pengembangan dengan pihak ketiga maupun pembelian secara langsung.

Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.

Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware tanpa perangkat lunak (*software*) tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka perangkat



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

lunak (software) tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.

Perangkat lunak (software) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri dan tidak terkait dengan hardware dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Perangkat lunak (software) komputer yang dibeli dan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perangkat lunak (software) tersebut dicatat sebagai persediaan.

Perolehan perangkat lunak (software) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (software) dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan perangkat lunak (software) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (software) tidak dikapitalisasi.

Perangkat lunak (software) yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Perangkat lunak (software) yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak dikapitalisasi.

Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak dikapitalisasi.

Pengeluaran terkait perangkat lunak (software) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu:

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika kemampuan keuangan daerah dalam kondisi baik. Kewajiban jangka pendek antara lain Utang Transfer Pemerintah Daerah, Utang kepada Pegawai, Utang Bunga, Utang Jangka Pendek Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka.

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum. Bagi Pemerintah Pusat, PFK antara lain terdiri dari potongan iuran Taspen, Bapetarum, dan BPJS Kesehatan, sedangkan pajak pusat tidak termasuk karena langsung diakui sebagai pendapatan.

Bagi pemerintah daerah, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) antara lain terdiri dari potongan pajak-pajak Pemerintah Pusat, iuran Taspen, Bapetarum, dan BPJS Kesehatan. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan Pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapetarum, dan BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

b. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Sertifikat Perbendaharaan Negara (SPN), utang obligasi negara, utang jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode-periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

e. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten.

a. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan Pertukaran (*exchangetransactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchangetransactions*)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

5) Pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga

Pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dimana rincian obyek belanja kegiatan tersebut telah diterbitkan SPD oleh BUD. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima dimana rincian obyek belanja kegiatan tersebut telah diterbitkan SPD oleh BUD, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

6) Pengakuan Utang Bunga



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengakuan Utang Bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

7) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, pengakuan Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

8) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

9) Transaksi Pembelian Jasa

Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar yang dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dimana rincian obyek belanja kegiatan tersebut telah diterbitkan SPD oleh BUD.

b. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengukuran nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan/atau bendahara pengeluaran yang belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

2) Pengukuran Utang Jangka Pendek

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahkan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4) Pengukuran Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

6) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

7) Pengukuran utang belanja LS Gaji dapat diukur sesuai dengan nilai yang dicantumkan dalam amprah yang sesuai dengan diperintahkan oleh Undang-Undang atau peraturan lainnya pada saat ditunaikannya kewajiban itu.

c. Pengungkapan Kewajiban

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (a) Pengurangan pinjaman;
 - (b) Modifikasi persyaratan utang;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 7) Biaya pinjaman:
- (a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

6. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

7. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

a. Pengakuan Pendapatan – LO

Pendapatan LO diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

b. Pengukuran Pendapatan – LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Pengungkapan Pendapatan – LO

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- (1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

8. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah,



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

beban bantuan sosial, beban penyusutan/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban transfer dan beban lain-lain.

a. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak atau penyerahan barang/jasa dari pihak lain ke pemda tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemda.

2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

4) Terjadinya pengeluaran dari kas daerah yang dipotong oleh Bank Penampung rekening.

Beban ini timbul dikarenakan pemotongan administrasi maupun pajak dari pihak Bank yang nantinya harus dikembalikan sesuai dengan surat edaran BI ke Bank Umum bahwa dana yang berasal dari APBD/N dalam rekening pemerintah tidak akan dikenakan biaya administrasi dan pajak.

5) Dalam Hal Badan Layanan Umum Daerah, Beban Diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan lima kondisi, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan / pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban.
- 4) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan surat tagihan dana atau terbit nya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS/ Pengeluaran kas.
- 5) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran.

b. Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban diukur berdasarkan :

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- b. taksiran nilai wajar barang /jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya;
- c. Beban diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah.

c. Penilaian Beban

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

d. Pengungkapan Beban

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- 1) Rincian beban per OPD;
- 2) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

9. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada satu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- 2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- 3) Transfer Antar Daerah

a. Pengakuan Transfer

Transfer masuk (LRA) diakui pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan Transfer (LO) diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau;
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar (LRA) diakui pada saat terjadinya pengeluaran Kas dari Kas Umum Daerah.

Pengakuan beban transfer pada LO periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasarkan tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan, jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang beban transfer tahun berjalan.

b. Pengukuran Transfer

1. Transfer masuk pada LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan Pendapatan transfer pada LO diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepala pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penilaian Transfer

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Transfer keluar dinilai berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.

d. Pengungkapan Transfer

Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

1. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - a) Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
 - a) Transfer keluar harus dirinci;
 - b) Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

10. PEMBIAYAAN

- 1. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- 3. Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Penerimaan Pembiayaan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

a. Pengakuan Pembiayaan

- a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengukuran Pembiayaan

- a) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- b) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

c. Pengungkapan Pembiayaan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

11. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan serta operasi yang dihentikan.

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas, dan keterbandingan laporan keuangan tersebut antar waktu dan dengan laporan keuangan entitas lain.

a. PENGUNGKAPAN

Bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan:

- a) Sifat perubahan kebijakan akuntansi;
- b) Alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan
- c) Nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
- d) Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
- e) Dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. KESALAHAN

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:

- a) Keterlambatan bukti transaksi;
- b) Kesalahan perhitungan matematis;
- c) Kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
- d) Kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
- e) Kecurangan.

Laporan keuangan tidak sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dan aturan yang berlaku apabila terdapat kesalahan material, atau kesalahan tidak material yang disengaja untuk menyajikan nilai tertentu dalam laporan keuangan.

Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.

Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/ dikoreksi segera setelah diketahui.

Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.

Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LPSAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.

Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

c. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlukan sebagai koreksi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kesalahan, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

d. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:

- a) Persediaan usang
- b) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih
- c) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi
- d) Pendapatan pajak
- e) Kewajiban garansi

Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.

Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan diperlukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang lebih andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.

Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional pada tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap laporan operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

e. OPERASI YANG DIHENTIKAN

Operasi yang dihentikan antara lain berupa:

- a) Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
- b) Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.

Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.

Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/ alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain.
- b) Fungsi tersebut tetap ada.
- c) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- d) Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

12. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. PENGAKUAN

1. Belanja bantuan sosial diakui pada saat:
 - a) potensi manfaat ekonomi di masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Pengakuan belanja bantuan sosial pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

b. PENGUKURAN

Metode pencatatan belanja bantuan sosial dilakukan dengan:

- Metode *Perpetual*

Metode *perpetual*, pencatatan dilakukan setiap ada belanja bantuan sosial yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah bantuan sosial selalu *ter-update*.

Digunakan untuk mencatat jenis belanja bantuan sosial yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obat, alat kesehatan pakai habis, bahan permakanan, benih/bibit yang secara unit dan akumulasi nilainya cukup material.

- Metode Periodik

Metode pencatatan belanja bantuan sosial dilakukan secara periodik, maka pengukuran belanja bantuan sosial pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor, materai, barang kuasi lainnya.

c. PENILAIAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Penilaian belanja bantuan sosial menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai belanja bantuan sosial akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
2. Belanja bantuan sosial disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan belanja bantuan sosial meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan belanja bantuan sosial. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi belanja bantuan sosial meliputi biaya langsung yang terkait dengan belanja bantuan sosial yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar belanja bantuan sosial meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

d. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Belanja bantuan sosial disajikan sebagai pengeluaran belanja pada LRA dan sebagai beban pada LO.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a) Belanja bantuan sosial seperti barang atau jasa terkait dengan kejelasan peruntukannya.
 - b) Jenis, jumlah, dan nilai belanja bantuan sosial tidak dicantumkan dalam neraca cukup dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
- b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

a. OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

b. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada

- apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan
- apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

c. PERISTIWA PENYESUAIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan, antara lain:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
2. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan,
3. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
4. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
5. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

d. KESINAMBUNGAN ENTITAS

Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

e. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit

Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut

Pengungkapan Peristiwa Non penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

- Sifat peristiwa; dan
- Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

- a) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
- b) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
- c) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
- d) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
- e) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontingensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
- f) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

14. Perjanjian Konsensi Jasa

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- a) disediakan oleh mitra, yang:
 - dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

a. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Kebijakan ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam poin (a) terpenuhi

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan poin a selama umur aset sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi, dimana aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan (a) dan huruf (b. pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

b. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

Pengakuan kewajiban awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
-
- a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financialliability* model);
- b) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator* model),
- misalnya:

- Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
- Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan

Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan

Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

- a) pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui ;
- b) bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
- c) bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, , maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa).

Membagi Perjanjian

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur.

Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban berdasarkan masing-masing skema

KEWAJIBAN LAINNYA, KOMITMEN, KEWAJIBAN KONTINJENSI, DAN ASET KONTINJENSI



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi

c. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada kebijakan yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:

- a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
- b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
- c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*);



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
- d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

15. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

a. PENGAKUAN

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

b. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.

c. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

- a) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- c) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

d. ALIH GUNA

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

e. PELEPASAN

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
2. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
3. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

f. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

g. PENGUNGKAPAN

1. Entitas mengungkapkan:
 - a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) metode penyusutan yang digunakan;
 - c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - pelepasan;
 - penyusutan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - perubahan lain.
- f) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - tanggal efektif penilaian kembali;
 - nilai tercatat sebelum revaluasi
 - jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
- penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- m) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI

PENJELASAN ATAS POS LAPORAN KEUANGAN

**6.1. PENJELASAN POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA**

Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama Tahun 2024 dan perbandingan dengan Tahun 2023.

6.1.1. Pendapatan

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp1.139.908.805.098,36	Rp1.180.122.990.490,32	(Rp40.214.185.391,96)	(3,41)

Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi Tahun 2024 serta realisasi Tahun 2023 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Asli Daerah	262.275.006.382,00	97.941.938.585,36	37,34	144.790.352.958,32
Pendapatan Transfer	1.084.680.428.000,00	1.041.897.041.513,00	96,06	1.035.332.637.532,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	69.825.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.346.955.434.382,00	1.139.908.805.098,36	84,63	1.180.122.990.490,32

Realisasi Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebesar Rp1.139.908.805.098,36 atau 84,63% dari anggaran sebesar Rp1.346.955.434.382,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.180.122.990.490,32, maka jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp40.214.185.391,96 atau 3,41%.

Masing-masing realisasi akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp97.941.937.585,36	Rp144.790.352.958,32	(Rp46.848.415.372,96)	(32,36)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti selama Tahun 2024 sebesar Rp97.941.937.585,36 atau 37,34% dari anggaran sebesar Rp262.275.006.382,00, Realisasi PAD Tahun 2024 mengalami penurunan Rp46.848.415.372,96 atau 32,36% dari Realisasi PAD Tahun 2023 sebesar Rp144.790.352.958,32. Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Pajak Daerah	41.100.000.000,00	18.679.998.295,01	45,45	16.671.383.937,45
Pendapatan Retribusi Daerah	95.120.124.097,00	64.919.566.355,04	68,25	1.337.128.750,00
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	80.548.000.000,00	9.524.546.677,00	11,82	12.246.453.249,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	45.506.882.285,00	4.817.826.258,31	10,59	114.535.387.021,87
Jumlah	262.275.006.382,00	97.941.937.585,36	37,34	144.790.352.958,32

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023, selanjutnya dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

6.1.1.a 1. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp18.679.998.295,01	Rp16.671.383.937,45	Rp2.008.614.357,56	12,05

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 serta realisasi Tahun 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Hotel	325.000.000,00	354.946.525,10	109,21	1.028.250.936,00
Pajak Restoran	800.000.000,00	654.524.927,00	81,82	2.705.414.722,10
Pajak Hiburan	137.500.000,00	84.142.332,50	61,19	424.727.746,95
Pajak Reklame	1.500.000.000,00	822.997.614,00	54,87	921.030.048,00
Pajak Penerangan Jalan	2.512.905.351,00	2.621.184.173,00	104,31	6.517.196.993,00
Pajak Parkir	25.000.000,00	15.755.316,66	63,02	52.309.850,20
Pajak Air Tanah	150.000.000,00	197.201.065,60	131,47	383.641.359,20
Pajak Sarang Burung Walet	18.800.000.000,00	553.882.000,00	2,95	1.200.432.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.500.000.000,00	2.904.044.148,00	82,97	1.891.769.916,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000.000,00	1.683.992.227,00	84,20	1.546.610.366,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	11.349.594.649,00	8.787.327.966,15	77,42	0,00
Jumlah	41.100.000.000,00	18.679.998.295,01	45,45	16.671.383.937,45

Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp18.679.998.295,01 atau 45,45% dari anggaran sebesar Rp41.100.000.000,00. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan Rp2.008.614.357,56 atau 12,05% dari Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2023 sebesar Rp16.671.383.937,45.

Rincian Realisasi Pajak Daerah menurut OPD sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	325.000.000,00	354.946.525,10	109,21	1.028.250.936,00
Jumlah	325.000.000,00	354.946.525,10	109,21	1.028.250.936,00

b. Pajak Restoran

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	800.000.000,00	654.524.927,00	81,82	2.705.414.722,10
Jumlah	800.000.000,00	654.524.927,00	81,82	2.705.414.722,10



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Pajak Hiburan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	137.500.000,00	84.142.332,50	61,19	424.727.746,95
Jumlah	137.500.000,00	84.142.332,50	61,19	424.727.746,95

d. Pajak Reklame

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	1.500.000.000,00	822.997.614,00	54,87	921.030.048,00
Jumlah	1.500.000.000,00	822.997.614,00	54,87	921.030.048,00

e. Pajak Penerangan Jalan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	2.512.905.351,00	2.621.184.173,00	104,31	6.517.196.993,00
Jumlah	2.512.905.351,00	2.621.184.173,00	104,31	6.517.196.993,00

f. Pajak Parkir

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	25.000.000,00	15.755.316,66	63,02	52.309.850,20
Jumlah	25.000.000,00	15.755.316,66	63,02	52.309.850,20

g. Pajak Air Tanah

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	150.000.000,00	197.201.065,60	131,47	383.641.359,20
Jumlah	150.000.000,00	197.201.065,60	131,47	383.641.359,20

h. Pajak Sarang Burung Walet

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	18.800.000.000,00	553.882.000,00	2,95	1.200.432.000,00
Jumlah	18.800.000.000,00	553.882.000,00	2,95	1.200.432.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	3.500.000.000,00	2.904.044.148,00	82,97	1.891.769.916,00
Jumlah	3.500.000.000,00	2.904.044.148,00	82,97	1.891.769.916,00

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	2.000.000.000,00	1.683.992.227,00	84,20	1.546.610.366,00
Jumlah	2.000.000.000,00	1.683.992.227,00	84,20	1.546.610.366,00

k. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	11.349.594.649,00	8.787.327.966,15	77,42	0,00
Jumlah	11.349.594.649,00	8.787.327.966,15	77,42	0,00

Pada Tahun 2024, objek pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan metode *Self Assessment* dan *Official Assessment* sesuai dengan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 yang realisasinya lebih kecil dari target anggaran yaitu: Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Sarang Burung Walet. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Pajak sarang burung walet disebabkan banyaknya sarang burung walet yang sudah tidak beroperasi lagi karena banyaknya burung walet yang bermigrasi di sebabkan oleh beberapa faktor seperti bencana alam yaitu kebakaran, roboh dan angin ribut serta berkurangnya pakan burung walet. Adanya turunnya harga pasar sarang burung walet sehingga menyebabkan turunnya pendapatan, selain itu banyaknya Wajib Pajak yang belum jujur dan tidak taat dalam melaporkan hasil sarang burung walet, sedangkan Badan Pendapatan Daerah belum memiliki juru sita.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pajak Reklame terjadi penurunan disebabkan oleh banyaknya Wajib Pajak yang tutup usaha, sehingga jumlah reklame insidental menjadi berkurang, dan Badan Pendapatan Daerah belum memiliki juru sita untuk melakukan penagihan secara maksimal.
3. Pajak Hiburan mengalami penurunan disebabkan Jumlah Objek Pajak tidak bertambah, selain itu tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak dinilai kurang dan juga kurangnya wisatawan yang datang berkunjung di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan serapan realisasi pajak daerah antara lain:

1. Melakukan kegiatan Penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah;
2. Penentuan besarnya pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah serta pengawasan penyetorannya;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola pajak daerah;
4. Melakukan Sosialisasi lebih intens kepada wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan validitas data wajib pajak.

6.1.1.a 2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp64.919.566.355,04	Rp1.337.128.750,00	Rp63.582.437.605,04	4.755,15

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp64.919.566.355,04 atau 68,25% dari anggaran sebesar Rp95.120.124.097,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mengalami kenaikan Rp63.582.437.605,04 atau 4.755,15% dari Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp1.337.128.750,00.
Rincian Pendapatan Retribusi adalah sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Jasa Umum	56.744.624.097,00	64.528.871.452,04	113,72	776.052.650,00
Jasa Usaha	37.975.500.000,00	81.300.000,00	0,21	170.450.100,00
Perizinan Tertentu	400.000.000,00	309.394.903,00	77,35	390.626.000,00
Jumlah	95.120.124.097,00	64.919.566.355,04	68,25	1.337.128.750,00

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi retribusi jasa umum menurut OPD dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kesehatan	55.609.624.097,00	63.789.823.702,04	114,71	23.723.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	540.000.000,00	324.522.000,00	60,10	271.562.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	23.246.000,00
Dinas Perhubungan	400.000.000,00	166.000.000,00	41,50	121.377.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	0,00	25.616.250,00	100,00	217.609.150,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	195.000.000,00	222.909.500,00	114,31	118.535.500,00
Jumlah	56.744.624.097,00	64.528.871.452,04	113,72	776.052.650,00

Realisasi retribusi jasa umum Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Retribusi Pelayanan Kesehatan	55.609.624.097,00	63.789.823.702,04	114,71	23.723.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	540.000.000,00	324.522.000,00	60,10	271.562.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	400.000.000,00	166.000.000,00	41,50	121.377.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	195.000.000,00	222.909.500,00	114,31	95.273.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	23.246.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	23.262.500,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	25.616.250,00	100,00	217.609.150,00
Jumlah	56.744.624.097,00	64.528.871.452,04	113,72	776.052.650,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 sebesar Rp64.528.871.452,04 atau 113,72% dari anggaran sebesar Rp56.744.624.097,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 mengalami kenaikan Rp63.752.818.802,04 atau 8215,01% dari Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp776.052.650,00.

Pendapatan BLUD pada UPT Puskesmas di Dinas Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Puskesmas	Pendapatan BLUD
Puskesmas Selatpanjang	2.387.696.153,00
Puskesmas Alai	1.559.888.555,00
Puskesmas Alah Air	2.662.436.218,00
Puskesmas Pulau Merbau	1.286.072.525,00
Puskesmas Bandul	1.098.109.459,00
Puskesmas Anak Setatah	1.721.637.111,00
Puskesmas Kedabu Rapat	1.439.115.461,00
Puskesmas Teluk Belitung	1.218.646.931,00
Puskesmas Tanjung Samak	2.059.801.510,00
Puskesmas Sungai Tohor	1.187.505.053,00
UPT RSUD	47.168.914.726,04
Jumlah	63.789.823.702,04

Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang dicatat berdasarkan dokumen SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja) yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi retribusi jasa usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	84.230.000,00
Retribusi Terminal	37.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	5.500.000,00	3.800.000,00	69,09	3.825.000,00
Retribusi Pelayanan Ke Pelabuhan	150.000.000,00	77.500.000,00	51,67	61.997.100,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	20.398.000,00
Jumlah	37.975.500.000,00	81.300.000,00	0,21	170.450.100,00

Realisasi Retribusi Jasa usaha menurut OPD sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.500.000,00	3.800.000,00	69,09	3.825.000,00
Dinas Perhubungan	150.000.000,00	77.500.000,00	51,67	61.997.100,00
Dinas Perikanan	20.000.000,00	0,00	0,00	20.398.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	37.800.000.000,00	0,00	0,00	84.230.000,00
Jumlah	37.975.500.000,00	81.300.000,00	0,21	170.450.100,00

Data tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 sebesar Rp81.300.000,00 atau 0,21% dari anggaran sebesar Rp37.975.500.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 mengalami penurunan Rp89.150.100,00 atau 52,30% dari Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp170.450.100,00.

Tidak terealisasi retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah disebabkan belanja operasional tidak terealisasi dan berdampak operasional ikan tidak dapat dijalankan. Retribusi Terminal tidak terealisasi berdasarkan Hasil Evaluasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Kementerian Keuangan RI Nomor: S-189/PK/PK.5 /2023, perihal Hasil Evaluasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 15 November 2023, terhadap tarif Retribusi Gudang Hasil Produksi yang sebelumnya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berada pada Struktur dan Tarif Retribusi Penyediaan Tempat/Ruangan Pada Gudang Hasil Produksi pada Retribusi Jasa Usaha, oleh Kementerian Keuangan RI direkomendasikan terhadap Pemanfaatan/penggunaan aset (Gudang Hasil Produksi) dapat direposisi pada retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah. Sehingga menghadapi masalah sebagai berikut :

- a) Pemindahan posisi tarif Gudang Hasil Produksi ke Pemanfaatan Aset Daerah tentu saja memiliki konsekuensi tersendiri dimana secara aturan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan adalah termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah;
- b) Hasil evaluasi Kementerian Keuangan RI direkomendasikan terhadap Pemanfaatan/penggunaan aset (Gudang Hasil Produksi) dapat direposisi pada retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah, sehingga retribusi daerah kami belum bisa melakukan pemungutan terhadap tarif retribusi penyediaan tempat/ruangan pada gudang hasil produksi
Perlunya pembuatan/ pembangunan gudang terlebih dahulu untuk menampung hasil produksi seperti tepung sagu. Untuk lokasi gudang sendiri harus berada di tepi laut untuk mempermudah proses bongkar muat barang hasil produksi.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu berhubungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan memiliki otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah . Realisasi retribusi perizinan tertentu dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	298.126.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00	309.394.903,00	77,35	0,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	92.500.000,00
Jumlah	400.000.000,00	309.394.903,00	77,35	390.626.000,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu menurut OPD sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000.000,00	309.394.903,00	77,35	298.126.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	92.500.000,00
Jumlah	400.000.000,00	309.394.903,00	77,35	390.626.000,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 sebesar Rp309.394.903,00 atau 77,35% dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu yaitu melakukan kegiatan penyuluhan subjek retribusi daerah kepada masyarakat luas terutama kepada aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Upaya ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran/ketaatan beberapa wajib retribusi dalam membayar retribusi baik jumlah maupun masa retribusi.

6.1.1.a 3. Pendapatan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp9.524.546.677,00	Rp12.246.453.249,00	(Rp2.721.906.572,00)	(22,23)

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari dividen yang dibagikan oleh PT Bank Riau Kepri Syariah Tahun 2024 sebesar Rp9.524.546.677,00. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.000.000.000,00	9.524.546.677,00	59,53	12.246.453.249,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Guna)	64.548.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	80.548.000.000,00	9.524.546.677,00	11,82	12.246.453.249,00

Penerimaan dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp9.524.546.677,00 atau 11,82% dari anggaran sebesar Rp80.548.000.000,00. Realisasi Tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan Rp2.721.906.572,00 atau 22,23% dari Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp12.246.453.249,00.

Rincian Pendapatan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menurut OPD dirincikan sebagai berikut:

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.000.000.000,00	9.524.546.677,00	59,53	12.246.453.249,00
Jumlah	16.000.000.000,00	9.524.546.677,00	59,53	12.246.453.249,00

2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Guna)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	64.548.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	64.548.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tidak terealisasinya Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Guna) sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 70 Ayat (3) Dividen sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Berdasarkan Laporan Keuangan BUMD BUMI MERANTI yang disampaikan oleh Direktur BUMD, Kondisi Keuangan saat ini belum menghasilkan keuntungan.

6.1.1.a 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp4.817.826.258,31	Rp114.535.387.021,87	(Rp109.717.560.763,56)	(95,79)

Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan	34.530.000.000,00	96.798.050,00	0,28	38.805.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	950.882.555,00	894.772.920,00	94,10	0,00
Jasa Giro	1.000.000.000,00	333.687.304,00	33,37	378.159.820,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Bunga	800.000.000,00	386.546.039,00	48,32	668.930.882,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	99.999.730,00	8.000.000,00	8,00	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.000.000.000,00	1.717.047.990,37	171,70	1.021.310.696,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000.000,00	25.936.402,57	0,52	478.835.117,60
Pendapatan Denda Pajak Daerah	320.000.000,00	105.855.922,14	33,08	118.130.979,08
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	1.138.500,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	50.416.494.277,00
Pendapatan dari Pengembalian	300.000.000,00	71.741.986,00	23,91	151.615.898,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	59.660.494.094,11
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	76.927.750,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.500.000.000,00	1.170.301.144,23	78,02	1.519.682.508,08
Jumlah	45.506.882.285,00	4.817.826.258,31	10,59	114.535.387.021,87

Penerimaan dari lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 sebesar Rp4.817.826.258,31 atau 10,59% dari anggaran sebesar Rp45.506.882.285,00. Realisasi Tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan Rp109.717.560.763,56 atau 95,79% dari Realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun 2023 sebesar Rp114.535.387.021,87.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan sebesar Rp96.798.050,00 atau 0,28% dari anggaran sebesar Rp34.530.000.000,00, Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dijual Secara Lelang Berupa 4 Paket Peralatan dan Mesin Beserta Infrastruktur Lainnya Kondisi Rusak Berat Milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 yang berupa 1 Paket Inventaris kantor berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.843.000,00, 1 paket Inventaris kantor berupa bangunan gedung instalasi pengelolaan air yang akan dibongkar beserta tempat penampungan air sebesar Rp87.668.800,00, 1 Paket Inventaris kantor berupa sisa tempat penampungan air hujan sebesar Rp825.000,00, 1 paket Inventaris kantor berupa Pot Bunga sebesar Rp463.750,00 dan Rp2.500,00 merupakan biaya Administrasi Bank. Realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp386.546.039,00 atau 48,32% dari target sebesar Rp800.000.000,00. Realisasi pendapatan tersebut merupakan Pendapatan TDF Remunerasi pada Rekening TDF-DBH.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Penerimaan dari Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp8.000.000,00 atau 8,00% dari target sebesar Rp99.999.730,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan atas setoran temuan hasil pemeriksaan.

Realisasi Pendapatan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp1.717.047.990,37 atau 171,70 dari target sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan pendapatan yang berasal dari Pengembalian Kelebihan Belanja yang tidak masuk dalam LHP BPK dan Inspektorat dan kelebihan setor pajak daerah.

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp25.936.402,57 atau 0,52% dari target sebesar Rp5.000.000.000,00.

Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan		Realisasi 2024
CV. Anugrah Kencana	Rp	16.220.220,00
CV. Bumi Beringin Indah	Rp	2.984.051,18
CV. Bumi Beringin Indah	Rp	6.732.131,39
Jumlah	Rp	25.936.402,57

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp105.855.922,14 atau 33,08% dari target anggaran sebesar Rp320.000.000,00. Pendapatan ini berasal dari Denda Pajak hotel, Denda Pajak Restoran, Denda Pajak Hiburan, Denda Pajak Reklame, Denda Pajak Sarang Burung Walet, dan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp1.138.500,00 atau 100% dari target anggaran sebesar Rp0,00. Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagai berikut:

Nama Perusahaan		Realisasi 2024
PT. Centratama Menara Indonesia	Rp	1.138.500,00
Jumlah	Rp	1.138.500,00

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp71.741.986,00 atau 23,91% dari target anggaran sebesar Rp300.000.000,00. Pendapatan ini berasal dari Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.

Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut OPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	34.530.000.000,00	96.798.050,00	0,28	24.357.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	14.448.000,00
Jumlah	34.530.000.000,00	96.798.050,00	0,28	38.805.000,00

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	950.882.555,00	894.772.920,00	94,10	378.159.820,00
Jumlah	950.882.555,00	894.772.920,00	94,10	378.159.820,00

3. Jasa Giro

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.000.000.000,00	333.687.304,00	33,37	378.159.820,00
Jumlah	1.000.000.000,00	333.687.304,00	33,37	378.159.820,00

4. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	668.930.882,00
Jumlah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	668.930.882,00

5. Pendapatan Bunga

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	800.000.000,00	386.546.039,00	48,32	668.930.882,00
Jumlah	800.000.000,00	386.546.039,00	48,32	668.930.882,00

6. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	99.999.730,00	8.000.000,00	8,00	0,00
Jumlah	99.999.730,00	8.000.000,00	8,00	0,00

7. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.000.000.000,00	1.717.047.990,37	171,70	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.021.310.696,00
Jumlah	1.000.000.000,00	1.717.047.990,37	171,70	1.021.310.696,00

8. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.000.000.000,00	25.936.402,57	0,52	478.835.117,60
Jumlah	5.000.000.000,00	25.936.402,57	0,52	478.835.117,60

9. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	160.000.000,00	105.855.922,14	66,16	118.130.979,08
Jumlah	320.000.000,00	105.855.922,14	33,08	118.130.979,08

10. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	1.138.500,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	1.138.500,00	0,00	0,00

11. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	50.416.494.277,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	50.416.494.277,00

12. Pendapatan dari Pengembalian

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	300.000.000,00	71.741.986,00	23,91	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	151.615.898,00
Jumlah	300.000.000,00	71.741.986,00	23,91	151.615.898,00

13. Pendapatan BLUD

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	59.660.494.094,11
Jumlah	0,00	0,00	0,00	59.660.494.094,11



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	31.861.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	45.066.750,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	76.927.750,00

15. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00

16. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.500.000.000,00	1.170.301.144,23	78,02	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.319.682.508,08
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Jumlah	1.500.000.000,00	1.170.301.144,23	78,02	1.519.682.508,08

Realisasi jasa giro dari rekening bank milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
a. Jasa Giro pada Kas Daerah:	
- Jasa Giro Bank BRI	Rp 5.156,00
- Jasa Giro Bank Riau Kepri Syariah	Rp 303.338.016,00
- Jasa Giro Puskesmas	Rp 1.627.363,00
Jumlah Jasa Giro pada Kas Daerah	Rp 304.970.535,00
b. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	Rp 28.716.769,00
Jumlah	Rp 333.687.304,00

6.1.1.b Pendapatan Transfer

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp1.041.897.042.513,00	Rp1.035.332.637.532,00	Rp6.564.404.981,00	0,63



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian hasil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Realisasi pendapatan transfer Tahun 2024 sebesar Rp1.041.897.042.513,00 atau 96,06% dari anggaran sebesar Rp1.084.680.428.000,00. Realisasi Tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan Rp6.564.404.981,00 atau 0,63% dari Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp1.035.332.637.532,00.

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	985.351.028.000,00	965.312.551.861,00	97,97	935.353.084.856,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.329.400.000,00	76.584.490.652,00	77,10	99.979.552.676,00
Jumlah	1.084.680.428.000,00	1.041.897.042.513,00	96,06	1.035.332.637.532,00

6.1.1.b.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp965.312.551.861,00	Rp935.353.084.856,00	Rp29.959.467.005,00	3,20

Rincian realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Perimbangan	888.110.986.000,00	868.072.509.861,00	97,74	837.190.653.956,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	97.240.042.000,00	97.240.042.000,00	100,00	98.162.430.900,00
Jumlah	985.351.028.000,00	965.312.551.861,00	97,97	935.353.084.856,00

6.1.1.b.1.a Dana Perimbangan

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp868.072.509.861,00	Rp837.190.653.956,00	Rp30.881.854.905,00	3,69

Rincian Dana Perimbangan Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak	79.052.417.000,00	92.098.608.000,00	116,50	86.789.666.959,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	107.488.959.000,00	88.305.177.000,00	82,15	143.216.165.923,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	437.522.368.000,00	433.071.545.428,00	98,98	422.381.067.892,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	150.463.081.000,00	143.879.146.253,00	95,62	79.250.197.369,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	113.584.161.000,00	110.718.033.180,00	97,48	105.553.555.813,00
Jumlah	888.110.986.000,00	868.072.509.861,00	97,74	837.190.653.956,00

Realisasi transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp868.072.509.861,00 atau 97,74% dari anggaran sebesar Rp888.110.986.000,00. Realisasi Tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan Rp30.881.854.905,00 atau 3,69% dari Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 sebesar Rp837.190.653.956,00.

Rincian Dana Perimbangan menurut OPD sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	888.110.986.000,00	868.072.509.861,00	97,74	837.190.653.956,00
Jumlah	888.110.986.000,00	868.072.509.861,00	97,74	837.190.653.956,00

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp92.098.608.000,00	Rp86.789.666.959,00	Rp5.308.941.041,00	6,12

Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 adalah sebesar Rp92.098.608.000,00 atau 116,50% dari anggaran sebesar Rp79.052.417.000,00. Realisasi Tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan Rp5.308.941.041,00 atau 6,12% dari Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp86.789.666.959,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT). Rincian atas DBH Pajak sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	69.614.985.000,00	80.786.708.000,00	116,05	75.184.549.097,00
DBH PPh Pasal 21	9.437.432.000,00	10.577.747.000,00	112,08	10.761.341.570,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	734.152.000,00	100,00	843.776.292,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Jumlah	79.052.417.000,00	92.098.608.000,00	116,50	86.789.666.959,00

b) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp88.305.177.000,00	Rp143.216.165.923,00	(Rp54.910.988.923,00)	(38,34)

Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2024 adalah sebesar Rp88.305.177.000,00 atau 82,15% dari anggaran sebesar Rp107.488.959.000,00. Realisasi Tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan Rp54.910.988.923,00 atau 38,34% dari Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp143.216.165.923,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral Batu Bara-Landrent, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan. Rincian atas DBH Sumber Daya Alam Sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	32.285,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	96.212.181.000,00	59.432.612.250,00	61,77	124.458.247.604,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	16.611.737.750,00	100,00	3.516.615.850,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.900.354.000,00	41.451.000,00	1,06	22.493.205,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	4.842.952.000,00	100,00	3.619.323.427,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.953.508.000,00	4.953.508.000,00	100,00	8.713.339.341,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.422.916.000,00	2.422.916.000,00	100,00	2.886.114.211,00
Jumlah	107.488.959.000,00	88.305.177.000,00	82,15	143.216.165.923,00

c) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp433.071.545.428,00	Rp422.381.067.892,00	Rp10.690.477.536,00	2,53

Realisasi Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Alokasi Umum	344.269.530.000,00	344.269.530.000,00	100,00	276.470.849.412,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00	857.809.370,00	85,78	940.702.690,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7.312.275.000,00	3.815.490.423,00	52,18	43.582.980.000,00
DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	37.940.729.000,00	44.715.237.000,00	117,86	32.537.272.000,00
DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	22.581.696.000,00	15.807.188.000,00	70,00	34.745.070.790,00
DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	24.418.138.000,00	23.606.290.635,00	96,68	34.104.193.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Jumlah	437.522.368.000,00	433.071.545.428,00	98,98	422.381.067.892,00

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2024 sebesar Rp437.522.368.000,00 atau 99,98% dari anggaran. Realisasi Tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan Rp10.690.477.536,00 atau 2,53% dari realisasi pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp422.381.067.892,00.

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp143.879.146.253,00	Rp79.250.197.369,00	Rp64.628.948.884,00	81,55

Jumlah realisasi DAK Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	209.877.000,00	209.677.000,00	99,90	1.246.116.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.637.157.000,00	7.634.636.000,00	99,97	17.567.566.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.593.079.000,00	2.591.582.000,00	99,94	6.267.323.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	10.466.066.062,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.953.372.000,00	3.802.831.532,00	96,19	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	36.720.923.000,00	38.816.264.711,00	105,71	30.761.414.950,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	7.988.347.000,00	5.664.844.149,00	70,91	8.940.986.357,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	109.997.000,00	109.373.000,00	99,43	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler - Penurunan AKI dan AKB	409.258.000,00	403.621.000,00	98,62	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	399.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	80.922.309.000,00	79.603.098.131,00	98,37	0,00
DAK Fisik- Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	9.918.762.000,00	5.043.218.730,00	50,85	3.600.925.000,00
Jumlah	150.463.081.000,00	143.879.146.253,00	95,62	79.250.197.369,00

Penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 sebesar Rp143.879.146.253,00 atau 95,62% dari anggaran sebesar Rp150.463.081.000,00. Realisasi Tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan Rp64.628.948.884,00 atau 81,55% dari realisasi pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp79.250.197.369,00.

e) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp110.718.033.180,00	Rp105.553.555.813,00	Rp5.164.477.367,00	4,89

Jumlah realisasi DAK Non Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DAK Non Fisik-BOS Reguler	29.548.220.000,00	29.547.920.000,00	100,00	30.091.178.400,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	41.816.679.000,00	41.371.552.000,00	98,94	38.038.616.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.094.000.000,00	2.219.863.000,00	106,01	1.768.500.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	20.277.557.000,00	20.353.974.000,00	100,38	19.731.727.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.698.100.000,00	3.680.532.600,00	99,52	3.389.351.300,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	459.280.000,00	434.700.000,00	94,65	488.210.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.576.689.000,00	1.209.866.995,00	46,95	7.527.050.140,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.864.281.000,00	3.695.905.390,00	95,64	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	427.800.000,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	3.145.879.473,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	410.454.150,00	78,93	316.168.500,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	629.075.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.129.355.000,00	6.193.265.045,00	86,87	0,00
Jumlah	113.584.161.000,00	110.718.033.180,00	97,48	105.553.555.813,00

Penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 sebesar Rp110.718.033.180,00 atau 97,48% dari anggaran sebesar Rp113.584.161.000,00. Realisasi Tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan Rp5.164.477.367,00 atau 4,89% dari realisasi pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp105.553.555.813,00.

6.1.1.b.1.b Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp97.240.042.000,00	Rp98.162.430.900,00	(Rp922.388.900,00)	(0,94)

Rincian penetapan dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DID	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	97.240.042.000,00	97.240.042.000,00	100,00	98.162.430.900,00
Jumlah	97.240.042.000,00	97.240.042.000,00	100,00	98.162.430.900,00

Penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2024 adalah Dana Desa dengan nilai sebesar Rp97.240.042.000,00 dan terealisasi 100,00% dari anggaran sebesar Rp97.240.042.000,00.

Dasar hukum penetapan Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 dan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kekurangan Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

6.1.1.b.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp76.584.490.652,00	Rp99.979.552.676,00	(Rp23.395.062.024,00)	(23,40)

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	92.300.000.000,00	75.528.250.652,00	81,83	94.461.552.676,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	7.029.400.000,00	1.056.240.000,00	15,03	5.518.000.000,00
Jumlah	99.329.400.000,00	76.584.490.652,00	77,10	99.979.552.676,00

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sesuai OPD sebagian berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	92.300.000.000,00	75.528.250.652,00	81,83	94.461.552.676,00
Jumlah	92.300.000.000,00	75.528.250.652,00	81,83	94.461.552.676,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.664.901.594,00	18.465.580.469,00	135,13	18.102.233.644,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.572.858.000,00	6.433.421.281,00	38,82	14.893.486.304,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.011.292.753,00	29.314.463.253,00	69,78	40.627.377.151,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	827.780.000,00	570.714.038,00	68,95	1.083.298.629,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.223.167.653,00	20.744.071.611,00	107,91	19.755.156.948,00
Jumlah	92.300.000.000,00	75.528.250.652,00	81,83	94.461.552.676,00

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp75.528.250.652,00 atau 81,83% dari anggaran Rp92.300.000.000,00.

Realisasi dana bagi hasil dari Tahun 2024 ditetapkan oleh surat keputusan sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan:
 1. KPTS.7726/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 Tentang Perhitungan Dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Okt-Nov) Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.359/IV/2024 Tanggal 03 April 2024 Tentang Perhitungan Dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Des) Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
 3. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.360/IV/2024 Tanggal 03 April 2024 Tentang Perhitungan Dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Keputusan Gubernur Riau KPTS.3056/V/2024 Tanggal 21 Mei 2024 Tentang Perhitungan Dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2024 Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau;
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.3172/VII/2024 Tanggal 03 Juli 2024 Tentang Perhitungan Dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.3618/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 Tentang Perhitungan Dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.3795/X/2024 Tanggal 19 Desember 2024 Tentang Perhitungan Dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Okt-Nov) Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.3794/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024 Tentang Perhitungan Dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2024 Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dan Tahun 2023 berdasarkan OPD sebagian berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.029.400.000,00	1.056.240.000,00	15,03	5.518.000.000,00
Jumlah	7.029.400.000,00	1.056.240.000,00	15,03	5.518.000.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp1.056.240.000,00 atau 15,03% dari anggaran Rp7.029.000.000,00.

Rincian bantuan keuangan pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.029.400.000,00	1.056.240.000,00	15,03	5.518.000.000,00
Jumlah	7.029.400.000,00	1.056.240.000,00	15,03	5.518.000.000,00

Realisasi transfer bantuan keuangan Tahun 2024 terdiri dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp1.056.240.000,00 atau 15,03% dari anggaran sebesar Rp7.029.400.000,00.

6.1.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp69.825.000,00	Rp0,00	Rp69.825.000,00	Rp100,00

Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pihak Lainnya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Realisasi pendapatan transfer Tahun 2024 sebesar Rp69.825.000,00. Rincian realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Hibah	0,00	69.825.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	69.825.000,00	100,00	0,00

Realisasi Belanja Pendapatan Hibah tahun 2024 sebesar Rp69.825.000,00 merupakan Klaim biaya pengiriman sample oleh PT Global Fun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti atas Sampel Tes Cepat Molekuler (TCM).

Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Organisasi Dalam Negeri				
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri	0,00	69.825.000,00	100,00	0,00
Jumlah	0,00	69.825.000,00	100,00	0,00

6.1.2. Belanja dan Transfer

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp1.126.226.701.732,86	Rp1.142.428.599.201,52	(Rp16.201.897.468,66)	(1,42)

Realisasi Belanja Kabupaten Kepulauan Meranti selama Tahun 2024 mencapai Rp1.126.226.701.732,86 atau 81,10% dari anggaran sebesar Rp1.388.733.959.775,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp1.142.428.599.201,52 mengalami penurunan Rp16.201.897.468,66 atau 1,42% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Operasi	1.006.291.568.733,00	813.079.880.116,04	80,79	851.217.352.454,07
Belanja Modal	219.815.008.806,00	176.830.375.813,82	80,45	129.280.718.647,45
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	912.403.803,00	91,24	746.785.200,00
Belanja Transfer	161.627.382.236,00	135.404.042.000,00	83,78	161.183.742.900,00
Jumlah	1.388.733.959.775,00	1.126.226.701.732,86	81,10	1.142.428.599.201,52

6.1.2. a. Belanja Operasi

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp813.079.880.116,04	Rp851.217.352.454,07	(Rp38.137.472.338,03)	(4,48)

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kepulauan Meranti selama Tahun 2024 mencapai Rp813.079.880.116,04 atau 80,79% dari anggaran sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp1.006.291.568.733,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp851.217.352.454,07 mengalami penurunan Rp38.137.472.338,03 atau 4,48% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Pegawai	502.813.618.853,00	402.888.874.978,77	80,13	414.521.101.134,61
Belanja Barang dan Jasa	404.214.424.230,00	340.262.540.010,53	84,18	377.920.490.812,65
Belanja Bunga	2.000.000.000,00	922.890.122,00	46,14	3.281.890.320,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	81.074.951.700,00	65.002.572.619,51	80,18	45.352.775.246,12
Belanja Bantuan Sosial	16.188.573.950,00	4.003.002.385,23	24,73	10.141.094.940,69
Jumlah	1.006.291.568.733,00	813.079.880.116,04	80,80	851.217.352.454,07

6.1.2. a.1. Belanja Pegawai

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp402.888.874.978,77	Rp414.521.101.134,61	(Rp11.632.226.155,84)	(2,81)

Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Kepulauan Meranti selama Tahun 2024 mencapai Rp402.888.874.978,77 atau 80,13% dari anggaran sebesar Rp502.813.618.853,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp414.521.101.134,61 mengalami penurunan Rp11.632.226.155,84 atau 2,81%. Realisasi Belanja Pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	279.225.013.635,00	239.817.631.596,00	85,89	199.439.769.628,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	119.118.832.428,00	63.073.333.282,00	52,95	111.375.615.835,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	71.352.968.748,00	65.914.166.126,00	92,38	69.579.684.202,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.769.821.437,00	16.705.899.129,00	94,01	16.760.811.432,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	164.513.841,00	138.676.363,00	84,29	173.739.598,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	427.460.906,00	421.160.900,00	98,53	505.701.000,00
Belanja Pegawai BLUD	14.755.007.858,00	16.818.007.582,77	113,98	16.685.779.439,61



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Jumlah	502.813.618.853,00	402.888.874.978,77	80,13	414.521.101.134,61

Rincian realisasi berdasarkan OPD sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	153.507.828.657,00	134.815.698.147,00	87,82	111.557.312.575,00
Dinas Kesehatan	51.501.972.912,00	44.586.993.155,00	86,57	32.145.004.533,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.617.962.283,00	2.406.914.632,00	91,94	2.327.313.324,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.235.946.388,00	1.150.382.809,00	93,08	1.091.339.976,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.326.208.406,00	1.234.027.066,00	93,05	1.076.369.995,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.526.688.453,00	2.411.300.833,00	95,43	2.243.029.083,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.537.802.002,00	1.419.069.495,00	92,28	1.404.327.836,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.998.286.085,00	3.752.850.640,00	93,86	2.531.635.716,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.833.382.356,00	2.612.013.221,00	92,19	2.653.107.086,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.365.464.737,00	1.271.022.814,00	93,08	1.208.967.770,00
Dinas Perhubungan	2.614.250.528,00	2.421.186.500,00	92,61	2.215.908.431,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.160.852.389,00	1.061.199.647,00	91,42	1.021.389.793,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	1.458.089.332,00	1.327.853.317,00	91,07	1.286.947.653,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.375.799.029,00	1.284.356.256,00	93,35	1.199.992.647,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.944.912.004,00	1.782.876.946,00	91,67	1.456.348.685,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.264.617.205,00	1.156.266.925,00	91,43	1.157.388.712,00
Dinas Perikanan	1.556.064.635,00	1.432.059.484,00	92,03	1.310.430.672,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.118.368.660,00	1.927.351.772,00	90,98	1.774.377.237,00
Sekretariat Daerah	6.130.966.561,00	5.543.202.426,00	90,41	4.958.480.436,00
Sekretariat DPRD	1.629.253.203,00	1.511.501.013,00	92,77	1.639.200.396,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.796.767.300,00	2.567.726.636,00	91,81	1.992.258.244,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.810.578.139,00	3.814.607.418,00	29,78	3.271.680.567,00
Badan Pendapatan Daerah	3.573.197.755,00	3.286.984.255,00	91,99	3.108.917.125,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.154.104.814,00	1.964.010.742,00	91,18	1.939.001.937,00
Inspektorat Daerah	3.128.888.943,00	2.900.145.084,00	92,69	2.597.923.307,00
Kecamatan Tebing Tinggi	2.418.415.183,00	2.215.409.873,00	91,61	2.190.918.018,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	976.993.094,00	897.949.695,00	91,91	917.149.465,00
Kecamatan Rangsang	1.216.183.362,00	1.129.239.370,00	92,85	1.227.424.390,00
Kecamatan Rangsang Barat	1.086.570.937,00	974.831.920,00	89,72	955.136.321,00
Kecamatan Merbau	1.172.915.927,00	1.093.301.777,00	93,21	1.070.388.816,00
Kecamatan Pulau Merbau	944.514.077,00	893.135.661,00	94,56	930.162.339,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	720.630.538,00	662.353.022,00	91,91	527.247.422,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	496.955.819,00	447.547.464,00	90,06	526.445.159,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	696.850.754,00	642.796.265,00	92,24	660.916.067,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.326.731.168,00	1.219.465.316,00	91,92	1.265.327.895,00
Jumlah	279.225.013.635,00	239.817.631.596,00	85,89	199.439.769.628,00

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.201.942.302,00	23.776.187.823,00	55,03	40.272.399.879,00
Dinas Kesehatan	30.288.067.514,00	16.038.684.078,00	52,95	28.521.694.478,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.595.411.808,00	821.727.190,00	51,51	1.429.891.972,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	766.439.190,00	417.927.089,00	54,53	767.779.835,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	841.031.750,00	431.279.473,00	51,28	663.854.033,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.236.300.000,00	712.083.866,00	57,60	1.164.395.044,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	960.324.023,00	476.235.763,00	49,59	791.449.960,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.512.232.987,00	809.779.255,00	53,55	1.357.784.493,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.736.939.674,00	1.306.447.156,00	47,73	2.902.836.840,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	796.970.573,00	403.903.750,00	50,68	703.874.575,00
Dinas Perhubungan	1.555.980.116,00	770.372.200,00	49,51	1.274.593.561,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	716.602.849,00	398.299.690,00	55,58	691.587.096,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	862.034.815,00	431.555.790,00	50,06	749.322.164,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	778.051.803,00	442.575.470,00	56,88	713.977.357,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.052.838.800,00	616.210.000,00	58,53	907.032.502,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	716.328.924,00	387.710.000,00	54,12	671.439.000,00
Dinas Perikanan	862.676.587,00	482.492.800,00	55,93	720.854.506,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.083.684.460,00	588.521.700,00	54,31	1.008.308.319,00
Sekretariat Daerah	7.254.556.906,00	3.554.824.550,00	49,00	6.651.154.090,00
Sekretariat DPRD	987.541.365,00	530.510.000,00	53,72	924.175.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.435.196.275,00	1.227.692.600,00	50,41	2.241.435.207,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.431.026.400,00	1.260.932.398,00	51,87	2.561.798.000,00
Badan Pendapatan Daerah	2.902.474.355,00	1.584.742.173,00	54,60	3.563.656.015,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.256.845.314,00	647.377.000,00	51,51	1.139.727.795,00
Inspektorat Daerah	2.810.209.714,00	1.617.190.695,00	57,55	3.259.820.405,00
Kecamatan Tebing Tinggi	1.667.719.678,00	747.756.873,00	44,84	1.184.104.338,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	633.517.780,00	278.609.197,00	43,98	491.372.900,00
Kecamatan Rangsang	717.046.865,00	360.553.500,00	50,28	674.101.704,00
Kecamatan Rangsang Barat	595.532.051,00	329.525.000,00	55,33	565.249.615,00
Kecamatan Merbau	810.268.039,00	353.457.424,00	43,62	570.894.496,00
Kecamatan Pulau Merbau	633.517.780,00	279.692.430,00	44,15	488.316.995,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	573.945.884,00	203.882.344,00	35,52	313.025.568,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	530.773.548,00	169.823.200,00	32,00	319.389.342,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	530.773.548,00	213.417.600,00	40,21	389.913.037,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	784.028.751,00	401.353.205,00	51,19	724.405.714,00
Jumlah	119.118.832.428,00	63.073.333.282,00	52,95	111.375.615.835,00

3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	66.282.423.748,00	63.668.121.126,00	96,06	64.708.209.202,00
Dinas Kesehatan	263.040.000,00	131.520.000,00	50,00	250.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.180.000,00	92.860.000,00	46,86	268.100.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	97.800.000,00	47.100.000,00	48,16	99.960.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.440.000,00	24.820.000,00	36,80	98.270.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	85.920.000,00	38.760.000,00	45,11	90.600.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	118.320.000,00	75.000.000,00	63,39	114.780.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	68.400.000,00	34.200.000,00	50,00	66.900.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55.200.000,00	26.400.000,00	47,83	52.800.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	70.560.000,00	35.280.000,00	50,00	66.330.000,00
Dinas Perhubungan	149.640.000,00	74.820.000,00	50,00	149.280.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	68.280.000,00	26.940.000,00	39,46	83.400.000,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	74.760.000,00	36.480.000,00	48,80	80.360.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.640.000,00	38.820.000,00	50,00	72.920.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	86.040.000,00	38.820.000,00	45,12	69.240.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	61.845.000,00	23.565.000,00	38,10	57.580.000,00
Dinas Perikanan	89.160.000,00	44.580.000,00	50,00	78.740.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80.880.000,00	40.440.000,00	50,00	74.060.000,00
Sekretariat Daerah	716.600.000,00	390.480.000,00	54,49	582.370.000,00
Sekretariat DPRD	231.360.000,00	112.680.000,00	48,70	253.460.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	101.280.000,00	50.640.000,00	50,00	101.280.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	495.580.000,00	371.230.000,00	74,91	450.880.000,00
Badan Pendapatan Daerah	918.020.000,00	72.360.000,00	7,88	942.515.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	84.720.000,00	42.360.000,00	50,00	90.720.000,00
Inspektorat Daerah	127.140.000,00	40.320.000,00	31,71	80.640.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi	140.760.000,00	70.380.000,00	50,00	135.200.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	72.600.000,00	36.300.000,00	50,00	52.200.000,00
Kecamatan Rangsang	63.600.000,00	31.800.000,00	50,00	56.680.000,00
Kecamatan Rangsang Barat	58.200.000,00	26.100.000,00	44,85	52.200.000,00
Kecamatan Merbau	75.300.000,00	37.650.000,00	50,00	69.300.000,00
Kecamatan Pulau Merbau	43.320.000,00	21.660.000,00	50,00	37.320.000,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	58.200.000,00	27.500.000,00	47,25	46.760.000,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	33.720.000,00	18.660.000,00	55,34	48.910.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	46.920.000,00	20.460.000,00	43,61	40.920.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.120.000,00	45.060.000,00	50,00	56.300.000,00
Jumlah	71.352.968.748,00	65.914.166.126,00	92,38	69.579.684.202,00

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Sekretariat DPRD	17.769.821.437,00	16.705.899.129,00	94,01	16.760.811.432,00
Jumlah	17.769.821.437,00	16.705.899.129,00	94,01	16.760.811.432,00

5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Sekretariat Daerah	164.513.841,00	138.676.363,00	84,29	173.739.598,00
Jumlah	164.513.841,00	138.676.363,00	84,29	173.739.598,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Sekretariat Daerah	219.560.906,00	219.560.900	100,00	304.101.000,00
Sekretariat DPRD	207.900.000,00	201.600.000,00	96,97	201.600.000,00
Jumlah	427.460.906,00	421.160.900,00	98,53	505.701.000,00

7. Belanja Pegawai BLUD

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kesehatan	14.755.007.858,00	16.818.007.582,77	113,98	16.685.779.439,61
Jumlah	14.755.007.858,00	16.818.007.582,77	113,98	16.685.779.439,61

6.1.2. a.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp340.262.540.010,53	Rp377.920.490.812,65	(Rp37.657.950.802,12)	(9,96)

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp340.262.540.010,53 atau 84,18% dari anggaran sebesar Rp404.214.424.230,00, realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan Rp37.657.950.802,12 atau 9,96% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp377.920.490.812,65.

Realisasi belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 meliputi belanja barang dan jasa dari realisasi APBD, BLUD dan Dana BOSP-BOS. Rincian realisasi Belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Barang	78.972.327.819,00	64.541.882.158,50	81,73	78.314.147.028,04
Belanja Jasa	151.303.153.783,00	119.312.275.892,90	78,86	140.564.779.232,22
Belanja Pemeliharaan	52.846.335.388,00	45.039.543.188,90	85,23	36.983.148.378,00
Belanja Perjalanan Dinas	56.504.337.100,00	42.371.581.337,00	74,99	57.237.977.490,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.457.530.000,00	4.295.538.048,00	78,71	2.790.472.761,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	20.948.481.267,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	22.218.541.500,00	20.902.062.110,00	94,07	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.912.198.640,00	43.799.657.275,23	118,66	41.081.484.656,39
Jumlah	404.214.424.230,00	340.262.540.010,53	84,18	377.920.490.812,65

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Barang Pakai Habis	76.422.854.794,00	62.800.290.158,50	82,17	78.287.147.028,04
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.549.473.025,00	1.741.592.000,00	68,31	0,00
Belanja Jasa Kantor	117.703.900.016,00	92.934.655.679,00	78,96	103.807.035.927,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.834.062.017,00	7.061.057.766,00	79,93	7.666.834.873,00
Belanja Sewa Tanah	200.000.000,00	123.000.000,00	61,50	175.900.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.926.650.000,00	7.457.190.124,00	94,08	10.801.596.722,72
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.805.351.900,00	2.399.651.500,00	63,06	3.037.390.936,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	441.500.000,00	396.949.000,00	89,91	1.643.276.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	3.524.631.100,00	2.316.835.203,90	65,73	5.967.190.773,50
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.557.563.750,00	1.435.017.480,00	92,13	875.506.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	55.500.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	25.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.875.295.000,00	4.821.719.140,00	70,13	6.173.548.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	259.200.000,00	191.200.000,00	73,77	336.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	204.920.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.794.080.000,00	2.960.448.739,00	78,03	4.178.985.611,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.015.161.388,00	24.088.919.557,55	92,60	12.330.578.917,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.322.604.000,00	17.980.174.892,35	80,55	20.268.663.850,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	704.490.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.504.337.100,00	42.371.581.337,00	74,99	57.110.915.556,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	127.061.934,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.123.900.000,00	1.773.950.000,00	83,52	2.367.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.333.630.000,00	2.521.588.048,00	75,64	423.472.761,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	21.867.374.000,00	20.572.744.610,00	94,08	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	343.917.500,00	322.067.500,00	93,65	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	7.250.000,00	7.250.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	20.948.481.267,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.912.198.640,00	43.799.657.275,23	118,66	41.081.484.656,39
Jumlah	404.214.424.230,00	340.262.540.010,53	84,18	377.920.490.812,65

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah:

1. Belanja Barang

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.367.404.600,00	2.329.063.950,00	69,16	2.176.372.600,00
Dinas Kesehatan	11.215.626.815,00	9.317.435.748,00	83,08	6.928.258.674,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	461.877.698,00	211.790.615,50	45,85	812.246.350,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2.086.756.950,00	1.372.659.650,00	65,78	1.782.237.450,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	408.367.700,00	225.650.500,00	55,26	336.602.842,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	903.725.550,00	819.557.400,00	90,69	747.027.260,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.537.843.000,00	880.774.179,00	57,27	982.847.782,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.586.303.800,00	1.856.573.339,00	71,78	3.691.240.773,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	692.132.609,00	474.006.670,00	68,48	459.926.300,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	490.508.950,00	207.586.450,00	42,32	396.983.750,00
Dinas Perhubungan	386.871.310,00	384.452.309,00	99,37	255.286.300,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	394.579.000,00	205.649.900,00	52,12	440.539.917,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	3.472.123.750,00	3.187.970.240,00	91,82	3.239.230.285,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	164.779.395,00	91.759.395,00	55,69	501.785.426,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	810.795.918,00	424.513.120,00	52,36	1.037.301.366,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	171.684.220,00	162.650.810,00	94,74	186.144.351,00
Dinas Perikanan	7.740.403.292,00	5.703.303.379,00	73,68	5.283.655.458,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	363.054.350,00	334.172.700,00	92,04	868.481.920,00
Sekretariat Daerah	18.378.372.450,00	17.175.738.800	93,46	27.032.962.090,00
Sekretariat DPRD	11.472.514.500,00	11.330.036.950,00	98,76	11.106.444.352,04
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.330.044.550,00	549.577.347,00	41,32	696.821.750,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.021.582.300,00	840.302.700,00	41,57	2.073.099.600,00
Badan Pendapatan Daerah	1.070.436.422,00	880.307.870,00	82,24	1.486.558.150,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	604.846.000,00	442.660.500,00	73,19	527.269.000,00
Inspektorat Daerah	682.670.290,00	204.274.895,00	29,92	341.123.412,00
Kecamatan Tebing Tinggi	1.119.407.900,00	888.158.953,00	79,34	576.737.170,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	483.329.950,00	405.608.000,00	83,92	625.567.000,00
Kecamatan Rangsang	481.913.850,00	385.766.039,00	80,05	445.583.350,00
Kecamatan Rangsang Barat	439.790.250,00	359.496.150,00	81,74	355.570.750,00
Kecamatan Merbau	864.760.000,00	649.657.000,00	75,13	672.044.650,00
Kecamatan Pulau Merbau	561.609.050,00	469.174.600,00	83,54	488.894.500,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	508.862.250,00	421.678.000,00	82,87	387.010.000,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	560.244.950,00	429.839.000,00	76,72	497.975.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	521.590.950,00	388.087.000,00	74,40	417.758.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	615.513.250,00	531.948.000,00	86,42	456.559.450,00
Jumlah	78.972.327.819,00	64.541.882.158,50	81,73	78.314.147.028,04



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Belanja Jasa

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.658.281.200,00	11.656.213.430,00	85,34	14.715.858.813,00
Dinas Kesehatan	34.338.437.984,00	25.055.559.812,00	72,97	32.075.990.383,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.785.591.606,00	2.916.005.581,00	77,03	4.813.475.200,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	6.460.281.479,00	5.328.003.965,90	82,47	7.149.740.667,50
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.308.136.290,00	995.810.953,00	76,12	1.120.974.331,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.894.106.632,00	5.863.325.272,22	85,05	5.669.812.280,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.069.219.324,00	5.165.149.330,00	85,10	5.328.545.141,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.248.963.536,00	1.815.032.679,00	80,71	2.704.943.693,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	957.825.990,00	729.046.239,00	76,11	768.612.107,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	783.386.060,00	577.251.839,00	73,69	551.179.539,00
Dinas Perhubungan	12.770.170.620,00	10.030.784.385,00	78,55	1.996.790.197,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.200.680.000,00	2.488.270.067,00	59,23	3.903.528.055,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	871.754.765,00	375.620.752,00	43,09	401.754.001,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	565.634.600,00	400.041.503,00	70,72	1.168.870.690,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.737.665.918,00	1.132.127.605,00	65,15	1.359.172.735,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	865.221.785,00	629.746.992,00	72,78	583.194.394,00
Dinas Perikanan	809.830.000,00	531.740.911,00	65,66	710.945.807,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.296.266.640,00	1.010.264.538,00	77,94	1.447.519.681,00
Sekretariat Daerah	16.939.760.180,00	15.036.986.309,00	88,77	24.679.638.171,00
Sekretariat DPRD	14.992.949.400,00	14.047.211.803,00	93,69	16.828.090.142,72
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.845.867.140,00	1.483.470.419,00	52,13	905.757.678,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.680.239.040,00	3.511.074.032,00	75,02	3.658.826.213,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	1.780.025.000,00	1.281.058.083,00	71,97	1.367.694.426,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.705.696.280,00	1.018.413.660,00	59,71	869.426.762,00
Inspektorat Daerah	1.786.067.400,00	688.459.155,00	38,55	549.152.689,00
Kecamatan Tebing Tinggi	2.750.305.816,00	2.450.307.275,00	89,09	2.146.877.305,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	412.126.056,00	300.109.666,00	72,82	361.652.000,00
Kecamatan Rangsang	399.537.385,00	308.681.661,00	77,26	307.273.175,00
Kecamatan Rangsang Barat	318.460.000,00	229.709.148,00	72,13	270.733.710,00
Kecamatan Merbau	696.892.554,00	569.090.000,00	81,66	519.935.350,00
Kecamatan Pulau Merbau	299.591.660,00	231.303.828,00	77,21	256.678.600,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	381.462.320,00	332.422.000,00	87,14	256.170.400,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	241.269.480,00	182.288.000,00	75,55	185.884.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	347.337.718,00	248.996.000,00	71,69	255.402.896,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.104.111.925,00	692.699.000,00	62,74	674.678.000,00
Jumlah	151.303.153.783,00	119.312.275.892,90	78,86	140.564.779.232,22

3. Belanja Pemeliharaan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.168.211.000,00	13.545.203.591,00	95,60	3.221.364.400,00
Dinas Kesehatan	7.030.863.000,00	4.591.650.714,19	65,31	279.350.014,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.694.491.000,00	22.336.838.892,35	90,45	22.113.327.367,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	890.190.000,00	61.700.000,00	6,93	140.100.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80.940.000,00	64.600.000,00	79,81	128.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	95.000.000,00	55.329.714,00	58,24	15.100.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	311.797.150,00	298.835.000,00	95,84	222.120.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan	45.000.000,00	44.998.971,00	100,00	27.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.000.000,00	10.500.000,00	26,25	22.660.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	220.000.000,00	209.575.758,82	95,26	424.472.000,00
Dinas Perhubungan	118.300.000,00	117.435.033,76	99,27	3.497.843.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	96.300.000,00	30.300.000,00	31,46	32.550.000,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	136.592.000,00	19.500.000,00	14,28	126.375.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	254.480.000,00	37.447.800,00	14,72	35.195.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	117.600.000,00	114.590.000,00	97,44	37.830.150,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	223.310.000,00	212.871.143,00	95,33	175.877.000,00
Dinas Perikanan	44.900.000,00	42.800.000,00	95,32	69.090.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	364.000.000,00	225.983.720,78	62,08	20.000.000,00
Sekretariat Daerah	2.548.180.000,00	2.213.367.000,00	86,86	5.034.879.000,00
Sekretariat DPRD	277.500.000,00	274.750.000,00	99,01	684.045.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	166.500.000,00	102.231.887,00	61,40	108.509.645,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	244.000.000,00	101.850.000,00	41,74	333.311.000,00
Badan Pendapatan Daerah	142.000.000,00	62.000.000,00	43,66	66.874.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	118.151.238,00	18.700.000,00	15,83	16.400.000,00
Inspektorat Daerah	90.430.000,00	13.875.963,00	15,34	59.384.302,00
Kecamatan Tebing Tinggi	107.400.000,00	62.308.000,00	58,01	16.500.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	44.600.000,00	33.600.000,00	75,34	6.000.000,00
Kecamatan Rangsang	25.000.000,00	12.000.000,00	48,00	14.200.000,00
Kecamatan Rangsang Barat	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	14.495.000,00
Kecamatan Merbau	12.800.000,00	12.800.000,00	100,00	4.496.000,00
Kecamatan Pulau Merbau	10.000.000,00	9.500.000,00	95,00	16.600.000,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	34.300.000,00	34.300.000,00	100,00	14.000.000,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	16.500.000,00	15.000.000,00	90,91	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	10.000.000,00	8.500.000,00	85,00	4.700.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000,00	7.600.000,00	25,33	0,00
Jumlah	52.846.335.388,00	45.039.543.188,90	85,23	36.983.148.378,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.444.867.000,00	575.713.800,00	39,85	1.116.366.256,00
Dinas Kesehatan	5.110.655.000,00	3.828.787.679,00	74,92	4.721.427.577,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.189.176.000,00	696.363.441,00	58,56	889.455.956,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	884.652.000,00	469.368.989,00	53,06	712.468.626,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	844.357.000,00	489.416.141,00	57,96	1.348.810.367,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	582.285.000,00	313.646.386,00	53,86	310.829.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.009.421.000,00	466.048.800,00	46,17	703.424.010,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	884.248.000,00	536.429.045,00	60,66	597.246.757,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	515.567.000,00	275.289.085,00	53,40	210.992.326,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	711.186.000,00	392.350.888,00	55,17	469.009.945,00
Dinas Perhubungan	549.251.000,00	467.332.497,00	85,09	562.908.839,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.206.822.000,00	824.023.872,00	68,28	1.162.515.000,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	456.198.000,00	200.561.427,00	43,96	427.094.728,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	171.283.000,00	136.459.365,00	79,67	291.564.100,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	225.923.000,00	196.653.000,00	87,04	254.950.411,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	194.849.000,00	188.062.395,00	96,52	125.965.440,00
Dinas Perikanan	579.032.000,00	456.336.400,00	78,81	373.351.948,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	313.830.000,00	262.273.028,00	83,57	547.222.648,00
Sekretariat Daerah	9.032.159.000,00	7.921.034.979,00	87,70	10.090.539.172,00
Sekretariat DPRD	16.657.531.000,00	16.627.669.239,00	99,82	23.684.569.754,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.375.061.000,00	1.567.245.718,00	46,44	1.792.408.194,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.932.054.000,00	1.886.708.718,00	64,35	2.073.265.210,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pendapatan Daerah	840.440.100,00	620.511.200,00	73,83	1.254.952.172,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.898.311.000,00	1.301.267.869,00	68,55	1.320.915.583,00
Inspektorat Daerah	3.868.168.000,00	1.078.344.977,00	27,88	1.325.442.255,00
Kecamatan Tebing Tinggi	157.449.000,00	113.031.960,00	71,79	93.231.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	49.982.000,00	14.875.000,00	29,76	37.125.000,00
Kecamatan Rangsang	60.000.000,00	53.675.000,00	89,46	58.900.000,00
Kecamatan Rangsang Barat	62.077.000,00	58.266.000,00	93,86	58.352.000,00
Kecamatan Merbau	59.800.000,00	31.850.000,00	53,26	60.990.000,00
Kecamatan Pulau Merbau	74.070.000,00	53.190.000,00	71,81	55.700.000,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	59.932.000,00	0,00	0,00	59.560.000,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	50.000.000,00	33.200.000,00	66,40	45.690.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	59.976.000,00	26.950.000,00	44,93	48.020.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	393.725.000,00	208.644.439,00	52,99	352.713.216,00
Jumlah	56.504.337.100,00	42.371.581.337,00	74,99	57.237.977.490,00

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.550.000,00	48.550.000,00	96,04	2.000.000,00
Dinas Kesehatan	40.800.000,00	13.310.000,00	32,62	3.700.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	10.000.000,00	40,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	234.500.000,00	222.500.000,00	94,88	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	325.350.000,00	159.625.000,00	49,06	253.350.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	35.550.000,00	19.700.000,00	55,41	318.400.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.000.000,00	10.000.000,00	71,43	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	43.800.000,00	0,00	0,00	14.022.761,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	549.700.000,00	292.700.000,00	53,25	406.050.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.400.000,00	970.000,00	40,42	1.000.000,00
Dinas Perikanan	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	3.533.000.000,00	3.171.383.048,00	89,76	1.291.500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	32.382.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.248.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi	58.150.000,00	56.200.000,00	96,65	71.800.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	35.200.000,00	35.200.000,00	100,00	37.900.000,00
Kecamatan Rangsang	64.000.000,00	43.600.000,00	68,13	38.500.000,00
Kecamatan Rangsang Barat	44.050.000,00	44.050.000,00	100,00	30.250.000,00
Kecamatan Merbau	25.500.000,00	24.300.000,00	95,29	24.300.000,00
Kecamatan Pulau Merbau	38.850.000,00	38.850.000,00	100,00	19.150.000,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	93.400.000,00	49.900.000,00	53,43	72.850.000,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	25.500.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	31.700.000,00	29.200.000,00	92,11	10.200.000,00
Jumlah	5.457.530.000,00	4.295.538.048,00	78,71	2.790.472.761,00

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	20.948.481.267,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	20.948.481.267,00

7. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.218.541.500,00	20.902.062.110,00	94,07	0,00
Jumlah	22.218.541.500,00	20.902.062.110,00	94,07	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kesehatan	36.912.198.640,00	43.799.657.275,23	118,66	41.081.484.656,39
Jumlah	36.912.198.640,00	43.799.657.275,23	118,66	41.081.484.656,39

6.1.2. a.3. Belanja Bunga

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp922.890.122,00	Rp3.281.890.320,00	(Rp2.359.000.198,00)	(71,88)

Realisasi Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebesar Rp922.890.122,00 atau 46,14% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi belanja bunga mengalami penurunan sebesar Rp2.359.000.198,00 dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.281.890.320,00. Belanja Bunga dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	2.000.000.000,00	922.890.122,00	46,14	3.281.890.320,00
Jumlah	2.000.000.000,00	922.890.122,00	46,14	3.281.890.320,00

Rincian Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) berdasarkan OPD adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.000.000.000,00	922.890.122,00	46,14	3.281.890.320,00
Jumlah	2.000.000.000,00	922.890.122,00	46,14	3.281.890.320,00

6.1.2. a.4. Belanja Hibah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp65.002.572.619,51	Rp45.352.775.246,12	Rp19.649.797.373,39	43,33

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp65.002.572.619,51 atau 80,18% dari anggaran sebesar Rp81.074.951.700,00. Jika dibandingkan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dengan Tahun 2023 realisasi belanja hibah mengalami kenaikan sebesar Rp19.649.797.373,39 dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp45.352.775.246,12 atau 43,33%. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.439.412.600,00	1.484.967.453,01	23,06	9.090.591.212,53
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	65.654.113.100,00	54.553.230.816,50	83,09	35.045.176.033,59
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.252.536.000,00	1.251.831.750,00	99,94	1.217.008.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	7.728.890.000,00	7.712.542.600,00	99,79	0,00
Jumlah	81.074.951.700,00	65.002.572.619,51	80,18	45.352.775.246,12

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp1.484.967.453,01 atau 23,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.439.412.600,00, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp54.553.230.816,50 atau 83,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.654.113.100,00, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada partai politik sebesar Rp1.251.831.750,00 atau 99,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.252.536.000,00 dan Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp7.712.542.600,00 atau 99,79% dari anggaran Rp7.728.890.000,00.

Rincian Belanja Hibah berdasarkan OPD adalah sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.299.500.000,00	1.484.967.453,01	45,01	4.611.472.712,53
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	711.118.500,00
Sekretariat Daerah	3.139.912.600,00	0,00	0,00	3.768.000.000,00
Jumlah	6.439.412.600,00	1.484.967.453,01	23,06	9.090.591.212,53



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.086.925.000,00	1.872.684.417,00	60,67	17.512.447.629,94
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	1.040.004.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	12.546.040.000,00	4.270.926.999,50	34,04	9.666.502.403,65
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	315.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	354.712.500,00	321.300.000,00	90,58	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	300.000.000,00	250.600.000,00	83,53	0,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	650.000.000,00	600.000.000,00	92,31	750.000.000,00
Sekretariat Daerah	3.870.000.000,00	3.314.395.000,00	85,64	6.026.222.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.411.435.600,00	43.803.324.400,00	98,63	50.000.000,00
Jumlah	65.654.113.100,00	54.553.230.816,50	83,09	35.045.176.033,59

3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.252.536.000,00	1.251.831.750,00	99,94	1.217.008.000,00
Jumlah	1.252.536.000,00	1.251.831.750,00	99,94	1.217.008.000,00

4. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan	7.728.890.000,00	7.712.542.600,00	99,79	0,00
Jumlah	7.728.890.000,00	7.712.542.600,00	99,79	0,00

Rincian Belanja Hibah berdasarkan Penerima Hibah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Penerima	Realisasi
Asrama Koramil Kecamatan Merbau	19.926.609,00
Pos Babinsa Desa Tebun	14.926.170,00
Asrama Koramil Kecamatan Tebing Tinggi	23.907.124,50
Pengadilan Negeri Bengkalis	149.829.350,09



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerima	Realisasi
Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti di Desa Gogok Darussalam	233.505.901,31
Asrama Koramil di Kec. Merbau	87.499.218,00
Asrama Koramil di Kec. Tebing Tinggi	80.845.346,63
Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Kep. Meranti di Desa Gogok Darussalam	350.258.851,97
Pagar Kantor POLSEK Rangsang	149.815.032,56
Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti di Desa Gogok Darussalam	194.588.251,09
Pos Babinsa Desa Tebun	179.865.597,86
Jumlah	1.484.967.453,01

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Rincian Penerima Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp54.553.230.816,50 akan dijelaskan pada **Lampiran 1** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Penerima	Realisasi
Partai Amanat Nasional (PAN)	158.047.500,00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	104.880.750,00
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	109.824.000,00
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	74.607.000,00
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	41.652.000,00
Partai DEMOKRAT	92.264.250,00
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	46.439.250,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	119.944.500,00
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	93.697.500,00
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	71.399.250,00
Partai Amanat Nasional (PAN)	46.107.750,00
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	33.796.750,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	51.821.250,00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	45.503.250,00
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	32.506.500,00
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	8.206.250,00
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	29.812.250,00
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	25.931.750,00
Partai DEMOKRAT	35.148.750,00
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	30.241.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerima	Realisasi
Jumlah	1.251.831.750,00

4. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS

Rincian Penerima Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp7.712.542.600,00 akan dijelaskan pada **Lampiran 2** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

6.1.2. a.5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp4.003.002.385,23	Rp10.141.094.940,69	(Rp6.138.092.555,46)	(60,53)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp4.003.002.385,23 atau 24,73% dari anggaran sebesar Rp16.188.573.950,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp6.138.092.555,46 dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp10.141.094.940,69 atau 60,53. Rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut: .

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.631.580.000,00	964.633.917,46	17,13	4.457.426.940,69
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	6.208.200.000,00	0,00	0,00	1.197.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.348.793.950,00	3.038.368.467,77	69,87	4.486.668.000,00
Jumlah	16.188.573.950,00	4.003.002.385,23	24,73	10.141.094.940,69

Peraturan terkait Belanja Bantuan Sosial yakni Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 148/HK/KPTS/II/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Kaum Dhu'afa Tahun Anggaran 2024.
2. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 114/HK/KPTS/I/2024 tentang Penetapan By Name By Address Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dan peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.17 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.18 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.10 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.06 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.05 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.14 tentang Penetapan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik
Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.13 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.02 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.03 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.12 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.11 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.09 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.15 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.01 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.16 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.04 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.08 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:600/KPTS/DPUPR-CKJK/PM-KSM/DAK-FSK.SAN/V/2024/032.07 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tahun Anggaran 2024.

Rincian Belanja Bantuan Sosial berdasarkan OPD adalah sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5.369.080.000,00	702.133.917,46	13,08	3.855.426.940,69
Sekretariat Daerah	262.500.000,00	262.500.000,00	100,00	602.000.000,00
Jumlah	5.631.580.000,00	964.633.917,46	17,13	4.457.426.940,69

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.208.200.000,00	0,00	0,00	1.197.000.000,00
Jumlah	6.208.200.000,00	0,00	0,00	1.197.000.000,00

3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.552.253.950,00	2.519.902.067,77	98,73	480.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.796.540.000,00	518.466.400,00	28,86	3.913.268.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	93.400.000,00
Jumlah	4.348.793.950,00	3.038.368.467,77	69,87	4.486.668.000,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp49.058.644.481,00 termasuk didalamnya belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebanyak 197 SDN dan SMPN dan 22 SD Swasta dan SMS Swasta, 6 BOP Kesenjangan dan 206 BOP PAUD sekolah sebesar Rp20.903.899.710,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp86.536.576.228,42 termasuk dana yang bersumber Dana JKN sebanyak 10 Puskesmas 1 RSUD sebesar Rp49.876.566.650,23. Secara umum Rencana Belanja Barang dan Jasa tidak terealisasi secara keseluruhan karena adanya upaya rasionalisasi dan penghematan disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan Kas di Pemerintah Daerah dan selanjutnya hal tersebut ditempuh dengan prinsip anggaran belanja yang direncanakan adalah pagu tertinggi sehingga tidak harus direalisasikan semua.

6.1.2. b. Belanja Modal

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp176.830.375.813,82	Rp129.280.718.647,45	Rp47.549.657.166,37	36,78

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 mencapai Rp176.830.375.813,82 atau 80,45% dari anggaran sebesar Rp219.815.008.806,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun 2023 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp129.280.718.647,45 mengalami kenaikan sebesar Rp47.549.657.166,37 atau 36,78%.

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.568.572.943,00	44.748.275.224,00	80,53	21.521.539.986,91
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.835.756.313,00	59.476.677.697,29	75,44	34.372.784.234,70
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.088.407.250,00	68.476.709.950,53	83,42	70.281.954.225,84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.270.772.300,00	4.116.234.600,00	125,85	3.104.440.200,00
Belanja Modal Aset Lainnya	51.500.000,00	12.478.342,00	24,23	0,00
Jumlah	219.815.008.806,00	176.830.375.813,82	80,45	129.280.718.647,45

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal dapat dirinci sebagai berikut:

6.1.2. b.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp0,00	Rp0,00	0,00	0,00

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menganggarkan belanja modal tanah Rp0,00, dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

6.1.2. b.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp44.748.275.224,00	Rp21.521.539.986,91	Rp23.226.735.237,09	107,92

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp44.748.275.224,00 atau 80,53% dari anggaran sebesar Rp55.568.572.943,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dari Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2023 sebesar Rp23.226.735.237,00 atau 107,92%. Rincian belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Alat Besar	1.573.594.475,00	99.678.000,00	6,33	227.829.300,00
Belanja Modal Alat Angkutan	18.169.479.760,00	13.182.690.000,00	72,55	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	70.830.000,00	69.421.000,00	98,01	151.741.790,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.738.250.322,00	6.031.331.683,00	77,94	8.206.199.698,91
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	687.375.000,00	477.545.000,00	69,47	366.490.450,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.587.738.987,00	16.848.821.120,00	95,80	1.353.082.500,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	525.000.000,00	510.926.000,00	97,32	3.944.953.000,00
Belanja Modal Komputer	2.970.615.601,00	1.716.497.925,00	57,78	2.350.228.746,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	109.790.000,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	61.776.000,00	52.650.000,00	85,23	8.940.000,00
Belanja Modal Alat Peraga	300.000.000,00	239.975.000,00	79,99	351.750.000,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	132.490.000,00	130.393.640,00	98,42	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	19.460.000,00	21.960.000,00	112,85	10.514.230,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.613.972.470,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.389.545.200,00	2.804.141.990,00	117,35	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.342.417.598,00	2.562.243.866,00	76,66	1.797.647.802,00
Jumlah	55.568.572.943,00	44.748.275.224,00	80,53	21.521.539.986,91

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut OPD sebagai berikut:

1. Belanja Modal Alat Besar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kesehatan	1.332.020.975,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	55.888.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	106.950.000,00
Dinas Perikanan	23.435.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Sekretariat Daerah	100.000.000,00	99.678.000,00	99,68	0,00
Inspektorat Daerah	28.138.500,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang	0,00	0,00	0,00	7.990.800,00
Jumlah	1.573.594.475,00	99.678.000,00	6,33	227.829.300,00

2. Belanja Modal Alat Angkutan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	6.925.000.000,00	6.891.240.000,00	99,51	0,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.107.092.000,00	1.104.000.000,00	99,72	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	129.169.000,00	104.700.000,00	81,06	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.600.000.000,00	1.599.000.000,00	99,94	0,00
Dinas Perhubungan	4.499.940.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	45.308.000,00	36.685.000,00	80,97	0,00
Sekretariat Daerah	3.580.000.000,00	3.341.350.000,00	93,33	0,00
Badan Pendapatan Daerah	75.494.000,00	72.380.000,00	95,88	0,00
Inspektorat Daerah	161.947.890,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.528.870,00	33.335.000,00	73,22	0,00
Jumlah	18.169.479.760,00	13.182.690.000,00	72,55	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kesehatan	22.621.000,00	22.621.000,00	100,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.800.000,00	46.800.000,00	100,00	10.640.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	8.223.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	1.409.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	90.874.090,00
Kecamatan Merbau	0,00	0,00	0,00	20.784.700,00
Jumlah	70.830.000,00	69.421.000,00	98,01	151.741.790,00

4. Belanja Modal Alat Pertanian

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00

5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.902.279.000,00	1.849.703.000,00	97,24	2.487.277.104,00
Dinas Kesehatan	1.023.000.000,00	1.008.500.000,00	98,58	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	442.824.000,00	429.635.610,00	97,02	479.386.729,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	64.733.000,00	34.850.000,00	53,84	25.184.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.100.000,00	7.770.000,00	40,68	19.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	129.738.000,00	116.386.100,00	89,71	189.482.050,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.041.000,00	610.000,00	15,10	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50.000.000,00	49.995.000,00	99,99	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	197.493.800,00	45.240.000,00	22,91	19.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.903.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Dinas Perhubungan	13.250.000,00	13.100.000,00	98,87	
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	128.880.000,00	73.994.000,00	57,41	11.532.000,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	157.190.000,00	41.654.000,00	26,50	45.203.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.472.920,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.795.352,00	4.291.000,00	29,00	478.174.919,91
Dinas Perikanan	13.067.500,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	520.000.000,00	19.910.000,00	3,83	0,00
Sekretariat Daerah	1.779.000.000,00	1.692.135.000,00	95,12	3.072.208.000,00
Sekretariat DPRD	591.098.000,00	500.834.000,00	84,73	1.096.350.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	221.903.000,00	35.893.000,00	16,18	133.295.500,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	79.465.000,00	46.990.000,00	59,13	49.250.000,00
Badan Pendapatan Daerah	17.760.000,00	17.000.000,00	95,72	20.249.550,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.325.000,00	11.325.000,00	100,00	8.616.000,00
Inspektorat Daerah	187.617.750,00	5.472.973,00	2,92	33.685.946,00
Kecamatan Tebing Tinggi	13.200.000,00	10.000.000,00	75,76	19.814.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	17.300.000,00	2.500.000,00	14,45	
Kecamatan Rangsang	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	0,00
Kecamatan Rangsang Barat	18.255.000,00	12.543.000,00	68,71	0,00
Kecamatan Merbau	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	18.370.000,00	0,00	0,00	7.980.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	18.189.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.738.250.322,00	6.031.331.683,00	77,94	8.206.199.698,91

6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	148.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.700.000,00	20.530.000,00	99,18	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	116.550.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	61.200.000,00	0,00	0,00	19.530.450,00
Dinas Perhubungan	8.160.000,00	7.672.000,00	94,02	
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	35.000.000,00	0,00	0,00	62.160.000,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	13.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	20.250.000,00
Sekretariat DPRD	445.100.000,00	422.478.000,00	94,92	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	10.500.000,00	9.800.000,00	93,33	0,00
Kecamatan Rangsang Barat	7.865.000,00	7.865.000,00	100,00	0,00
Jumlah	687.375.000,00	477.545.000,00	69,47	366.490.450,00

7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kesehatan	17.510.933.987,00	16.820.506.120,00	96,06	1.312.425.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00
Sekretariat Daerah	8.688.000,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	33.377.500,00
Kecamatan Tebing Tinggi	59.667.000,00	19.865.000,00	33,29	0,00
Jumlah	17.587.738.987,00	16.848.821.120,00	95,80	1.353.082.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Belanja Modal Alat Laboratorium

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	3.944.953.000,00
Dinas Kesehatan	515.000.000,00	510.926.000,00	99,21	0,00
Dinas Perikanan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	525.000.000,00	510.926.000,00	97,32	3.944.953.000,00

9. Belanja Modal Komputer

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80.650.000,00	68.845.000,00	85,36	146.750.000,00
Dinas Kesehatan	283.400.000,00	48.840.000,00	17,23	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	248.566.937,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	33.553.000,00	28.953.000,00	86,29	25.872.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	147.500.000,00	82.465.000,00	55,91	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	56.574.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49.290.658,00	0,00	0,00	207.847.500,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100.000.000,00	99.559.325,00	99,56	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	479.356.605,00	185.000.000,00	38,59	157.392.390,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.498.000,00	36.547.000,00	80,33	139.200.674,00
Dinas Perhubungan	32.450.000,00	31.550.000,00	97,23	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	363.299.000,00	268.706.600,00	73,96	141.263.895,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	28.620.000,00	16.790.000,00	58,67	78.721.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	42.431.238,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	80.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.743.000,00	5.743.000,00	100,00	6.900.000,00
Sekretariat Daerah	21.927.000,00	21.927.000,00	100,00	216.554.000,00
Sekretariat DPRD	142.120.000,00	139.155.000,00	97,91	175.555.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	202.200.000,00	167.800.000,00	82,99	232.800.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	186.049.000,00	68.150.000,00	36,63	344.830.000,00
Badan Pendapatan Daerah	150.334.000,00	146.304.000,00	97,32	87.364.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	108.675.000,00	108.675.000,00	100,00	12.253.000,00
Inspektorat Daerah	89.588.100,00	0,00	0,00	23.800.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	3.535.350,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	42.194.000,00	41.694.000,00	98,81	0,00
Kecamatan Rangsang	39.504.000,00	6.370.000,00	16,12	0,00
Kecamatan Rangsang Barat	27.096.000,00	15.084.000,00	55,67	14.072.000,00
Kecamatan Merbau	0,00	0,00	0,00	6.751.000,00
Kecamatan Pulau Merbau	38.557.000,00	14.900.000,00	38,64	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	39.786.000,00	9.200.000,00	23,12	0,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	29.673.000,00	29.673.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	38.767.000,00	38.767.000,00	100,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.080.000,00	27.800.000,00	99,00	0,00
Jumlah	2.970.615.601,00	1.716.497.925,00	57,78	2.350.228.746,00

10. Belanja Modal Alat Eksplorasi

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	109.790.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	109.790.000,00

11. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.650.000,00	52.650.000,00	100,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Kecamatan Rangsang Barat	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	9.126.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	61.776.000,00	52.650.000,00	85,23	8.940.000,00

13. Belanja Modal Alat Peraga

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	300.000.000,00	239.975.000,00	79,99	351.750.000,00
Jumlah	300.000.000,00	239.975.000,00	79,99	351.750.000,00

14. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Kecamatan Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00

15. Belanja Modal Rambu-Rambu

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.000.000,00	44.955.000,00	99,90	0,00
Dinas Perhubungan	87.490.000,00	85.438.640,00	97,66	0,00
Jumlah	132.490.000,00	130.393.640,00	98,42	0,00

16. Belanja Modal Peralatan Olahraga

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.100.000,00	4.600.000,00	219,05	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.090.000,00	9.090.000,00	100,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	5.552.230,00
Kecamatan Pulau Merbau	8.270.000,00	8.270.000,00	100,00	4.962.000,00
Jumlah	19.460.000,00	21.960.000,00	112,85	10.514.230,00

17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	2.613.972.470,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.613.972.470,00

18. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan	2.389.545.200,00	2.804.141.990,00	117,35	0,00
Jumlah	2.389.545.200,00	2.804.141.990,00	117,35	0,00

19. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kesehatan	3.342.417.598,00	2.562.243.866,00	76,66	1.797.647.802,00
Jumlah	3.342.417.598,00	2.562.243.866,00	76,66	1.797.647.802,00

6.1.2. b.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp59.476.677.697,29	Rp34.372.784.234,70	Rp25.103.893.462,59	73,03

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan Tahun 2024 sebesar Rp59.476.677.697,29 atau 75,44% dari anggaran sebesar Rp78.835.756.313,00, Realisasi tersebut mengalami kenaikan dari Tahun 2023 sebesar Rp25.103.893.462,59,00 atau 73,03%. Rincian belanja modal gedung dan bangunan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Bangunan Gedung	78.435.756.313,00	59.343.712.697,29	75,66	34.190.670.438,70
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	132.188.396,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	132.965.000,00	33,24	49.925.400,00
Jumlah	78.835.756.313,00	59.476.677.697,29	75,44	34.372.784.234,70

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.425.854.000,00	11.022.137.436,00	96,47	17.172.890.778,70
Dinas Kesehatan	51.280.515.013,00	38.543.631.762,10	75,16	444.623.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.842.900.000,00	2.080.760.606,30	54,15	4.843.506.620,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	180.302.000,00
Dinas Perhubungan	8.418.822.000,00	6.959.235.330,89	82,66	2.021.544.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	49.990.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	1.173.574.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.324.611.000,00	0,00	0,00	7.674.457.040,00
Dinas Perikanan	752.394.300,00	688.322.562,00	91,48	139.210.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	140.000.000,00	49.625.000,00	35,45	137.189.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	353.384.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	150.660.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	78.435.756.313,00	59.343.712.697,29	75,66	34.190.670.438,70



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	132.188.396,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	132.188.396,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kesehatan	400.000.000,00	132.965.000,00	33,24	49.925.400,00
Jumlah	400.000.000,00	132.965.000,00	33,24	49.925.400,00

6.1.2. b.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp68.476.709.950,53	Rp70.281.954.225,84	(Rp1.805.244.275,31)	(2,57)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) Tahun 2024 sebesar Rp68.476.709.950,53 atau 83,42% dari anggaran sebesar Rp82.088.407.250,00, Realisasi tersebut mengalami penurunan dari Tahun 2023 sebesar Rp1.805.244.275,31 atau 2,57%. Rincian belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	71.720.941.250,00	61.298.175.520,50	85,47	68.078.152.692,21
Belanja Modal Bangunan Air	6.224.266.000,00	3.496.943.034,78	56,18	2.203.801.533,63
Belanja Modal Instalasi	3.993.200.000,00	3.681.591.394,95	92,20	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	82.088.407.250,00	68.476.709.950,23	83,42	70.281.954.225,84

Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD sebagai berikut:

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.430.377.250,00	58.613.755.245,84	89,58	62.013.135.283,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	6.290.564.000,00	2.684.420.274,96	42,67	6.065.017.409,21



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup				
Jumlah	71.720.941.250,00	61.298.175.520,80	85,47	68.078.152.692,21

2. Belanja Modal Bangunan Air

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.287.220.000,00	2.652.445.689,36	80,69	1.402.326.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2.937.046.000,00	844.497.345,42	28,75	801.475.533,63
Jumlah	6.224.266.000,00	3.496.943.034,78	56,18	2.203.801.533,63

3. Belanja Modal Instalasi

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.993.200.000,00	3.681.591.394,95	92,20	0,00
Jumlah	3.993.200.000,00	3.681.591.394,95	92,20	0,00

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kesehatan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00

6.1.2. b.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp4.116.234.600,00	Rp3.104.440.200,00	Rp1.011.794.400,00	32,59

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp4.116.234.600,00 atau 125,85,00% dari anggaran sebesar Rp3.270.772.300,00, Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.011.794.400,00 dari Tahun 2023 sebesar Rp3.104.440.200,00 atau 32,59% . Rincian belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	366.745.000,00	359.313.000,00	97,97	548.540.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak	166.500,00	166.500,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Kesenian/Kebudayaan /Olahraga				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	2.555.900.200,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	2.903.860.800,00	3.756.755.100,00	129,37	0,00
Jumlah	3.270.772.300,00	4.116.234.600,00	125,85	3.104.440.200,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.560.000,00	4.560.000,00	100,00	319.624.000,00
Dinas Perhubungan				99.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	171.000.000,00	170.000.000,00	99,42	0,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	104.928.000,00	99.900.000,00	95,21	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80.000.000,00	79.925.000,00	99,91	224.795.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi	4.928.000,00	4.928.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	0,00	0,00	0,00	4.022.000,00
Kecamatan Rangsang Barat	1.329.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	366.745.000,00	359.313.000,00	97,97	548.540.000,00

2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	166.500,00	166.500,00	100,00	0,00
Jumlah	166.500,00	166.500,00	100,00	0,00

3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	2.555.900.200,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.555.900.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan	2.903.860.800,00	3.756.755.100,00	129,37	0,00
Jumlah	2.903.860.800,00	3.756.755.100,00	129,37	0,00

Pelampauan realisasi belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS disebabkan adanya perubahan anggaran yang dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, tetapi hingga berakhirnya tahun anggaran tidak dilakukan pergeseran terhadap APBD Dinas Pendidikan.

6.1.2. b.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp12.478.342,00	Rp0,00	Rp12.478.342,00	100,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp12.478.342,00 atau 24,23% dari anggaran sebesar Rp51.500.000,00. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000,00	12.478.342,00	24,96	0,00
Jumlah	51.500.000,00	12.478.342,00	24,23	0,00

Rincian berdasarkan OPD adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kesehatan	50.000.000,00	12.478.342,00	24,96	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	51.500.000,00	12.478.342,00	24,23	0,00

6.1.2. c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp912.403.803,00	Rp746.785.200,00	Rp165.618.603,00	22,18



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang. Belanja tidak terduga digunakan antara lain untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja tidak terduga Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp912.403.803,00 atau 91,24% dari anggaran Rp1.000.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Kecamatan Dan Bantuan Keuangan Khusus Rumah Layak Huni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.809.832,00 dan realisasi belanja ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 887.584.000,00. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga berdasarkan OPD sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.000.000.000,00	912.403.803,00	91,24	746.785.200,00
Jumlah	1.000.000.000,00	912.403.803,00	91,24	746.785.200,00

6.1.2. d. Belanja Transfer

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp135.404.042.000,00	Rp161.183.742.900,00	(Rp25.779.700.900,00)	(15,99)

Belanja transfer merupakan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa. Realisasi belanja transfer Tahun 2024 sebesar Rp135.404.042.000,00 atau 83,78% dari anggaran sebesar Rp161.627.382,236,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan dari Tahun 2023 sebesar Rp25.779.700.900,00 atau 15,99%. Rincian Belanja transfer sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.980.965.900,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	159.646.416.336,00	135.404.042.000,00	84,81	161.183.742.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Jumlah	161.627.382.236,00	135.404.042.000,00	83,78	161.183.742.900,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp135.404.042.000,00 atau 84,81% dari anggaran sebesar Rp159.646.416.336,00. Terdiri dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp38.164.000.000,00 dan Dana Desa bersumber dari APBN sebesar Rp97.240.042.000,00. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp1.980.965.900,00. Rincian Belanja Transfer menurut OPD sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.980.965.900,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.980.965.900,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terealisasinya Belanja bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa merujuk kepada petunjuk teknis perhitungan bagi hasil pajak dan retribusi ke Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehubungan hal tersebut belum ditetapkan maka penyaluran belum bisa dilakukan.

2. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	159.646.416.336,00	135.404.042.000,00	84,81	161.183.742.900,00
Jumlah	159.646.416.336,00	135.404.042.000,00	84,81	161.183.742.900,00

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota Kepada Desa	97.240.041.936,00	97.240.042.000,00	100,00	98.162.430.900,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	62.406.374.400,00	38.164.000.000,00	61,15	63.021.312.000,00
Jumlah	159.646.416.336,00	135.404.042.000,00	84,81	161.183.742.900,00

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, diberikan kepada 96 Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan rincian alokasi dan realisasi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 3** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

6.1.3. Surplus/(Defisit)

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp13.682.103.365,50	Rp37.694.391.288,80	(Rp24.012.287.923,30)	(63,70)

Surplus APBD Tahun 2024 sebesar Rp13.682.103.365,50 merupakan selisih jumlah pendapatan daerah dibandingkan dengan jumlah belanja daerah. Realisasi pendapatan daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.139.908.805.098,36 sementara realisasi belanja daerah dan transfer Tahun 2024 sebesar Rp1.126.226.701.732,86.

6.1.4. Pembiayaan

6.1.4.a Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp9.657.327.481,76	Rp12.212.900.270,04	(Rp2.555.572.788,28)	(20,93)

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya berdasarkan LHP BPK-RI Nomor: 17.A/LHP/XVIII.PEK/05/2024 Tanggal 20 Mei 2024 sebesar Rp9.673.484.108,76. Terhadap Penerimaan Pembiayaan dilakukan koreksi kesalahan pembukuan tahun-tahun sebelumnya atas SILPA sebesar Rp16.156.013,00 dan Sisa Kas atas BOS PAUD Swasta pada tahun sebelumnya sebesar Rp614. Penerimaan Pembiayaan Daerah diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Penggunaan SILPA	63.511.323.400,00	9.657.327.481,76	15,21	12.212.900.270,04
Jumlah	63.511.323.400,00	9.657.327.481,76	15,21	12.212.900.270,04

6.1.4.b Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp20.775.896.319,38	Rp40.233.807.450,08	(Rp19.457.911.130,70)	(48,36)

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank Riau Kepri Syariah periode Tahun 2024.

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	21.000.000.000,00	20.775.896.319,38	98,93	35.233.807.450,08
Jumlah	21.000.000.000,00	20.775.896.319,38	98,93	40.233.807.450,08

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank terealisasi sebesar Rp20.775.896.319,38 atau 98,93% dari anggaran Rp21.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank mengalami penurunan sebesar Rp14.457.911.130,70 atau 41,03% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp35.233.807.450,08.

6.1.5. SILPA

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Rp2.563.534.527,88	Rp9.673.484.108,76	(Rp7.109.949.580,88)	(73,50)

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Jumlah SILPA Tahun 2024 Sebesar Rp2.563.534.527,88 merupakan penjumlahan surplus/ (defisit) dengan pembiayaan netto. Surplus (Defisit) Tahun 2024 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp13.682.103.365,50 dan Pembiayaan Netto sebesar minus Rp11.118.568.837,62. SiLPA Tahun 2024 Rp2.563.534.527,88 tersebut mengalami penurunan Rp7.109.949.580,88 atau 73,50% dari Tahun 2023 sebesar Rp9.673.484.108,76.

SILPA Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus/Defisit Rp 13.682.103.365,50
- Pembiayaan Netto Rp(11.118.568.837,62)
- Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 2.563.534.527,88

SiLPA Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp2.563.534.527,88 mengalami penurunan sebesar Rp785.845.815,40 dari Saldo Akhir Kas Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.349.380.343,28, dengan rincian Kas Neraca sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024
Kas di Kasda	79.033.064,53
Kas BLUD	1.246.854.896,35
Kas BOSP	96.636.668,00
Kas Dana BOK Puskesmas	982.620.625,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	156.551.674,00
Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas Lainnya	787.683.415,40
Jumlah	3.349.380.343,28

Selisih antara SiLPA dan Kas Neraca dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2024
Bertambah Utang PFK:	
Utang PFK BOS	785.845.815,40
Jumlah	785.845.815,40



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.2 Penjelasan Pos-Pos Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 dan Tahun 2023. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan komparatif Tahun 2024 dan 2023. Penyajian komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilakukan dari Tahun 2024 pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

6.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
9.673.484.108,76	12.212.900.270,04	(2.539.416.161,28)	(20,79)

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.673.484.108,76 yang menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal di Tahun 2024.

6.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
9.657.327.481,76	12.212.900.270,04	(2.555.572.788,28)	(20,93)

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, yaitu sebesar Rp9.673.484.108,76. Terdapat selisih sebesar Rp16.156.627,00 yang merupakan koreksi kesalahan pembukuan tahun-tahun sebelumnya atas SILPA-LRA.

6.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
2.563.534.527,88	9.673.484.108,76	(7.109.949.580,88)	(73,50)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2.563.534.527,88 di Tahun 2024 dan sebesar Rp9.673.484.108,76 di Tahun 2023, yang berasal dari:

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
a	Pendapatan Daerah	1.139.908.805.098,36	1.180.122.990.490,32	(40.214.185.391,96)	(3,41)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
b	Belanja Daerah	1.126.226.701.732,86	1.142.428.599.201,52	(16.201.897.468,66)	(1,42)
c	Surplus/Defisit	13.682.103.365,50	37.694.391.288,80	(24.012.287.923,30)	(63,70)
d	Penerimaan Pembiayaan				
	Penggunaan SILPA	9.657.327.481,76	12.212.900.270,04	(2.555.572.788,28)	(20,93)
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Pengeluaran Pembiayaan				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100)
	Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bank	20.775.896.319,38	35.233.807.450,08	(14.457.911.130,70)	(41,03)
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	2.563.534.527,88	9.673.484.108,76	(7.109.949.580,88)	(73,50)

6.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
(16.156.627,00)	0,00	(16.156.627,00)	(100,00)

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan 2024 sebesar minus Rp16.156.627,00 yang merupakan koreksi kesalahan pembukuan tahun-tahun sebelumnya atas SILPA-LRA sebesar minus Rp16.156.013,00 dan koreksi kurang atas Kas di Bendahara BOS yang merupakan sisa Kas atas BOS PAUD Swasta tahun-tahun sebelumnya sebesar minus Rp614,00.

6.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
2.563.534.527,88	9.673.484.108,76	(7.109.949.580,88)	(73,50)

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.563.534.527,88 dan Rp9.673.484.108,76 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
a	Saldo Anggaran Lebih Awal	9.673.484.108,76	12.212.900.270,04	(2.539.416.161,28)	(20,79)
b	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	9.657.327.481,76	12.212.900.270,04	(2.555.572.788,28)	(20,93)
c	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	2.563.534.527,88	9.673.484.108,76	(7.109.949.580,88)	(73,50)
d	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(16.156.627,00)	0,00	(16.156.627,00)	(100,00)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	2.563.534.527,88	9.673.484.108,76	(7.109.949.580,88)	(73,50)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca pada Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2023 menggambarkan posisi keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti, Pada tahun 2015 telah dimulai penerapan basis akrual sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

6.3.1. Aset

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
2.629.728.490.250,54	2.643.689.798.555,68	(13.961.308.305,14)	(0,53)

Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.629.728.490.250,54 dan Rp2.643.689.798.555,68 Terjadi Penurunan Nilai Aset Rp13.961.308.305,14 dan 0,53% terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Aset Lancar	62.507.487.237,83	32.505.708.710,05	30.001.778.527,79	92,30
Investasi Jangka Panjang	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00	0,00
Aset Tetap	2.376.392.892.640,87	2.340.079.942.089,83	36.312.950.551,03	1,55
Aset Lainnya	125.828.110.371,84	206.104.147.755,80	(80.276.037.383,96)	(38,95)
Jumlah	2.629.728.490.250,54	2.643.689.798.555,68	(13.961.308.305,14)	(0,53)

6.3.1.a. Aset Lancar

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
62.507.487.237,83	32.505.708.710,05	30.001.778.527,79	92,30

Aset Lancar merupakan kelompok sumber daya ekonomi yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, artinya Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Non Lancar.

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp62.507.487.237,83 dan Rp32.505.708.710,05. Terjadi Kenaikan Rp30.001.778.527,79 atau 92,30 % terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Kas di Kas Daerah	79.033.064,53	7.797.367.769,45	(7.718.334.704,92)	(98,99)
Kas di Bendahara Pengeluaran	156.551.674,00	191.798.271,00	(35.246.597,00)	(18,38)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	17.763.100,00	(17.763.100,00)	(100,00)
Kas di BLUD	1.246.854.896,35	712.563.260,31	534.291.636,04	74,98
Kas Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	785.845.815,40	328.060.815,40	457.785.000,00	139,54
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	98.474.268,00	1.745.740,00	96.728.528,00	5.540,83
Kas Dana BOK Puskesmas	982.620.625,00	936.089.955,00	46.530.670,00	4,97
Investasi jangka pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak	27.027.122.389,92	24.624.015.548,92	2.403.106.841,00	9,76
Piutang Retribusi	2.136.467.143,00	2.083.813.589,00	52.653.554,00	2,53
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain(Lain PAD yang Sah	100.274.127,00	280.430.800,00	(180.156.673,00)	(64,24)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	30.751.329.088,00	0,00	30.751.329.088,00	100,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(21.811.438.354,84)	(20.495.301.737,59)	(1.316.136.617,25)	6,42
Beban Dibayar Dimuka	4.486.851.564,00	0,00	4.486.851.564,00	100,00
Persediaan	16.467.500.937,47	16.027.361.598,56	440.139.338,91	2,75
RK SPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	62.507.487.237,83	32.505.708.710,05	30.001.778.527,79	92,30

6.3.1.a.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
79.033.064,53	7.797.367.769,45	(7.718.334.704,92)	(98,99)

Kas di Kas Daerah pada Kabupaten Kepulauan Meranti per 31 Desember 2024 senilai Rp79.033.064,53 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp7.797.367.769,45 maka mengalami penurunan senilai Rp7.718.334.704,92 atau sebesar 98,99%. Akun ini merupakan Kas Daerah per 31 Desember 2024, nilai masing-masing pada rekening Kas Daerah terinci sebagai berikut:

Nama Bank	Nomor Rekening	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
BANK RIAU KEPRI	1050210376	79.033.064,53	7.714.372.970,45	(7.635.339.905,92)	(98,98)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama Bank	Nomor Rekening	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
PENAMPUNGAN BPHTB PEMDA KEPULAUAN MERANTI	17101000338305	0,00	82.994.799,00	(82.994.799,00)	(100,00)
Jumlah Kas di Kas Daerah		79.033.064,53	7.797.367.769,45	(7.718.334.704,92)	(98,99)

Penjelasan masing-masing rekening tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank Riau Kepri (BRK)
Rekening Bank Riau Kepri No.105-02-10376 adalah rekening umum Kas Daerah yang digunakan untuk hampir keseluruhan transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Rekening nomor 0171-01-000338-305 adalah rekening penampungan yang digunakan untuk menerima pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2024 adalah hasil rekonsiliasi antara BUD dengan Bank Riau Kepri. Pada Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat transfer Dana Bagi Hasil (DBH) yang dihitung sebagai piutang pada saat Triwulan IV Tahun 2024.

6.3.1.a.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
156.551.674,00	191.798.271,00	(35.246.597,00)	(18,38)

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kabupaten Kepulauan Meranti per 31 Desember 2024 senilai Rp156.551.674,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp191.798.271,00 maka mengalami penurunan senilai minus Rp35.246.597,00 atau sebesar 18,38%. Akun ini merupakan saldo kas yang masih dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	127,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	443.980,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	23.088.315,00
Sekretariat Daerah	156.107.694,00	168.709.829,00
Jumlah	156.551.674,00	191.798.271,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp156.551.674,00 merupakan sisa UP yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp156.551.674,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut rincian sisa UP yang belum di setorkan dan masih ada di Rekening Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal penyetoran di Tahun 2024 di masing-masing OPD:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Tgl. Penyetoran UYHD 2024
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	443.980,00	0,00	6 Januari 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	23.088.315,00	-
Sekretariat Daerah	156.107.694,00	168.709.829,00	3 Januari 2025 dan 9 Januari 2025
Jumlah	156.551.674,00	191.798.271,00	

Berikut rincian Jasa Giro di masing-masing OPD:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	0,00	127,00
Jumlah	0,00	127,00

6.3.1.a.3. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	17.763.100,00	(17.763.100,00)	(100,00)

Kas di Bendahara Penerimaan pada Kabupaten Kepulauan Meranti per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp17.763.100,00 maka mengalami penurunan senilai Rp17.763.100,00 atau sebesar 100,00%. Akun ini merupakan saldo kas yang masih dalam Pengelolaan Bendahara Penerimaan. Untuk tahun 2024 dan 2023 memiliki saldo masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp17.763.100,00. Berikut rincian Kas di Bendahara Penerimaan:

OPD	Rincian Objek Penerimaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	384.000,00
Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir	0,00	11.346.000,00
	Retribusi Pelayanan Pelabuhan	0,00	6.033.100,00
Jumlah		0,00	17.763.100,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan 2023 Rp17.763.100,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.3.1.a.4. Kas di BLUD

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1.246.854.896,35	712.563.260,31	534.291.636,04	74,98

Kas di BLUD pada Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Laporan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.246.854.896,35 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp712.563.260,31 maka mengalami peningkatan senilai Rp534.291.636,04 atau sebesar 74,98%. Akun ini merupakan saldo Kas yang masih dalam pengelolaan Bendahara BLUD pada UPT RSUD dan PUSKESMAS per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp1.246.854.896,35 dan Tahun 2023 sebesar Rp712.563.260,31. Kas di BLUD tersebut dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional di BLUD-RSUD dan BLUD-Puskesmas Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 171/HK/KPTS/III/2015 Tentang Penetapan Status Penuh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kebijakan Akuntansi untuk BLUD pada RSUD maupun Puskesmas mengacu pada Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Rincian kas di BLUD sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di BLUD RSUD	367.197.531,35	451.766.016,31
Puskesmas Alah Air	1.223.867,00	1.053,00
Puskesmas Alai	78.444.372,00	490,00
Puskesmas Selatpanjang	488.800.082,00	205.526.470,00
Puskesmas Kedabu Rapat	1.456,00	10.397.660,00
Puskesmas Anak Setatah	1.301,00	1.765,00
Puskesmas Pulau Merbau	201.405,00	965,00
Puskesmas Bandul	38,00	48,00
Puskesmas Tanjung Samak	216.341.661,00	3.070,00
Puskesmas Teluk Belitung	94.640.003,00	44.857.452,00
Puskesmas Sungai Tohor	3.180,00	8.271,00
Jumlah	1.246.854.896,35	712.563.260,31

Adapun Rincian Kas di BLUD RSUD Sebagai Berikut :

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD	46.805,00	297.023.462,81
Rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	52.338.361,00	145.248.510,50
Kas Di tangan Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	4.028.347,00	9.494.043,00
Kas Umum BLUD	310.784.018,35	0,00
Jumlah	367.197.531,35	451.766.016,31



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.3.1.a.5. Kas Dana Bos

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Kas Dana BOS pada Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 maka tidak mengalami kenaikan/ penurunan pada tahun 2024. Kas Dana Bos dicatat di akun Kas Dana BOSP berdasarkan Permendagri Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah) yang terdiri dari Pengelolaan Dana BOS, Pengelolaan Dana BOP PAUD, dan Pengelolaan Dana BOS Kesetaraan.

6.3.1.a.6. Kas Dana Kapitalisasi pada FKTP

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada Kabupaten Kepulauan Meranti per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 maka tidak mengalami kenaikan/ penurunan.

6.3.1.a.7. Kas Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
785.845.815,40	328.060.815,40	457.785.000,00	139,54

Kas Lainnya pada Kabupaten Kepulauan Meranti per 31 Desember 2024 senilai Rp785.845.815,40 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp328.060.815,40 maka mengalami peningkatan senilai Rp457.785.000,00 atau sebesar 139,54%. Akun ini merupakan saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp Rp785.845.815,40 dan Rp328.060.815,40. Kas lainnya pada Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan saldo Utang Pfk pada rekening Kas Daerah Penerimaan BUD. Rekening Bank Riau Kepri No. 105-02-10393 adalah rekening untuk menampung dana Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang berasal dari Belanja Pegawai Tidak Langsung (BTL), selain pemotongan PPh-21 Sebesar Rp785.845.815,40 yang berada pada OPD BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.3.1.a.8. Setara Kas

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Kas Setara Kas pada Kabupaten Kepulauan Meranti per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00 maka tidak mengalami kenaikan/ penurunan. Akun ini merupakan saldo Setara Kas berupa Deposito per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.3.1.a.9. Kas Dana BOSP

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
98.474.268,00	1.745.740,00	96.728.528,00	5540,83

Kas Dana BOSP pada Kabupaten Kepulauan Meranti per 31 Desember 2024 senilai Rp98.474.268,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.745.740,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp96.728.528,00 atau sebesar 5540,83 %. Kas Dana BOSP merupakan akun yang merupakan posisi Saldo Kas pada Bendahara BOS di masing-masing sekolah SD Negeri, SMP Negeri, SLB SD Negeri, dan SLB SMP Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saldo kas Dana Bos per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp98.474.268,00 dan Rp1.745.740,00. Nilai Kas dana BOS Rp98.474.268,00 dengan jumlah satuan pendidikan sebanyak 206 (dua ratus enam) dengan rincian SD Negeri sebanyak 164 Sekolah dan SMP Negeri sebanyak 42 Sekolah, jumlah satuan PAUD sebanyak 204 (dua ratus empat) dengan rincian PAUD Negeri sebanyak 10 PAUD dan PAUD Swasta sebanyak 188 PAUD dan satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri berjumlah 1 dan satuan pendidikan kesetaraan Swasta sebanyak 5 (Lima) per 31 Desember 2024.

Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2023 dan Permendagri Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah). Pengelolaan Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah) terdiri dari Pengelolaan Dana BOS, Pengelolaan Dana BOP PAUD, dan Pengelolaan Dana BOS Kesetaraan. Adapun Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS Tahun 2024 pada Sekolah dapat di lihat pada **Lampiran 4**
Rincian sisa kas BOSP per Jenis dapat di rincikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
BOP PAUD SWASTA	0,00	614,00	(614,00)	(100,00)
SD REGULER	57.260.646,00	968.271,00	56.292.375,00	5.813,70
SMP REGULER	41.213.622,00	776.855,00	40.436.767,00	5.205,19
SD KINERJA	0,00	0,00	0,00	0,00
SMP KINERJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	98.474.268,00	1.745.740,00	96.728.528,00	5540,83

6.3.1.a.10. Kas Dana BOK Puskesmas

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
982.620.625,00	936.089.955,00	46.530.670,00	4,97

Kas Dana BOK pada Kabupaten Kepulauan Meranti per 31 Desember 2024 senilai Rp982.620.625,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp936.089.955,00 maka mengalami peningkatan senilai Rp46.530.670,00 atau sebesar 4,97%. Adapun Kas BOK dapat di lihat pada rincian sebagai berikut :

PUSKESMAS	BANK	NO REKENING	SISA KAS 2024	SISA KAS 2023
SELATPANJANG	BNI	1590083474	127.667.382,00	168.189.387,00
ALAHAIR	BNI	1590083565	35.816.600,00	143.270.649,00
ALAI	BNI	1590083543	54.464.140,00	43.821.734,00
ANAK SETATAH	BNI	1590083521	71.444.960,00	151.827.691,00
KEDABURAPAT	BNI	1590083509	108.100.993,00	100.306.376,00
TANJUNG SAMAK	BNI	1590083554	199.579.232,00	84.684.084,00
PULAU MERBAU	BNI	1590083510	114.174.047,00	25.897,00
TELUK BELITUNG	BNI	1590083532	101.097.054,00	81.160.082,00
BANDUL	BNI	1590083496	84.012.996,00	69.987.904,00
SUNGAI TOHOR	BNI	1590083485	86.263.221,00	92.816.151,00
JUMLAH			982.620.625,00	936.089.955,00

6.3.1.a.11. Investasi Jangka Pendek

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Akun ini merupakan saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang Daerah dan Penyisihan Piutang Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
38.203.754.393,09	6.492.958.200,33	31.710.796.192,76	488,39

Saldo Piutang Daerah dan Penyisihan Piutang Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.203.754.393,09 dan per 31 Desember 2023 Rp6.492.958.200,33. Terjadi kenaikan Piutang Daerah dan Penyisihan Piutang Daerah Rp31.710.796.192,76 dan 488,39%. Nilai tersebut merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dari nilai bruto sebesar Rp60.015.192.747,92 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp21.811.438.354,84, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak	27.027.122.389,92	24.624.015.548,92	2.403.106.841,00	9,76
Piutang Retribusi	2.136.467.143,00	2.083.813.589,00	52.653.554,00	2,53
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	100.274.127,00	280.430.800,00	(180.156.673,00)	(64,24)
Piutang Transfer Antar Daerah	30.751.329.088,00	0,00	30.751.329.088,00	100,00
Penyisihan Piutang	(21.811.438.354,84)	(20.495.301.737,59)	(1.316.136.617,25)	6,42
Jumlah	38.203.754.393,09	6.492.958.200,33	31.710.796.192,76	488,39

6.3.1.a.12. Piutang Pajak

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
27.027.122.389,92	24.624.015.548,92	2.403.106.841,00	9,76

Akun Piutang Pajak merupakan selisih antara nilai Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak Restoran	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Reklame	347.316.192,00	232.866.900,00	114.449.292,00	49,15
Piutang Pajak Penerangan Jalan	218.330.809,00	218.330.809,00	0,00	0,00
Piutang Pajak	106.932.860,00	106.932.860,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Air Tanah				
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.353.642.528,92	24.064.984.979,92	2.288.657.549,00	9,51
Jumlah	27.027.122.389,92	24.624.015.548,92	2.403.106.841,00	9,76

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.027.122.389,92. Piutang Pajak Daerah tersebut terdapat pada Badan Pendapatan Daerah.

Saldo Piutang Pajak Restoran sebesar Rp900.000,00 merupakan tagihan Piutang sejak tahun 2014. Saldo Piutang Pajak Air Tanah Rp106.932.860,00 dan Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN merupakan tagihan Piutang sejak 2015 sebesar Rp218.330.809,00.

Saldo Piutang Pajak PBB-P2 Tahun 2024 sebesar Rp26.353.642.528,92 dan Tahun 2023 sebesar Rp24.064.984.979,92, terjadi kenaikan Rp2.288.657.549,00.

Saldo Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 sebesar Rp347.316.192,00 dan Tahun 2023 Rp232.866.900,00, terjadi kenaikan Rp114.449.292,00.

6.3.1.a.13. Piutang Retribusi

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
2.136.467.143,00	2.083.813.589,00	52.653.554,00	2,53

Akun Piutang Retribusi merupakan selisih antara nilai Retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh objek pajak termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan Piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	38.820.500,00	0,00	38.820.000,00	100,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	39.449.304,00	0,00	39.449.304,00	100,00
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	61.752.900,00	87.369.150,00	(25.616.250,00)	(29,32)
Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1.855.444.439,00	1.855.444.439,00	0,00	0,00
Jumlah	2.136.467.143,00	2.083.813.589,00	52.653.554,00	2,53

Saldo Piutang Retribusi Tahun 2024 Rp2.136.467.143,00 dan 2023 Rp2.083.813.589,00 Terjadi kenaikan Piutang Retribusi Jasa Umum Rp52.653.554,00 dan 2,53%.

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Tahun 2024 Rp1.855.444.439,00 dan 2023 Rp1.855.444.439,00 tidak terjadi kenaikan/ penurunan Piutang Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024.

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2024 Rp38.820.500,00 dan 2023 Rp0,00 Terjadi kenaikan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rp38.820.500,00 dan 100,00%.

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling Tahun 2024 Rp39.449.304,00 dan 2023 Rp0,00 Terjadi kenaikan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling Rp39.449.304,00 dan 100,00%.

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2024 Rp141.000.000,00 dan 2023 Rp141.000.000,00 tidak terjadi kenaikan/ penurunan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp38.820.000,00 dan 100,00%.

Saldo Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2024 Rp61.752.900,00 dan 2023 Rp87.369.150,00 terjadi penurunan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp25.616.250,00 dan 29,32% di karenakan adanya pelunasan/Pembayaran atas piutang tersebut.

6.3.1.a.14. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akun ini merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.3.1.a.15. PiutangLain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
100.274.127,00	280.430.800,00	(180.156.673,00)	(64,24)

Akun ini merupakan saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp100.274.127,00 dan Rp280.430.800,00 Terjadi Penurunan Pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Rp180.156.673,00 atau 64,24%.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	5.000,00	172.433.400,00	(172.428.400,00)	(100,00)
BLUD Puskesmas dan RSUD	0,00	2.187.400,00	(2.187.400,00)	(100,00)
Badan Pengelola Keuangan Daerah	100.269.127,00	105.810.000,00	(5.540.873,00)	(5,24)
Jumlah	100.274.127,00	280.430.800,00	(180.156.673,00)	(64,24)

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp100.274.127,00 merupakan Piutang Dana Bergulir.

Pada Dinas Kesehatan Rp5.000,00 merupakan Piutang Jasa Giro.

6.3.1.a.16. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Akun ini merupakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.3.1.a.17. Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
30.751.329.088,00	0,00	30.751.329.088,00	100,00

Akun ini merupakan saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp30.751.329.088,00 dan Rp0,00. Pada Tahun 2024 TW IV Berdasarkan SK Gubernur Riau No 357/5/2025 Terdapat Piutang Transfer Antar Daerah dari Provinsi Riau Dengan Rincian Sebagai Berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.823.410.445,00	0,00	100,00	100,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.514.169.077,00	0,00	100,00	100,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.515.805.580,00	0,00	100,00	100,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	589.943.986,00	0,00	100,00	100,00
Piutang Bantuan Keuangan Provinsi	308.000.000,00	0,00	100,00	100,00
Jumlah	30.751.329.088,00	0,00	100,00	100,00

6.3.1.a.18. Piutang Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Akun ini merupakan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.3.1.a.19. Penyisihan Piutang

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
(21.811.438.354,84)	(20.495.301.737,59)	(1.316.136.617,25)	6,42

Akun Penyisihan Piutang merupakan nilai Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah dan Piutang Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari Wajib Pajak dengan perhitungan berdasarkan kualitas umur Piutang.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.811.438.354,84 dan Rp20.495.301.737,59. Penyisihan Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah daerah dihitung berdasarkan klasifikasi Piutang yang terdiri dari 4 (empat) kriteria yaitu kriteria lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Piutang Pajak Daerah yang dilakukan Penyisihan terhadap Pajak Air Tanah, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Non PLN, Pajak PBB-P2 dan Pajak Reklame. Penyisihan Retribusi Daerah terhadap Retribusi Pelayanan Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir dan Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah yang di lakukan penyisihan terhadap JKN,



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BPJS dan Dana Bergulir. Penyisihan terhadap 3(tiga) kelompok Pendapatan Asli Daerah tersebut, dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2023		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Pajak Air Tanah	(106.932.860,00)	0,00	0,00	(106.932.860,00)
Pajak Restoran	(900.000,00)	0,00	0,00	(900.000,00)
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	(218.330.809,00)	0,00	0,00	(218.330.809,00)
Pajak PBB P2	(17.985.295.190,59)	(1.550.355.986,91)	(423.877.984,73)	(19.111.773.192,77)
Pajak Reklame	(15.814.017,00)	(34.980.748,46)	(418.922,50)	(50.375.842,96)
Retribusi Izin gangguan (HO)	(1.855.444.439,00)	0,00	0,00	(1.855.444.439,00)
Retribusi Pelayanan Parkir	(141.000.000,00)	0,00	0,00	(141.000.000,00)
Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(60.899.025,00)	0,00	(2.561.625,00)	(58.337.400,00)
JKN (DINKES)	(4.656.657,00)	(2.932.050,00)	(4.656.657,00)	(2.932.050,00)
BPJS (RSUD)	(218.740,00)	(11.842.820,03)	(218.740,00)	(11.842.820,03)
Transfer Antar Daerah	0,00	(153.756.645,44)	0,00	(153.756.645,44)
Dana Bergulir	(105.810.000,00)	(2.295,64)	(6.000.000,00)	(99.812.295,64)
Jumlah	(20.495.301.737,59)	(1.753.870.546,48)	(437.733.929,23)	(21.811.438.354,84)

Rincian Penyisihan Piutang 2024 sebagai berikut:

Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Nilai Bersih setelah penyisihan
Piutang Pajak			
Pajak Air Tanah			
Tahun 2014	106.932.860,00	(106.932.860,00)	0,00
Pajak Restoran			
Tahun 2015	900.000,00	(900.000,00)	0,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN			
Tahun 2015	218.330.809,00	(218.330.809,00)	0,00
Pajak PBB P2			
<Tahun 2015	12.236.197.806,92	(12.236.197.806,92)	0,00
Tahun 2016	1.053.474.116,00	(1.053.474.116,00)	0,00
Tahun 2017	1.029.759.711,00	(1.029.759.711,00)	0,00
Tahun 2018	1.419.380.047,00	(1.419.380.047,00)	0,00
Tahun 2019	1.467.795.497,00	(1.467.795.497,00)	0,00
Tahun 2020	1.550.046.695,00	(775.023.347,50)	775.023.347,50
Tahun 2021	1.604.511.266,00	(802.255.633,00)	802.255.633,00
Tahun 2022	1.457.625.124,00	(145.762.512,40)	1.311.862.611,60
Tahun 2023	1.678.423.796,00	(167.842.379,60)	1.510.581.416,40
Tahun 2024	2.856.428.470,00	(14.282.142,35)	2.842.146.327,65
Pajak Reklame			
Tahun 2011	4.230.000,00	(4.230.000,00)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Nilai Bersih setelah penyisihan
Tahun 2021	67.661.400,00	(33.935.300,00)	33.726.100,00
Tahun 2022	40.291.300,00	(4.008.210,00)	36.283.090,00
Tahun 2023	73.964.900,00	(7.396.490,00)	66.568.410,00
Tahun 2024	161.168.592,00	(805.842,96)	160.362.749,04
Piutang Retribusi			
Retribusi Izin Gangguan (HO)			
Tahun 2011	19.495.850,00	(19.495.850,00)	0,00
Tahun 2012	71.010.745,00	(71.010.745,00)	0,00
Tahun 2013	301.904.202,00	(301.904.202,00)	0,00
Tahun 2014	175.940.150,00	(175.940.150,00)	0,00
Tahun 2015	570.283.442,00	(570.283.442,00)	0,00
Tahun 2016	716.810.050,00	(716.810.050,00)	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir			
Tahun 2014	141.000.000,00	(141.000.000,00)	0,00
Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi			
Tahun 2021	11.137.500,00	(11.137.500,00)	0,00
Tahun 2022	0,00	0,00	0,00
Tahun 2023	46.820.400,00	(46.820.400,00)	0,00
Tahun 2024	3.795.000,00	(379.500,00)	3.415.500,00
RSUD			
BPJS			
Tahun 2023	39.449.304,00	(11.842.820,03)	27.606.483,97
JKN (DINKES)			
Tahun 2023	38.820.500,00	(2.932.050,00)	35.888.450,00
Piutang Lain-lain PAD			
Piutang Transfer Antar Daerah			
Tahun 2024	30.751.329.088,00	(153.756.645,44)	30.597.572.442,56
Dana Bergulir			
Tahun 2010	99.810.000,00	(99.810.000,00)	0,00
Tahun 2024	459.127,00	(2.295,64)	456.831,37
JKN (DINKES)			
Tahun 2024	5.000,00	0,00	5.000,00
Jumlah	60.015.192.747,92	(21.811.438.354,84)	38.203.754.393,09

6.3.1.a.20. Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
4.486.851.564,00	0,00	4.486.851.564,00	100,00

Akun ini merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.486.851.564,00,00 merupakan Sisa Dana Hibah ke KPU dan BAWASLU.

6.3.1.a.21. Persediaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
16.467.500.937,47	16.027.361.598,56	440.139.338,91	2,75



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan metode pengakuan Beban Persediaan berupa pendekatan beban dan metode pencatatan persediaan berupa metode periodik sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp16.467.500.937,47 dan Rp16.027.361.598,56 terjadi Kenaikan Rp440.139.338,91 atau 2,75%.

Persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp2.102.761.900,00 merupakan Persediaan Bibit Kopi Liberika Varietas Liberoid. Atas persediaan tersebut merupakan persediaan dengan nilai per 31 Desember 2023 dan belum dilakukan perhitungan kembali karena sedang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yang merupakan kasus korupsi pengadaan Bibit Kopi Liberika antara penyedia (CV Bintang Bersegi) selaku penyedia bibit kopi dan Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Permukiman Rakyat, Perumahan, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup (Perkimtan-LH) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil *stock opname* yang dilakukan per 31 Desember 2024 yang terdapat pada OPD:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	1.121.000,00	(1.121.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	13.871.740.485,74	13.068.061.233,49	803.679.252,24	6,15
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	6.719.665,00	(6.719.665,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2.102.761.900,00	2.163.987.400,00	(61.225.500,00)	(2,83)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	541.600,00	769.000,00	(227.400,00)	(29,57)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	983.000,00	622.000,00	361.000,00	58,04
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan	160.000,00	344.000,00	(184.000,00)	(53,49)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Keluarga Berencana				
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	13.703.500,00	37.197.200,00	(23.493.700,00)	(63,16)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300.837.596,06	382.573.026,06	(81.735.430,00)	(21,36)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	829.000,00	948.000,00	(119.000,00)	(12,55)
Dinas Perhubungan	65.741.924,00	632.000,00	65.109.924,00	10.302,20
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	0,00	1.868.000,00	(1.868.000,00)	(100,00)
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	3.702.000,00	(3.702.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	0,00	788.000,00	(788.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	0,00	364.000,00	(364.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	672.000,00	27.000,00	645.000,00	2.388,89
Dinas Perikanan	0,00	2.359.000,00	(2.359.000,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	369.000,00	1.650.000,00	(1.281.000,00)	(77,64)
Sekretariat Daerah	0,00	147.063.224,00	(147.063.224,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	1.181.000,00	29.321.000,00	(28.140.000,00)	(95,97)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	67.395.266,67	148.967.610,00	(81.572.343,33)	(54,76)
Badan Pendapatan Daerah	25.970.000,00	6.694.000,00	19.276.000,00	287,96
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.368.000,00	90.000,00	1.278.000,00	1.420,00
Inspektorat	1.083.665,00	1.406.240,00	(322.575,00)	(22,94)
Kecamatan Tebing Tinggi	395.000,00	1.909.000,00	(1.514.000,00)	(79,31)
Kecamatan Tebing Tinggi	6.067.000,00	7.861.000,00	(1.794.000,00)	(22,82)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Barat				
Kecamatan Rangsang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Merbau	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Pulau Merbau	3.629.000,00	5.396.000,00	(1.767.000,00)	(32,75)
Kecamatan Rangsang Pesisir	0,00	1.837.000,00	(1.837.000,00)	(100,00)
Kecamatan Tasik Putri Puyu	1.053.000,00	453.000,00	600.000,00	132,45
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	499.000,00	2.215.000,00	(1.716.000,00)	(77,47)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	520.000,00	416.000,00	104.000,00	25,00
Jumlah	16.467.500.937,47	16.027.361.598,56	440.139.338,91	2,75

Nilai persediaan per 31 Desember 2024 merupakan nilai yang disajikan berdasarkan selisih dari pembelian Persediaan setelah dikurangi Beban Persediaan. Nilai Persediaan menurut per Jenis dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Barang Pakai Habis	16.467.500.937,47	16.027.361.598,56	440.139.338,91	2,75
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	16.467.500.937,47	16.027.361.598,56	440.139.338,91	2,75

6.3.1.a.21.1 Barang Pakai Habis

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
16.467.500.937,47	16.027.361.598,56	440.139.338,91	2,75

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp16.467.500.937,47 dan Rp16.027.361.598,56 terjadi Kenaikan Rp440.139.338,91 atau 2,75%. Nilai Persediaan menurut per Jenis dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan	4.324.941.200,37	5.248.243.708,10	(923.302.507,73)	(17,59)
Suku Cadang	0,00	4.701.665,00	(4.701.665,00)	(100,00)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.052.330.597,23	1.376.276.612,59	(323.946.015,36)	(23,54)
Obat-obatan	11.090.229.139,87	9.398.139.612,87	1.692.089.527,00	18,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah	16.467.500.937,47	16.027.361.598,56	440.139.338,91	2,75

6.3.1.a.21.1.1 Bahan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
4.324.941.200,37	5.248.243.708,10	(923.302.507,73)	(17,59)

Saldo Persediaan Bahan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.324.941.200,37 dan Rp5.248.243.708,10 Terjadi Penurunan Rp923.302.507,73 atau 17,59%. Persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp2.102.761.900,00 merupakan Persediaan Bibit Kopi Liberika Varietas Liberoid. Atas persediaan tersebut merupakan persediaan dengan nilai per 31 Desember 2023 dan belum dilakukan perhitungan kembali karena sedang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yang merupakan kasus korupsi pengadaan Bibit Kopi Liberika antara penyedia (CV Bintang Bersegi) selaku penyedia bibit kopi dan Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Permukiman Rakyat, Perumahan, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup (Perkimtan-LH) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Nilai Persediaan Bahan menurut per OPD dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	2.221.979.300,37	3.139.087.808,10	(917.108.507,73)	(29,22)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2.102.761.900,00	2.102.761.900,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	4.594.000,00	(4.594.000,00)	(100,00)
Kecamatan Pulau Merbau	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Jumlah	4.324.941.200,37	5.248.243.708,10	(923.302.507,73)	(17,59)

6.3.1.a.21.1.2 Suku Cadang

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	4.701.665,00	(4.701.665,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.701.665,00. Terjadi Penurunan Rp4.701.665,00. Nilai Persediaan Suku Cadang menurut per OPD dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	4.701.665,00	(4.701.665,00)	(100)
Jumlah	0,00	4.701.665,00	(4.701.665,00)	(100)

6.3.1.a.21.1.3 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1.052.330.597,23	1.376.276.612,59	(323.946.015,36)	(23,54)

Saldo Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.052.330.597,23 dan Rp1.376.276.612,59 Terjadi Penurunan Rp323.946.015,36 atau 23,54%. Nilai Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor menurut per OPD dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	1.121.000,00	(1.121.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	573.235.545,50	568.031.012,52	5.204.532,98	0,92
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	218.000,00	(218.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	0,00	61.225.500,00	(61.225.500,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	541.600,00	769.000,00	(227.400,00)	(29,57)
Kantor Satuan	983.000,00	622.000,00	361.000,00	58,04



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
Dinas Sosial. Pemberdayaa n Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	160.000,00	344.000,00	(184.000,00)	(53,49)
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	300.837.596,06	382.573.026,06	(81.735.430,00)	(21,36)
Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	829.000,00	948.000,00	(119.000,00)	(12,55)
Dinas Perhubungan	65.741.924,00	632.000,00	65.109.924,00	10.302,20
Dinas Komunikasi, Informatika,sta tistik dan Persandian	0,00	1.868.000,00	(1.868.000,00)	(100,00)
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	3.702.000,00	(3.702.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	0,00	788.000,00	(788.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	0,00	364.000,00	(364.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	672.000,00	27.000,00	645.000,00	2.388,89
Dinas Perikanan	0,00	2.359.000,00	(2.359.000,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian	369.000,00	1.650.000,00	(1.281.000,00)	(77,64)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
dan Perdagangan				
Sekretariat Daerah	0,00	142.469.224,00	(142.469.224,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	1.181.000,00	29.321.000,00	(28.140.000,00)	(95,97)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	67.395.266,67	148.967.610,00	(81.572.343,33)	(54,76)
Badan Pendapatan Daerah	25.970.000,00	6.694.000,00	19.276.000,00	287,96
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.368.000,00	90.000,00	1.278.000,00	1.420,00
Inspektorat	1.083.665,00	1.406.240,00	(322.575,00)	(22,94)
Kecamatan Tebing Tinggi	395.000,00	1.909.000,00	(1.514.000,00)	(79,31)
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	6.067.000,00	7.861.000,00	(1.794.000,00)	(22,82)
Kecamatan Pulau Merbau	3.429.000,00	5.396.000,00	(1.967.000,00)	(36,45)
Kecamatan Rangsang Pesisir	0,00	1.837.000,00	(1.837.000,00)	(100,00)
Kecamatan Tasik Putri Puyu	1.053.000,00	453.000,00	600.000,00	132,45
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	499.000,00	2.215.000,00	(1.716.000,00)	(77,47)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	520.000,00	416.000,00	104.000,00	25,00
Jumlah	1.052.330.597,23	1.376.276.612,59	(323.946.015,36)	(23,54)

6.3.1.a.21.1.4 Obat-obatan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
11.090.229.139,87	9.398.139.612,87	1.692.089.527,00	18,00

Saldo Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp11.090.229.139,87 dan Rp9.398.139.612,87. Terjadi Kenaikan Rp1.692.089.527,00 atau 18,00%. Nilai Persediaan Obat-obatan menurut per OPD dapat dirincikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	11.076.525.639,87	9.360.942.412,87	1.715.583.227,00	18,33
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	13.703.500,00	37.197.200,00	(23.493.700,00)	(63,16)
Jumlah	11.090.229.139,87	9.398.139.612,87	1.692.089.527,00	18,00

6.3.1.a.21.2 Barang Tak Habis Pakai

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Persediaan Barang Tak Habis Pakai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Tidak ada saldo Persediaan Barang Tak Habis Pakai Pada Tahun 2024 dan 2023

6.3.1.a.21.3 Barang Bekas Dipakai

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Persediaan Barang Tak Habis Pakai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Tidak ada saldo Persediaan Barang Tak Habis Pakai Pada Tahun 2024 dan 2023.

6.3.1.b. Investasi Jangka Panjang

6.3.1.b.1. Investasi Non Permanen

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.3.1.b.1.a. Investasi Non Permanen Lainnya – Dana Bergulir

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya – Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.3.1.b.1.b. Penyisihan Dana Bergulir

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.3.1.b.2. Investasi Permanen

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00	0,00

Akun Investasi Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp65.000.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah, dan PT. Bumi Meranti.

6.3.1.b.2.a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00	0,00

Akun Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan berupa Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri Syariah dari tahun 2010 s.d 2017, dan PT. Bumi Meranti pada Tahun 2023. Sesuai Perda No 7 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD PT. Bumi Meranti dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Nama Perusahaan	Nilai
2010	PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	5.000.000.000,00
2011	PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	10.000.000.000,00
2012	PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	15.000.000.000,00
2013	PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	10.000.000.000,00
2014	PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	10.000.000.000,00
2017	PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	10.000.000.000,00
2023	PT. BUMI MERANTI	5.000.000.000,00
Jumlah		65.000.000.000,00

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada PT. Bank Riau Kepri Syariah, dan PT. Bumi Meranti Rp65.000.000.000,00 sama dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2023 karena pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp5.000.000.000,00 kepada PT. Bumi Meranti.

Adapun Jumlah Hasil Dividen dari Bank Riau Kepri per Tahun dapat di lihat pada Tabel Berikut :

Tahun	Nama Perusahaan	Dasar Hukum	Jumlah Investasi	Hasil Investasi/ Dividen
2010	PT. BANK RIAU KEPRI	Perda No. 02 Tahun 2010	5.000.000.000,00	0,00
2011	PT. BANK RIAU KEPRI	Perda No. 02 Tahun 2010	10.000.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun	Nama Perusahaan	Dasar Hukum	Jumlah Investasi	Hasil Investasi/ Deviden
2012	PT. BANK RIAU KEPRI	Perda No. 02 Tahun 2010	15.000.000.000,00	1.056.827.608,00
2013	PT. BANK RIAU KEPRI	Perda No. 02 Tahun 2010	10.000.000.000,00	3.198.978.718,00
2014	PT. BANK RIAU KEPRI	Perda No. 02 Tahun 2010	10.000.000.000,00	7.957.160.326,00
2015	PT. BANK RIAU KEPRI	Perda No. 02 Tahun 2010	10.000.000.000,00	10.375.514.223,00
2016	-	-	0,00	8.984.775.436,00
2017	-	-	0,00	15.538.260.853,00
2018	-	-	0,00	15.477.494.290,00
2019	-	-	0,00	14.204.016.698,00
2020	-	-	0,00	10.322.091.276,00
2021	-	-	0,00	15.178.104.057,00
2022	-	-	0,00	12.451.599.353,00
2023	PT. Bumi Meranti	Perda No.7 Tahun 2022	5.000.000.000,00	0,00
2023	PT. BANK RIAU KEPRI			12.246.453.249,00
2024	PT. BANK RIAU KEPRI	-	0,00	9.524.546.677,00
Jumlah			65.000.000.000,00	136.515.822.764,00

Untuk rincian Lembar saham pada Perusahaan Penerima Investasi dapat di lihat sebagai berikut :

Tahun	Nama Perusahaan	No Lembar Saham	Jumlah Investasi
2010	PT. BANK RIAU KEPRI	8.188.740 s/d 8.238.739	5.000.000.000,00
2011	PT. BANK RIAU KEPRI	8.518.766 s/d 8.668.766	10.000.000.000,00
2012	PT. BANK RIAU KEPRI	8.320.740 s/d 8.370.739	15.000.000.000,00
2013	PT. BANK RIAU KEPRI	8.906.479 s/d 9.206.479	10.000.000.000,00
2014	PT. BANK RIAU KEPRI	-	10.000.000.000,00
2015	PT. BANK RIAU KEPRI	9.757.034 s/d 10.357.033	10.000.000.000,00
2016	PT. BANK RIAU KEPRI	-	0,00
2023	PT. Bumi Meranti	-	5.000.000.000,00
Jumlah			65.000.000.000,00

6.3.1.c. Aset Tetap

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
2.376.392.892.640,86	2.340.079.942.089,83	36.312.950.551,03	1,55



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.376.392.892.640,86 dan Rp2.340.079.942.089,83 Terjadi Kenaikan Rp36.312.950.551,03 dan 1,55%. Rincian menurut Jenis Aset Tetap sebagai berikut :

Jenis Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	302.563.067.306,27	312.834.556.533,44	(10.271.489.227,17)	(3,28)
Peralatan dan Mesin	580.822.126.386,11	590.398.619.847,77	(9.576.493.461,66)	(1,62)
Gedung dan Bangunan	928.269.251.776,94	883.584.342.966,95	44.684.908.809,99	5,06
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.807.667.597.548,36	2.694.332.289.297,32	113.335.308.251,04	4,21
Aset Tetap Lainnya	57.017.436.313,42	51.637.794.539,58	5.379.641.773,84	10,42
Konstruksi dalam Pengerjaan	289.607.530.032,26	269.249.838.965,46	20.357.691.066,79	7,56
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.589.554.116.722,49)	(2.461.957.500.060,68)	(127.596.616.661,81)	5,18
Jumlah	2.376.392.892.640,87	2.340.079.942.089,83	36.312.950.551,04	1,55

Adapun rincian Aset Tetap yang masih mempunyai Nilai Buku dapat di lihat pada Tabel berikut :

Jenis Aset	31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Nilai Buku
Tanah	302.563.067.306,27	0,00	302.563.067.306,27
Peralatan dan Mesin	580.822.126.386,11	(470.461.554.257,90)	110.360.572.128,21
Gedung dan Bangunan	928.269.251.776,94	(175.685.748.061,69)	752.583.503.715,25
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.807.667.597.548,36	(1.922.747.568.630,53)	884.920.028.917,84
Aset Tetap Lainnya	57.017.436.313,42	(20.659.245.772,38)	36.358.190.541,04
Konstruksi dalam Pengerjaan	289.607.530.032,26	0,00	289.607.530.032,26
Jumlah	4.965.947.009.363,36	(2.589.554.116.722,49)	2.376.392.892.640,87

Kenaikan Aset Tetap dapat dijelaskan Sebagai Berikut :

Uraian	Nilai
Jumlah Penambahan	370.632.549.284,77



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Nilai
Mutasi OPD	9.107.617.571,39
Belanja Modal 2023	176.817.897.471,82
Perolehan belanja pegawai	0,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	22.649.529.009,96
Reklasifikasi dari Tanah	0,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	0,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	48.594.976.871,19
Reklasifikasi dari Jalan,Irigasi dan Jaringan	24.864.434.036,83
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	372.126.600,00
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	702.200,00
Reklasifikasi dari Aset Lain lain	180.000.000,00
Aset Hibah	15.172.427.871,60
Belanja Tak Terduga (BTT)	0,00
Revaluasi Aset	0,00
Reklasifikasi dari KDP	42.235.500.169,03
Utang tahun 2024	21.901.242.482,94
Koreksi Saldo Aset	8.736.095.000,00
Jumlah Pengurangan	206.722.982.071,93
Mutasi OPD	9.107.617.571,39
Reklasifikasi ke Tanah	0,00
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	147.052.975,00
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	1.181.491.657,33
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.186.879.842,59
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	3.159.247.166,30
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	6.000.000,00
Reklasifikasi ke Aset lain-lain	61.379.566.357,13
Transfer keluar KDP	62.392.366.035,83
Penghapusan Aset	15.231.889.669,27
Extracomptable	3.784.987.993,88
Diakui Sebagai Beban	862.588.237,50
Hibah Keluar	0,00
Pelunasan Utang Tahun sebelumnya	283.294.565,70
Koreksi Saldo Aset	0,00
Jumlah Penambahan - Jumlah Pengurangan	163.909.567.212,84
Kenaikan/ Penurunan Akumulasi Penyusutan	(127.596.616.661,81)
(Jumlah Penambahan - Jumlah Pengurangan)+ Kenaikan/ Penurunan Akumulasi Penyusutan	36.312.950.551,04

Keterangan :

- Pengadaan (Perolehan BM 2024+ Perolehan BP+Kapitalisasi dari BBJ) adalah penambahan aset tetap akibat pengadaan yang dianggarkan dalam



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

APBD Tahun berjalan, sedangkan penghapusan adalah kebalikannya yaitu pengurangan aset tetap karena dihapuskan.

- Transfer dari KDP Tahun lalu adalah penambahan aset tetap akibat aset tetap yang dibangun (KDP) Tahun lalu telah selesai Tahun pelaporan, sedangkan transfer ke aset tetapnya adalah pengurangan aset tetap KDP akibat telah selesai Tahun pelaporan.
- Transfer masuk/ Mutasi OPD adalah penambahan aset tetap dari OPD lain dalam satu entitas pelaporan, sedangkan Transfer keluar/ Mutasi OPD adalah pengurangan aset tetap akibat penyerahan aset tetap ke OPD lain dalam satu entitas pelaporan.
- Reklasifikasi masuk adalah penambahan aset tetap dari jenis aset tetap yang lain atau aset lainnya dalam satu OPD, sedangkan reklasifikasi keluar adalah pengurangan aset tetap kepada jenis aset tetap yang lain atau aset lainnya dalam satu OPD.
- Penerimaan Hibah adalah penambahan aset tetap dari pemberian pihak luar entitas pelaporan tanpa memberikan apapun, sedangkan pemberian hibah adalah pengurangan aset tetap akibat memberikan aset tetap kepada pihak lain di luar entitas pelaporan.

Nilai Aset Tetap sebesar Rp2.376.392.892.640,86 merupakan nilai Aset Tetap tahun 2024 setelah penyusutan dan nilai berdasarkan Daftar Inventaris Barang per 31 Desember 2024. Daftar Inventaris Barang disusun berdasarkan hasil inventarisasi barang atas pengadaan sejak tahun 2009 s.d. 2024. Inventarisasi dilakukan untuk menginventarisasi seluruh barang milik daerah di seluruh OPD.

Inventarisasi barang milik daerah dilakukan oleh pengurus barang masing-masing OPD di bawah koordinasi Bidang Aset BPKAD untuk mendata seluruh barang yang dimiliki pemerintah daerah dan termasuk aset yang diperoleh melalui dana BOS dan hibah dari instansi lainnya.

Rincian mutasi Aset Tetap untuk perolehan Tahun 2024 dan perbandingan dengan Belanja Modal pada LRA adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Penambahan / Penurunan	Belanja Modal	Selisih
Tanah	(10.271.489.227,17)	0,00	(10.271.489.227,17)
Peralatan dan Mesin	(9.576.493.461,66)	44.748.275.224,00	(54.324.768.685,66)
Gedung dan Bangunan	44.684.908.809,99	59.476.677.697,29	(14.791.768.887,30)
Jalan. Irigasi dan Jaringan	113.335.308.251,04	68.476.709.950,53	44.858.598.300,51
Aset Tetap Lainnya	5.379.641.773,84	4.116.234.600,00	1.263.407.173,84
Konstruksi dalam Pengerjaan	20.357.691.066,79	0,00	20.357.691.066,79
Jumlah	163.909.567.212,84	176.817.897.471,82	(12.908.330.258,99)

Perbedaan nilai mutasi Aset Tetap dengan realisasi Belanja Modal pada LRA sebesar Rp12.908.330.258,98, berupa hibah dari Kementerian, penghapusan aset



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

karena rusak berat, penghapusan aset karena lelang, penghapusan aset karena hibah keluar (tidak dalam satu Entitas), Penerimaan hibah aset, reklasifikasi aset tetap, dan penambah harga perolehan dari Belanja Operasi seperti kapitalisasi Belanja Barang seperti Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

Rincian dan uraian per masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

6.3.1.c.1.Tanah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
302.563.067.306,27	312.834.556.533,44	(10.271.489.227,17)	(3,28)

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp302.563.067.306,27 dan Rp312.834.556.533,44. Terjadi Penurunan Rp10.271.489.227,17 dan 3,28% yang berada pada OPD dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	53.271.737.736,35	1.621.500.000,00	0,00	51.650.237.736,35
Dinas Kesehatan	9.127.142.700,00	9.630.000,00	0,00	9.117.512.700,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.960.988.366,30	0,00	0,00	170.960.988.366,30
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5.740.623.320,48	0,00	0,00	5.740.623.320,48
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.600.000,00	0,00	0,00	47.600.000,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	2.701.231.800,00	0,00	0,00	2.701.231.800,00
Dinas Perhubungan	5.610.838.970,75	0,00	5.500.018.180,00	11.110.857.150,75
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	451.170.000,00	0,00	0,00	451.170.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Dinas Kepemudaan.Olahrag a dan Pariwisata	5.490.146.818,62	120.533.000,00	960.966.411,86	6.330.580.230,48
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.556.466.411,86	960.966.411,86	0,00	595.500.000,00
Dinas Perikanan	4.089.929.600,75	170.000.000,00	0,00	3.919.929.600,75
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.603.654.609,28	1.130.960.000,00	0,00	1.472.694.609,28
Sekretariat Daerah	18.252.412.511,49	0,00	2.032.501.047,17	20.284.913.558,66
Badan Pengelola Keuagn dan Aset Daerah	317.200.000,00	0,00	0,00	317.200.000,00
Badan Pendapatan Daerah	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi	837.255.000,00	0,00	0,00	837.255.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	1.556.884.002,59	0,00	5.421.593.000,00	6.978.477.002,59
Kecamatan Rangsang	1.318.305.500,00	0,00	70.000.000,00	1.388.305.500,00
Kecamatan Rangsang Barat	3.327.817.500,00	0,00	300.000.000,00	3.627.817.500,00
Kecamatan Merbau	11.499.985.990,00	0,00	0,00	11.499.985.990,00
Kecamatan Pulau Merbau	256.698.337,80	0,00	0,00	256.698.337,80
Kecamatan Rangsang Pesisir	261.211.500,00	0,00	0,00	261.211.500,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	1.121.276.630,00	0,00	0,00	1.121.276.630,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	261.530.000,00	0,00	0,00	261.530.000,00
Jumlah	302.563.067.306,27	4.013.589.411,86	14.285.078.639,03	312.834.556.533,44

Rincian Aset Tetap Tanah Pada OPD(Organisasi Perangkat Daerah) berdasarkan persentase Kenaikan dan Penurunan sebagai berikut :

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53.271.737.736,35	51.650.237.736,35	1.621.500.000,00	3,14
Dinas Kesehatan	9.127.142.700,00	9.117.512.700,00	9.630.000,00	0,11
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.960.988.366,30	170.960.988.366,30	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5.740.623.320,48	5.740.623.320,48	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak.	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman dan Pertanian	2.701.231.800,00	2.701.231.800,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	5.610.838.970,75	11.110.857.150,75	(5.500.018.180,00)	(49,50)
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	451.170.000,00	451.170.000,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olahrag a dan Pariwisata	5.490.146.818,62	6.330.580.230,48	(840.433.411,86)	(13,28)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.556.466.411,86	595.500.000,00	960.966.411,86	161,37
Dinas Perikanan	4.089.929.600,75	3.919.929.600,75	170.000.000,00	4,34
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.603.654.609,28	1.472.694.609,28	1.130.960.000,00	76,80
Sekretariat Daerah	18.252.412.511,49	20.284.913.558,66	(2.032.501.047,17)	(10,02)
Badan Pengelola Keuangn dan Aset Daerah	317.200.000,00	317.200.000,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi	837.255.000,00	837.255.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	1.556.884.002,59	6.978.477.002,59	(5.421.593.000,00)	(77,69)
Kecamatan Rangsang	1.318.305.500,00	1.388.305.500,00	(70.000.000,00)	(5,04)
Kecamatan Rangsang Barat	3.327.817.500,00	3.627.817.500,00	(300.000.000,00)	(8,27)
Kecamatan Merbau	11.499.985.990,00	11.499.985.990,00		
Kecamatan Pulau Merbau	256.698.337,80	256.698.337,80	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	261.211.500,00	261.211.500,00	0,00	0,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	1.121.276.630,00	1.121.276.630,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	261.530.000,00	261.530.000,00	0,00	0,00
Jumlah	302.563.067.306,27	312.834.556.533,44	(10.271.489.227,17)	(3,28)

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp302.563.067.306,27 dan Rp Rp312.834.556.533,44 Terjadi Penurunan Rp10.271.489.227,17 dan 3,28%, nilai Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
MUTASI MASUK	4.013.589.411,86



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Nilai
Mutasi OPD	2.882.629.411,86
Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00
Penerimaan Hibah	1.130.960.000,00
MUTASI KELUAR	14.285.078.639,03
Penghapusan Aset	14.402.449.227,17
Mutasi OPD	2.882.629.411,86
Jumlah	(10.271.489.227,17)

Penjelasan Mutasi Tambah:

- Mutasi OPD Merupakan Mutasi Aset Antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Rp2.882.629.411,86 Pada Tahun 2024.
- Penerimaan Hibah Merupakan Perolehan Aset Tetap Berupa Tanah dari Hibah yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Mutasi Suatu aset dalam Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Rp1.130.960.000,00 yang masuk dari Kementerian ke OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penjelasan Mutasi Kurang:

- Penghapusan Aset Tanah Di Karenakan adanya Hibah keluar dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Rp2.882.629.411,86 Pada Tahun 2024.

Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar pada Aset Tetap Tanah sesuai dengan dokumen terkait dengan rincian sebagai berikut:

- Mutasi Aset Tetap Tanah Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 88/HK/KPTS/I/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		No SK	Nilai Perolehan	Keterangan
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk			
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	88/HK/KPTS/I/2024	177.840.000,00	Mutasi Aset
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	88/HK/KPTS/I/2024	239.400.000,00	Mutasi Aset
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	88/HK/KPTS/I/2024	149.700.000,00	Mutasi Aset
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	88/HK/KPTS/I/2024	55.560.000,00	Mutasi Aset
Kecamatan Tebing	Dinas Pendidikan Dan	88/HK/KPTS/I/2024	63.000.000,00	Mutasi Aset



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Aset		No SK	Nilai Perolehan	Keterangan
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk			
Tinggi Barat	Kebudayaan			
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	88/HK/KPTS//2024	121.040.000,00	Mutasi Aset
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	88/HK/KPTS//2024	196.720.000,00	Mutasi Aset
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	88/HK/KPTS//2024	116.640.000,00	Mutasi Aset
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	88/HK/KPTS//2024	286.200.000,00	Mutasi Aset
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	88/HK/KPTS//2024	125.400.000,00	Mutasi Aset
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	88/HK/KPTS//2024	90.000.000,00	Mutasi Aset
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Dinas Kesehatan	88/HK/KPTS//2024	9.630.000,00	Mutasi Aset
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Dinas Kepemudaan.Olahraga dan Pariwisata	88/HK/KPTS//2024	120.533.000,00	Mutasi Aset
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Dinas Perikanan	88/HK/KPTS//2024	170.000.000,00	Mutasi Aset
Jumlah			1.921.663.000,00	

- b. Penghapusan Karena Hibah pada Aset Tetap Tanah Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 90/HK/KPTS/I/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		No SK	Nilai Perolehan	Keterangan
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk			
Kecamatan Rangsang	Kodim 0303/ Bengkalis	90/HK/KPTS//2024	70.000.000,00	Penghapusan Karena Hibah
Jumlah			70.000.000,00	

- c. Penghapusan Karena Hibah pada Aset Tetap Tanah Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 98/HK/KPTS/I/2024 dengan
rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		No SK	Nilai Perolehan	Keterangan
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk			
Dinas Perhubungan	Kesyahbandaran	98/HK/KPTS/I/2024	5.500.018.180,00	Penghapusan Karena Hibah
Jumlah			5.500.018.180,00	

- d. Penghapusan Karena Hibah pada Aset Tetap Tanah Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 102/HK/KPTS/I/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		No SK	Nilai Perolehan	Keterangan
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk			
Kecamatan Rangsang Barat	Kodim 0303/ Bengkalis	102/HK/KPTS/I/2024	300.000.000,00	Penghapusan Karena Hibah
Jumlah			300.000.000,00	

- e. Penghapusan Karena Hibah pada Aset Tetap Tanah Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 166/HK/KPTS/I/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		No SK	Nilai Perolehan	Keterangan
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk			
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Kodim 0303/ Bengkalis	166/HK/KPTS/I/2024	3.499.930.000,00	Penghapusan Karena Hibah
Jumlah			3.499.930.000,00	

- f. Penghapusan Karena Hibah pada Aset Tetap Tanah Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 299/HK/KPTS/VIII/2024 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Aset		No SK	Nilai Perolehan	Keterangan
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk			
Sekretariat Daerah	Kementerian/ Provinsi	299/HK/KPTS/VIII/2024	2.032.501.047,17	Penghapusan Karena Hibah
Jumlah			2.032.501.047,17	

- g. Mutasi Aset pada Aset Tetap Tanah Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 314/HK/KPTS/VIII/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		No SK	Nilai Perolehan	Keterangan
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk			
Dinas Kepemudaan.Olahraga dan Pariwisata	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	314/HK/KPTS/VIII/2024	960.966.411,86	Mutasi Aset
Jumlah			960.966.411,86	

Pada Tahun 2024 Terdapat Sengketa Tanah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, antara Pemerintah Daerah dengan warga yang saat ini mengklaim hak atas Tanah Tersebut. Tanah terkait Tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti atas Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Bidang Tanah Terdapat pada Jalan Nusa Indah/ Jalan Ibrahim Gg. Kencana/ Beringin Kelurahan Selatpanjang Selatan di perkirakan dengan Ukuran P=77m dan L=115m.

Melihat Dokumen dan Histori SKGR Tahun 1997 masih menjadi kepemilikan NEMI akan tetapi **Belum dapat di simpulkan** yang terjadi setelah Tahun 1997 sampai dengan 2021 Siapa Pemilik Tanah Tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Masih Menunggu Hasil Keputusan Pengadilan Pemilik Sebidang Tanah Tersebut, dan pada Saat ini Masih Tercatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

6.3.1.c.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
580.822.126.386,11	590.398.619.847,77	(9.576.493.461,66)	(1,62)

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp580.822.126.386,11 dan Rp590.398.619.847,77 Terjadi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penurunan Rp9.576.493.461,66 atau 1,62% yang berada pada OPD dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	127.959.449.039,51	5.317.523.590,00	492.670.100,00	123.134.595.549,51
Dinas Kesehatan	207.211.456.301,46	35.658.163.341,00	2.801.077.120,78	174.354.370.081,24
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.978.869.527,00	1.276.980.392,89	4.979.369.387,65	17.681.258.521,76
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	11.552.229.044,63	1.277.747.000,00	0,00	10.274.482.044,63
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.911.596.888,90	313.070.000,00	820.658.332,89	7.419.185.221,79
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.891.852.381,92	1.767.585.286,00	0,00	4.124.267.095,92
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.864.336.876,87	240.585.000,00	2.459.268.046,89	6.083.019.923,76
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	6.451.012.751,88	149.554.325,00	0,00	6.301.458.426,88
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.690.618.803,44	230.240.000,00	0,00	4.460.378.803,44
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	761.840.674,00	36.547.000,00	722.043.000,00	1.447.336.674,00
Dinas Perhubungan	19.439.876.053,49	834.047.494,64	707.695.611,61	19.313.524.170,46
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	7.336.838.175,98	342.700.600,00	16.024.229,51	7.010.161.805,49
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	955.561.460,57	95.129.000,00	0,00	860.432.460,57
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	2.838.624.499,48	0,00	0,00	2.838.624.499,48
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	1.464.179.259,48	51.510.500,00	834.402.645,44	2.247.071.404,91
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.639.009.102,60	4.291.000,00	196.000,00	2.634.914.102,60
Dinas Perikanan	9.647.713.458,13	0,00	0,00	9.647.713.458,13
Dinas Perindustrian	14.556.689.143,01	25.653.000,00	31.651.000,00	14.562.687.143,01



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
dan Perdagangan				
Sekretariat Daerah	81.350.093.627,28	5.556.487.384,00	44.849.432.849,45	120.643.039.092,73
Sekretariat DPRD	11.523.290.291,20	1.333.097.000,00	5.353.713.525,66	15.543.906.816,86
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	3.145.607.764,53	203.693.000,00	900.413.652,12	3.842.328.416,65
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.423.647.374,90	1.184.693.853,00	528.845.541,51	5.767.799.063,41
Badan Pendapatan Daerah	4.631.151.409,21	235.684.000,00	179.500.000,00	4.574.967.409,21
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.272.146.692,54	120.000.000,00	0,00	2.152.146.692,54
Inspektorat	1.569.432.614,25	5.472.973,00	410.131.157,68	1.974.090.798,93
Kecamatan Tebing Tinggi	3.089.508.378,02	29.865.000,00	29.865.000,00	3.089.508.378,02
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	1.206.927.344,72	53.994.000,00	0,00	1.152.933.344,72
Kecamatan Rangsang	4.748.705.139,45	7.370.000,00	0,00	4.741.335.139,45
Kecamatan Rangsang Barat	3.026.533.723,07	35.492.000,00	388.000,00	2.991.429.723,07
Kecamatan Merbau	921.274.680,00	0,00	0,00	921.274.680,00
Kecamatan Pulau Merbau	1.437.134.187,00	23.170.000,00	8.270.000,00	1.422.234.187,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	2.097.796.348,35	9.200.000,00	0,00	2.088.596.348,35
Kecamatan Tasik Putri Puyu	2.959.599.440,64	29.673.000,00	0,00	2.929.926.440,64
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	1.813.904.582,01	38.767.000,00	0,00	1.775.137.582,01
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	453.619.346,59	61.135.000,00	0,00	392.484.346,59
Jumlah	580.822.126.386,11	56.549.121.739,53	66.125.615.201,19	590.398.619.847,77

Rincian Aset Tetap Peralatan Mesin Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berdasarkan persentase Kenaikan atau Penurunan sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	127.959.449.039,51	123.134.595.549,51	4.824.853.490,00	3,92
Dinas Kesehatan	207.211.456.301,46	174.354.370.081,24	32.857.086.220,22	18,85
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.978.869.527,00	17.681.258.521,76	(3.702.388.994,76)	(20,94)
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	11.552.229.044,63	10.274.482.044,63	1.277.747.000,00	12,44
Badan Penanggulangan	6.911.596.888,90	7.419.185.221,79	(507.588.332,89)	(6,84)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bencana Daerah				
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.891.852.381,92	4.124.267.095,92	1.767.585.286,00	42,86
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.864.336.876,87	6.083.019.923,76	(2.218.683.046,89)	(36,47)
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	6.451.012.751,88	6.301.458.426,88	149.554.325,00	2,37
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.690.618.803,44	4.460.378.803,44	230.240.000,00	5,16
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	761.840.674,00	1.447.336.674,00	(685.496.000,00)	(47,36)
Dinas Perhubungan	19.439.876.053,49	19.313.524.170,46	126.351.883,03	0,65
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	7.336.838.175,98	7.010.161.805,49	326.676.370,49	4,66
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	955.561.460,57	860.432.460,57	95.129.000,00	11,06
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	2.838.624.499,48	2.838.624.499,48	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	1.464.179.259,48	2.247.071.404,91	(782.892.145,44)	(34,84)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.639.009.102,60	2.634.914.102,60	4.095.000,00	0,16
Dinas Perikanan	9.647.713.458,13	9.647.713.458,13	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.556.689.143,01	14.562.687.143,01	(5.998.000,00)	(0,04)
Sekretariat Daerah	81.350.093.627,28	120.643.039.092,73	(39.292.945.465,45)	(32,57)
Sekretariat DPRD	11.523.290.291,20	15.543.906.816,86	(4.020.616.525,66)	(25,87)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	3.145.607.764,53	3.842.328.416,65	(696.720.652,12)	(18,13)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.423.647.374,90	5.767.799.063,41	655.848.311,49	11,37
Badan Pendapatan Daerah	4.631.151.409,21	4.574.967.409,21	56.184.000,00	1,23
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.272.146.692,54	2.152.146.692,54	120.000.000,00	5,58



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Inspektorat	1.569.432.614,25	1.974.090.798,93	(404.658.184,68)	(20,50)
Kecamatan Tebing Tinggi	3.089.508.378,02	3.089.508.378,02	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	1.206.927.344,72	1.152.933.344,72	53.994.000,00	4,68
Kecamatan Rangsang	4.748.705.139,45	4.741.335.139,45	7.370.000,00	0,16
Kecamatan Rangsang Barat	3.026.533.723,07	2.991.429.723,07	35.104.000,00	1,17
Kecamatan Merbau	921.274.680,00	921.274.680,00	0,00	0,00
Kecamatan Pulau Merbau	1.437.134.187,00	1.422.234.187,00	14.900.000,00	1,05
Kecamatan Rangsang Pesisir	2.097.796.348,35	2.088.596.348,35	9.200.000,00	0,44
Kecamatan Tasik Putri Puyu	2.959.599.440,64	2.929.926.440,64	29.673.000,00	1,01
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	1.813.904.582,01	1.775.137.582,01	38.767.000,00	2,18
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	453.619.346,59	392.484.346,59	61.135.000,00	15,58
Jumlah	580.822.126.386,11	590.398.619.847,77	(9.576.493.461,66)	(1,62)

Saldo awal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp580.822.126.386,11 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp580.828.126.386,11. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar 1,62% atau Rp9.576.493.461,66. Adapun kenaikan Aset Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Jumlah Penambahan	56.549.121.739,53
Mutasi OPD	2.662.651.374,53
Belanja Modal 2024	44.748.275.224,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	1.175.949.186,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	88.037.375,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	59.015.600,00
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	702.200,00
Aset Hibah	4.060.276.160,00
Utang tahun 2024	3.754.214.620,00
Jumlah Pengurangan	66.125.615.201,19
Mutasi OPD	2.662.651.374,53
Reklasifikasi ke Aset lain-lain	61.379.566.357,13
Penghapusan Aset	1.313.347.298,76
Extracomptabel	734.185.170,76
Diakui Sebagai Beban	29.865.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	6.000.000,00
Jumlah	(9.576.493.461,66)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penjelasan Mutasi Masuk :

- a) Mutasi OPD Merupakan Mutasi Aset Antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Rp2.662.651.374,53 Pada Tahun 2024.
- b) Belanja Modal Merupakan Realisasi atas Belanja yang sudah di Anggarkan pada Tahun 2024 Rp44.748.275.224,00.
- c) Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Merupakan Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa yang di Kapitalisasikan Ke Aset Tetap sebagai Penambah Nilai dan/ atau Sebagai perolehan Aset Tetap dengan Rincian Sebagai Berikut :

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp522.018.000,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp43.109.186,00
Sekretariat Daerah	Rp348.642.000,00
Sekretariat DPRD	Rp262.180.000,00
Jumlah	Rp1.175.949.186,00

- d) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Merupakan Mutasi Aset dari KIB C ke KIB B berdasarkan klasifikasi aset tersebut pada Dinas Kesehatan Tahun 2024 Rp88.037.375,00.
- e) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya Merupakan Mutasi Aset dari KIB E ke KIB B berdasarkan klasifikasi aset tersebut Pada Dinas Pendidikan Rp 59.015.600,00.
- f) Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud Merupakan Mutasi Aset dari ATB ke KIB B berdasarkan klasifikasi aset tersebut Pada Dinas Kesehatan Rp702.200,00.
- g) Aset Hibah Merupakan Perolehan Atas Aset melalui mekanisme Hibah baik dari Provinsi, Kementerian, dan Pihak Ketiga Lainnya, yang sudah di terima Asetnya dan sudah Di Terbitkan BAST dan SK atas Penerimaan Aset Tersebut. Aset Hibah Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 Terdapat pada Dinas Kesehatan Rp3.970.276.160,00 dan Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Rp90.000.000,00.
- h) Utang tahun 2024 Merupakan Perolehan Aset yang di Akui di karenakan adanya Aset yang belum di bayar lunas atau masih terutang pada Tahun 2024, Utang Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 Terdapat pada Dinas Kesehatan Rp3.734.270.620,00 dan Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Rp19.944.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penjelasan Mutasi Keluar :

- a) Mutasi OPD Merupakan Mutasi Aset Antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Rp2.662.651.374,53 Pada Tahun 2024.
- b) Reklasifikasi ke Aset lain-lain Merupakan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 ke Aset Lain-Lain di karenakan Aset Tersebut sudah rusak berat atau sudah tidak di pergunakan dalam Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Rincian Sebagai Berikut :

Dinas Kesehatan	Rp2.635.580.952,35
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp4.551.762.404,89
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp768.008.332,89
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp2.106.908.046,89
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp722.043.000,00
Dinas Perhubungan	Rp700.023.611,61
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	Rp16.024.229,51
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	Rp834.402.645,44
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 31.651.000,00
Sekretariat Daerah	Rp42.237.551.956,59
Sekretariat DPRD	Rp5.343.465.525,66
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Rp493.167.952,12
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp528.845.541,51
Inspektorat	Rp410.131.157,68
Jumlah	Rp61.379.566.357,13

- a) Penghapusan Aset Merupakan Penghapusan Aset Tahun 2024 di Karenakan adanya Lelang, Hibah keluar, Aset sudah di musnahkan, dan faktor lain yang dapat di pertanggungjawabkan OPD Terkait sehingga Aset Tersebut di hapus dari KIB dan Neraca dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Rincian sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp403.001.598,76
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp351.750.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Rp407.245.700,00
Badan Pendapatan Daerah	Rp151.350.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah	Rp1.313.347.298,76

- c) Extracomptabel Merupakan Belanja Modal yang Asetnya Tidak memenuhi Kriteria sebagai Aset Tetap, Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Mengeluarkan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 Sebagai Extracomptabel Rp734.185.170,76 Dengan Rincian Sebagai Berikut.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp486.670.100,00
Dinas Kesehatan	Rp165.496.168,43
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp52.650.000,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp610.000,00
Dinas Perhubungan	Rp7.672.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp196.000,00
Sekretariat Daerah	Rp1.984.902,33
Sekretariat DPRD	Rp10.248.000,00
Kecamatan Rangsang Barat	Rp388.000,00
Kecamatan Pulau Merbau	Rp8.270.000,00
Jumlah	Rp734.185.170,76

- d) Diakui Sebagai Beban Merupakan Realisasi Belanja Modal yang di akui sebagai Beban di karenakan tidak termasuk klasifikasi sebagai Aset Tetap Rp29.865.000,00 pada OPD Kecamatan Tebing Tinggi.
- e) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud Merupakan Mutasi Aset dari KIB B ke ATB dikarenakan Aset Terbut termasuk dalam Klasifikasi sebagai Aset Tak Berwujud Rp6.000.000,00 Pada Dinas Pendidikan.

Terdapat 54 Unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang Merupakan Aset Hibah dari Kabupaten Bengkalis yang tidak di ketahui keberadaannya dan tidak memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB. Adapun Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang tidak di ketahui keberadaannya terdiri dari 32 Unit dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang tidak memiliki Bukti Kepemilikan Berupa BPKB 22 Unit.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang tidak di ketahui keberadaannya Sebagai Berikut :

Rincian Aset	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	OPD
Helicak/ Bajaj	2006	15.150.000,00	Dinas Perpustakaan
Sepeda Motor	2014	3.300.000,00	PUPR
Sepeda Motor	2000	4.963.000,00	Dinas Kesehatan
Sepeda Motor	2006	4.463.000,00	Dinas Kesehatan
Sepeda Motor	2006	6.990.000,00	Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Aset	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	OPD
Sepeda Motor	2007	7.330.000,00	Dinas Kesehatan
Sepeda Motor	2008	14.422.000,00	Disperindag
Sepeda Motor	2014	13.693.812,50	DKPP
Sepeda Motor	2002	5.070.000,00	Kec. Merbau
Sepeda Motor	2002	6.227.000,00	Kec. Merbau
Sepeda Motor	2002	6.227.000,00	Kec. Merbau
Sepeda Motor	2004	7.130.000,00	Kec. Merbau
Sepeda Motor	2001	3.793.000,00	Kec. Merbau
Sepeda Motor	2007	6.230.000,00	Kec. Merbau
Sepeda Motor	1999	1.212.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2000	5.326.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2001	4.463.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2001	1.562.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2004	2.111.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2006	8.032.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2007	7.330.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2007	8.484.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2007	9.070.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2009	17.235.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2009	15.600.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2013	2.653.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2006	8.032.000,00	Kec. Rangsang Barat
Sepeda Motor	2006	8.032.000,00	Kec. Rangsang Barat
Sepeda Motor	2001	3.793.000,00	Kec. Tebing Tinggi Timur
Sepeda Motor	2001	4.463.000,00	Kec. Tebing Tinggi
Sepeda Motor	2008	15.000.000,00	Kec. Tebing Tinggi
Sepeda Motor	2008	7.670.000,00	Kec. Tebing Tinggi
Jumlah		235.056.812,50	

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan Berupa BPKB Sebagai Berikut :

Rincian Aset	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	OPD
Sepeda Motor	1997	3.963.000,00	Bapenda
Sepeda Motor	2003	9.000.000,00	Dinas Perikanan
Helicak/ Bajaj	2014	5.247.000,00	Dinas Perpustakaan
Sepeda Motor	2014	3.300.000,00	PUPR
Mobil Tangki Air	2014	150.000.000,00	PUPR
Sepeda Motor	2000	4.963.000,00	Dinas Kesehatan
Sepeda Motor	-	4.463.000,00	Dinas Kesehatan
Sepeda Motor	2006	6.990.000,00	Dinas Kesehatan
Sepeda Motor	2007	7.330.000,00	Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sepeda Motor	2008	14.422.000,00	Disperindag
Sepeda Motor	-	14.422.000,00	Disperindag
Sepeda Motor	2001	3.793.000,00	Kec. Pulau Merbau
Sepeda Motor	2007	6.230.000,00	Kec. Rangsang Pesisir
Sepeda Motor	1999	1.212.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2007	7.330.000,00	Kec. Rangsang
Sepeda Motor	2001	1.670.000,00	Kec. Rangsang Barat
Sepeda Motor	2014	1.562.000,00	Kec. Tasik Putri Puyu
Sepeda Motor	2011	33.150.000,00	Kec. Tasik Putri Puyu
Sepeda Motor	2001	3.793.000,00	Kec. Tebing Tinggi Timur
Sepeda Motor	2001	4.463.000,00	Kec. Tebing Tinggi Barat
Sepeda Motor	2004	6.030.000,00	Kec. Tebing Tinggi Barat
Pick Up	2008	151.350.000,00	Sekretariat Daerah
Jumlah		444.683.000,00	

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Berdasarkan Jenis Aset Tetap Sebagai Berikut :

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penur unan)	%
Alat Besar	54.964.777.561,00	52.632.286.962,98	2.332.490.598,02	4,43
Alat Angkutan	98.454.234.630,76	88.651.431.492,41	9.802.803.138,35	11,06
Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.253.308.515,45	3.091.746.013,06	161.562.502,39	5,23
Alat Pertanian	16.152.057.065,63	16.142.057.065,63	10.000.000,00	0,06
Alat Kantor dan Rumah Tangga	138.006.111.622,38	165.781.627.062,87	(27.775.515.440,49)	(16,75)
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.838.226.673,90	19.476.844.869,60	(2.638.618.195,70)	(13,55)
Alat Kedokteran dan Kesehatan	125.002.486.963,90	107.241.011.024,41	17.761.475.939,49	16,56
Alat Laboratorium	28.535.810.173,32	24.590.824.492,40	3.944.985.680,93	16,04
Alat Persenjataan	323.807.265,08	312.957.265,08	10.850.000,00	3,47
Komputer	94.491.413.764,72	101.704.576.858,82	(7.213.163.094,09)	(7,09)
Alat Eksplorasi	227.163.254,75	227.163.254,75	0,00	0,00
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	642.004.000,00	642.004.000,00	0,00	0,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	541.820.610,22	755.066.350,64	(213.245.740,43)	(28,24)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Peraga	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	154.625.544,58	6.978.800.137,46	(6.824.174.592,88)	(97,78)
Rambu-rambu	2.412.709.311,78	1.355.953.671,78	1.056.755.640,00	77,93
Peralatan Olahraga	810.669.428,64	803.369.325,88	7.300.102,76	0,91
Jumlah	580.822.126.386,11	590.398.619.847,77	(9.576.493.461,66)	(1,62)

Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan dokumen terkait dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 88/HK/KPTS/I/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Sekretariat Daerah	Dinas Kepemudaan.Olahraga dan Pariwisata	Sepeda Motor	88/HK/KPTS/I/2024	34.000.000,00	Mutasi Aset
Sekretariat Daerah	Dinas Kepemudaan.Olahraga dan Pariwisata	Sepeda Motor	88/HK/KPTS/I/2024	17.510.500,00	Mutasi Aset
Sekretariat Daerah	Dinas Perhubungan	Sepeda Motor	88/HK/KPTS/I/2024	23.143.038,12	Mutasi Aset
Sekretariat Daerah	Dinas Perhubungan	Sepeda Motor	88/HK/KPTS/I/2024	23.143.038,12	Mutasi Aset
Badan Pendapatan Daerah	Sekretariat Daerah	Sepeda Motor	88/HK/KPTS/I/2024	28.150.000,00	Mutasi Aset
Sekretariat Daerah	Dinas Perhubungan	Station Wagon	88/HK/KPTS/I/2024	650.000.774,40	Mutasi Aset
Jumlah				775.947.350,64	

- b. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 152/HK/KPTS/I/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Generating set	152/HK/KPTS/I/2024	198.732.595,29	Mutasi Aset
Sekretariat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Station Wagon	152/HK/KPTS/I/2024	181.153.853,00	Mutasi Aset
Jumlah				379.886.448,29	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Penghapusan Karena Hibah ke Masyarakat Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 188/HK/KPTS/I/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Badan Pendapatan Daerah	GPK(Pramuka)	Kendaraan Beroda Empat	188/HK/KPTS/I/2024	151.350.000,00	Penghapusan Karena Hibah
Jumlah				151.350.000,00	

- d. Penghapusan Karena Hibah ke Masyarakat Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 209/HK/KPTS/V/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masyarakat	Alat Peraga IPA Lanjutan lain-lain	209/HK/KPTS/V/2024	351.750.000,00	Penghapusan Karena Hibah ke Masyarakat
Jumlah				351.750.000,00	

- e. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 238/HK/KPTS/VI/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	A.C. Split	238/HK/KPTS/VI/2024	21.562.367,73	Penghapusan Karena Lelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dispenser	238/HK/KPTS/VI/2024	2.035.714,00	Penghapusan Karena Lelang
Dinas	-	Drilling	238/HK/KPTS/VI/2024	85.822.112,00	Penghapusan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Machine			Karena Lelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Jar Tester	238/HK/KPTS/VI/2024	22.852.500,00	Penghapusan Karena Lelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Kipas Angin	238/HK/KPTS/VI/2024	379.237,86	Penghapusan Karena Lelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Lemari Besi/Metal	238/HK/KPTS/VI/2024	99.368.965,17	Penghapusan Karena Lelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Mesin Pemotong Aspal (Draging)	238/HK/KPTS/VI/2024	20.980.702,00	Penghapusan Karena Lelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Mobil Tangki Air	238/HK/KPTS/VI/2024	150.000.000,00	Penghapusan Karena Lelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Penampungan Air Hujan (PAH)	238/HK/KPTS/VI/2024	1.602.352.500,00	Penghapusan Karena Lelang
Jumlah				2.005.354.098,76	

- f. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 314/HK/KPTS/VIII/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Station Wagon	314/HK/KPTS/VIII/2024	413.100.000,00	Mutasi Aset
Sekretariat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Station Wagon	314/HK/KPTS/VIII/2024	550.400.000,00	Mutasi Aset
Sekretariat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Station Wagon	314/HK/KPTS/VIII/2024	338.000.000,00	Mutasi Aset



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Daerah				
Jumlah				1.301.500.000,00	

- g. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 321/HK/KPTS/IX/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Station Wagon	321/HK/KPTS/IX/2024	180.712.187,60	Mutasi Aset
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretariat Daerah	Sepeda Motor	321/HK/KPTS/IX/2024	24.605.384,00	Mutasi Aset
Jumlah				205.317.571,60	

- h. Perolehan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 349/HK/KPTS/XII/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Kementerian/Provinsi	Dinas Kesehatan	Tempat Tidur Besi	349/HK/KPTS/XII/2024	325.000.000,00	Pendapatan Hibah
Jumlah				325.000.000,00	

- i. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 350/HK/KPTS/XII/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	-	Peta	350/HK/KPTS/XII/2024	407.245.700,00	Penghapusan Karena RB
Jumlah				407.245.700,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.3.1.c.2.1. Alat Besar

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
54.964.777.561,00	52.632.286.962,98	2.332.490.598,02	4,43

Saldo Aset Peralatan dan Mesin-Alat Besar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp54.964.777.561,00 dan saldo Aset Peralatan dan Mesin-Alat Besar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp52.632.286.962,98. Pada Tahun 2023 terjadi Kenaikan Aset Peralatan dan Mesin-Alat Besar sebesar 4,43% atau Rp2.332.490.598,02.

Adapun kenaikan Aset Alat Besar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	555.848.400,00	538.318.400,00	17.530.000,00	3,26
Dinas Kesehatan	3.564.061.970,06	2.538.938.020,05	1.025.123.950,00	40,38
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.156.613.422,98	5.737.879.304,00	1.418.734.118,98	24,73
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4.897.053.092,52	4.094.053.092,52	803.000.000,00	19,61
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.882.767.972,15	2.400.009.706,96	(517.241.734,81)	(21,55)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	478.986.649,24	383.748.649,24	95.238.000,00	24,82
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.653.165,78	80.480.997,25	(67.827.831,47)	(84,28)
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	2.305.464,62	2.305.464,62	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.133.743,98	75.133.743,98	(0,00)	(0,00)
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	388.788.402,45	400.788.402,45	(12.000.000,00)	(2,99)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	803.261.842,98	803.261.842,98	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	33.993.882.708,96	34.182.292.304,25	(188.409.595,29)	(0,55)
Sekretariat DPRD	6.960.130,18	248.616.439,57	(241.656.309,39)	(97,20)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	190.960.000,00	190.960.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Daerah				
Badan Pendapatan Daerah	239.053.945,11	239.053.945,11	(0,00)	(0,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.895.000,00	3.895.000,00	0,00	0,00
Inspektorat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang	375.044.650,00	375.044.650,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Barat	120.342.000,00	120.342.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Pulau Merbau	61.403.000,00	61.403.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	26.742.000,00	26.742.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah	54.964.777.561,00	52.632.286.962,98	2.332.490.598,02	4,43

6.3.1.c.2.2. Alat Angkutan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
98.454.234.630,76	88.651.431.492,41	9.802.803.138,34	11,06

Saldo Aset Alat Angkutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp88.651.431.492,41 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp98.454.234.630,76. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan sebesar 11,06 % atau Rp9.802.803.138,34.

Adapun Penurunan Aset Alat Angkutan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.236.803.000,00	2.233.803.000,00	3.000.000,00	0,13
Dinas Kesehatan	22.537.537.777,87	16.861.392.595,87	5.676.145.182,00	33,66
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.699.015.695,85	1.279.808.895,36	419.206.800,49	32,76
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	3.280.100.053,83	2.889.100.053,83	391.000.000,00	13,53
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.745.467.506,04	2.668.917.506,04	76.550.000,00	2,87
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.520.714.325,64	1.878.605.139,64	1.642.109.186,00	87,41



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.238.370.083,50	1.238.370.083,50	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	731.374.523,34	731.374.523,34	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	127.971.900,00	127.971.900,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	138.177.000,00	154.862.000,00	(16.685.000,00)	(10,77)
Dinas Perhubungan	16.301.399.234,83	16.247.167.649,04	54.231.585,78	0,33
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	104.418.679,17	67.733.679,17	36.685.000,00	54,16
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	297.548.830,00	297.548.830,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan.Olahra ga dan Pariwisata	184.720.000,00	133.209.500,00	51.510.500,00	38,67
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	172.089.420,00	172.089.420,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	3.872.710.200,00	3.872.710.200,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.714.674.366,74	1.729.096.366,74	(14.422.000,00)	(0,83)
Sekretariat Daerah	28.830.076.643,72	28.311.099.027,64	518.977.616,08	1,83
Sekretariat DPRD	1.923.811.028,63	1.923.811.028,63	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	642.722.270,34	643.274.270,34	(552.000,00)	(0,09)
Badan Pengelola Keuagn dan Aset Daerah	1.593.096.619,93	554.265.351,93	1.038.831.268,00	187,42
Badan Pendapatan Daerah	349.923.908,90	457.043.908,90	(107.120.000,00)	(23,44)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	204.108.485,22	204.108.485,22	0,00	0,00
Inspektorat	413.952.353,00	413.952.353,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi	1.297.647.352,67	1.297.647.352,67	(0,00)	(0,00)
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	451.463.222,29	451.463.222,29	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang	395.195.000,00	395.195.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kecamatan Rangsang Barat	164.329.000,00	164.329.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Merbau	186.454.000,00	186.454.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Pulau Merbau	369.535.507,00	369.535.507,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	197.181.000,00	197.181.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	192.037.861,13	192.037.861,15	(0,02)	(0,00)
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	270.803.781,12	270.803.781,12	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68.804.000,00	35.469.000,00	33.335.000,00	93,98
Jumlah	98.454.234.630,76	88.651.431.492,41	9.802.803.138,35	11,06

6.3.1.c.2.3. Alat Bengkel dan Alat Ukur

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
3.253.308.515,45	3.091.746.013,07	161.562.502,38	5,23

Saldo Aset Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.091.746.013,07 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.253.308.515,45. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan Aset Tetap Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar 5,23 % atau Rp161.562.502,38. Adapun kenaikan Aset Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	150.540.950,00	150.540.950,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	229.413.023,56	172.019.523,56	57.393.500,00	33,36
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	561.293.395,46	193.447.805,03	367.845.590,43	190,15
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	166.381.385,21	166.381.385,21	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.079.028,75	42.079.028,75	0,00	0,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	56.929.450,00	56.929.450,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	785.989.602,69	785.989.602,69	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Desa				
Dinas Perhubungan	54.452.000,00	54.452.000,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	178.061.730,56	178.061.730,56	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan.Olahra ga dan Pariwisata	6.061.266,79	6.061.266,79	0,00	0,00
Dinas Perikanan	254.899.582,68	254.899.582,68	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	579.925.682,52	579.925.682,52	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	37.548.000,00	287.119.426,54	(249.571.426,54)	(86,92)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	0,00	14.105.161,50	(14.105.161,50)	(100,00)
Badan Pengelola Keuagn dan Aset Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	75.988.417,24	75.988.417,24	0,00	0,00
Inspektorat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Pulau Merbau	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	3.253.308.515,45	3.091.746.013,07	161.562.502,38	5,23

6.3.1.c.2.4. Alat Pertanian

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
16.152.057.065,63	16.142.057.065,63	10.000.000,00	0,06

Saldo Aset Alat Pertanian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.142.057.065,63 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.152.057.065,63. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan Aset Tetap Alat Pertanian 0,06% atau Rp10.000.000,00.

Adapun kenaikan Aset Alat Pertanian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	2.700.500,00	2.700.500,00	0,00	0,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.007.600,00	1.007.600,00	0,00	0,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan.	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	221.050.000,00	221.050.000,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	2.432.207.897,82	2.420.207.897,82	12.000.000,00	0,50
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.504.617.568,81	7.504.617.568,81	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang	1.828.547.549,00	1.828.547.549,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Barat	1.467.942.900,00	1.467.942.900,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	737.075.800,00	737.075.800,00	0,00	0,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	1.939.407.250,00	1.939.407.250,00	0,00	0,00
Jumlah	16.152.057.065,63	16.142.057.065,63	10.000.000,00	0,06

6.3.1.c.2.5. Alat Kantor dan Rumah Tangga

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
138.006.111.622,37	165.781.627.062,87	(27.775.515.440,50)	(16,75)

Saldo Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp165.781.627.062,87 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp138.006.111.622,37. Pada Tahun 2024 terjadi Penurunan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar 16,75% atau Rp27.775.515.440,50.

Adapun kenaikan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	51.003.089.725,52	47.946.923.225,53	3.056.166.499,99	6,37
Dinas Kesehatan	32.041.688.807,68	29.347.820.588,96	2.693.868.218,72	9,18
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.209.807.481,03	1.880.405.009,41	329.402.471,62	17,52
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2.545.039.302,31	2.490.245.302,31	54.794.000,00	2,20
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	977.406.287,16	1.113.303.564,43	(135.897.277,27)	(12,21)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan	949.631.860,76	928.483.760,76	21.148.100,00	2,28



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pemadam Kebakaran				
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	898.905.759,59	2.214.559.102,91	(1.315.653.343,32)	(59,41)
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	3.239.928.756,43	3.189.933.756,44	49.994.999,99	1,57
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.302.308.218,03	1.257.068.218,02	45.240.000,01	3,60
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	381.465.000,00	791.441.318,00	(409.976.318,00)	(51,80)
Dinas Perhubungan	694.065.802,36	692.627.319,36	1.438.483,00	0,21
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	114.266.332,11	115.981.561,71	(1.715.229,60)	(1,48)
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	325.999.916,71	294.985.916,71	31.014.000,00	10,51
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	1.214.108.994,18	1.214.108.994,18	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan.Olahra ga dan Pariwisata	693.728.947,58	1.146.881.916,91	(453.152.969,33)	(39,51)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.935.621.461,41	1.931.526.461,41	4.095.000,00	0,21
Dinas Perikanan	1.231.504.074,33	1.231.504.074,33	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.983.437.867,76	1.980.756.867,77	2.680.999,99	0,14
Sekretariat Daerah	13.792.429.376,51	41.898.437.029,35	(28.106.007.652,84)	(67,08)
Sekretariat DPRD	6.318.155.910,10	9.040.618.241,09	(2.722.462.330,99)	(30,11)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	1.517.736.756,00	2.030.739.310,15	(513.002.554,16)	(25,26)
Badan Pengelola Keuagn dan Aset Daerah	1.569.575.579,02	1.808.964.102,20	(239.388.523,18)	(13,23)
Badan Pendapatan Daerah	1.049.788.006,32	1.032.788.006,31	17.000.000,01	1,65
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.269.731.486,92	1.258.406.486,92	11.325.000,00	0,90
Inspektorat	628.280.379,49	840.362.394,66	(212.082.015,17)	(25,24)
Kecamatan Tebing Tinggi	1.081.940.985,21	1.081.940.985,21	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	490.773.122,43	488.273.122,43	2.500.000,00	0,51
Kecamatan	1.640.935.723,84	1.639.935.723,84	1.000.000,00	0,06



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Rangsang				
Kecamatan Rangsang Barat	890.945.100,00	878.790.100,00	12.155.000,00	1,38
Kecamatan Merbau	589.560.680,00	589.560.680,00	0,00	0,00
Kecamatan Pulau Merbau	635.664.000,00	635.664.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	873.734.924,30	873.734.924,30	0,00	0,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	624.981.329,50	624.981.329,50	0,02	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	1.074.669.205,54	1.074.669.205,54	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	215.204.462,23	215.204.462,24	(0,00)	(0,00)
Jumlah	138.006.111.622,37	165.781.627.062,87	(27.775.515.440,50)	(16,75)

6.3.1.c.2.6. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
16.838.226.673,90	19.476.844.869,60	(2.638.618.195,70)	(13,55)

Saldo Aset Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.476.844.869,61 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.838.226.673,90. Pada Tahun 2024 terjadi Penurunan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar 13,55% atau Rp2.638.618.195,71.

Adapun kenaikan Aset Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.205.197.929,00	4.147.768.129,00	57.429.800,00	1,38
Dinas Kesehatan	7.136.942.354,48	6.517.701.204,48	619.241.150,00	9,50
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74.191.170,03	152.468.441,70	(78.277.271,67)	(51,34)
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	29.664.327,91	29.664.327,91	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	388.747.752,64	431.794.482,40	(43.046.729,76)	(9,97)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	409.953.040,35	409.953.040,35	0,00	0,00
Dinas Sosial.	261.522.420,35	360.073.361,62	(98.550.941,27)	(27,37)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	233.911.897,62	233.911.897,62	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.660.497,44	174.660.497,44	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.675.000,00	81.286.973,00	(41.611.973,00)	(51,19)
Dinas Perhubungan	358.007.533,67	358.007.533,67	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	261.778.952,83	261.778.952,81	0,02	0,00
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	62.303.846,52	62.303.846,52	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	197.547.194,39	205.047.194,39	(7.500.000,00)	(3,66)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	36.310.480,65	36.310.480,65	0,00	0,00
Dinas Perikanan	53.759.948,92	53.759.948,92	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	253.058.866,60	253.058.866,60	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	693.777.132,17	3.714.744.110,09	(3.020.966.977,92)	(81,32)
Sekretariat DPRD	930.767.618,63	885.267.354,41	45.500.264,22	5,14
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	28.985.160,00	67.696.238,87	(38.711.078,87)	(57,18)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	131.785.500,01	131.785.500,01	(0,00)	(0,00)
Badan Pendapatan Daerah	543.657.560,64	543.657.560,64	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	50.103.512,13	50.103.512,13	0,00	0,00
Inspektorat	1.542.400,00	51.331.837,46	(49.789.437,46)	(97,00)
Kecamatan Tebing Tinggi	38.030.952,05	38.030.952,05	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	44.135.000,00	34.335.000,00	9.800.000,00	28,54
Kecamatan Rangsang	23.462.184,94	23.462.184,94	0,00	0,00
Kecamatan	36.514.402,40	28.649.402,40	7.865.000,00	27,45



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Rangsang Barat				
Kecamatan Merbau	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Pulau Merbau	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	16.632.037,53	16.632.037,53	0,00	0,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	49.300.000,00	49.300.000,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	16.838.226.673,90	19.476.844.869,60	(2.638.618.195,70)	(13,55)

6.3.1.c.2.7. Alat Kedokteran dan Kesehatan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
125.002.486.963,90	107.241.011.024,41	17.761.475.939,49	16,56

Saldo Aset Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp107.241.011.024,41 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp125.002.486.963,90. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar 16,56 % atau Rp17.761.475.939,49.

Adapun kenaikan Aset Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	124.908.479.812,35	107.147.003.872,85	17.761.475.939,50	16,58
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	76.143.151,56	76.143.151,56	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
Jumlah	125.002.486.963,90	107.241.011.024,41	17.761.475.939,49	16,56

6.3.1.c.2.8. Alat Laboratorium

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
28.535.810.173,32	24.590.824.492,38	3.944.985.680,94	16,04



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo awal Aset Alat Laboratorium per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp24.590.824.492,38 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp28.535.810.173,32. Pada Tahun 2023 terjadi Penurunan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Laboratorium sebesar 16,04% atau Rp3.944.985.680,94.

Adapun kenaikan Aset Alat Laboratorium tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	17.229.727.920,22	16.845.817.920,22	383.910.000,00	2,28
Dinas Kesehatan	9.571.602.315,01	5.436.571.305,01	4.135.031.010,00	76,06
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.041.872,00	214.872.096,00	(179.830.224,00)	(83,69)
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	83.321.934,00	83.321.934,00	0,00	0,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.633.643,67	365.383.643,66	(351.749.999,99)	(96,27)
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	7.548.831,30	7.548.831,30	0,00	0,00
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	49.225.000,00	49.225.000,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan.Olahraga dan Pariwisata	0,00	825.000,00	(825.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	529.270.690,68	529.270.690,68	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.014.937.966,44	1.014.937.966,44	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	11.550.465,07	(11.550.465,07)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	0,00	29.999.640,00	(29.999.640,00)	(100,00)
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	28.535.810.173,32	24.590.824.492,38	3.944.985.680,94	16,04

6.3.1.c.2.9. Alat persenjataan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
323.807.265,08	312.957.265,08	10.850.000,00	3,47



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo awal Aset Alat persenjataan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp312.957.265,08 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp323.807.265,08. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan Aset Alat persenjataan 3,47 % atau Rp10.850.000,00.

Adapun kenaikan Aset Alat persenjataan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	94.071.257,51	94.071.257,51	(0,00)	(0,00)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	60.620.692,00	60.620.692,00	0,00	0,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.940.000,00	2.790.000,00	(850.000,00)	(30,47)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	166.025.315,57	145.815.315,57	20.210.000,00	13,86
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	7.360.000,00	(7.360.000,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	950.000,00	(950.000,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
Jumlah	323.807.265,08	312.957.265,08	10.850.000,00	3,47

6.3.1.c.2.10. Komputer

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
94.491.413.764,72	101.704.576.858,82	(7.213.163.094,09)	(7,09)

Saldo Aset Komputer per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp101.704.576.858,81 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp94.491.413.764,72. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan Aset Komputer sebesar 7,09% atau Rp7.213.163.094,09.

Adapun kenaikan Aset Komputer tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	51.743.595.093,41	50.475.345.103,41	1.268.249.990,00	2,51



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	6.841.617.129,86	5.952.809.859,87	888.807.269,99	14,93
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.210.209.211,64	1.253.992.947,21	(43.783.735,57)	(3,49)
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	495.118.948,85	466.165.948,85	28.953.000,00	6,21
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	517.643.758,65	450.551.349,71	67.092.408,94	14,89
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	366.418.763,93	366.418.763,93	0,00	0,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.308.935.296,70	1.690.986.227,54	(382.050.930,84)	(22,59)
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	1.211.875.675,88	1.112.316.350,88	99.559.325,00	8,95
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.004.239.444,00	2.819.239.444,00	185.000.000,00	6,56
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	202.523.674,00	416.246.383,00	(213.722.709,00)	(51,35)
Dinas Perhubungan	462.772.181,29	477.529.007,04	(14.756.825,75)	(3,09)
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	6.959.572.891,02	6.631.181.290,97	328.391.600,06	4,95
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	251.106.134,13	223.676.134,13	27.430.000,00	12,26
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	1.109.424.577,25	1.109.424.577,25	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	216.610.592,02	554.438.768,13	(337.828.176,11)	(60,93)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	490.667.740,54	490.667.740,54	0,00	0,00
Dinas Perikanan	868.072.661,26	868.072.661,26	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	618.255.173,61	612.512.173,61	5.743.000,00	0,94
Sekretariat Daerah	3.942.429.765,94	12.177.846.729,79	(8.235.416.963,85)	(67,63)
Sekretariat DPRD	2.138.817.348,91	3.084.703.910,14	(945.886.561,23)	(30,66)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	956.163.578,19	1.047.193.198,54	(91.029.620,35)	(8,69)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.889.309.675,94	3.032.904.109,27	(143.594.433,33)	(4,73)
Badan Pendapatan Daerah	2.371.695.571,00	2.225.391.571,00	146.304.000,00	6,57
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	742.658.208,27	633.983.208,27	108.675.000,00	17,14
Inspektorat	510.157.481,76	652.944.213,81	(142.786.732,05)	(21,87)
Kecamatan Tebing Tinggi	657.689.088,09	657.689.088,09	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	217.256.000,00	175.562.000,00	41.694.000,00	23,75
Kecamatan Rangsang	485.070.031,67	478.700.031,67	6.370.000,00	1,33
Kecamatan Rangsang Barat	341.620.320,67	326.536.320,67	15.084.000,00	4,62
Kecamatan Merbau	128.760.000,00	128.760.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Pulau Merbau	330.231.680,00	315.331.680,00	14.900.000,00	4,73
Kecamatan Rangsang Pesisir	246.430.586,52	237.230.586,52	9.200.000,00	3,88
Kecamatan Tasik Putri Puyu	143.973.000,00	114.300.000,00	29.673.000,00	25,96
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	343.381.595,35	304.614.595,35	38.767.000,00	12,73
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	167.110.884,36	139.310.884,36	27.800.000,00	19,96
Jumlah	94.491.413.764,72	101.704.576.858,82	(7.213.163.094,09)	(7,09)

6.3.1.c.2.11. Alat Eksplorasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
227.163.254,75	227.163.254,75	0,00	0,00

Saldo awal Aset Alat Eksplorasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp227.163.254,75 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp227.163.254,75. Pada Tahun 2024 tidak terjadi kenaikan atau penurunan Aset Alat Eksplorasi.

Adapun kenaikan Aset Alat Eksplorasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Perikanan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	204.778.254,75	204.778.254,75	0,00	0,00
Jumlah	227.163.254,75	227.163.254,75	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.3.1.c.2.12. Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
642.004.000,00	642.004.000,00	0,00	0,00

Saldo awal Aset Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp642.004.000,00 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp642.004.000,00. Pada Tahun 2024 tidak terjadi kenaikan atau penurunan Aset Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian.

Adapun kenaikan Aset Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	165.120.000,00	165.120.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	311.404.000,00	311.404.000,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	39.980.000,00	39.980.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Barat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	642.004.000,00	642.004.000,00	0,00	0,00

6.3.1.c.2.13. Alat Keselamatan Kerja

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
541.820.610,22	755.066.350,64	(213.245.740,43)	(28,24)

Saldo awal Aset Alat Keselamatan Kerja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp755.066.350,64 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp541.820.610,22. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan Aset Alat Keselamatan Kerja sebesar 28,24% atau Rp213.245.740,43.

Adapun kenaikan Aset Alat Keselamatan Kerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	78.415.740,43	(78.415.740,43)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	215.430.000,00	215.430.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	155.238.251,53	155.238.251,53	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan.Olahraga dan Pariwisata	90.312.358,69	90.312.358,69	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	134.830.000,00	(134.830.000,00)	(100,00)
Kecamatan Rangsang Barat	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	541.820.610,22	755.066.350,64	(213.245.740,43)	(28,24)

6.3.1.c.2.14. Alat Peraga

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00

Saldo Aset Alat Peraga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.900.000,00 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.900.000,00. Pada Tahun 2024 tidak terjadi kenaikan atau penurunan Aset Alat Peraga.

Adapun Aset Alat Peraga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00
Jumlah	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00

6.3.1.c.2.15. Peralatan Proses/Produksi

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
154.625.544,58	6.978.800.137,46	(6.824.174.592,88)	(97,78)

Saldo Aset Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.978.800.137,46 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp154.625.544,58. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan Aset Aset Peralatan Proses/Produksi sebesar 97,78% atau Rp6.824.174.592,88.

Adapun kenaikan Aset Peralatan Proses/Produksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	66.008.610,58	66.008.610,58	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.125.278,00	6.889.968.282,61	(6.803.843.004,61)	(98,75)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.491.656,00	2.491.656,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	20.331.588,27	(20.331.588,27)	(100,00)
Jumlah	154.625.544,58	6.978.800.137,46	(6.824.174.592,88)	(97,78)

6.3.1.c.2.16. Rambu-rambu

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
2.412.709.311,78	1.355.953.671,78	1.056.755.640,00	77,93

Saldo Aset Rambu-rambu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.355.953.671,78 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.412.709.311,78. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan Aset Rambu-rambu sebesar 77,93 % atau Rp1.056.755.640,00.

Adapun kenaikan Aset Rambu-rambu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	946.572.000,00	0,00	946.572.000,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.983.326,01	3.028.326,01	44.955.000,00	1.484,48
Dinas Perhubungan	1.403.153.985,77	1.337.925.345,77	65.228.640,00	4,88
Jumlah	2.412.709.311,78	1.355.953.671,78	1.056.755.640,00	77,93

6.3.1.c.2.17. Peralatan Olahraga

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
810.669.428,64	803.369.325,88	7.300.102,76	0,91

Saldo awal Aset Peralatan Olahraga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp803.369.325,88 dan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp810.669.428,64. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan Aset Peralatan Olahraga sebesar 0,91 % atau Rp7.300.102,76.

Adapun kenaikan Aset Peralatan Olahraga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	658.626.021,36	620.058.821,36	38.567.200,00	6,22
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.090.000,00	0,00	9.090.000,00	100,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.376.507,28	5.376.507,28	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	2.428.000,00	2.428.000,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan.Olahraga dan Pariwisata	75.198.900,00	102.935.400,00	(27.736.500,00)	(26,95)
Sekretariat Daerah	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	0,00	9.120.597,24	(9.120.597,24)	(100,00)
Jumlah	810.669.428,64	803.369.325,88	7.300.102,76	0,91

6.3.1.c.3.Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
928.269.251.776,94	883.584.342.966,95	44.684.908.809,99	5,06

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp928.269.251.776,94 dan Rp883.584.342.966,95 Terjadi Kenaikan Pada Aset Gedung dan Bangunan Rp 44.684.908.809,99 dan 5,06 %. Penambahan dan Penurunan Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang berada pada OPD(Organisasi Perangkat Daerah) dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	421.336.352.137,81	22.640.570.551,00	0,00	398.695.781.586,81
Dinas Kesehatan	207.969.463.093,90	56.263.625.270,47	38.318.764.374,00	190.024.602.197,43
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.979.650.061,08	5.054.688.363,63	3.489.720.886,30	29.414.682.583,74
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan	11.988.133.124,70	0,00	0,00	11.988.133.124,70



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.793.202.068,68	0,00	180.236.000,00	4.973.438.068,68
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	275.558.396,00	0,00	0,00	275.558.396,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.287.984.207,69	3.328.169.785,00	0,00	4.959.814.422,69
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	3.874.461.000,00	0,00	0,00	3.874.461.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.888.289.500,53	232.171.000,00	0,00	1.656.118.500,53
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.128.718.758,82	280.515.758,82	0,00	2.848.203.000,00
Dinas Perhubungan	4.887.392.395,09	7.038.954.144,66	6.959.235.330,89	4.807.673.581,33
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	4.584.637.034,02	0,00	0,00	4.584.637.034,02
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	3.068.989.785,00	3.068.989.785,00
Dinas Kepemudaan.Olahra ga dan Pariwisata	35.860.476.403,63	0,00	0,00	35.860.476.403,63
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.743.753.403,00	195.183.000,00	0,00	3.548.570.403,00
Dinas Perikanan	4.936.485.038,99	688.322.562,00	0,00	4.248.162.476,99
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	58.429.140.741,83	364.478.750,60	0,00	58.064.661.991,23
Sekretariat Daerah	34.839.918.786,48	615.176.000,00	0,00	34.224.742.786,48
Sekretariat DPRD	11.573.625.201,30	0,00	0,00	11.573.625.201,30
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	7.070.984.931,00	0,00	0,00	7.070.984.931,00
Badan Pengelola Keuagn dan Aset Daerah	3.117.666.469,71	0,00	0,00	3.117.666.469,71
Badan Pendapatan Daerah	1.516.159.790,00	0,00	0,00	1.516.159.790,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan	5.015.433.240,00	0,00	0,00	5.015.433.240,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
SDM				
Inspektorat	1.132.718.722,19	0,00	0,00	1.132.718.722,19
Kecamatan Tebing Tinggi	7.213.434.752,00	0,00	0,00	7.213.434.752,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	4.977.407.859,00	0,00	0,00	4.977.407.859,00
Kecamatan Rangsang	9.762.455.500,00	0,00	0,00	9.762.455.500,00
Kecamatan Rangsang Barat	9.911.696.998,00	0,00	0,00	9.911.696.998,00
Kecamatan Merbau	6.582.143.000,00	0,00	0,00	6.582.143.000,00
Kecamatan Pulau Merbau	3.880.433.093,00	0,00	0,00	3.880.433.093,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	5.176.033.468,00	0,00	0,00	5.176.033.468,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	4.590.600.702,49	0,00	0,00	4.590.600.702,49
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	4.944.841.898,00	0,00	0,00	4.944.841.898,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	928.269.251.776,94	96.701.855.186,18	52.016.946.376,19	883.584.342.966,95

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Berdasarkan Persentase Kenaikan/(Penurunan)
per OPD(Organisasi Perangkat Daerah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	421.336.352.137,81	398.695.781.586,81	22.640.570.551,00	5,68
Dinas Kesehatan	207.969.463.093,90	190.024.602.197,43	17.944.860.896,47	9,44
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.979.650.061,08	29.414.682.583,74	1.564.967.477,33	5,32
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	11.988.133.124,70	11.988.133.124,70	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.793.202.068,68	4.973.438.068,68	(180.236.000,00)	(3,62)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	275.558.396,00	275.558.396,00	0,00	0,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.287.984.207,69	4.959.814.422,69	3.328.169.785,00	67,10
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman	3.874.461.000,00	3.874.461.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
dan Pertanian				
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.888.289.500,53	1.656.118.500,53	232.171.000,00	14,02
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.128.718.758,82	2.848.203.000,00	280.515.758,82	9,85
Dinas Perhubungan	4.887.392.395,09	4.807.673.581,33	79.718.813,76	1,66
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	4.584.637.034,02	4.584.637.034,02	0,00	0,00
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	3.068.989.785,00	(3.068.989.785,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	35.860.476.403,63	35.860.476.403,63	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.743.753.403,00	3.548.570.403,00	195.183.000,00	5,50
Dinas Perikanan	4.936.485.038,99	4.248.162.476,99	688.322.562,00	16,20
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	58.429.140.741,83	58.064.661.991,23	364.478.750,60	0,63
Sekretariat Daerah	34.839.918.786,48	34.224.742.786,48	615.176.000,00	1,80
Sekretariat DPRD	11.573.625.201,30	11.573.625.201,30	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	7.070.984.931,00	7.070.984.931,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.117.666.469,71	3.117.666.469,71	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	1.516.159.790,00	1.516.159.790,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.015.433.240,00	5.015.433.240,00	0,00	0,00
Inspektorat	1.132.718.722,19	1.132.718.722,19	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi	7.213.434.752,00	7.213.434.752,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	4.977.407.859,00	4.977.407.859,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang	9.762.455.500,00	9.762.455.500,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Barat	9.911.696.998,00	9.911.696.998,00	0,00	0,00
Kecamatan Merbau	6.582.143.000,00	6.582.143.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Pulau Merbau	3.880.433.093,00	3.880.433.093,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	5.176.033.468,00	5.176.033.468,00	0,00	0,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	4.590.600.702,49	4.590.600.702,49	0,00	0,00
Kecamatan Tebing	4.944.841.898,00	4.944.841.898,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tinggi Timur				
Jumlah	928.269.251.776,94	883.584.342.966,95	44.684.908.809,99	5,06

Saldo awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp883.584.342.966,95 dan saldo akhir aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp928.269.251.776,94. Terjadi kenaikan nilai Aset Gedung dan Bangunan 5,06 % atau Rp44.684.908.809,99. Adapun Mutasi masuk dan Mutasi Keluar nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Jumlah Penambahan	96.701.855.186,18
Mutasi OPD	3.249.225.785,00
Belanja Modal 2024	59.476.677.697,29
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	15.016.951.053,96
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	702.795.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	313.111.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lain lain	180.000.000,00
Aset Hibah	9.695.068.421,60
Reklasifikasi dari KDP	165.585.657,33
Utang tahun 2024	7.711.249.571,00
Koreksi Saldo Aset	191.191.000,00
Jumlah Pengurangan	52.016.946.376,19
Mutasi OPD	3.249.225.785,00
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	88.037.375,00
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.116.965.330,89
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	3.159.247.166,30
Transfer keluar KDP	38.230.726.999,00
Penghapusan Aset	172.743.720,00
Jumlah	44.684.908.809,99

Penjelasan Mutasi Masuk :

- Mutasi OPD Merupakan Mutasi Aset Antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Rp3.249.225.785,00 Pada Tahun 2024.
- Belanja Modal Merupakan Realisasi atas Belanja yang sudah di Anggarkan pada Tahun 2024 Rp59.476.677.697,29.
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Merupakan Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa yang di Kapitalisasikan Ke Aset Tetap sebagai Penambah Nilai dan/ atau Sebagai perolehan Aset Tetap dengan Rincian Sebagai Berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp11.334.655.115,00
Dinas Kesehatan	Rp2.208.746.366,37
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp240.658.000,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp259.180.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp199.575.758,82
Dinas Perhubungan	Rp79.718.813,76
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp195.183.000,00
Sekretariat Daerah	Rp499.234.000,00
Jumlah	Rp15.016.951.053,96

- d) Reklasifikasi dari Jalan,Irigasi dan Jaringan Merupakan Mutasi Aset dari KIB D ke KIB C berdasarkan klasifikasi aset tersebut pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 Rp702.795.000,00.
- e) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya Merupakan Mutasi Aset dari KIB E ke KIB C berdasarkan klasifikasi aset tersebut Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp232.171.000,00 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp80.940.000,00.
- f) Reklasifikasi dari Aset Lain lain Merupakan Mutasi Aset dari Aset Lainnya ke KIB C berdasarkan klasifikasi aset tersebut Pada Dinas Pendidikan Rp180.000.000,00.
- g) Reklasifikasi dari KDP Merupakan Mutasi Aset dari KIB F ke KIB C berdasarkan klasifikasi aset tersebut Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp165.585.657,33
- h) Aset Hibah Merupakan Perolehan Atas Aset melalui mekanisme Hibah baik dari Provinsi, Kementerian, dan Pihak Ketiga Lainnya, yang sudah di terima Asetnya dan sudah Di Terbitkan BAST dan SK atas Penerimaan Aset Tersebut. Aset Hibah Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 Terdapat pada Dinas Kesehatan Rp9.560.450.671,00.
- i) Utang tahun 2024 Merupakan Perolehan Aset yang di Akui di karenakan adanya Aset yang belum di bayar lunas atau masih terutang pada Tahun 2024, Utang Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024 Terdapat pada Dinas Pendidikan Rp103.778.000,00, Dinas Kesehatan Rp5.817.831.471,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.673.698.100,00 dan Sekretariat Daerah Rp115.942.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- j) Koreksi Saldo Aset Merupakan Koreksi saldo Awal Aset pada Gedung dan Bangunan di Karenakan Baru di nilai, kesalahan pencatatan pada Tahun sebelumnya, dan Lain lain yang di akui sebagai perolehan atau menambah nilai Aset pada Tahun 2024 Terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp191.191.000,00.

Penjelasan Mutasi Keluar :

- b) Mutasi OPD Merupakan Mutasi Aset Antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Rp3.249.225.785,00 Pada Tahun 2024.
- c) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin Merupakan Mutasi Aset dari KIB C ke KIB B berdasarkan klasifikasi aset tersebut pada Dinas Kesehatan Tahun 2024 Rp88.037.375,00.
- k) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Merupakan Mutasi Aset dari KIB C ke KIB D berdasarkan klasifikasi aset tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp157.730.000,00 dan Dinas Perhubungan Rp6.959.235.330,89.
- d) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya Merupakan Mutasi Aset dari KIB C ke KIB E berdasarkan klasifikasi aset tersebut Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp3.159.247.166,30.
- e) Reklasifikasi ke KDP Merupakan Mutasi Aset dari KIB C ke KIB F berdasarkan klasifikasi aset tersebut Pada Dinas Kesehatan Rp38.230.726.999,00.
- f) Penghapusan Aset Merupakan Penghapusan Aset Tahun 2024 di Karenakan adanya Lelang, Hibah keluar, Aset sudah di musnahkan, dan faktor lain yang dapat di pertanggungjawabkan OPD Terkait sehingga Aset Tersebut di hapus dari KIB dan Neraca dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdapat Penghapusan pada Dinas PUPR Rp172.743.720,00 di karenakan Aset Tersebut Telah di Lelang berdasarkan SK bupati No 238/HK/KPTS/VI/2024.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Berdasarkan Jenis Aset Tetap Sebagai Berikut :

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung	915.766.081.623,07	871.719.283.927,68	44.046.797.695,39	5,05
Monumen	1.746.940.593,33	1.746.940.593,33	0,00	0,00
Bangunan Menara	535.342.891,00	535.342.891,00	0,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.220.886.669,55	9.582.775.554,95	638.111.114,60	6,66



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah	928.269.251.776,94	883.584.342.966,95	44.684.908.809,99	5,06

Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai dengan dokumen terkait dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 220/HK/KPTS/VI/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bangunan Gedung Kantor	220/HK/KPTS/VI/2024	180.236.000,00	Mutasi Aset
Jumlah				180.236.000,00	

- b. Penghapusan Karena Lelang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 238/HK/KPTS/VI/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Bangunan Gedung Instalasi Pengelolaan Air	238/HK/KPTS/VI/2024	17.625.000,00	Penghapusan Karena Lelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Bangunan Gedung Instalasi Pengelolaan Air	238/HK/KPTS/VI/2024	79.152.720,00	Penghapusan Karena Lelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Bangunan Gedung Instalasi Pengelolaan Air	238/HK/KPTS/VI/2024	60.933.000,00	Penghapusan Karena Lelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Bangunan Gedung Instalasi Pengelolaan Air	238/HK/KPTS/VI/2024	15.033.000,00	Penghapusan Karena Lelang
Jumlah				172.743.720,00	

- c. Mutasi Aset Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 346/HK/KPTS/XII/2024 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	1.144.750.000,00	Mutasi Aset
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	10.900.000,00	Mutasi Aset
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	39.890.000,00	Mutasi Aset
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	29.992.000,00	Mutasi Aset
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	44.210.000,00	Mutasi Aset
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	8.450.000,00	Mutasi Aset
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	44.000.000,00	Mutasi Aset
Dinas	Dinas Sosial.	Bangunan	346/HK/KPTS/XII/2024	9.000.000,00	Mutasi Aset



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gedung Kantor			
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	192.326.785,00	Mutasi Aset
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	268.226.000,00	Mutasi Aset
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	19.790.000,00	Mutasi Aset
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	49.658.000,00	Mutasi Aset
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	39.909.000,00	Mutasi Aset
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	202.600.000,00	Mutasi Aset
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan	Bangunan Gedung Kantor	346/HK/KPTS/XII/2024	965.288.000,00	Mutasi Aset



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
	Keluarga Berencana				
Jumlah				3.068.989.785,00	

- d. Perolehan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 349/HK/KPTS/XII/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Kementerian/ Provinsi	Dinas Kesehatan	Bangunan Klinik/ Puskesmas	349/HK/KPTS/XII/2024	1.041.315.200,00	Pendapatan Hibah
Kementerian/ Provinsi	Dinas Kesehatan	Bangunan Klinik/ Puskesmas	349/HK/KPTS/XII/2024	1.913.136.000,00	Pendapatan Hibah
Kementerian/ Provinsi	Dinas Kesehatan	Bangunan Klinik/ Puskesmas	349/HK/KPTS/XII/2024	4.572.685.000,00	Pendapatan Hibah
Kementerian/ Provinsi	Dinas Kesehatan	Bangunan Klinik/ Puskesmas	349/HK/KPTS/XII/2024	2.033.314.471,00	Pendapatan Hibah
Jumlah				9.560.450.671,00	

6.3.1.c.3.1. Bangunan Gedung

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
915.766.081.623,07	871.719.283.927,68	44.046.797.695,39	5,05

Nilai Aset Tetap Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp915.766.081.623,07 dan Rp871.719.283.927,67. Terjadi Kenaikan Pada Aset Bangunan Gedung Rp44.046.797.695,39 dan 5,05 %. Penambahan dan Penurunan Nilai Aset Bangunan Gedung yang berada pada OPD(Organisasi Perangkat Daerah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	418.729.850.902,14	396.089.280.351,14	22.640.570.551,00	5,72
Dinas Kesehatan	207.168.964.351,90	189.224.103.455,43	17.944.860.896,47	9,48
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.248.553.187,07	27.187.079.073,74	1.061.474.113,33	3,90



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	10.845.675.729,70	10.845.675.729,70	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.793.202.068,68	4.973.438.068,68	(180.236.000,00)	(3,62)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	143.370.000,00	143.370.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.072.477.489,87	4.744.307.704,87	3.328.169.785,00	70,15
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	3.677.961.000,00	3.677.961.000,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.888.289.500,53	1.656.118.500,53	232.171.000,00	14,02
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.128.718.758,82	2.848.203.000,00	280.515.758,82	9,85
Dinas Perhubungan	4.269.402.932,14	4.189.684.118,38	79.718.813,76	1,90
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	4.230.993.784,03	4.230.993.784,02	0,01	0,00
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	3.068.989.785,00	(3.068.989.785,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	35.343.133.512,64	35.343.133.512,64	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.743.753.403,00	3.548.570.403,00	195.183.000,00	5,50
Dinas Perikanan	4.601.389.485,85	3.913.066.923,85	688.322.562,00	17,59
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	58.294.522.991,22	58.064.661.991,22	229.861.000,00	0,40
Sekretariat Daerah	33.730.628.740,90	33.115.452.740,90	615.176.000,00	1,86
Sekretariat DPRD	10.757.592.361,19	10.757.592.361,19	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	7.070.984.931,00	7.070.984.931,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.895.366.469,71	2.895.366.469,71	(0,00)	(0,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Daerah				
Badan Pendapatan Daerah	1.258.159.790,00	1.258.159.790,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.015.433.240,00	5.015.433.240,00	0,00	0,00
Inspektorat	1.132.718.722,19	1.132.718.722,19	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi	7.015.555.752,00	7.015.555.752,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	4.977.407.859,00	4.977.407.859,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang	9.762.455.500,00	9.762.455.500,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Barat	9.911.696.998,00	9.911.696.998,00	0,00	0,00
Kecamatan Merbau	6.564.143.000,00	6.564.143.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Pulau Merbau	3.880.433.093,00	3.880.433.093,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	5.077.803.468,00	5.077.803.468,00	0,00	0,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	4.590.600.702,49	4.590.600.702,49	0,01	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	4.944.841.898,00	4.944.841.898,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	915.766.081.623,07	871.719.283.927,68	44.046.797.695,39	5,05

6.3.1.c.3.2. Monumen

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1.746.940.593,33	1.746.940.593,33	0,00	0,00

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.746.940.593,33 dan Rp1.746.940.593,33. Tidak Terjadi Kenaikan Pada Aset Gedung dan Bangunan. Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang berada pada OPD(Organisasi Perangkat Daerah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	71.901.000,00	71.901.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk	215.506.717,82	215.506.717,82	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
danKeluarga Berencana				
Dinas Perhubungan	92.542.806,49	92.542.806,49	0,00	0,00
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	36.692.500,00	36.692.500,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	585.973.589,31	585.973.589,31	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	388.093.979,71	388.093.979,71	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	98.230.000,00	98.230.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.746.940.593,33	1.746.940.593,33	0,00	0,00

6.3.1.c.33. Bangunan Menara

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
535.342.891,00	535.342.891,00	0,00	0,00

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp535.342.891,00 dan Rp535.342.891,00. Tidak Terjadi Kenaikan Pada Aset Bangunan Menara. Nilai Aset Bangunan Menara yang berada pada OPD(Organisasi Perangkat Daerah) dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas KepemudaanOlahraga dan Pariwisata	517.342.891,00	517.342.891,00	0,00	0,00
Kecamatan Merbau	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	535.342.891,00	535.342.891,00	0,00	0,00

6.3.1.c.3.4. Tugu Titik Kontrol/Pasti

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
10.220.886.669,55	9.582.775.554,94	638.111.114,60	6,66

Nilai Aset Tetap Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.220.886.669,55 dan Rp9.582.775.554,94. Terjadi Kenaikan Pada Aset Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp 638.111.114,60 dan 6,66 %. Penambahan dan Penurunan Nilai Aset Tugu Titik Kontrol/Pasti yang berada pada OPD(Organisasi Perangkat Daerah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.606.501.235,67	2.606.501.235,67	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	800.498.742,00	800.498.742,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.731.096.874,00	2.227.603.510,00	503.493.364,00	22,60



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.070.556.395,00	1.070.556.395,00	0,00	0,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	132.188.396,00	132.188.396,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	525.446.656,46	525.446.656,46	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	316.950.750,00	316.950.750,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	335.095.553,14	335.095.553,14	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	134.617.750,60	0,00	134.617.750,60	100,00
Sekretariat Daerah	523.316.456,27	523.316.456,27	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	427.938.860,40	427.938.860,40	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	222.300.000,00	222.300.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi	197.879.000,00	197.879.000,00	0,00	0,00
Jumlah	10.220.886.669,55	9.582.775.554,94	638.111.114,60	6,66

6.3.1.c.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
2.807.667.597.548,36	2.694.332.289.297,32	113.335.308.251,04	4,21

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.807.667.597.548,36 dan Rp2.694.332.289.297,32 Terjadi Kenaikan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp113.335.308.253,04 dan 4,21 % yang berada pada OPD dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	271.619.000,00	0,00	0,00	271.619.000,00
Dinas Kesehatan	3.009.079.180,00	1.793.700.000,00	0,00	1.215.379.180,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.495.548.471.574,97	122.129.978.816,85	26.725.898.003,20	2.400.144.390.761,32
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan	18.765.691.343,33	7.815.218.767,32	686.906.336,83	11.637.378.912,84



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Lingkungan Hidup				
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	709.645.384,94	0,00	0,00	709.645.384,94
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	2.524.063.590,00	0,00	0,00	2.524.063.590,00
Dinas Perhubungan	207.011.552.668,64	8.723.091.716,89	0,00	198.288.460.951,75
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	751.913.431,10	0,00	0,00	751.913.431,10
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	26.724.000,00	0,00	0,00	26.724.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.381.000,00	0,00	0,00	33.381.000,00
Dinas Perikanan	5.081.187.814,84	286.123.290,00	0,00	4.795.064.524,84
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.553.214.023,30	0,00	0,00	2.553.214.023,30
Sekretariat Daerah	69.728.304.333,01	0,00	0,00	69.728.304.333,01
Sekretariat DPRD	478.360.204,23	0,00	0,00	478.360.204,23
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	123.850.000,00	0,00	0,00	123.850.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	273.402.000,00	0,00	0,00	273.402.000,00
Kecamatan Rangsang	657.918.000,00	0,00	0,00	657.918.000,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	119.220.000,00	0,00	0,00	119.220.000,00
Jumlah	2.807.667.597.548,36	140.748.112.591,06	27.412.804.340,03	2.694.332.289.297,32

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Persentase Kenaikan/(Penurunan) per OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	271.619.000,00	271.619.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	3.009.079.180,00	1.215.379.180,00	1.793.700.000,00	147,58
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.495.548.471.574,97	2.400.144.390.761,32	95.404.080.813,65	3,97
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan	18.765.691.343,33	11.637.378.912,84	7.128.312.430,49	61,25



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Lingkungan Hidup				
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	709.645.384,94	709.645.384,94	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	2.524.063.590,00	2.524.063.590,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	207.011.552.668,64	198.288.460.951,75	8.723.091.716,89	4,40
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	751.913.431,10	751.913.431,10	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	26.724.000,00	26.724.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.381.000,00	33.381.000,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	5.081.187.814,84	4.795.064.524,84	286.123.290,00	5,97
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.553.214.023,30	2.553.214.023,30	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	69.728.304.333,01	69.728.304.333,01	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	478.360.204,23	478.360.204,23	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	123.850.000,00	123.850.000,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	273.402.000,00	273.402.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang	657.918.000,00	657.918.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	119.220.000,00	119.220.000,00	0,00	0,00
Jumlah	2.807.667.597.548,36	2.694.332.289.297,32	113.335.308.251,03	4,21

Saldo akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.807.667.597.548,36 dan Rp2.694.332.289.297,32. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan 4,21% atau Rp113.335.308.253,03. Adapun kenaikan nilai Jalan Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Jumlah Penambahan	140.748.112.591,06
Belanja Modal 2024	68.476.709.950,53
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	3.817.717.216,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	7.116.965.330,89
Aset Hibah	286.123.290,00
Reklasifikasi dari KDP	42.069.914.511,70
Utang tahun 2024	10.435.778.291,94
Koreksi Saldo Aset	8.544.904.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Nilai
Jumlah Pengurangan	27.412.804.340,03
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	702.795.000,00
Transfer keluar KDP	24.161.639.036,83
Penghapusan Aset	1.602.352.500,00
Diakui Sebagai Beban	662.723.237,50
Pelunasan Utang Tahun sebelumnya	283.294.565,70
Jumlah	113.335.308.251,03

Penjelasan Mutasi Masuk :

- a) Belanja Modal Merupakan Realisasi atas Belanja yang sudah di Anggarkan pada Tahun 2024 Rp68.476.709.950,53.

- b) Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Merupakan Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa yang di Kapitalisasikan Ke Aset Tetap sebagai Penambah Nilai dan/ atau Sebagai perolehan Aset Tetap dengan Rincian Sebagai Berikut :

Dinas Kesehatan	Rp998.400.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp2.694.348.600,00
Dinas Perhubungan	Rp124.968.616,00
Jumlah	Rp3.817.717.216,00

- c) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Merupakan Mutasi Aset dari KIB C ke KIB D berdasarkan klasifikasi aset tersebut dengan Rincian Sebagai Berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp157.730.000,00
Dinas Perhubungan	Rp6.959.235.330,89
Jumlah	Rp7.116.965.330,89

- d) Aset Hibah Merupakan Perolehan Atas Aset melalui mekanisme Hibah baik dari Provinsi, Kementerian, dan Pihak Ketiga Lainnya, yang sudah di terima Asetnya dan sudah Di Terbitkan BAST dan SK atas Penerimaan Aset Tersebut. Aset Hibah Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 Terdapat pada Dinas Perikanan Rp286.123.290,00.
- e) Reklasifikasi dari KDP Merupakan Mutasi Aset dari KIB F ke KIB D berdasarkan klasifikasi aset tersebut Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 41.824.930.511,70 dan Pada Dinas Perhubungan Rp244.984.000,00.
- f) Utang tahun 2024 Merupakan Perolehan Aset yang di Akui di karenakan adanya Aset yang belum di bayar lunas atau masih terutang pada Tahun 2024, Utang Aset Gedung dan Bangunan Tahun dengan Rincian Sebagai Berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Kesehatan	Rp795.300.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp3.960.273.375,00
Dinas Perkim	Rp4.286.301.146,94
Dinas Perhubungan	Rp1.393.903.770,00
Jumlah	Rp10.435.778.291,94

- g) Koreksi Saldo Aset Merupakan Koreksi saldo Awal Aset pada Jalan Irigasi dan Jaringan di Karenakan Baru di nilai, kesalahan pencatatan pada Tahun sebelumnya, dan Lain lain yang di akui sebagai perolehan atau menambah nilai Aset pada Tahun 2024 Terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp8.544.904.000,00.

Penjelasan Mutasi Keluar :

- a) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan Merupakan Mutasi Aset dari KIB D ke KIB C berdasarkan klasifikasi aset tersebut pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 Rp702.795.000,00.
- b) Transfer keluar KDP Merupakan Mutasi Aset dari KIB D ke KIB F berdasarkan klasifikasi aset tersebut pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 Rp 23.474.732.700,00 dan Dinas Perkim Rp686.906.336,83.
- c) Penghapusan Aset Merupakan Penghapusan Aset Tahun 2024 di Karenakan adanya Lelang, Hibah keluar, Aset sudah di musnahkan, dan faktor lain yang dapat di pertanggungjawabkan OPD Terkait sehingga Aset Tersebut di hapus dari KIB dan Neraca dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdapat Penghapusan pada Dinas PUPR Rp1.602.352.500,00 di karenakan Aset Tersebut Telah di Lelang berdasarkan SK bupati No 238/HK/KPTS/VI/2024.
- d) Diakui Sebagai Beban Merupakan Realisasi Belanja Modal yang tidak masuk sebagai Aset Tetap berdasarkan klasifikasi aset tersebut Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp662.723.237,50.
- e) Pelunasan Utang Tahun sebelumnya Merupakan Pelunasan Atas Perolehan Utang pada tahun sebelumnya Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp283.294.565,70.

Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per Jenis dapat di jelaskan sebagai berikut :

Jenis Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jalan dan Jembatan	2.460.976.288.870,65	2.356.114.634.466,26	104.861.654.404,39	4,45
Bangunan Air	186.645.122.092,01	180.281.838.752,13	6.363.283.339,88	3,53
Instalasi	96.094.372.819,96	103.928.571.947,29	(7.834.199.127,32)	(7,54)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jaringan	63.951.813.765,74	54.007.244.131,65	9.944.569.634,10	18,41
Jumlah	2.807.667.597.548,36	2.694.332.289.297,32	113.335.308.251,04	4,21

6.3.1.c.4.1. Jalan dan Jembatan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
2.460.976.288.870,65	2.356.114.634.466,26	104.861.654.404,39	4,45

Nilai Aset Tetap Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.460.976.288.870,65 dan Rp2.356.114.634.466,26 Terjadi Kenaikan pada Aset Tetap Jalan dan Jembatan Rp104.861.654.404,39 dan 4,45 % yang berada pada OPD dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.234.592.932.377,73	2.143.488.965.190,21	91.103.967.187,52	4,25
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	14.667.379.656,19	9.533.109.486,21	5.134.270.169,98	53,86
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	411.653.981,99	411.653.981,99	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	1.196.732.310,00	1.196.732.310,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	206.853.838.585,52	198.230.421.538,63	8.623.417.046,89	4,35
Dinas Perikanan	804.905.345,00	804.905.345,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.442.329.156,64	1.442.329.156,64	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	887.667.457,58	887.667.457,58	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	118.850.000,00	118.850.000,00	0,00	0,00
Jumlah	2.460.976.288.870,65	2.356.114.634.466,26	104.861.654.404,39	4,45

6.3.1.c.4.2. Bangunan Air

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
186.645.122.092,01	180.281.838.752,13	6.363.283.341,88	3,53



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai Aset Tetap Bangunan Air per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp186.645.122.094,01 dan Rp180.281.838.752,13 Terjadi Kenaikan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp6.363.283.341,88 dan 3,53 % yang berada pada OPD dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	271.619.000,00	271.619.000,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.759.210.487,72	171.702.789.698,36	4.056.420.789,36	2,36
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4.023.371.687,14	2.029.329.426,63	1.994.042.260,51	98,26
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90.249.293,20	90.249.293,20	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	1.078.332.470,00	1.051.635.470,00	26.697.000,00	2,54
Dinas Perhubungan	43.039.413,12	43.039.413,12	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	166.747.431,10	166.747.431,10	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.881.000,00	23.881.000,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	4.096.715.889,17	3.810.592.599,16	286.123.290,01	7,51
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	208.557.800,00	208.557.800,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	185.785.620,56	185.785.620,56	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	37.492.000,00	37.492.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang	540.900.000,00	540.900.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	119.220.000,00	119.220.000,00	0,00	0,00
Jumlah	186.645.122.092,01	180.281.838.752,13	6.363.283.339,88	3,53

6.3.1.c.4.3. Instalasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
96.094.372.819,96	103.928.571.947,29	(7.834.199.127,33)	(7,54)

Nilai Aset Tetap Instalasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp96.094.372.819,96 dan Rp103.928.571.947,29 Terjadi Penurunan pada



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Tetap Instalasi 7.834.199.127,33 dan 7,54%, yang berada pada OPD dengan rincian sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	2.920.016.180,00	1.126.316.180,00	1.793.700.000,00	159,25
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74.556.966.998,77	84.257.843.796,09	(9.700.876.797,32)	(11,51)
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79.974.881,10	79.974.881,10	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	0,00	26.697.000,00	(26.697.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	114.674.670,00	15.000.000,00	99.674.670,00	664,50
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	505.476.000,00	505.476.000,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	26.724.000,00	26.724.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	165.427.580,67	165.427.580,67	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	17.065.109.925,76	17.065.109.925,77	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	292.574.583,66	292.574.583,66	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	235.910.000,00	235.910.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang	117.018.000,00	117.018.000,00	0,00	0,00
Jumlah	96.094.372.819,96	103.928.571.947,29	(7.834.199.127,33)	(7,54)

6.3.1.c.4.4. Jaringan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
63.951.813.765,74	54.007.244.131,65	9.944.569.634,10	18,41

Nilai Aset Tetap Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp63.951.813.765,74 dan Rp54.007.244.131,65 Terjadi Kenaikan pada Aset Tetap Jaringan Rp9.944.569.634,10 dan 18,41% yang berada pada OPD dengan rincian sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	89.063.000,00	89.063.000,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.639.361.710,75	694.792.076,66	9.944.569.634,09	1.431,30
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	74.940.000,00	74.940.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	127.767.228,65	127.767.228,65	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	248.998.810,00	248.998.810,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	79.690.000,00	79.690.000,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	14.139.000,00	14.139.000,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	902.327.066,67	902.327.066,67	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	51.775.526.949,67	51.775.526.949,67	0,00	0,00
Jumlah	63.951.813.765,74	54.007.244.131,65	9.944.569.634,10	18,41

6.3.1.c.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
57.017.436.313,42	51.637.794.539,58	5.379.641.773,84	10,42

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp57.017.436.313,42 dan Rp51.637.794.539,58 Terjadi kenaikan nilai aset tetap Aset Tetap Lainnya 10,42 % atau Rp5.379.641.773,84. Adapun kenaikan Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	29.459.292.911,74	5.825.107.084,00	3.045.981.300,00	26.680.167.127,74
Dinas Kesehatan	376.131.701,73	0,00	0,00	376.131.701,73
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.019.720.185,65	3.472.358.166,30	1.054.107.923,34	6.601.469.942,69
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	494.834.448,40	0,00	0,00	494.834.448,40
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	289.432.000,00	0,00	0,00	289.432.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	62.335.300,00	0,00	0,00	62.335.300,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33.514.600,00	0,00	0,00	33.514.600,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	745.764.250,00	0,00	0,00	745.764.250,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.670.000,00	232.171.000,00	232.171.000,00	14.670.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.650.000,00	80.940.000,00	80.940.000,00	1.650.000,00
Dinas Perhubungan	844.425.902,00	0,00	0,00	844.425.902,00
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	99.900.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	476.670.850,00	0,00	0,00	476.670.850,00
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	527.378.375,51	41.350.000,00	0,00	486.028.375,51
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.223.888.555,58	99.924.870,00	63.837.123,12	2.187.800.808,70
Dinas Perikanan	1.348.286.628,29	0,00	0,00	1.348.286.628,29
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.152.710.677,59	0,00	0,00	3.152.710.677,59
Sekretariat Daerah	5.063.074.575,98	0,00	0,00	5.063.074.575,98
Sekretariat DPRD	483.101.652,04	0,00	0,00	483.101.652,04
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	819.467.850,00	0,00	0,00	819.467.850,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40.179.500,00	0,00	0,00	40.179.500,00
Badan Pendapatan Daerah	1.100.511.800,00	0,00	0,00	1.100.511.800,00
Inspektorat	37.216.500,00	0,00	0,00	37.216.500,00
Kecamatan Tebing Tinggi	34.928.000,00	4.928.000,00	0,00	30.000.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	4.022.000,00	0,00	0,00	4.022.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Kecamatan Rangsang	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
Kecamatan Rangsang Barat	14.059.300,00	0,00	0,00	14.059.300,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	49.276.848,92	0,00	0,00	49.276.848,92
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	25.350.000,00	0,00	0,00	25.350.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	167.541.900,00	0,00	0,00	167.541.900,00
Jumlah	57.017.436.313,42	10.026.679.120,30	4.647.037.346,46	51.637.794.539,58

Nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Persentase Kenaikan/(Penurunan) per OPD(Organisasi Perangkat Daerah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Nama OPD	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	29.459.292.911,74	26.680.167.127,74	2.779.125.784,00	10,42
Dinas Kesehatan	376.131.701,73	376.131.701,73	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.019.720.185,65	6.601.469.942,69	2.418.250.242,96	36,63
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	494.834.448,40	494.834.448,40	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	289.432.000,00	289.432.000,00	0,00	0,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	62.335.300,00	62.335.300,00	0,00	0,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33.514.600,00	33.514.600,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	745.764.250,00	745.764.250,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.670.000,00	14.670.000,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	844.425.902,00	844.425.902,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi,	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Informatika, statistik dan Persandian				
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00	0,00
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	476.670.850,00	476.670.850,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan.Olahraga dan Pariwisata	527.378.375,51	486.028.375,51	41.350.000,00	8,51
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.223.888.555,58	2.187.800.808,70	36.087.746,88	1,65
Dinas Perikanan	1.348.286.628,29	1.348.286.628,29	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.152.710.677,59	3.152.710.677,59	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	5.063.074.575,98	5.063.074.575,98	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	483.101.652,04	483.101.652,04	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	819.467.850,00	819.467.850,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40.179.500,00	40.179.500,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	1.100.511.800,00	1.100.511.800,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	37.216.500,00	37.216.500,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi	34.928.000,00	30.000.000,00	4.928.000,00	16,43
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	4.022.000,00	4.022.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Barat	14.059.300,00	14.059.300,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	49.276.848,92	49.276.848,92	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	167.541.900,00	167.541.900,00	0,00	0,00
Jumlah	57.017.436.313,42	51.637.794.539,58	5.379.641.773,84	10,42

Saldo awal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah Rp Rp51.637.794.539,58 dan saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp57.017.436.313,41. Pada Tahun 2024 Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya 10,42 % atau Rp5.379.641.773,84. Adapun kenaikan Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Nilai
Jumlah Penambahan	10.026.679.120,30
Mutasi OPD	313.111.000,00
Belanja Modal 2024	4.116.234.600,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	2.438.086.354,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	3.159.247.166,30
Jumlah Pengurangan	4.647.037.346,46
Mutasi OPD	313.111.000,00
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	59.015.600,00
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	313.111.000,00
Penghapusan Aset	740.996.923,34
Extracomptable	3.050.802.823,12
Diakui Sebagai Beban	170.000.000,00
Jumlah	5.379.641.773,84

Penjelasan Mutasi Masuk :

- Mutasi OPD Merupakan Mutasi Aset Antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Rp313.111.000,00 Pada Tahun 2024
- Belanja Modal Merupakan Realisasi atas Belanja yang sudah di Anggaran pada Tahun 2024 Rp4.116.234.600,00.
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Merupakan Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa yang di Kapitalisasikan Ke Aset Tetap sebagai Penambah Nilai dan/ atau Sebagai perolehan Aset Tetap dengan Rincian Sebagai Berikut :

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp2.063.625.484,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp313.111.000,00
Dinas Kepemudaan.Olahraga dan Pariwisata	Rp41.350.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp19.999.870,00
Jumlah	Rp2.438.086.354,00

- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Merupakan Mutasi Aset dari KIB C ke KIB E berdasarkan klasifikasi aset tersebut pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 Rp3.159.247.166,30.

Penjelasan Mutasi Keluar :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Mutasi OPD Merupakan Mutasi Aset Antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Rp313.111.000,00 Pada Tahun 2024
- b) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin Merupakan Mutasi Aset dari KIB E ke KIB B dikarenakan Aset Tersebut termasuk dalam Klasifikasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin Rp59.015.600,00 Pada Dinas Pendidikan.
- c) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan Merupakan Mutasi Aset dari KIB E ke KIB C dikarenakan Aset Tersebut termasuk dalam Klasifikasi sebagai Aset Gedung dan Bangunan Rp232.171.000,00 Pada Dinas Kependudukan dan Ctatan Sipil, Rp80.940.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..
- d) Penghapusan Aset Merupakan Penghapusan Aset Tahun 2024 di Karenakan adanya Lelang, Hibah keluar,Aset sudah di musnahkan, dan faktor lain yang dapat di pertanggungjawabkan OPD Terkait sehingga Aset Tersebut di hapus dari KIB dan Neraca dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdapat Penghapusan pada Dinas PUPR Rp740.996.923,34 di karenakan Aset Tersebut Telah di Lelang berdasarkan SK bupati No 238/HK/KPTS/VI/2024.
- e) Extracomptabel Merupakan Belanja Modal yang Asetnya Tidak memenuhi Kriteria sebagai Aset Tetap, Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Mengeluarkan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 Sebagai Extracomptabel Rp2.986.965.700,00 Pada Dinas Pendidikan dan Rp63.837.123,12 Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- f) Diakui Sebagai Beban Merupakan Realisasi Belanja Modal yang di akui sebagai Beban di karenakan tidak termasuk klasifikasi sebagai Aset Tetap Rp170.000.000,00 pada OPD Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian.

Rincian Aset Tetap Lainnya per Jenis dapat di jelaskan sebagai berikut :

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	21.694.126.773,81	20.846.330.726,93	847.796.046,88	4,07
Barang Bercorak Kesenian/Keb udayaan/ Olahraga	7.064.801.801,75	7.014.831.801,75	49.970.000,00	0,71
Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanaman	175.855.209,01	916.852.132,35	(740.996.923,34)	(80,82)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	28.082.652.528,85	22.859.779.878,55	5.222.872.650,31	22,85
Jumlah	57.017.436.313,42	51.637.794.539,58	5.379.641.773,84	10,42

Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar pada Aset Tetap Lainnya sesuai dengan dokumen terkait dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penghapusan Aset Tetap Lainnya Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
 Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:
 238/HK/KPTS/VI/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Tanaman Hias	238/HK/KPTS/VI/2024	740.996.923,34	Penghapusan Karena Lelang
Jumlah				740.996.923,34	

6.3.1.c.5.1. Bahan Perpustakaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
21.694.126.773,81	20.846.330.726,93	847.796.046,88	4,07

Nilai Aset Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.694.126.773,81 dan Rp20.846.330.726,93 Terjadi kenaikan nilai aset tetap Aset Bahan Perpustakaan 4,07 % atau Rp847.796.046,88. Adapun kenaikan Aset Bahan Perpustakaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	14.646.086.397,06	13.980.556.097,06	665.530.300,00	4,76
Dinas Kesehatan	24.648.300,00	24.648.300,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	448.550.000,00	448.550.000,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	16.686.000,00	16.686.000,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	62.335.300,00	62.335.300,00	0,00	0,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33.514.600,00	33.514.600,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.670.000,00	14.670.000,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	33.916.000,00	33.916.000,00	0,00	0,00
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00	0,00
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	31.683.500,00	31.683.500,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	62.650.000,00	21.300.000,00	41.350.000,00	194,13
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.223.888.555,58	2.187.800.808,70	36.087.746,88	1,65
Dinas Perikanan	1.348.286.628,29	1.348.286.628,29	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	385.796.177,59	385.796.177,59	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	751.888.842,66	751.888.842,66	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	474.050.573,71	474.050.573,71	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	819.467.850,00	819.467.850,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40.179.500,00	40.179.500,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Inspektorat	37.216.500,00	37.216.500,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi	34.928.000,00	30.000.000,00	4.928.000,00	16,43
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	4.022.000,00	4.022.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Barat	14.059.300,00	14.059.300,00	0,00	0,00
Kecamatan	49.276.848,92	49.276.848,92	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Rangsang Pesisir				
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.825.900,00	8.825.900,00	0,00	0,00
Jumlah	21.694.126.773,81	20.846.330.726,93	847.796.046,88	4,07

6.3.1.c.5.2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
7.064.801.801,75	7.014.831.801,75	49.970.000,00	0,71

Nilai Aset Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.064.801.801,74 dan Rp7.014.831.801,75 Terjadi kenaikan nilai aset Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga 0,71 % atau Rp49.970.000,00. Adapun kenaikan Aset Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.545.134.000,00	1.495.164.000,00	49.970.000,00	3,34
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	380.131.817,71	380.131.817,71	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	444.987.350,00	444.987.350,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	3.111.808.458,53	3.111.808.458,53	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	1.099.011.800,00	1.099.011.800,00	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	7.064.801.801,75	7.014.831.801,75	49.970.000,00	0,71

6.3.1.c.5.3. Hewan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Nilai Aset Hewan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.3.1.c.5.4. Tanaman

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
175.855.209,01	916.852.132,35	(740.996.923,34)	(80,82)

Nilai Aset Tanaman per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp175.855.209,01 dan Rp916.852.132,35 Terjadi penurunan nilai aset Tanaman Rp740.996.923,34 dan 80,82%. Adapun rincian per OPD Aset Tanaman tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	740.996.923,34	(740.996.923,34)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	98.016.630,69	98.016.630,69	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	68.787.500,00	68.787.500,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	9.051.078,32	9.051.078,32	0,00	0,00
Jumlah	175.855.209,01	916.852.132,35	(740.996.923,34)	(80,82)

6.3.1.c.5.5. Aset Tetap Dalam Renovasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
28.082.652.528,85	22.859.779.878,55	5.222.872.650,31	22,85

Nilai Aset Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp28.082.652.528,85 dan Rp22.859.779.878,55 Terjadi kenaikan nilai aset Aset Tetap Dalam Renovasi 22,85 % atau Rp5.222.872.650,31. Adapun kenaikan Aset Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13.268.072.514,67	11.204.447.030,67	2.063.625.484,00	18,42
Dinas Kesehatan	351.483.401,73	351.483.401,73	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.571.170.185,65	5.411.923.019,35	3.159.247.166,30	58,38
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	279.432.000,00	279.432.000,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	745.764.250,00	745.764.250,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	810.509.902,00	810.509.902,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.698.127.000,00	2.698.127.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	1.199.377.274,80	1.199.377.274,79	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	158.716.000,00	158.716.000,00	0,00	0,00
Jumlah	28.082.652.528,85	22.859.779.878,55	5.222.872.650,31	22,85

6.3.1.c.6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
289.607.530.032,26	269.249.838.965,46	20.357.691.066,80	7,56

Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah Rp269.249.838.965,46 dan saldo akhir Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp289.607.530.032,26. Pada Tahun 2024 terjadi Kenaikan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp20.357.691.066,80 dan 7,56 % yang berada pada OPD dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Kenaikan/ (Penurunan)	31 Desember 2023
Dinas Kesehatan	38.467.576.999,00	38.267.926.999,00	0,00	199.650.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163.368.879.880,24	23.474.732.700,00	41.990.516.169,03	181.884.663.349,27
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	3.298.618.645,33	686.906.336,83	0,00	2.611.712.308,50
Dinas Perhubungan	75.377.827.375,38	74.725.200,00	244.984.000,00	75.548.086.175,38
Dinas Kepemudaan.Olahraga dan Pariwisata	372.056.692,31	88.900.000,00	0,00	283.156.692,31
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.674.457.040,00	0,00	0,00	7.674.457.040,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	210.162.400,00	0,00	0,00	210.162.400,00
Sekretariat Daerah	67.951.000,00	0,00	0,00	67.951.000,00
Kecamatan Merbau	770.000.000,00	0,00	0,00	770.000.000,00
Jumlah	289.607.530.032,26	62.593.191.235,83	42.235.500.169,03	269.249.838.965,46

Nilai Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Persentase Kenaikan/(Penurunan) per OPD(Organisasi Perangkat Daerah) dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	38.467.576.999,00	199.650.000,00	38.267.926.999,00	19.167,51
Dinas Pekerjaan	163.368.879.880,24	181.884.663.349,27	(18.515.783.469,03)	(10,18)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Umum dan Penataan Ruang				
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	3.298.618.645,33	2.611.712.308,50	686.906.336,83	26,30
Dinas Perhubungan	75.377.827.375,38	75.548.086.175,38	(170.258.800,00)	(0,23)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	372.056.692,31	283.156.692,31	88.900.000,00	31,40
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	210.162.400,00	210.162.400,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	67.951.000,00	67.951.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Merbau	770.000.000,00	770.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	289.607.530.032,26	269.249.838.965,46	20.357.691.066,80	7,56

Adapun mutasi KDP tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Jumlah Penambahan	62.593.191.235,83
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	200.825.200,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	32.462.875.528,00
Reklasifikasi dari Jalan,Irigasi dan Jaringan	24.161.639.036,83
Utang tahun 2024	5.767.851.471,00
Jumlah Pengurangan	42.235.500.169,03
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	165.585.657,33
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.069.914.511,70
Jumlah	20.357.691.066,80

Penjelasan Mutasi Masuk :

- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Merupakan Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa yang di Kapitalisasikan Ke Aset Tetap sebagai Penambah Nilai dan/ atau Sebagai perolehan Aset Tetap Pada Dinas Kesehatan Rp37.200.000,00, Pada Dinas Perhubungan Rp74.725.200,00, dan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga danPariwisata Rp88.900.000,00.
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Merupakan Mutasi Aset dari KIB C ke KIB F berdasarkan klasifikasi aset tersebut pada Dinas Kesehatan Tahun 2024 Rp38.230.726.999,00.
- Reklasifikasi dari Jalan,Irigasi dan Jaringan Merupakan Mutasi Aset dari KIB D ke KIB F berdasarkan klasifikasi aset tersebut Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp23.474.732.700,00, Dan pada Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Rp686.906.336,83.

Penjelasan Mutasi Keluar :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan Merupakan Mutasi Aset dari KIB F ke KIB C berdasarkan klasifikasi aset tersebut Pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp165.585.657,33
- b) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Merupakan Mutasi Aset dari KIB F ke KIB D berdasarkan klasifikasi aset tersebut Pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 41.824.930.511,70 merupakan Belanja dari tahun sebelumnya yang seharusnya di Kapitalisasikan ke Aset Induk yang berada Pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Rp 244.984.000,00 Pada Dinas Perhubungan

6.3.1.c.7.Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
(2.589.554.116.722,49)	(2.461.957.500.060,68)	(127.596.616.661,81)	5,18

Akumulasi Penyusutan merupakan nilai pengurang harga perolehan atas pengurangan masa manfaat aset tetap sesuai dengan umur ekonomis. Penghitungan akumulasi penyusutan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.589.554.116.722,49 dan Rp2.461.957.500.060,68 Terjadi Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pada Tahun 2023 Rp127.596.616.661,81 atau 5,18 % dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(183.534.135.109,35)	(159.623.262.893,04)	(23.910.872.216,31)	14,98
Dinas Kesehatan	(202.753.112.377,08)	(184.716.341.915,50)	(18.036.770.461,57)	9,76
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.895.636.622.812,23)	(1.780.019.817.188,48)	(115.616.805.623,75)	6,50
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	(13.807.526.927,10)	(12.284.096.724,00)	(1.523.430.203,10)	12,40
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(5.861.352.929,14)	(5.842.206.776,31)	(19.146.152,83)	0,33
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(3.872.676.453,52)	(3.698.134.130,59)	(174.542.322,93)	4,72
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(5.031.558.470,89)	(5.681.793.764,28)	650.235.293,39	(11,44)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	(9.099.098.744,50)	(8.854.138.416,21)	(244.960.328,29)	2,77
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(4.353.737.899,86)	(3.998.911.677,37)	(354.826.222,49)	8,87
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1.313.961.242,23)	(1.945.546.679,52)	631.585.437,29	(32,46)
Dinas Perhubungan	(43.706.554.827,61)	(39.280.109.551,51)	(4.426.445.276,10)	11,27
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	(4.853.446.969,97)	(3.098.982.001,52)	(1.754.464.968,45)	56,61
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	(756.384.306,99)	(1.248.559.917,85)	492.175.610,86	(39,42)
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	(2.828.090.219,41)	(2.787.536.993,92)	(40.553.225,49)	1,45
Dinas Kepemudaan.Olahraga dan Pariwisata	(8.966.292.730,96)	(8.960.239.788,32)	(6.052.942,64)	0,07
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.952.500.990,71)	(2.668.155.340,14)	(284.345.650,57)	10,66
Dinas Perikanan	(11.496.225.452,63)	(11.029.897.559,13)	(466.327.893,50)	4,23
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(22.413.534.878,01)	(20.652.552.933,41)	(1.760.981.944,60)	8,53
Sekretariat Daerah	(100.887.441.684,31)	(137.201.625.470,12)	36.314.183.785,81	(26,47)
Sekretariat DPRD	(10.512.937.625,40)	(14.406.349.002,79)	3.893.411.377,39	(27,03)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	(4.259.888.325,01)	(4.842.119.274,53)	582.230.949,52	(12,02)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(5.821.288.670,13)	(5.653.866.439,96)	(167.422.230,17)	2,96
Badan Pendapatan Daerah	(4.386.197.829,20)	(4.248.403.757,62)	(137.794.071,58)	3,24
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(3.344.614.363,47)	(3.203.526.654,49)	(141.087.708,98)	4,40
Inspektorat	(1.683.005.461,87)	(2.009.259.001,89)	326.253.540,02	(16,24)
Kecamatan Tebing Tinggi	(5.925.536.046,99)	(5.723.741.683,89)	(201.794.363,10)	3,53
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	(2.356.460.929,73)	(2.226.983.947,55)	(129.476.982,18)	5,81
Kecamatan Rangsang	(7.235.576.103,70)	(7.008.137.461,23)	(227.438.642,48)	3,25
Kecamatan Rangsang Barat	(5.155.657.792,03)	(4.924.771.823,03)	(230.885.969,00)	4,69
Kecamatan Merbau	(2.496.023.833,33)	(2.339.036.523,33)		
Kecamatan Pulau Merbau	(2.022.066.825,26)	(1.926.287.520,54)	(95.779.304,72)	4,97



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kecamatan Rangsang Pesisir	(3.137.347.494,68)	(3.002.230.759,61)	(135.116.735,06)	4,50
Kecamatan Tasik Putri Puyu	(3.717.965.735,28)	(3.613.554.581,35)	(104.411.153,93)	2,89
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	(2.940.487.262,53)	(2.821.482.838,86)	(119.004.423,67)	4,22
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(434.807.397,38)	(415.839.068,81)	(18.968.328,57)	4,56
Jumlah	(2.589.554.116.722,49)	(2.461.957.500.060,68)	(127.596.616.661,81)	5,18

Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis dapat di rincikan Sebagai Berikut :

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(470.461.554.257,90)	(490.548.310.892,67)	20.086.756.634,77	(4,09)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(175.685.748.061,69)	(155.785.161.702,53)	(19.900.586.359,15)	12,77
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.922.747.568.630,53)	(1.796.354.298.781,67)	(126.393.269.848,86)	7,04
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(20.659.245.772,38)	(19.269.728.683,80)	(1.389.517.088,57)	7,21
Jumlah	(2.589.554.116.722,49)	(2.461.957.500.060,68)	(127.596.616.661,82)	5,18

6.3.1.c.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
(470.461.554.257,90)	(490.548.310.892,67)	20.086.756.634,77	(4,09)

Nilai akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp470.461.554.257,90 dan Rp490.548.310.892,67 Terjadi penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pada Tahun 2024 Rp20.086.756.634,77 atau 4,09% dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Penurunan	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(97.526.765.010,11)	(82.161.134.343,62)	(15.365.630.666,48)	18,70
Dinas Kesehatan	(159.492.341.391,24)	(147.810.234.360,54)	(11.682.107.030,70)	7,90
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(12.356.367.273,64)	(16.628.622.948,47)	4.272.255.674,83	(25,69)
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	(10.020.276.413,55)	(9.778.488.898,62)	(241.787.514,94)	2,47
Badan Penanggulangan	(5.078.557.808,58)	(5.139.085.349,20)	60.527.540,61	(1,18)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Penurunan	%
Bencana Daerah				
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(3.842.615.904,94)	(3.673.584.749,93)	(169.031.155,01)	4,60
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(3.152.994.294,39)	(4.589.088.758,98)	1.436.094.464,59	(31,29)
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	(6.284.124.795,40)	(6.238.721.961,30)	(45.402.834,10)	0,73
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(4.042.141.808,16)	(3.721.208.422,81)	(320.933.385,35)	8,62
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(686.428.267,71)	(1.377.037.879,52)	690.609.611,81	(50,15)
Dinas Perhubungan	(18.453.375.506,68)	(18.144.385.444,07)	(308.990.062,60)	1,70
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	(3.847.854.739,62)	(2.199.839.798,85)	(1.648.014.940,77)	74,92
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	(756.384.307,00)	(694.080.033,26)	(62.304.273,74)	8,98
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	(2.828.090.219,40)	(2.787.536.993,91)	(40.553.225,49)	1,45
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	(1.369.978.017,81)	(2.084.389.417,70)	714.411.399,89	(34,27)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.156.566.318,79)	(1.945.074.910,40)	(211.491.408,39)	10,87
Dinas Perikanan	(9.458.856.186,11)	(9.331.075.909,79)	(127.780.276,32)	1,37
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(13.654.578.829,71)	(13.294.069.515,06)	(360.509.314,65)	2,71
Sekretariat Daerah	(70.321.429.682,48)	(109.111.951.327,49)	38.790.521.645,01	(35,55)
Sekretariat DPRD	(8.415.986.285,29)	(12.527.913.406,45)	4.111.927.121,16	(32,82)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	(2.647.234.556,86)	(3.382.895.205,00)	735.660.648,14	(21,75)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(4.998.052.157,64)	(4.893.920.896,91)	(104.131.260,74)	2,13
Badan Pendapatan Daerah	(4.144.978.911,49)	(4.036.365.781,83)	(108.613.129,66)	2,69
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(2.149.146.325,87)	(2.108.367.281,69)	(40.779.044,18)	1,93



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Penurunan	%
Inspektorat	(1.431.883.955,88)	(1.780.791.870,34)	348.907.914,46	(19,59)
Kecamatan Tebing Tinggi	(3.053.884.501,98)	(3.025.288.531,14)	(28.595.970,83)	0,95
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	(1.152.127.386,39)	(1.109.536.761,39)	(42.590.625,00)	3,84
Kecamatan Rangsang	(4.724.457.834,10)	(4.705.927.342,43)	(18.530.491,67)	0,39
Kecamatan Rangsang Barat	(2.956.476.872,60)	(2.923.824.843,55)	(32.652.029,05)	1,12
Kecamatan Merbau	(915.229.513,33)	(889.975.063,33)	(25.254.450,00)	2,84
Kecamatan Pulau Merbau	(1.403.801.960,81)	(1.385.631.317,95)	(18.170.642,86)	1,31
Kecamatan Rangsang Pesisir	(2.045.346.824,30)	(2.016.135.158,59)	(29.211.665,71)	1,45
Kecamatan Tasik Putri Puyu	(2.928.640.580,53)	(2.916.041.440,65)	(12.599.139,88)	0,43
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	(1.763.708.207,02)	(1.743.600.621,30)	(20.107.585,71)	1,15
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(400.871.608,49)	(392.484.346,59)	(8.387.261,90)	2,14
Jumlah	(470.461.554.257,90)	(490.548.310.892,67)	20.086.756.634,77	(4,09)

6.3.1.c.7. 2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
(175.685.748.061,69)	(155.785.161.702,53)	(19.900.586.359,15)	12,77

Nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp175.685.748.061,69 dan Rp155.785.161.702,53 Terjadi Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pada Tahun 2023 Rp19.900.586.359,15 atau 12,77% dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Penurunan	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(75.188.853.643,58)	(67.435.256.934,31)	(7.753.596.709,27)	11,50
Dinas Kesehatan	(42.812.515.042,12)	(36.525.370.369,03)	(6.287.144.673,09)	17,21
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(5.503.713.543,17)	(5.002.397.905,25)	(501.315.637,92)	10,02
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	(2.191.690.590,25)	(1.951.927.927,76)	(239.762.662,49)	12,28
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(636.917.876,11)	(575.872.982,67)	(61.044.893,44)	10,60
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(30.060.548,58)	(24.549.380,66)	(5.511.167,92)	22,45
Dinas Sosial. Pemberdayaan	(1.373.825.455,44)	(614.054.267,68)	(759.771.187,77)	123,73



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Penurunan	%
Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	(868.847.608,10)	(791.608.039,65)	(77.239.568,46)	9,76
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(311.596.091,70)	(277.703.254,56)	(33.892.837,14)	12,20
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(627.532.974,52)	(568.508.800,00)	(59.024.174,52)	10,38
Dinas Perhubungan	(1.034.290.323,92)	(938.779.546,46)	(95.510.777,46)	10,17
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	(827.192.206,09)	(741.532.264,19)	(85.659.941,90)	11,55
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	(554.479.884,59)	554.479.884,60	(100,00)
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	(0,01)	(0,01)	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan.Olahra ga dan Pariwisata	(7.588.965.613,15)	(6.869.169.370,62)	(719.796.242,53)	10,48
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(787.170.110,83)	(715.349.401,97)	(71.820.708,86)	10,04
Dinas Perikanan	(857.172.904,05)	(770.713.635,29)	(86.459.268,76)	11,22
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(7.422.260.649,94)	(6.224.863.013,86)	(1.197.397.636,08)	18,71
Sekretariat Daerah	(7.734.885.285,67)	(7.071.662.828,78)	(663.222.456,89)	9,38
Sekretariat DPRD	(2.028.618.167,84)	(1.823.355.343,45)	(205.262.824,39)	11,26
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	(1.550.363.351,48)	(1.408.943.652,86)	(141.419.698,62)	10,04
Badan Pengelola Keuagn dan Aset Daerah	(735.022.195,83)	(678.878.709,72)	(56.143.486,10)	8,27
Badan Pendapatan Daerah	(241.218.917,70)	(212.037.975,79)	(29.180.941,92)	13,76
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(1.195.468.037,60)	(1.095.159.372,80)	(100.308.664,80)	9,16
Inspektorat	(251.121.505,98)	(228.467.131,54)	(22.654.374,44)	9,92
Kecamatan Tebing Tinggi	(2.871.651.545,02)	(2.698.453.152,74)	(173.198.392,27)	6,42
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	(1.204.333.543,34)	(1.117.447.186,16)	(86.886.357,18)	7,78
Kecamatan Rangsang	(2.346.196.869,60)	(2.151.032.168,80)	(195.164.700,80)	9,07



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Penurunan	%
Kecamatan Rangsang Barat	(2.199.180.919,44)	(2.000.946.979,48)	(198.233.939,96)	9,91
Kecamatan Merbau	(1.580.794.320,00)	(1.449.061.460,00)	(131.732.860,00)	9,09
Kecamatan Pulau Merbau	(618.264.864,46)	(540.656.202,60)	(77.608.661,86)	14,35
Kecamatan Rangsang Pesisir	(1.055.047.870,38)	(951.527.201,02)	(103.520.669,36)	10,88
Kecamatan Tasik Putri Puyu	(789.325.154,75)	(697.513.140,70)	(91.812.014,05)	13,16
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	(1.176.779.055,51)	(1.077.882.217,55)	(98.896.837,96)	9,18
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	(175.685.748.061,69)	(155.785.161.702,53)	(19.900.586.359,15)	12,77

6.3.1.c.7. 3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
(1.922.747.568.630,53)	(1.796.354.298.781,67)	(126.393.269.848,86)	7,04

Nilai akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.922.747.568.630,53 dan Rp1.796.354.298.781,67 Terjadi Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pada Tahun 2024 Rp126.393.269.848,86 atau 7,04 % dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Penurunan	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(63.632.341,67)	(45.473.493,34)	(18.158.848,33)	39,93
Dinas Kesehatan	(230.957.302,68)	(186.870.771,67)	(44.086.531,01)	23,59
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.872.331.587.869,60)	(1.753.337.668.183,37)	(118.993.919.686,23)	6,79
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	(1.595.559.923,30)	(553.679.897,62)	(1.041.880.025,67)	188,17
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(504.738.721,07)	(478.650.737,63)	(26.087.983,44)	5,45
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	(1.491.100.063,21)	(1.418.499.754,14)	(72.600.309,07)	5,12
Dinas Perhubungan	(23.516.447.081,95)	(19.548.536.639,38)	(3.967.910.442,57)	20,30
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	(178.400.024,26)	(157.609.938,48)	(20.790.085,78)	13,19
Dinas	(7.349.100,00)	(6.681.000,00)	(668.100,00)	10,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Penurunan	%
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(8.764.561,10)	(7.731.027,77)	(1.033.533,33)	13,37
Dinas Perikanan	(1.180.196.362,47)	(928.108.014,05)	(252.088.348,42)	27,16
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.287.313.856,15)	(1.114.963.071,15)	(172.350.785,00)	15,46
Sekretariat Daerah	(19.930.809.317,47)	(18.197.652.400,17)	(1.733.156.917,30)	9,52
Sekretariat DPRD	(68.333.172,29)	(55.080.252,91)	(13.252.919,38)	24,06
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	(62.290.416,67)	(50.280.416,67)	(12.010.000,00)	23,89
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(88.214.316,66)	(81.066.833,33)	(7.147.483,33)	8,82
Kecamatan Rangsang	(164.921.400,00)	(151.177.950,00)	(13.743.450,00)	9,09
Kecamatan Rangsang Pesisir	(36.952.800,00)	(34.568.400,00)	(2.384.400,00)	6,90
Jumlah	(1.922.747.568.630,53)	(1.796.354.298.781,67)	(126.393.269.848,86)	7,04

6.3.1.c.7. 4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
(20.659.245.772,38)	(19.269.728.683,80)	(1.389.517.088,57)	7,21

Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.659.245.772,38 dan Rp19.269.728.683,81. Terjadi Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pada Tahun 2024 Rp1.389.517.088,58 atau 7,21 % dengan rincian sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Penurunan	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(10.754.884.113,99)	(9.981.398.121,76)	(773.485.992,23)	7,75
Dinas Kesehatan	(217.298.641,04)	(193.866.414,26)	(23.432.226,78)	12,09
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(5.429.474.392,50)	(5.051.128.151,39)	(378.346.241,11)	7,49
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(145.877.244,45)	(127.248.444,44)	(18.628.800,01)	14,64
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman dan Pertanian	(455.026.277,78)	(405.308.661,12)	(49.717.616,66)	12,27
Dinas Perhubungan	(702.441.915,07)	(648.407.921,60)	(54.033.993,47)	8,33
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(19.990.000,00)	(18.657.333,33)	(1.332.666,67)	7,14
Sekretariat Daerah	(2.900.317.398,67)	(2.820.358.913,69)	(79.958.484,99)	2,84
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(33.935.788,89)	(23.354.722,23)	(10.581.066,66)	45,31



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Penurunan	%
Jumlah	(20.659.245.772,38)	(19.269.728.683,81)	(1.389.517.088,58)	7,21

6.3.1.d. Aset Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
125.828.110.371,84	206.104.147.755,80	(80.276.037.383,96)	(38,95)

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp125.828.110.371,84 dan Rp206.104.147.755,80. Terjadi Penurunan Aset Lainnya Rp80.276.037.383,96 atau 38,95%. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap seperti Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.714.000.424,76	1.431.101.311,53	8.000.000,00	4.137.101.736,29
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	3.381.816.150,94	169.986.282,00	702.200,00	3.551.100.232,94
Aset Lain-lain	202.741.823.815,98	65.030.201.357,13	32.184.862.420,00	235.587.162.753,11
Akumulasi Amortisasi	(2.733.492.635,88)	(220.765.023,14)	0,00	(2.954.257.659,02)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(114.492.996.691,49)	0,00	(114.492.996.691,49)
Jumlah	206.104.147.755,80	(48.082.472.763,96)	32.193.564.620,00	125.828.110.371,84

Rincian Aset Lainnya berdasarkan persentase Kenaikan atau Penurunan sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.137.101.736,29	2.714.000.424,76	1.423.101.311,53	52,44
Aset Tak Berwujud	3.551.100.232,94	3.381.816.150,94	169.284.082,00	5,01
Aset Lain-lain	235.587.162.753,11	202.741.823.815,98	32.845.338.937,14	16,20
Akumulasi Amortisasi	(2.954.257.659,02)	(2.733.492.635,88)	(220.765.023,14)	8,08
Akumulasi Aset Lainnya	(114.492.996.691,49)	0,00	(114.492.996.691,49)	100,00
Jumlah	125.828.110.371,84	206.104.147.755,80	(80.276.037.383,96)	(38,95)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.3.1.d.1. Tagihan Penjualan Angsuran

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo pada Tagihan Penjualan Angsuran 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.3.1.d.2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
4.137.101.736,29	2.714.000.424,76	1.423.101.311,53	52,44

Saldo pada Tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.137.101.736,29 Terjadi Kenaikan Tuntutan ganti rugi pada Tahun 2024 Rp1.423.101.311,53 dan 52,44%. Kenaikan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2024 Terdapat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara Rp1.351.687.740,43 dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya Rp2.785.413.995,86. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya Terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pegawai Negeri Bukan Bendahara Rp 1.400.553.684,33 dan Pihak Ketiga Rp667.824.399,00.

Rincian Penambahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Dapat di Rincikan Sebagai Berikut :

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	50.512.766,98	0,00	50.512.766,98	100,00
Dinas Kesehatan	276.420.010,00	284.420.010,00	(8.000.000,00)	(2,81)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.030.214.895,77	0,00	1.030.214.895,77	100,00
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	394.771,84	0,00	394.771,84	100,00
Dinas Perhubungan	82.991.076,37	0,00	82.991.076,37	100,00
Dinas Perikanan	9.320.000,00	0,00	9.320.000,00	100,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
Sekretariat Daerah	2.429.580.414,76	2.429.580.414,76	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	232.667.800,57	0,00	232.667.800,57	100,00
Jumlah	4.137.101.736,29	2.714.000.424,76	1.423.101.311,53	52,44

6.3.1.d.3. Aset Tak Berwujud

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
3.551.100.232,94	3.381.816.150,94	169.284.082,00	5,01



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo pada Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.551.100.232,94 dan tahun 2023 sebesar Rp3.381.816.150,94. Terjadi Kenaikan pada Aset Tak Berwujud Rp169.284.082,00 atau 5,01 %. Rincian Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	909.161.142,00	12.478.342,00	702.200,00	897.385.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73.798.000,00	0,00	0,00	73.798.000,00
Dinas Perhubungan	64.994.940,00	64.994.940,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	116.449.391,18	0,00	0,00	116.449.391,18
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	86.513.000,00	86.513.000,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	190.700.000,00	0,00	0,00	190.700.000,00
Sekretariat DPRD	159.634.016,38	0,00	0,00	159.634.016,38
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	44.834.749,40	0,00	0,00	44.834.749,40
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.669.371.681,00	0,00	0,00	1.669.371.681,00
Badan Pendapatan Daerah	99.690.000,00	0,00	0,00	99.690.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	97.313.853,99	0,00	0,00	97.313.853,99
Inspektorat	32.639.459,00	0,00	0,00	32.639.459,00
Jumlah	3.551.100.232,94	169.986.282,00	702.200,00	3.381.816.150,94

Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan persentase Kenaikan atau Penurunan sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	909.161.142,00	897.385.000,00	11.776.142,00	1,31
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73.798.000,00	73.798.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	64.994.940,00	0,00	64.994.940,00	0,00
Dinas Komunikasi,	116.449.391,18	116.449.391,18	(0,01)	(0,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Informatika, statistik dan Persandian				
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	86.513.000,00	0,00	86.513.000,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	190.700.000,00	190.700.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	159.634.016,38	159.634.016,38	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	44.834.749,40	44.834.749,40	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.669.371.681,00	1.669.371.681,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	99.690.000,00	99.690.000,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	97.313.853,99	97.313.853,99	0,00	0,00
Inspektorat	32.639.459,00	32.639.459,00	0,00	0,00
Jumlah	3.551.100.232,94	3.381.816.150,94	169.284.082,00	5,01

6.3.1.d.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
(2.954.257.659,01)	(2.733.492.635,88)	(220.765.023,13)	8,08

Saldo pada Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.954.257.659,01 Terjadi Kenaikan Rp220.765.023,13 atau 8,08% dengan rincian sebagai berikut.

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(6.000.000,00)	0,00	(6.000.000,00)	100
Dinas Kesehatan	(628.942.966,56)	(548.092.083,34)	(80.850.883,23)	14,75
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(45.508.766,67)	(30.749.166,67)	(14.759.600,00)	48,00
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	(48.520.579,65)	(25.230.701,42)	(23.289.878,24)	92,31
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(177.986.666,67)	(139.846.666,67)	(38.140.000,00)	27,27
Sekretariat DPRD	(125.940.512,29)	(94.013.709,01)	(31.926.803,28)	33,96
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	(44.834.749,40)	(38.856.782,81)	(12.759.600,00)	11,47
Badan Pengelola	(1.669.371.681,00)	(1.669.371.681,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kuangan dan Aset Daerah				
Badan Pendapatan Daerah	(99.690.000,00)	(86.398.000,00)	(13.292.000,00)	15,38
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(97.313.853,99)	(97.313.853,99)	0,00	0,00
Inspektorat	(10.147.882,78)	(3.619.990,98)	(6.527.891,80)	180,33
Jumlah	(2.954.257.659,01)	(2.733.492.635,88)	(220.765.023,13)	8,08

6.3.1.d.5. Aset Lain-lain

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
235.587.162.753,11	202.741.823.815,98	32.845.338.937,13	16,20

Saldo pada Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp235.587.162.753,11 dan per 31 Desember 2023 Rp202.741.823.815,98 Terjadi kenaikan Aset Lain-lain sebesar Rp32.845.338.937,13 atau 16,20%.

Rincian Aset Lain-lain per Jenis adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Piutang				
Piutang TDF	30.862.408.000,00	3.470.635.000,00	30.862.408.000,00	3.470.635.000,00
Piutang Jaspel	50.747.410.805,00	0,00	0,00	50.747.410.805,00
Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	127.028.308,00	0,00	0,00	127.028.308,00
Jumlah	81.736.847.113,00	3.470.635.000,00	30.862.408.000,00	54.345.074.113,00
Aset Tetap				
Tanah	848.568.053,00	0,00	0,00	848.568.053,00
Peralatan dan Mesin	34.345.226.674,00	61.379.566.357,13	600.754.420,00	95.124.038.611,13
Gedung dan Bangunan	50.065.251.380,00	0,00	541.700.000,00	49.523.551.380,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	627.923.950,00	0,00	0,00	627.923.950,00
Aset Tetap Lainnya	10.370.580.299,11	0,00	0,00	10.370.580.299,11
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.593.200.229,67	0,00	0,00	24.593.200.229,67
Jumlah	120.850.750.585,78	61.379.566.357,13	1.142.454.420,00	181.087.862.522,90
Aset Lainnya				0,00
Aset Tak Berwujud	154.226.117,21	0,00	0,00	154.226.117,21
Jumlah	154.226.117,21	0,00	0,00	154.226.117,21
Jumlah	202.741.823.815,99	64.850.201.357,13	32.004.862.420,00	235.587.162.753,11

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 seluruhnya diperoleh dari hasil inventarisasi karena adanya reklasifikasi dari Aset Tetap karena barang rusak berat, pelunasan piutang dan penghapusan.

Rincian Aset Lain-lain per OPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.858.949.927,11	180.000.000,00	180.000.000,00	4.858.949.927,11
Dinas Kesehatan	29.004.671.472,03	2.635.580.952,35	0,00	26.369.090.519,68
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.153.009.609,89	4.551.762.404,89	0,00	72.601.247.205,00
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	541.700.000,00	541.700.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.227.691.989,39	768.008.332,89	0,00	459.683.656,50
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	187.189.326,96	0,00	0,00	187.189.326,96
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.107.208.046,89	2.106.908.046,89	600.754.420,00	601.054.420,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	10.980.167.341,38	0,00	0,00	10.980.167.341,38
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.210.984,00	0,00	0,00	54.210.984,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	722.043.000,00	722.043.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.515.928.078,77	700.023.611,61	0,00	1.815.904.467,17
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	16.024.229,51	16.024.229,51	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	35.640.000,00	0,00	0,00	35.640.000,00
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	12.196.359.045,44	834.402.645,44	0,00	11.361.956.400,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	491.594.714,34	0,00	0,00	491.594.714,34
Dinas Perikanan	273.245.000,00	0,00	0,00	273.245.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	36.768.990.745,25	31.651.000,00	0,00	36.737.339.745,25
Sekretariat Daerah	43.284.619.889,59	42.237.551.956,59	0,00	1.047.067.933,00
Sekretariat DPRD	5.493.671.933,87	5.343.465.525,66	0,00	150.206.408,21
Badan Perencanaan Pembangunan	497.779.202,12	493.167.952,12	0,00	4.611.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Daerah Penelitian dan Pengembangan				
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.129.892.768,19	3.999.480.541,51	30.862.408.000,00	30.992.820.226,68
Badan Pendapatan Daerah	62.810.000,00	0,00	0,00	62.810.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.197.553,74	0,00	0,00	3.197.553,74
Inspektorat	422.390.291,57	410.131.157,68	0,00	12.259.133,89
Kecamatan Tebing Tinggi	46.458.733,65	0,00	0,00	46.458.733,65
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	790.932.477,57	0,00	0,00	790.932.477,57
Kecamatan Rangsang Barat	72.929.276,93	0,00	0,00	72.929.276,93
Kecamatan Merbau	1.401.513.160,00	0,00	0,00	1.401.513.160,00
Kecamatan Pulau Merbau	56.164.160,00	0,00	0,00	56.164.160,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	38.782.550,00	0,00	0,00	38.782.550,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	687.198.194,92	0,00	0,00	687.198.194,92
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.899.050,00	0,00	0,00	2.899.050,00
Jumlah	235.587.162.753,11	65.030.201.357,13	32.184.862.420,00	202.741.823.815,98

Saldo Aset Lain-lain Berdasarkan Persentase Kenaikan dan Penurunan dapat dirincikan sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.858.949.927,11	4.858.949.927,11	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	29.004.671.472,03	26.369.090.519,68	2.635.580.952,35	9,99
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.153.009.609,89	72.601.247.205,00	4.551.762.404,89	6,27
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	0,00	541.700.000,00	(541.700.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.227.691.989,39	459.683.656,50	768.008.332,89	167,07
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	187.189.326,96	187.189.326,96	0,00	0,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan	2.107.208.046,89	601.054.420,00	1.506.153.626,89	250,59



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	10.980.167.341,38	10.980.167.341,38	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.210.984,00	54.210.984,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	722.043.000,00	0,00	722.043.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	2.515.928.078,77	1.815.904.467,17	700.023.611,61	38,55
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	16.024.229,51	0,00	16.024.229,51	100,00
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan. Olaha ra dan Pariwisata	12.196.359.045,44	11.361.956.400,00	834.402.645,44	7,34
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	491.594.714,34	491.594.714,34	0,00	0,00
Dinas Perikanan	273.245.000,00	273.245.000,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	36.768.990.745,25	36.737.339.745,25	31.651.000,00	0,09
Sekretariat Daerah	43.284.619.889,59	1.047.067.933,00	42.237.551.956,59	4.033,89
Sekretariat DPRD	5.493.671.933,87	150.206.408,21	5.343.465.525,66	3.557,42
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	497.779.202,12	4.611.250,00	493.167.952,12	10.694,89
Badan Pengelola Keuangn dan Aset Daerah	4.129.892.768,19	30.992.820.226,68	(26.862.927.458,49)	(86,67)
Badan Pendapatan Daerah	62.810.000,00	62.810.000,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.197.553,74	3.197.553,74	0,00	0,00
Inspektorat	422.390.291,57	12.259.133,89	410.131.157,68	3.345,51
Kecamatan Tebing Tinggi	46.458.733,65	46.458.733,65	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	790.932.477,57	790.932.477,57	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Barat	72.929.276,93	72.929.276,93	0,00	0,00
Kecamatan Merbau	1.401.513.160,00	1.401.513.160,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kecamatan Pulau Merbau	56.164.160,00	56.164.160,00	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	38.782.550,00	38.782.550,00	0,00	0,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	687.198.194,92	687.198.194,92	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.899.050,00	2.899.050,00	0,00	0,00
Jumlah	235.587.162.753,11	202.741.823.815,98	32.845.338.937,13	16,20

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp202.741.823.815,98 dan saldo akhir Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp235.587.162.753,11. Rincian Penambahan dan Pengurangan atas Aset lain lain dapat di rincikan sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Jumlah Penambahan	65.030.201.357,13
Mutasi OPD	180.000.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	61.379.566.357,13
Mutasi Masuk	3.470.635.000,00
Jumlah Pengurangan	32.184.862.420,00
Mutasi OPD	180.000.000,00
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	180.000.000,00
Penghapusan Aset	31.824.862.420,00
Jumlah	32.845.338.937,13

Penjelasan Mutasi Masuk :

- Mutasi OPD Merupakan Mutasi Aset Antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Rp180.000.000,00 Pada Tahun 2024. Aset tersebut dari Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup oleh Dinas Pendidikan.
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Merupakan Perpindahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ke Aset Lainnya- Aset Lain Lain di karenakan Aset tersebut sudah rusak Berat dan rencana akan di hapuskan. Adapun Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang di Reklasifikasi ke Aset Lainnya- Aset Lain Lain Tahun 2024 sebesar Rp61.379.566.357,13.
- Mutasi Masuk Merupakan Piutang TDF pada OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pada Tahun 2024 Sebesar Rp3.470.635.000,00.

Penjelasan Mutasi Keluar :

- Mutasi OPD Merupakan Mutasi Aset Antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp180.000.000,00 Pada Tahun 2024. Aset tersebut dari Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup oleh Dinas Pendidikan.

- b) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan Merupakan Perpindahan Aset Lainnya- Aset Lain Lain Ke Aset Tetap di karenakan Aset tersebut sudah di terima dari Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup oleh Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan mengklasifikasikan Aset Tersebut Ke Gedung dan Bangunan Pada Tahun 2024.
- c) Penghapusan Aset Merupakan Penghapusan Aset lain lain di Karenakan sudah di terbitkan SK penghapusan Aset lain lain Karena Hibah Keluar Rp962.454.420,00 dan Pelunasan Piutang TDF Tahun 2023 Rp 30.862.408.000,00.

Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar pada Aset Lain-lain sesuai dengan dokumen terkait dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penghapusan karena hibah ke masyarakat Aset Lain-lain Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 82/HK/KPTS/I/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	Bangunan Pengelolaan Sampah	82/HK/KPTS/VI/2024	600.754.420,00	Hibah ke Masyarakat
Jumlah				541.700.000,00	

- b. Mutasi dan Penghapusan Aset Lain-lain Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Berdasarkan Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 220/HK/KPTS/VI/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Bangunan Pengelolaan Sampah	220/HK/KPTS/VI/2024	180.000.000,00	Mutasi Aset



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Aset		Jenis Barang	No SK	Nilai Perolehan	Keterangan OPD Mutasi Keluar
OPD Mutasi Keluar	OPD Mutasi Masuk/ Penerima Aset				
Hidup					
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Kementerian	Tempat sampah 3R	220/HK/KPTS/VI/2024	197.700.000,00	Penghapusan Karena Hibah
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Kementerian	Baangunan Pengelolaan Sampah Untuk MAN Selatpanjang	220/HK/KPTS/VI/2024	164.000.000,00	Penghapusan Karena Hibah
Jumlah				541.700.000,00	

6.3.1.d.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
(114.492.996.691,49)	0,00	(114.492.996.691,49)	100,00

Nilai Akumulasi Aset Lain-lain per per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp114.492.996.691,49 dan Rp0,00. Tejadi kenaikan pada Akumulasi Aset Lain-lain Rp114.492.996.691,49 atau 100,00%.

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(676.207.339,60)	(676.207.339,60)	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	(28.154.031.472,02)	(28.154.031.472,02)	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(4.551.462.404,89)	(4.551.462.404,89)	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.227.691.989,39)	(1.227.691.989,39)	0,00	0,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(187.189.326,96)	(187.189.326,96)	0,00	0,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian	(1.870.932.630,22)	(1.870.932.630,22)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Penurunan	31 Desember 2023
Penduduk dan Keluarga Berencana				
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	(2.740.775.929,54)	(2.740.775.929,54)	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(54.210.983,99)	(54.210.983,99)	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(722.043.000,00)	(722.043.000,00)	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	(901.158.639,11)	(901.158.639,11)	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	(16.024.229,50)	(16.024.229,50)	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	(35.640.000,00)	(35.640.000,00)	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(3.483.753.114,19)	(3.483.753.114,19)	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(265.794.714,33)	(265.794.714,33)	0,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(17.319.012.745,25)	(17.319.012.745,25)	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	(42.237.551.956,59)	(42.237.551.956,59)	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	(5.493.671.933,87)	(5.493.671.933,87)	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	(493.167.952,13)	(493.167.952,13)	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(658.209.101,52)	(658.209.101,52)	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(3.197.553,75)	(3.197.553,75)	0,00	0,00
Inspektorat	(422.390.291,57)	(422.390.291,57)	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi	(46.458.733,65)	(46.458.733,65)	0,00	0,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	(789.032.477,57)	(789.032.477,57)	0,00	0,00
Kecamatan Rangsang Barat	(71.429.276,93)	(71.429.276,93)	0,00	0,00
Kecamatan Merbau	(1.394.397.700,00)	(1.394.397.700,00)	0,00	0,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	(677.561.194,92)	(677.561.194,92)	0,00	0,00
Jumlah	(114.492.996.691,49)	(114.492.996.691,49)	0,00	0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Berdasarkan Persentase Kenaikan dan Penurunan dapat dirincikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(676.207.339,60)	0,00	(676.207.339,60)	100,00
Dinas Kesehatan	(28.154.031.472,02)	0,00	(28.154.031.472,02)	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(4.551.462.404,89)	0,00	(4.551.462.404,89)	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.227.691.989,39)	0,00	(1.227.691.989,39)	100,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(187.189.326,96)	0,00	(187.189.326,96)	100,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(1.870.932.630,22)	0,00	(1.870.932.630,22)	100,00
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	(2.740.775.929,54)	0,00	(2.740.775.929,54)	100,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(54.210.983,99)	0,00	(54.210.983,99)	100,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(722.043.000,00)	0,00	(722.043.000,00)	100,00
Dinas Perhubungan	(901.158.639,11)	0,00	(901.158.639,11)	100,00
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	(16.024.229,50)	0,00	(16.024.229,50)	100,00
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	(35.640.000,00)	0,00	(35.640.000,00)	100,00
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	(3.483.753.114,19)	0,00	(3.483.753.114,19)	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(265.794.714,33)	0,00	(265.794.714,33)	100,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(17.319.012.745,25)	0,00	(17.319.012.745,25)	100,00
Sekretariat Daerah	(42.237.551.956,59)	0,00	(42.237.551.956,59)	100,00
Sekretariat DPRD	(5.493.671.933,87)	0,00	(5.493.671.933,87)	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	(493.167.952,13)	0,00	(493.167.952,13)	100,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(658.209.101,52)	0,00	(658.209.101,52)	100,00
Badan Kepegawaian	(3.197.553,75)	0,00	(3.197.553,75)	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
dan Pengembangan SDM				
Inspektorat	(422.390.291,57)	0,00	(422.390.291,57)	100,00
Kecamatan Tebing Tinggi	(46.458.733,65)	0,00	(46.458.733,65)	100,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	(789.032.477,57)	0,00	(789.032.477,57)	100,00
Kecamatan Rangsang Barat	(71.429.276,93)	0,00	(71.429.276,93)	100,00
Kecamatan Merbau	(1.394.397.700,00)	0,00	(1.394.397.700,00)	100,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	(677.561.194,92)	0,00	(677.561.194,92)	100,00
Jumlah	(114.492.996.691,49)	0,00	(114.492.996.691,49)	100,00

6.3.2. Kewajiban

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
157.415.840.916,76	57.250.144.773,03	100.165.696.143,73	174,96

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp157.415.840.916,76 dan Rp57.250.144.773,03. Terjadi kenaikan pada Kewajiban Jangka Pendek Rp100.165.696.143,73 atau 174,96%.

6.3.2.a. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
157.415.840.916,76	57.250.144.773,03	100.165.696.143,73	174,96

Nilai kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp157.415.840.916,76 dan Rp57.250.144.773,03. Terjadi kenaikan pada Kewajiban Jangka Pendek Rp100.165.696.143,73 atau 174,96% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	328.060.815,40	785.845.815,40	328.060.815,40	785.845.815,40
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	20.775.896.319,38	0,00	20.775.896.319,38	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	350.393.556,54	0,00	74.921.357,93	275.472.198,61
Utang Belanja	35.795.794.081,72	134.102.339.109,74	13.543.610.288,70	156.354.522.902,75
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	57.250.144.773,03	134.888.184.925,14	34.722.488.781,41	157.415.840.916,76



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai kewajiban Jangka Pendek Berdasarkan Persentase Kenaikan/ Penurunan dapat di rincikan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	785.845.815,40	328.060.815,40	457.785.000,00	139,54
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	20.775.896.319,38	(20.775.896.319,38)	(100,00)
Pendapatan Diterima Dimuka	275.472.198,61	350.393.556,54	(74.921.357,93)	(21,38)
Utang Belanja	156.354.522.902,75	35.795.794.081,72	120.558.728.821,03	336,80
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	157.415.840.916,76	57.250.144.773,03	100.165.696.143,73	174,96

Nilai kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 Rp157.415.840.916,76
Terjadi Kenaikan pada Kewajiban Jangka Pendek Rp100.165.696.143,73 atau
174,96 %..

6.3.2.a.1. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
785.845.815,40	328.060.815,40	457.785.000,00	139,54

Saldo akhir utang perhitungan fihak ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp785.845.815,40 dan Rp328.060.815,40 Terjadi Kenaikan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp457.785.000,00 atau 139,54 % yang merupakan pajak-pajak yang telah dipungut oleh bendahara umum daerah dan bendahara pengeluaran OPD yang belum disetorkan ke Kas Negara.

6.3.2.a.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	20.775.896.319,38	(20.775.896.319,38)	(100,00)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan jumlah bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp20.775.896.319.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.3.2.a.3. Pendapatan diterima dimuka

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
275.472.198,61	350.393.556,54	(74.921.357,93)	(21,38)

Nilai pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp275.472.198,61 dan Rp350.393.556,54 Terjadi Penurunan Pendapatan diterima dimuka Rp74.921.357,93 atau 21,38%.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III	26.482.231,81	0,00	26.482.231,81	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	248.989.966,80	350.393.556,54	(101.403.589,74)	(28,94)
Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	275.472.198,61	350.393.556,54	(74.921.357,93)	(21,38)

6.3.2.a.4. Utang Belanja

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
156.354.522.902,75	35.795.794.081,72	120.558.728.821,03	336,80

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp156.354.522.902,75 dan Rp35.795.794.081,72 Terjadi Kenaikan pada Saldo Utang Belanja Rp120.558.728.821,03 atau 336,80%. Utang Belanja tersebut timbul karena Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima hak atas barang/jasa termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya; pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut berdasarkan surat permohonan pengakuan utang belanja dari OPD yang dilampirkan dengan invoice/surat tagihan atau berita acara serah terima pekerjaan dengan rincian OPD sebagai berikut:

OPD	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.949.843.839,00	19.978.186.196,00	14.800.000,00	23.913.230.035,00
Dinas Kesehatan	16.088.011.195,92	37.228.796.735,17	12.545.515.006,00	40.771.292.925,09
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.070.948.159,80	9.093.497.999,57	283.294.565,70	13.881.151.593,67
Badan	205.056.400,00	357.025.000,00	0,00	562.081.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Penanggulangan Bencana Daerah				
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	84.635.000,00	1.005.806.900,00	0,00	1.090.441.900,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	139.407.404,00	639.025.000,00	0,00	778.432.404,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	446.779.056,00	1.106.255.332,00	0,00	1.553.034.388,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	993.987.700,00	16.915.005.227,99	0,00	17.908.992.927,99
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	185.770.000,00	1.024.535.175,00	0,00	1.210.305.175,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	79.750.000,00	349.550.000,00	0,00	429.300.000,00
Dinas Perhubungan	191.690.000,00	4.290.769.401,00	700.000.717,00	3.782.458.684,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	109.320.300,00	782.417.550,00	0,00	891.737.850,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	129.653.560,00	442.316.970,00	0,00	571.970.530,00
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	141.697.964,00	556.330.600,00	0,00	698.028.564,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	118.000.000,00	321.702.000,00	0,00	439.702.000,00
Dinas Perikanan	122.701.632,00	1.810.192.400,00	0,00	1.932.894.032,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	112.945.000,00	411.750.000,00	0,00	524.695.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	199.020.000,00	503.438.000,00	0,00	702.458.000,00
Inspektorat Daerah	94.218.696,00	1.327.846.900,00	0,00	1.422.065.596,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	385.686.600,00	960.008.654,00	0,00	1.345.695.254,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	959.322.325,00	26.903.798.680,00	0,00	27.863.121.005,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 dan 31 Desember 2023
 (dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Badan Pendapatan Daerah	202.603.522,00	1.798.122.720,00	0,00	2.000.726.242,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	105.230.000,00	488.397.000,00	0,00	593.627.000,00
Sekretariat Daerah	4.523.023.727,00	2.220.138.854,00	0,00	6.743.162.581,00
Sekretariat DPRD	388.503.549,00	810.650.000,00	0,00	1.199.153.549,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	51.000.000,00	379.809.100,00	0,00	430.809.100,00
Kecamatan Tebing Tinggi	243.950.000,00	677.414.240,00	0,00	921.364.240,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	60.950.000,00	207.502.475,00	0,00	268.452.475,00
Kecamatan Rangsang	65.500.000,00	280.175.000,00	0,00	345.675.000,00
Kecamatan Rangsang Barat	51.550.000,00	214.300.000,00	0,00	265.850.000,00
Kecamatan Merbau	87.800.000,00	310.100.000,00	0,00	397.900.000,00
Kecamatan Pulau Merbau	42.300.000,00	234.500.000,00	0,00	276.800.000,00
Kecamatan Rangsang Pesisir	60.638.452,00	177.900.000,00	0,00	238.538.452,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	47.650.000,00	128.000.000,00	0,00	175.650.000,00
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	56.650.000,00	167.075.000,00	0,00	223.725.000,00
Jumlah	35.795.794.081,72	134.102.339.109,73	13.543.610.288,70	156.354.522.902,75

Rincian Utang Belanja Berdasarkan Persentase Kenaikan/ (Penurunan) dapat di rincikan sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.913.230.035,00	3.949.843.839,00	19.963.386.196,00	505,42
Dinas Kesehatan	40.771.292.925,09	16.088.011.195,92	24.683.281.729,17	153,43
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.881.151.593,67	5.070.948.159,80	8.810.203.433,87	173,74
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	562.081.400,00	993.987.700,00	(431.906.300,00)	(43,45)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.090.441.900,00	205.056.400,00	885.385.500,00	431,78
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	778.432.404,00	84.635.000,00	693.797.404,00	819,75



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.553.034.388,00	139.407.404,00	1.413.626.984,00	1.014,03
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	17.908.992.927,99	446.779.056,00	17.462.213.871,99	3.908,47
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.210.305.175,00	185.770.000,00	1.024.535.175,00	551,51
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	429.300.000,00	79.750.000,00	349.550.000,00	438,31
Dinas Perhubungan	3.782.458.684,00	191.690.000,00	3.590.768.684,00	1.873,22
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	891.737.850,00	109.320.300,00	782.417.550,00	715,71
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	571.970.530,00	129.653.560,00	442.316.970,00	341,15
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	698.028.564,00	141.697.964,00	556.330.600,00	392,62
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	439.702.000,00	112.945.000,00	326.757.000,00	289,31
Dinas Perikanan	1.932.894.032,00	118.000.000,00	1.814.894.032,00	1.538,05
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	524.695.000,00	122.701.632,00	401.993.368,00	327,62
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	702.458.000,00	199.020.000,00	503.438.000,00	252,96
Inspektorat Daerah	1.422.065.596,00	4.523.023.727,00	(3.100.958.131,00)	(68,56)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.345.695.254,00	388.503.549,00	957.191.705,00	246,38
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	27.863.121.005,00	385.686.600,00	27.477.434.405,00	7.124,29
Badan Pendapatan Daerah	2.000.726.242,00	959.322.325,00	1.041.403.917,00	108,56
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	593.627.000,00	202.603.522,00	391.023.478,00	193,00
Sekretariat Daerah	6.743.162.581,00	105.230.000,00	6.637.932.581,00	6.308,02
Sekretariat DPRD	1.199.153.549,00	94.218.696,00	1.104.934.853,00	1.172,73
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	430.809.100,00	243.950.000,00	186.859.100,00	76,60
Kecamatan Tebing Tinggi	921.364.240,00	60.950.000,00	860.414.240,00	1.411,67
Kecamatan Tebing	268.452.475,00	65.500.000,00	202.952.475,00	309,85



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tinggi Barat				
Kecamatan Rangsang	345.675.000,00	51.550.000,00	294.125.000,00	570,56
Kecamatan Rangsang Barat	265.850.000,00	87.800.000,00	178.050.000,00	202,79
Kecamatan Merbau	397.900.000,00	42.300.000,00	355.600.000,00	840,66
Kecamatan Pulau Merbau	276.800.000,00	60.638.452,00	216.161.548,00	356,48
Kecamatan Rangsang Pesisir	238.538.452,00	47.650.000,00	190.888.452,00	400,61
Kecamatan Tasik Putri Puyu	175.650.000,00	56.650.000,00	119.000.000,00	210,06
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	223.725.000,00	51.000.000,00	172.725.000,00	338,68
Jumlah	156.354.522.902,75	35.795.794.081,72	120.558.728.821,03	336,80

Rincian Utang Belanja Per Jenis dan Per Tahun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tahun	Pegawai	Barang Jasa	Hibah	Bantuan Sosial	Transfer	Modal	Jumlah
Saldo Awal							35.795.794.081,72
2015	0,00	139.584.208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	139.584.208,52
2016	0,00	351.797.240,40	0,00	0,00	0,00	3.525.921.531,80	3.877.718.772,20
2017	0,00	328.419.581,00	0,00	0,00	0,00	650.056.000,00	978.475.581,00
2018	0,00	63.627.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.627.325,00
2019	871.930.000,00	2.656.033.750,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	3.542.763.750,00
2020	4.995.735.000,00	3.878.438.000,00	0,00	0,00	0,00	26.820.000,00	8.900.993.000,00
2021	2.850.000,00	1.713.576.878,00	0,00	471.428.000,00	0,00	15.772.000,00	2.203.626.878,00
2022	800.000,00	206.495.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.295.260,00
2023	51.488.183,00	15.830.221.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881.709.307,00
Koreksi Saldo Awal							169.205.779,28
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	154.405.779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	154.405.779,28
Pelunasan 2024							13.374.404.509,42
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.294.565,70	283.294.565,70
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun	Pegawai	Barang Jasa	Hibah	Bantuan Sosial	Transfer	Modal	Jumlah
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	51.488.183,00	13.039.621.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091.109.943,72
Penambahan 2024							134.524.296.166,56
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45.909.318.034,17	29.984.652.597,97	9.545.527.569,97	4.196.482.994,68	25.742.374.400,00	18.723.983.512,94	156.354.522.902,75

Rincian Utang Belanja sampai dengan Tahun 2024 dapat di lihat pada **Lampiran 5**

6.3.2.a.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

6.3.2.b. Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Nilai Kewajiban Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

6.3.2.b.1. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Nilai Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

6.3.3. Ekuitas

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
2.472.312.649.333,78	2.586.439.653.782,65	(114.127.004.448,86)	(4,41)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.472.312.649.333,78 dan Rp2.586.439.653.782,65 Terjadi Penurunan Pada Ekuitas Rp114.127.004.448,86 atau 4,41% yang merupakan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan rincian sebagai berikut:

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(2.156.068.064.469,53)	(1.843.010.890.289,59)	(313.057.174.179,94)	16,99
Dinas Kesehatan	(868.538.642.521,42)	(724.920.047.286,42)	(143.618.595.235,00)	19,81
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(482.997.538.703,43)	(335.952.487.430,65)	(147.045.051.272,78)	43,77
Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	(138.717.309.039,13)	(110.048.440.206,96)	(28.668.868.832,18)	26,05
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(58.718.750.175,02)	(53.193.669.499,80)	(5.525.080.675,22)	10,39
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(102.177.187.785,60)	(90.639.115.950,70)	(11.538.071.834,89)	12,73
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(103.994.116.013,20)	(95.568.527.474,37)	(8.425.588.538,83)	8,82
Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman dan Pertanian	(163.812.243.091,27)	(150.830.993.872,43)	(12.981.249.218,84)	8,61
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(68.055.167.703,02)	(61.313.568.920,54)	(6.741.598.782,48)	11,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(48.050.817.300,23)	(44.794.234.996,52)	(3.256.582.303,71)	7,27
Dinas Perhubungan	137.413.514.199,82	163.597.848.966,56	(26.184.334.766,74)	(16,01)
Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	(18.675.439.257,34)	(10.645.791.580,16)	(8.029.647.677,19)	75,43
Dinas koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	(13.609.942.420,42)	(5.007.567.750,28)	(8.602.374.670,14)	171,79
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	(53.297.965.822,93)	(50.233.194.208,44)	(3.064.771.614,49)	6,10
Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	(51.709.185.193,50)	(42.036.614.553,81)	(9.672.570.639,69)	23,01
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(30.923.093.413,59)	(28.402.168.942,42)	(2.520.924.471,16)	8,88
Dinas Perikanan	(85.710.114.689,63)	(75.203.365.712,13)	(10.506.748.977,49)	13,97
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(85.468.066.108,31)	(63.149.928.210,28)	(22.318.137.898,03)	35,34



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Sekretariat Daerah	(805.141.985.499,39)	(734.281.457.319,60)	(70.860.528.179,80)	9,65
Sekretariat DPRD	(523.252.981.096,74)	(459.924.745.403,56)	(63.328.235.693,18)	13,77
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	(87.988.725.591,48)	(79.155.971.661,29)	(8.832.753.930,19)	11,16
Badan Pengelola Keuagn dan Aset Daerah	8.425.792.388.944,72	7.542.255.679.183,46	883.536.709.761,26	11,71
Badan Pendapatan Daerah	279.476.350.495,80	269.241.892.541,10	10.234.457.954,70	3,80
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(66.812.833.045,93)	(60.746.639.012,20)	(6.066.194.033,73)	9,99
Inspektorat	(65.638.534.218,21)	(57.665.089.330,86)	(7.973.444.887,35)	13,83
Kecamatan Tebing Tinggi	(63.840.655.507,96)	(56.280.056.237,21)	(7.560.599.270,75)	13,43
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	(21.196.142.342,42)	(12.644.491.849,67)	(8.551.650.492,75)	67,63
Kecamatan Rangsang	(26.760.695.103,25)	(23.857.765.890,78)	(2.902.929.212,47)	12,17
Kecamatan Rangsang Barat	(15.447.683.924,96)	(12.571.702.461,03)	(2.875.981.463,93)	22,88
Kecamatan Merbau	(17.232.833.950,33)	(12.599.242.739,33)	(4.633.591.211,00)	36,78
Kecamatan Pulau Merbau	(19.928.135.230,46)	(17.591.312.406,74)	(2.336.822.823,72)	13,28
Kecamatan Rangsang Pesisir	(17.662.104.452,41)	(15.615.215.351,34)	(2.046.889.101,07)	13,11
Kecamatan Tasik Putri Puyu	(16.424.840.645,14)	(14.193.610.632,30)	(2.231.230.012,84)	15,72
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	(18.347.827.554,51)	(16.481.625.265,84)	(1.866.202.288,67)	11,32
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(74.169.982.435,79)	(30.096.234.461,22)	(44.073.747.974,57)	146,44
Jumlah	2.472.312.649.333,78	2.586.439.653.782,65	(114.127.004.448,86)	(4,41)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.4 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang disajikan pada Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos luar biasa. Laporan Operasional disajikan secara komparatif dengan Laporan Operasional pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

6.4.1 Pendapatan – LO

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1.053.535.901.049,89	1.187.314.490.572,50	(133.778.589.522,62)	(11,27)

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pendapatan - LO selama Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	100.655.790.157,29	144.086.866.104,18	(43.431.075.946,89)	(30,14)
2	Pendapatan Transfer	948.016.556.601,00	1.037.150.776.460,00	(89.134.219.859,00)	(8,59)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.863.554.291,60	6.076.848.008,33	(1.213.293.716,73)	(19,97)
Jumlah		1.053.535.901.049,89	1.187.314.490.572,50	(133.778.589.522,62)	(11,27)

Pendapatan - LO selama Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Pendapatan LRA terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Pendapatan Asli Daerah	100.655.790.157,29	97.941.937.585,36	2.713.852.571,93	2,77
2	Pendapatan Transfer	948.016.556.601,00	1.041.897.042.513,00	(93.880.485.912,00)	(9,01)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.863.554.291,60	69.825.000,00	4.793.729.291,60	100,00
Jumlah		1.053.535.901.049,89	1.139.908.805.098,36	(86.372.904.048,47)	(7,58)

Masing-masing realisasi akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

6.4.1.a Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
100.655.790.157,29	144.086.866.104,18	(43.431.075.946,89)	(30,14)

Rincian realisasi PAD pada Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	21.515.603.909,01	18.386.872.542,90	3.128.731.366,11	17,02
2	Pendapatan Retribusi Daerah	64.795.152.801,51	1.348.036.110,59	63.447.116.690,92	4.706,63
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.524.546.677,00	12.246.453.249,00	(2.721.906.572,00)	(22,23)
4	Lain-lain PAD yang Sah	4.820.486.769,77	112.105.504.201,68	(107.285.017.431,91)	(95,70)
Jumlah		100.655.790.157,29	144.086.866.104,18	(43.431.075.946,89)	(30,14)

Realisasi PAD dari Kegiatan Operasional pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp100.655.790.157,29. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp43.431.075.946,89 atau 30,14% dari Realisasi PAD- LO Tahun 2023 sebesar Rp144.086.866.104,18.

Perbandingan antara Realisasi Pendapatan PAD-LO dan Pendapatan PAD-LRA sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	21.515.603.909,01	18.679.998.295,01	2.835.605.614,00	15,18
2	Pendapatan Retribusi Daerah	64.795.152.801,51	64.919.566.355,04	(124.413.553,53)	(0,19)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.524.546.677,00	9.524.546.677,00	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	4.820.486.769,77	4.817.826.258,31	2.660.511,46	0,06
Jumlah		100.655.790.157,29	97.941.937.585,36	2.713.852.571,93	2,77

Realisasi PAD dari Kegiatan Operasional pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp100.655.790.157,29. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.713.852.571,93 atau 2,77% dari Realisasi PAD LRA sebesar Rp97.941.937.585,36.

6.4.1.a.1. Pendapatan Pajak

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
21.515.603.909,01	18.386.872.542,90	3.128.731.366,11	17,02

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pendapatan pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel - LO	354.946.525,10	1.028.250.936,00	(673.304.410,90)	(65,48)
2	Pajak Restoran – LO	654.524.927,00	2.705.414.722,10	(2.050.889.795,10)	(75,81)
3	Pajak Hiburan – LO	84.142.332,50	424.727.746,95	(340.585.414,45)	(80,19)
4	Pajak Reklame – LO	998.696.387,00	1.026.515.014,45	(27.818.627,45)	(2,71)
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	2.621.184.173,00	6.517.196.993,00	(3.896.012.820,00)	(59,78)
6	Pajak Parkir	15.755.316,66	52.309.850,20	(36.554.533,54)	(69,88)
7	Pajak Air Tanah – LO	197.201.065,60	383.641.359,20	(186.440.293,60)	(48,60)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	553.882.000,00	1.200.432.000,00	(646.550.000,00)	(53,86)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO	5.563.950.989,00	3.501.773.555,00	2.062.177.434,00	58,89
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	1.683.992.227,00	1.546.610.366,00	137.381.861,00	8,88
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	8.787.327.966,15	0,00	8.787.327.966,15	100,00
Jumlah		21.515.603.909,01	18.386.872.542,90	3.128.731.366,11	17,02

Realisasi Pendapatan Pajak LO pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp21.515.603.909,01. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.128.731.366,11 atau 17,02% dari Realisasi pendapatan pajak LO Tahun 2023 sebesar Rp18.386.872.542,90.

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	354.946.525,10	1.028.250.936,00	(673.304.410,90)	(65,48)
Jumlah		354.946.525,10	1.028.250.936,00	(673.304.410,90)	(65,48)

2. Pajak Restoran – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	654.524.927,00	2.705.414.722,10	(2.050.889.795,10)	(75,81)
Jumlah		654.524.927,00	2.705.414.722,10	(2.050.889.795,10)	(75,81)

3. Pajak Hiburan – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	84.142.332,50	424.727.746,95	(340.585.414,45)	(80,19)
Jumlah		84.142.332,50	424.727.746,95	(340.585.414,45)	(80,19)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Pajak Reklame – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	998.696.387,00	1.026.515.014,45	(27.818.627,45)	(2,71)
Jumlah		998.696.387,00	1.026.515.014,45	(27.818.627,45)	(2,71)

5. Pajak Penerangan Jalan – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	2.621.184.173,00	6.517.196.993,00	(3.896.012.820,00)	(59,78)
Jumlah		2.621.184.173,00	6.517.196.993,00	(3.896.012.820,00)	(59,78)

6. Pajak Parkir – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	15.755.316,66	52.309.850,20	(36.554.533,54)	(69,88)
Jumlah		15.755.316,66	52.309.850,20	(36.554.533,54)	(69,88)

7. Pajak Air Tanah – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	197.201.065,60	383.641.359,20	(186.440.293,60)	(48,60)
Jumlah		197.201.065,60	383.641.359,20	(186.440.293,60)	(48,60)

8. Pajak Sarang Burung Walet – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	553.882.000,00	1.200.432.000,00	(646.550.000,00)	(53,86)
Jumlah		553.882.000,00	1.200.432.000,00	(646.550.000,00)	(53,86)

9. PBB P2 – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	5.563.950.989,00	3.501.773.555,00	2.062.177.434,00	58,89
Jumlah		5.563.950.989,00	3.501.773.555,00	2.062.177.434,00	58,89



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. BPHTB – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	1.683.992.227,00	1.546.610.366,00	137.381.861,00	8,88
Jumlah		1.683.992.227,00	1.546.610.366,00	137.381.861,00	8,88

11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	8.787.327.966,15	0,00	8.787.327.966,15	100,00
Jumlah		8.787.327.966,15	0,00	8.787.327.966,15	100,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO selama Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Pendapatan Pajak Daerah -LRA Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Pajak Hotel - LO	354.946.525,10	354.946.525,10	0,00	0,00
2	Pajak Restoran - LO	654.524.927,00	654.524.927,00	0,00	0,00
3	Pajak Hiburan - LO	84.142.332,50	84.142.332,50	0,00	0,00
4	Pajak Reklame - LO	998.696.387,00	822.997.614,00	175.698.773,00	21,35
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	2.621.184.173,00	2.621.184.173,00	0,00	0,00
6	Pajak Parkir	15.755.316,66	15.755.316,66	0,00	0,00
7	Pajak Air Tanah - LO	197.201.065,60	197.201.065,60	0,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	553.882.000,00	553.882.000,00	0,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO	5.563.950.989,00	2.904.044.148,00	2.659.906.841,00	91,59
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	1.683.992.227,00	1.683.992.227,00	0,00	0,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	8.787.327.966,15	8.787.327.966,15	0,00	0,00
Jumlah		21.515.603.909,01	18.679.998.295,01	2.835.605.614,00	15,18

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa pencapaian Pendapatan Pajak Daerah sama antara Realisasi LO dan Realisasi LRA kecuali pencapaian pendapatan Pajak Reklame - LO dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selisih Pajak Reklame - LO, dan Pajak Reklame LRA dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame Tahun 2023	296.096.803,73
2	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2024	(234.847.322,73)
3	Piutang Pajak Reklame Tahun 2024	937.446.906,00
4	Pelunasan Piutang Pajak Reklame	(822.997.614,00)
Jumlah		175.698.773,00

Selisih Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LRA dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Piutang PBB Tahun 2024	6.620.347.095,00
2	Pelunasan Piutang Pajak PBB	(2.904.044.148,00)
3	Penghapusan Piutang PBB	(1.084.853.450,00)
4	Koreksi Piutang PBB	28.457.344,00
Jumlah		2.659.906.841,00

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya.

6.4.1.a.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
64.795.152.801,51	1.348.036.110,59	63.447.116.190,92	4.706,63

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Jasa Umum - LO	64.401.246.156,04	778.733.900,00	63.622.512.256,04	8.169,99
2	Retribusi Jasa Usaha - LO	84.511.742,47	178.676.210,59	(94.164.468,12)	(52,70)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	309.394.903,00	390.626.000,00	(81.231.097,00)	(20,80)
Jumlah		64.795.152.801,51	1.348.036.110,59	63.447.116.690,92	4.706,63

Realisasi Retribusi LO pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp64.795.152.801,51. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp63.447.116.690,92 atau 4.706,63% dari Realisasi pendapatan pajak LO Tahun 2023 sebesar Rp1.348.036.110,59.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum - LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	63.687.814.656,04	23.723.000,00	63.664.091.656,04	268.364,42
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	324.522.000,00	271.562.000,00	52.960.000,00	19,50
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	23.246.000,00	(23.246.000,00)	(100,00)
4	Dinas Perhubungan	166.000.000,00	121.377.000,00	44.623.000,00	36,76
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	220.290.400,00	(220.290.400,00)	(100,00)
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	222.909.500,00	118.535.500,00	104.374.000,00	88,05
Jumlah		64.401.246.156,04	778.733.900,00	63.622.512.256,04	8.169,99

2. Retribusi Jasa Usaha - LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.800.000,00	3.825.000,00	(25.000,00)	(0,65)
2	Dinas Perhubungan	80.711.742,47	70.223.210,59	10.488.531,88	14,94
3	Dinas Perikanan	0,00	20.398.000,00	(20.398.000,00)	100,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	84.230.000,00	(84.230.000,00)	(100,00)
Jumlah		84.511.742,47	178.676.210,59	(94.164.468,12)	(52,70)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Retribusi Perizinan Tertentu - LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	309.394.903,00	298.126.000,00	11.268.903,00	3,78
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	92.500.000,00	(92.500.000,00)	(100,00)
Jumlah		309.394.903,00	390.626.000,00	(81.231.097,00)	(20,80)

Pendapatan Retribusi Daerah-LO selama Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Pendapatan Retribusi Daerah LRA Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Retribusi Jasa Umum - LO	64.401.246.156,04	64.528.871.452,04	(127.625.296,00)	(0,20)
2	Retribusi Jasa Usaha - LO	84.511.742,47	81.300.000,00	3.211.742,47	3,95
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	309.394.903,00	309.394.903,00	0,00	0,00
Jumlah		64.795.152.801,51	64.919.566.355,04	(124.413.553,53)	(0,19)

Berdasarkan rincian Pendapatan Retribusi Daerah di atas terlihat bahwa pencapaian Pendapatan Retribusi Daerah sama antara Realisasi LO dan Realisasi LRA, kecuali pendapatan Retribusi Jasa Umum.

1. Perbedaan nilai sebesar minus Rp127.625.296,00 terdiri dari :

No	Uraian	Nilai
1	Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2023	(174.537.600,00)
2	Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024	78.269.804,00
3	Pendapatan diterima dimuka Sewa Gedung Tahun 2023	6.000.000,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Gedung Tahun 2024	(11.741.250,00)
5	Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Menara Telekomunikasi Tahun 2023	(25.616.250,00)
Jumlah		(127.625.296,00)

2. Perbedaan nilai sebesar Rp3.211.742,47 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Pada Dinas Perhubungan yang diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.4.1.a.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
9.524.546.677,00	12.246.453.249,00	(2.721.906.572,00)	(22,23)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2024 dengan Tahun 2023 sebagai perbandingan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	9.524.546.677,00	12.246.453.249,00	(2.721.906.572,00)	(22,23)
Jumlah		9.524.546.677,00	12.246.453.249,00	(2.721.906.572,00)	(22,23)

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp9.524.546.677,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.721.906.572,00 atau 22,23% dari Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO Tahun 2023 sebesar Rp12.246.453.249,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.524.546.677,00	12.246.453.249,00	(2.721.906.572,00)	(22,23)
Jumlah		9.524.546.677,00	12.246.453.249,00	(2.721.906.572,00)	(22,23)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LRA sebagai perbandingan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas	9.524.546.677,00	9.524.546.677,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
	Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO				
	Jumlah	9.524.546.677,00	9.524.546.677,00	0,00	0,00

6.4.1.a.4. Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
4.820.486.769,77	112.105.504.201,68	(107.285.017.431,91)	(95,70)

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO Tahun 2024 dan perbandingan dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tak Dipisahkan – LO	0,00	14.448.000,00	(14.448.000,00)	(100,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	894.772.920,00	0,00	894.772.920,00	100,00
3	Jasa Giro – LO	333.687.304,00	378.164.947,00	(44.477.643,00)	(11,76)
4	Pendapatan Bunga – LO	387.005.166,00	663.512.075,00	(276.506.909,00)	(41,67)
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	1.830.047.424,83	988.971.855,81	841.075.569,02	85,05
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	25.936.402,57	478.835.117,60	(452.898.715,03)	(94,58)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	105.855.922,14	118.130.979,08	(12.275.056,94)	(10,39)
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	0,00	50.416.494.277,00	(50.416.494.277,00)	(100,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian - LO	71.741.986,00	151.615.898,00	(79.873.912,00)	(52,68)
10	Pendapatan BLUD – LO	0,00	57.301.964.794,11	(57.301.964.794,11)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO	0,00	73.683.750,00	(73.683.750,00)	(100,00)
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO	1.170.301.144,23	1.519.682.508,08	(349.381.363,85)	(22,99)
13	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	100,00
Jumlah		4.820.486.769,77	112.105.504.201,68	(107.285.017.431,91)	(95,70)

Realisasi Lain-lain PAD yang sah - LO pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp4.820.486.769,77. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp107.285.017.431,91 atau 95,70% dari Realisasi Lain-lain PAD yang sah - LO Tahun 2023 sebesar Rp112.105.504.201,68.

Lain-lain PAD yang sah- LO Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tak Dipisahkan – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	0,00	14.448.000,00	(14.448.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	14.448.000,00	(14.448.000,00)	(100,00)

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	894.772.920,00	0,00	894.772.920,00	100,00
Jumlah		894.772.920,00	0,00	894.772.920,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Jasa Giro – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	333.687.304,00	378.164.820,00	(44.477.516,00)	(11,76)
Jumlah		333.687.304,00	378.164.947,00	(44.550.431,00)	(11,78)

4. Pendapatan Bunga – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	387.005.166,00	663.512.075,00	(276.506.909,00)	(41,67)
Jumlah		387.005.166,00	663.512.075,00	(276.506.909,00)	(41,67)

5. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.830.047.424,83	33.097,25	1.830.014.327,58	5.529.203,57
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00	988.938.758,56	(988.938.758,56)	(100,00)
Jumlah		1.830.047.424,83	988.971.855,81	841.075.569,02	5.529.008,46

6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.936.402,57	478.835.117,60	(452.898.715,03)	(94,58)
Jumlah		25.936.402,57	478.835.117,60	(452.898.715,03)	(94,58)

7. Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	105.855.922,14	118.130.979,08	(12.275.056,94)	(10,39)
Jumlah		105.855.922,14	118.130.979,08	(12.275.056,94)	(10,39)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	0,00	50.416.494.277,00	(50.416.494.277,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	50.416.494.277,00	(50.416.494.277,00)	(100,00)

9. Pendapatan dari Pengembalian - LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	0,00	151.615.898,00	(151.615.898,00)	(100,00)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	71.741.986,00	0,00	71.741.986,00	100,00
Jumlah		71.741.986,00	151.615.898,00	(79.873.912,00)	(52,68)

10. Pendapatan BLUD – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	0,00	57.301.964.794,11	(57.301.964.794,11)	(100,00)
Jumlah		0,00	57.301.964.794,11	(57.301.964.794,11)	(100,00)

11. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	0,00	73.683.750,00	(73.683.750,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	73.683.750,00	(73.683.750,00)	(100,00)

12. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.519.682.508,08	(1.519.682.508,08)	(100,00)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.170.301.144,23	0,00	1.170.301.144,23	100,00
Jumlah		1.170.301.144,23	1.519.682.508,08	(349.381.363,85)	(22,99)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	100,00
Jumlah		1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	100,00

Lain-lain PAD yang sah - LO dengan Lain-lain PAD yang sah - LRA sebagai perbandingan sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	894.772.920,00	894.772.920,00	0,00	0,00
2	Jasa Giro – LO	333.687.304,00	333.687.304,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Bunga – LO	387.005.166,00	386.546.039,00	459.127,00	0,12
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(100,00)
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	1.830.047.424,83	1.813.846.040,37	16.201.384,46	0,89
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	25.936.402,57	25.936.402,57	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	105.855.922,14	105.855.922,14	0,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian - LO	71.741.986,00	71.741.986,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO	1.170.301.144,23	1.170.301.144,23	0,00	0,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	1.138.500,00	1.138.500,00	0,00	0,00
Jumlah		4.820.486.769,77	4.817.826.258,31	2.660.511,46	0,06



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selisih Penerimaan dari Lain-lain PAD yang sah LO dengan Lain-lain PAD yang sah LRA sebesar Rp2.660.511,46 disebabkan oleh:

1. Perbedaan nilai sebesar sebesar Rp459.127,00 merupakan Pendapatan Bunga atas Remunerasi Tahun 2024;
2. Perbedaan nilai sebesar sebesar minus Rp8.000.000,00 merupakan pelunasan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun 2023;
3. Perbedaan nilai sebesar sebesar minus Rp16.201.384,46 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2024; dan
4. Perbedaan nilai sebesar sebesar minus Rp6.000.000,00 merupakan pelunasan piutang dana bergulir Tahun 2023.

6.4.1.b Pendapatan Transfer

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
948.016.556.601,00	1.037.150.776.460,00	(89.134.219.859,00)	(8,59)

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, apabila terdapat kurang salur. Pendapatan transfer terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	840.680.736.861,00	845.710.266.074,00	(5.029.529.213,00)	(0,59)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	98.162.430.900,00	(98.162.430.900,00)	(100,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	105.971.579.740,00	87.760.079.486,00	18.211.500.254,00	20,75
4	Transfer Bantuan Keuangan	1.364.240.000,00	5.518.000.000,00	(4.153.760.000,00)	(75,28)
Jumlah		948.016.556.601,00	1.037.150.776.460,00	(89.134.219.859,00)	(8,59)

Realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp948.016.556.601,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp89.134.219.859,00 atau 8,59% dari Realisasi Lain-Lain PAD yang sah - LO Tahun 2023 sebesar Rp1.037.150.776.460,00.

Pendapatan Transfer - LO dengan Pendapatan Transfer - LRA sebagai perbandingan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	840.680.736.861,00	868.072.509.861,00	(27.391.773.000,00)	(3,16)
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	97.240.042.000,00	(97.240.042.000,00)	(100,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	105.971.579.740,00	75.528.250.652,00	30.443.329.088,00	40,31
4	Transfer Bantuan Keuangan	1.364.240.000,00	1.056.240.000,00	308.000.000,00	29,16
Jumlah		948.016.556.601,00	1.041.897.042.513,00	(93.880.485.912,00)	(9,01)

Dari data di atas dapat dilihat realisasi Pendapatan Transfer LO lebih rendah dibandingkan Pendapatan Transfer LRA Tahun 2024 sebesar Rp93.880.485.912,00 yang disebabkan oleh :

- Penambahan Piutang TDF Tahun 2024 sebesar Rp3.470.635.000,00;
- Pelunasan Piutang TDF Tahun 2023 sebesar Rp30.862.408.000,00;
- Penambahan Piutang Transfer Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp30.443.329.088,00;
- Penambahan Piutang Bantuan Keuangan Dari Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp308.000.000,00; dan
- Pendapatan Dana Desa Tahun 2024 yang tidak diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp97.240.042.000,00.

6.4.1.b.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
840.680.736.861,00	845.710.266.074,00	(5.029.529.213,00)	(0,59)

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan pada Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	82.523.053.000,00	92.491.120.000,00	(9.968.067.000,00)	(10,78)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	70.488.959.000,00	146.034.325.000,00	(75.545.366.000,00)	(51,73)
3	Dana Alokasi Umum	433.071.545.428,00	422.381.067.892,00	10.690.477.536,00	2,53
4	Dana Alokasi Khusus	254.597.179.433,00	184.803.753.182,00	69.793.426.251,00	37,77
Jumlah		840.680.736.861,00	845.710.266.074,00	(5.029.529.213,00)	(0,59)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp840.680.736.861,00. Realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.029.529.213,00 atau 0,59% dari Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 sebesar Rp845.710.266.074,00.

Perbandingan antara realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO dan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	82.523.053.000,00	92.098.608.000,00	(9.575.555.000,00)	(10,40)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	70.488.959.000,00	88.305.177.000,00	(17.816.218.000,00)	(20,18)
3	Dana Alokasi Umum	433.071.545.428,00	433.071.545.428,00	0,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus	254.597.179.433,00	254.597.179.433,00	0,00	0,00
Jumlah		840.680.736.861,00	868.072.509.861,00	(27.391.773.000,00)	(3,16)

Dari data di atas dapat dilihat realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO lebih rendah dibandingkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO LRA Tahun 2024 sebesar Rp27.391.773.000,00 .

6.4.1.b.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
82.523.053.000,00	92.491.120.000,00	(9.968.067.000,00)	(10,78)

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LO	73.085.620.000,00	80.394.712.000,00	(7.309.092.000,00)	(9,09)
2	DBH PPh Pasal 21 – LO	8.724.881.000,00	11.306.800.000,00	(2.581.919.000,00)	(22,84)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 – LO	712.551.000,00	789.608.000,00	(77.057.000,00)	(9,76)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - LO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Jumlah		82.523.053.000,00	92.491.120.000,00	(9.968.067.000,00)	(10,78)

Perbandingan antara realisasi Dana Bagi Hasil Pajak LO dan Dana Bagi Hasil Pajak LRA sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LO	73.085.620.000,00	80.786.708.000,00	(7.701.088.000,00)	(9,53)
2	DBH PPh Pasal 21 – LO	8.724.881.000,00	10.577.747.000,00	(1.852.866.000,00)	(17,52)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 – LO	712.551.000,00	734.152.000,00	(21.601.000,00)	(2,94)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - LO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Jumlah		82.523.053.000,00	92.098.608.000,00	(9.575.555.000,00)	(10,40)

Dari data di atas dapat dilihat realisasi Dana Bagi Hasil Pajak LO Tahun 2024 terdapat selisih dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak LRA Tahun 2024 sebesar minus Rp9.575.555.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh :

- Penambahan piutang TDF Tahun 2024 sebesar Rp3.470.635.000,00
- Pelunasan piutang TDF Tahun 2023 sebesar Rp13.046.190.000,00

6.4.1.b.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
70.488.959.000,00	146.034.325.000,00	(75.545.366.000,00)	(51,73)

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	42.977.271.250,00	128.602.776.000,00	(85.625.504.750,00)	(66,58)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	16.234.909.750,00	3.306.265.000,00	12.928.644.750,00	391,03
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	41.451.000,00	0,00	41.451.000,00	100,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.858.903.000,00	3.878.139.000,00	(19.236.000,00)	(0,50)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.953.508.000,00	7.572.784.000,00	(2.619.276.000,00)	(34,59)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.422.916.000,00	2.674.361.000,00	(251.445.000,00)	(9,40)
Jumlah		70.488.959.000,00	146.034.325.000,00	(75.545.366.000,00)	(51,73)

Perbandingan antara realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO dan dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	42.977.271.250,00	59.432.612.250,00	(16.455.341.000,00)	(27,69)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	16.234.909.750,00	16.611.737.750,00	(376.828.000,00)	(2,27)
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	41.451.000,00	41.451.000,00	0,00	0,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.858.903.000,00	4.842.952.000,00	(984.049.000,00)	(20,32)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.953.508.000,00	4.953.508.000,00	0,00	0,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.422.916.000,00	2.422.916.000,00	0,00	0,00
Jumlah		70.488.959.000,00	88.305.177.000,00	(17.816.218.000,00)	(20,18)

Dari data di atas dapat dilihat realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO Tahun 2024 terdapat selisih dengan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LRA Tahun 2024 sebesar minus Rp17.816.218.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh :

- Pelunasan Piutang TDF Tahun 2023 sebesar Rp17.816.218.000,00,00.

6.4.1.b.1.3 Dana Alokasi Umum

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
433.071.545.428,00	422.381.067.892,00	10.690.477.536,00	2,53

Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum pada Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAU – LO	344.269.530.000,00	276.470.849.412,00	67.798.680.588,00	24,52



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
2	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan - LO	857.809.370,00	940.702.690,00	(82.893.320,00)	(8,81)
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	3.815.490.423,00	43.582.980.000,00	(39.767.489.577,00)	(91,25)
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	37.940.729.000,00	32.537.272.000,00	5.403.457.000,00	16,61
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	22.581.696.000,00	34.745.070.790,00	(12.163.374.790,00)	(35,01)
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	23.606.290.635,00	34.104.193.000,00	(10.497.902.365,00)	(30,78)
Jumlah		433.071.545.428,00	422.381.067.892,00	10.690.477.536,00	2,53

Realisasi Dana Alokasi Umum pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp433.071.545.428,00.

Perbandingan antara realisasi Dana Alokasi Umum LO dan Dana Alokasi Umum LRA sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	DAU – LO	344.269.530.000,00	344.269.530.000,00	0,00	0,00
2	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan - LO	857.809.370,00	857.809.370,00	0,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	3.815.490.423,00	3.815.490.423,00	0,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	44.715.237.000,00	44.715.237.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	15.807.188.000,00	15.807.188.000,00	0,00	0,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	23.606.290.635,00	23.606.290.635,00	0,00	0,00
Jumlah		433.071.545.428,00	433.071.545.428,00	0,00	0,00

Dari data diatas dapat dilihat realisasi Dana Alokasi Umum LO Tahun 2024 sama dengan dengan realisasi Dana Alokasi Umum LRA Tahun 2024 sebesar Rp433.071.545.428,00.

6.4.1.b.1.4 Dana Alokasi Khusus

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
254.597.179.433,00	184.803.753.182,00	69.793.426.251,00	37,77

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	209.677.000,00	1.246.116.000,00	(1.036.439.000,00)	(83,17)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD- LO	7.634.636.000,00	17.567.566.000,00	(9.932.930.000,00)	(56,54)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP- LO	2.591.582.000,00	6.267.323.000,00	(3.675.741.000,00)	(58,65)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah- LO	0,00	10.466.066.062,00	(10.466.066.062,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan- LO	3.802.831.532,00	0,00	3.802.831.532,00	100,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan- LO	38.816.264.711,00	30.761.414.950,00	8.054.849.761,00	26,18
7	DAK Fisik - Bidang Transportasi perdesaaan – Reguler	5.664.844.149,00	8.940.986.357,00	(3.276.142.208,00)	(36,64)
8	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-KB	109.373.000,00	0,00	109.373.000,00	100,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	403.621.000,00	0,00	403.621.000,00	100,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	399.800.000,00	(399.800.000,00)	100,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	79.603.098.131,00	0,00	79.603.098.131,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
12	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	5.043.218.730,00	3.600.925.000,00	1.442.293.730,00	40,05
13	DAK Non Fisik-BOS Reguler- LO	29.547.920.000,00	30.091.178.400,00	(543.258.400,00)	(1,81)
14	DAK Non Fisik-BOS Kinerja- LO	1.600.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00	100,00
15	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	41.371.552.000,00	38.038.616.000,00	3.332.936.000,00	8,76
16	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.219.863.000,00	1.768.500.000,00	451.363.000,00	25,52
17	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	20.353.974.000,00	19.731.727.000,00	622.247.000,00	3,15
18	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	3.680.532.600,00	3.389.351.300,00	291.181.300,00	8,59
19	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan-LO	434.700.000,00	488.210.000,00	(53.510.000,00)	(10,96)
20	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK – LO	1.209.866.995,00	7.527.050.140,00	(6.317.183.145,00)	83,93
21	DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal	0,00	427.800.000,00	(427.800.000,00)	(100,00)
22	DAK Non Fisik-BOKB-KB – LO	3.695.905.390,00	3.145.879.473,00	550.025.917,00	17,48
23	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	410.454.150,00	316.168.500,00	94.285.650,00	29,82
24	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	629.075.000,00	(629.075.000,00)	(100,00)
25	DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas	6.193.265.045,00	0,00	6.193.265.045,00	100,00
Jumlah		254.597.179.433,00	184.803.753.182,00	69.793.426.251,00	37,77

Realisasi Dana Alokasi Khusus pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar
Rp254.597.179.433,00.

Perbandingan antara realisasi Dana Alokasi Khusus - LO dan Dana Alokasi
Khusus - LRA sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD- LO	209.677.000,00	209.677.000,00	0,00	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD- LO	7.634.636.000,00	7.634.636.000,00	0,00	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP- LO	2.591.582.000,00	2.591.582.000,00	0,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan- LO	3.802.831.532,00	3.802.831.532,00	0,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan- LO	38.816.264.711,00	38.816.264.711,00	0,00	0,00
6	DAK Fisik - Bidang Transportasi perdesaaan – Reguler	5.664.844.149,00	5.664.844.149,00	0,00	0,00
7	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-KB	109.373.000,00	109.373.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	403.621.000,00	403.621.000,00	0,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	79.603.098.131,00	79.603.098.131,00	0,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	5.043.218.730,00	5.043.218.730,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	29.547.920.000,00	29.547.920.000,00	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00
13	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	41.371.552.000,00	41.371.552.000,00	0,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.219.863.000,00	2.219.863.000,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	20.353.974.000,00	20.353.974.000,00	0,00	0,00
16	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	3.680.532.600,00	3.680.532.600,00	0,00	0,00
17	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	434.700.000,00	434.700.000,00	0,00	0,00
18	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK – LO	1.209.866.995,00	1.209.866.995,00	0,00	0,00
19	DAK Non Fisik-BOKKB-KB – LO	3.695.905.390,00	3.695.905.390,00	0,00	0,00
20	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	410.454.150,00	410.454.150,00	0,00	0,00
21	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6.193.265.045,00	6.193.265.045,00	0,00	0,00
Jumlah		254.597.179.433,00	254.597.179.433,00	0,00	0,00

Dari data di atas dapat dilihat realisasi Dana Alokasi Khusus - LO Tahun 2024 sama dengan realisasi Dana Alokasi Khusus - LRA Tahun 2024 sebesar Rp254.597.179.433,00.

6.4.1.b.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
0,00	98.162.430.900,00	(98.162.430.900,00)	(100,00)

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya pada Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Desa	0,00	98.162.430.900,00	(98.162.430.900,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	98.162.430.900,00	(98.162.430.900,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp98.162.430.900,00 atau 100,00% dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp98.162.430.900,00.

Perbandingan antara realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO dan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LRA sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Dana Desa	0,00	97.240.042.000,00	(97.240.042.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	97.240.042.000,00	(97.240.042.000,00)	(100,00)

Dari data di atas dapat dilihat realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO Tahun 2024 terdapat selisih dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA Tahun 2024 sebesar minus Rp97.240.042.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh :

- Pendapatan Dana Desa Tahun 2024 yang tidak diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp97.240.042.000,00 sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 Tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.

6.4.1.b.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
105.971.579.740,00	87.760.079.486,00	18.211.500.254,00	(20,75)

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Provinsi pada Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	29.288.990.914,00	16.347.751.838,00	12.941.239.076,00	79,16
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	13.947.590.358,00	13.590.042.494,00	357.547.864,00	2,63
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	40.830.268.833,00	37.074.720.254,00	3.755.548.579,00	10,13
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	1.160.658.024,00	992.407.952,00	168.250.072,00	16,95
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	20.744.071.611,00	19.755.156.948,00	988.914.663,00	5,01



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Jumlah	105.971.579.740,00	87.760.079.486,00	18.211.500.254,00	(20,75)

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp105.971.579.740,00.

Perbandingan antara realisasi Transfer Pemerintah Provinsi LO dan Transfer Pemerintah Provinsi LRA sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	29.288.990.914,00	18.465.580.469,00	10.823.410.445,00	58,61
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	13.947.590.358,00	6.433.421.281,00	7.514.169.077,00	116,80
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	40.830.268.833,00	29.314.463.253,00	11.515.805.580,00	39,28
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	1.160.658.024,00	570.714.038,00	589.943.986,00	103,37
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	20.744.071.611,00	20.744.071.611,00	0,00	0,00
	Jumlah	105.971.579.740,00	75.528.250.652,00	30.443.329.088,00	40,31

Dari data di atas dapat dilihat realisasi transfer pemerintah provinsi LO tahun 2024 sebesar Rp105.971.579.740,00, Realisasi tersebut lebih tinggi Rp30.443.329.088,00 dari Realisasi transfer pemerintah provinsi LRA tahun 2024 sebesar Rp75.528.250.652,00 yang disebabkan oleh :

- Penambahan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp30.443.329.088,00.

6.4.1.b.4 Transfer Bantuan Keuangan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1.364.240.000,00	5.518.000.000,00	(4.153.760.000,00)	(75,28)

Rincian realisasi Transfer Bantuan Keuangan pada Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah	1.364.240.000,00	5.518.000.000,00	(4.153.760.000,00)	(75,28)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Provinsi – LO				
	Jumlah	1.364.240.000,00	5.518.000.000,00	(4.153.760.000,00)	(75,28)

Realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp1.364.240.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.153.760.000,00 atau 75,28% dari realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp5.518.000.000,00.

Perbandingan antara realisasi Transfer Bantuan Keuangan LO dan Transfer Bantuan Keuangan LRA sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi – LO	1.364.240.000,00	1.056.240.000,00	308.000.000,00	29,16
	Jumlah	1.364.240.000,00	1.056.240.000,00	308.000.000,00	29,16

Dari data di atas dapat dilihat realisasi Transfer Bantuan Keuangan - LO Tahun 2024 lebih tinggi sebesar Rp308.000.000,00 dibandingkan realisasi Transfer Bantuan Keuangan - LRA Tahun 2024 sebesar Rp1.056.240.000,00 yang disebabkan oleh :

b. Penambahan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp308.000.000,00.

6.4.1.c Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
4.863.554.291,60	6.076.848.008,33	(1.213.293.716,73)	(19,97)

Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah	4.863.554.291,60	6.076.848.008,33	(1.213.293.716,73)	(19,97)
	Jumlah	4.863.554.291,60	6.076.848.008,33	(1.213.293.716,73)	(19,97)

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp4.863.554.291,60. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.213.293.716,73 atau 19,97% dari Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp6.078.848.008,33.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.4.1.c 1. Pendapatan Hibah

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
4.863.554.291,60	6.076.848.008,33	(1.213.293.716,73)	(19,97)

Pendapatan Hibah selama Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	366.561.589,00	3.678.376.700,00	(3.311.815.111,00)	(90,03)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO	4.259.489.702,60	2.355.071.308,33	1.904.418.394,27	80,86
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri .. - LO	0,00	21.600.000,00	(21.600.000,00)	(100,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri – LO	167.678.000,00	4.100.000,00	163.578.000,00	3.989,71
5	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri - LO	69.825.000,00	17.700.000,00	52.125.000,00	294,49
Jumlah		4.863.554.291,60	6.076.848.008,33	(1.213.293.716,73)	(19,97)

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2024 sebesar Rp4.863.554.291,60. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.213.293.716,73 atau 19,97% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.076.848.008,33..

Realisasi Pendapatan Hibah - LO dengan Pendapatan Hibah - LRA sebagai perbandingan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	366.561.589,00	0,00	366.561.589,00	100,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO	4.259.489.702,60	0,00	4.259.489.702,60	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri .. - LO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri – LO	167.678.000,00	0,00	167.678.000,00	100,00
5	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri - LO	69.825.000,00	69.825.000,00	0,00	0,00
Jumlah		4.863.554.291,60	69.825.000,00	4.793.729.291,60	6.865,35

Dari data di atas dapat dilihat realisasi Pendapatan Hibah LO terdapat selisih sebesar Rp4.793.729.291,60 dibandingkan realisasi Pendapatan Hibah – LRA dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Bentuk Hibah	Pemberi Hibah	Nilai
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO			
	Dinas Pendidikan	Barang menjadi Aset Tetap	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	80.438.299,00
	Dinas Perikanan	Barang menjadi Aset Tetap	Kementerian Pekerjaan Umum	286.123.290,00
Jumlah				366.561.589,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO			
	Dinas Kesehatan	Barang menjadi Persediaan	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	4.259.489.702,60
Jumlah				4.259.489.702,60
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri – LO			
	Dinas Kesehatan	Barang menjadi Aset Tetap	PT IMBANG TATA ALAM	7.700.000,00
	Dinas Kesehatan	Barang menjadi Aset Tetap	Bank Riau Kepri Syariah	159.978.000,00
Jumlah				167.678.000,00
Total				4.793.729.291,60



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.4.2 BEBAN

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1.100.686.407.653,57	1.270.214.220.083,81	(169.527.812.430,24)	(13,35)

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Transaksi beban tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi pengeluaran yang tidak melalui mekanisme APBD. Beban diakui pada saat timbulnya manfaat ekonomi atau potensi jasa.

6.4.2.a Beban Operasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1.100.686.407.653,57	1.270.214.220.083,81	(169.527.812.430,24)	(13,35)

Realisasi beban operasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Pegawai	448.746.704.829,94	414.548.726.007,61	34.197.978.822,33	8,25
2	Beban Persediaan	94.408.426.228,39	104.522.771.557,99	(10.114.345.329,59)	(9,68)
3	Beban Jasa	176.195.374.395,93	180.304.767.491,42	(4.109.393.095,49)	(2,28)
4	Beban Pemeliharaan	26.423.802.057,57	30.104.203.078,00	(3.680.401.020,43)	(12,23)
5	Beban Perjalanan Dinas	42.742.782.705,00	57.487.820.490,00	(14.745.037.785,00)	(25,65)
6	Beban Bunga	922.890.122,00	3.281.890.320,00	(2.359.000.198,00)	(71,88)
7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah	70.061.248.625,48	44.004.436.246,12	26.056.812.379,36	59,21
9	Beban Bantuan Sosial	8.199.485.379,91	9.462.055.940,69	(1.262.570.560,78)	(13,34)
10	Beban Penyusutan	167.110.683.339,74	263.535.064.492,84	(96.424.381.153,10)	(36,59)
11	Beban Amortisasi	214.765.023,14	238.078.972,38	(23.313.949,24)	(9,79)
12	Beban Penyisihan Piutang	1.753.870.546,47	1.539.505.338,52	214.365.207,95	13,92
13	Beban Transfer	63.906.374.400,00	161.183.742.900,00	(97.277.368.500,00)	(60,35)
14	Beban Lain-lain	0,00	1.157.248,25	(1.157.248,25)	(100,00)
Jumlah		1.100.686.407.653,57	1.270.214.220.083,81	(169.527.812.430,24)	(13,35)

Penjelasan atas akun beban operasional sebagai berikut:

6.4.2.a.1. Beban Pegawai

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
448.746.704.829,94	414.548.726.007,61	34.197.978.822,33	8,25



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp448.746.704.829,94. Beban Pegawai seluruhnya terdiri dari pengeluaran kas pada OPD, BLUD dan BOS.

Berikut rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	242.513.888.862,00	199.439.769.628,00	43.074.119.234,00	21,60
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	105.465.348.900,17	111.375.615.835,00	(5.910.266.934,83)	(5,31)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.576.816.126,00	69.578.634.202,00	(3.001.818.076,00)	(4,31)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	16.705.899.129,00	16.760.811.432,00	(54.912.303,00)	(0,33)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	138.676.363,00	173.739.598,00	(35.063.235,00)	(20,18)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	421.160.900,00	505.701.000,00	(84.540.100,00)	(16,72)
7	Beban Pegawai BLUD	16.924.914.549,77	16.714.454.312,61	210.460.237,16	1,26
Jumlah		448.746.704.829,94	414.548.726.007,61	34.197.978.822,33	8,25

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Realisasi Rp448.746.704.829,94 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp34.197.978.822,33 atau 8,25% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp414.548.726.007,61.

Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	241.450.938.372,00	216.537.921.656,00	24.913.016.716,00	11,51
2	Dinas Kesehatan	87.361.964.490,94	77.631.653.323,61	9.730.311.167,33	12,53
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.890.909.382,00	4.025.305.296,00	(134.395.914,00)	(3,34)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.916.368.948,00	1.959.079.811,00	(42.710.863,00)	(2,18)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.997.451.539,00	1.837.444.028,00	160.007.511,00	8,71
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.652.351.599,00	3.498.024.127,00	154.327.472,00	4,41
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.329.480.258,00	2.310.557.796,00	18.922.462,00	0,82
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.206.894.895,00	3.956.320.209,00	1.250.574.686,00	31,61
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.910.395.552,00	5.608.743.926,00	(698.348.374,00)	(12,45)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.016.156.564,00	1.979.172.345,00	36.984.219,00	1,87
11	Dinas Perhubungan	3.805.328.630,00	3.639.781.992,00	165.546.638,00	4,55
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.772.564.337,00	1.796.376.889,00	(23.812.552,00)	(1,33)
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	2.094.666.037,00	2.116.629.817,00	(21.963.780,00)	(1,04)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.082.351.726,00	1.986.890.004,00	95.461.722,00	4,80
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.833.156.946,00	2.432.621.187,00	400.535.759,00	16,47
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.815.481.925,00	1.886.407.712,00	(70.925.787,00)	(3,76)
17	Dinas Perikanan	2.305.407.284,00	2.110.025.178,00	195.382.106,00	9,26
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.943.048.472,00	2.856.745.556,00	86.302.916,00	3,02
19	Sekretariat Daerah	12.256.530.239,00	12.669.845.124,00	(413.314.885,00)	(3,26)
20	Sekretariat DPRD	19.437.590.142,00	19.779.246.828,00	(341.656.686,00)	(1,73)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.633.039.236,00	4.334.973.451,00	298.065.785,00	6,88
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.357.109.816,00	6.284.358.567,00	72.751.249,00	1,16
23	Badan Pendapatan Daerah	6.671.209.148,00	7.615.088.140,00	(943.878.992,00)	(12,39)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.084.892.742,00	3.169.449.732,00	(84.556.990,00)	(2,67)
25	Inspektorat Daerah	5.720.269.599,00	5.938.383.712,00	(218.114.113,00)	(3,67)
26	Kecamatan Tebing Tinggi	3.554.660.986,00	3.510.222.356,00	44.438.630,00	1,27
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	1.400.361.367,00	1.460.722.365,00	(60.360.998,00)	(4,13)
28	Kecamatan Rangsang	1.781.767.870,00	1.958.206.094,00	(176.438.224,00)	(9,01)
29	Kecamatan Rangsang Barat	1.534.256.920,00	1.572.585.936,00	(38.329.016,00)	(2,44)
30	Kecamatan Merbau	1.753.009.201,00	1.710.583.312,00	42.425.889,00	2,48
31	Kecamatan Pulau Merbau	1.412.488.091,00	1.455.799.334,00	(43.311.243,00)	(2,98)
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	1.049.135.366,00	887.032.990,00	162.102.376,00	18,27
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	1.028.248.865,00	894.744.501,00	(63.500.239,00)	(5,82)
34	Kecamatan Tasik Putri Puyu	753.530.664,00	1.091.749.104,00	(141.213.837,00)	(15,78)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.933.687.621,00	2.046.033.609,00	(112.345.988,00)	5,49
Jumlah		448.746.704.829,94	414.548.726.007,61	34.197.978.822,33	8,25

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	137.519.729.543,00	111.557.312.575,00	25.962.416.968,00	23,27
2	Dinas Kesehatan	44.586.993.155,00	32.145.004.533,00	12.441.988.622,00	38,71
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.402.426.188,00	2.327.313.324,00	75.112.864,00	3,23



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.150.382.809,00	1.091.339.976,00	59.042.833,00	5,41
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.234.027.066,00	1.076.369.995,00	157.657.071,00	14,65
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.411.300.833,00	2.243.029.083,00	168.271.750,00	7,50
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.419.069.495,00	1.404.327.836,00	14.741.659,00	1,05
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.752.850.640,00	2.531.635.716,00	1.221.214.924,00	48,24
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.612.013.221,00	2.653.107.086,00	(41.093.865,00)	(1,55)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.271.022.814,00	1.208.967.770,00	62.055.044,00	5,13
11	Dinas Perhubungan	2.421.186.500,00	2.215.908.431,00	205.278.069,00	9,26
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.059.278.481,00	1.021.389.793,00	37.888.688,00	3,71
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	1.327.853.317,00	1.286.947.653,00	40.905.664,00	3,18
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.284.356.256,00	1.199.992.647,00	84.363.609,00	7,03
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.782.876.946,00	1.456.348.685,00	326.528.261,00	22,42
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.156.266.925,00	1.157.388.712,00	(1.121.787,00)	(0,10)
17	Dinas Perikanan	1.432.059.484,00	1.310.430.672,00	121.628.812,00	9,28
18	Dinas Perindustrian dan	1.927.351.772,00	1.774.377.237,00	152.974.535,00	8,62



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Perdagangan				
19	Sekretariat Daerah	5.543.202.426,00	4.958.480.436,00	584.721.990,00	11,79
20	Sekretariat DPRD	1.511.501.013,00	1.639.200.396,00	(127.699.383,00)	(7,79)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.567.726.636,00	1.992.258.244,00	575.468.392,00	28,89
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.814.607.418,00	3.271.680.567,00	542.926.851,00	16,59
23	Badan Pendapatan Daerah	3.286.984.255,00	3.108.917.125,00	178.067.130,00	5,73
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.964.010.742,00	1.939.001.937,00	25.008.805,00	1,29
25	Inspektorat Daerah	2.900.145.084,00	2.597.923.307,00	302.221.777,00	11,63
26	Kecamatan Tebing Tinggi	2.215.409.873,00	2.190.918.018,00	24.491.855,00	1,12
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	897.949.695,00	917.149.465,00	(19.199.770,00)	(2,09)
28	Kecamatan Rangsang	1.129.239.370,00	1.227.424.390,00	(98.185.020,00)	(8,00)
29	Kecamatan Rangsang Barat	974.831.920,00	955.136.321,00	19.695.599,00	2,06
30	Kecamatan Merbau	1.093.301.777,00	1.070.388.816,00	22.912.961,00	2,14
31	Kecamatan Pulau Merbau	891.771.141,00	930.162.339,00	(38.391.198,00)	(4,13)
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	662.353.022,00	527.247.422,00	135.105.600,00	25,62
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	447.547.464,00	526.445.159,00	(78.897.695,00)	(14,99)
34	Kecamatan Tasik Putri Puyu	642.796.265,00	660.916.067,00	(18.119.802,00)	(2,74)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.219.465.316,00	1.265.327.895,00	(45.862.579,00)	100,00
Jumlah		242.513.888.862,00	199.439.769.628,00	43.074.119.234,00	21,60

2. Beban Tambahan Penghasilan ASN

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40.263.087.703,00	40.272.399.879,00	(9.312.176,00)	(0,02)
2	Dinas Kesehatan	25.718.536.786,17	28.521.694.478,00	(2.803.157.691,84)	(9,83)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.395.623.194,00	1.429.891.972,00	(34.268.778,00)	(2,41)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	718.886.139,00	767.779.835,00	(48.893.696,00)	(6,37)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	738.604.473,00	663.854.033,00	74.750.440,00	11,26
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.202.290.766,00	1.164.395.044,00	37.895.722,00	3,25
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	835.410.763,00	791.449.960,00	43.960.803,00	5,55
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.419.844.255,00	1.357.784.493,00	62.059.762,00	4,57
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.271.982.331,00	2.902.836.840,00	(630.854.509,00)	(21,73)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	709.853.750,00	703.874.575,00	5.979.175,00	0,85
11	Dinas Perhubungan	1.309.322.130,00	1.274.593.561,00	34.728.569,00	2,72
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	686.345.856,00	691.587.096,00	(5.241.240,00)	(0,76)
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	730.332.720,00	749.322.164,00	(18.989.444,00)	(2,53)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	759.175.470,00	713.977.357,00	45.198.113,00	6,33
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.011.460.000,00	907.032.502,00	104.427.498,00	11,51
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	635.650.000,00	671.439.000,00	(35.789.000,00)	(5,33)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
17	Dinas Perikanan	828.767.800,00	720.854.506,00	107.913.294,00	14,97
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	975.256.700,00	1.008.308.319,00	(33.051.619,00)	(3,28)
19	Sekretariat Daerah	5.943.860.550,00	6.651.154.090,00	(707.293.540,00)	(10,63)
20	Sekretariat DPRD	905.910.000,00	924.175.000,00	(18.265.000,00)	(1,98)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.014.672.600,00	2.241.435.207,00	(226.762.607,00)	(10,12)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.171.272.398,00	2.561.798.000,00	(390.525.602,00)	(15,24)
23	Badan Pendapatan Daerah	2.669.964.893,00	3.563.656.015,00	(893.691.122,00)	(25,08)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.078.522.000,00	1.139.727.795,00	(61.205.795,00)	(5,37)
25	Inspektorat Daerah	2.779.804.515,00	3.259.820.405,00	(480.015.890,00)	(14,73)
26	Kecamatan Tebing Tinggi	1.268.871.113,00	1.184.104.338,00	84.766.775,00	7,16
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	466.111.672,00	491.372.900,00	(25.261.228,00)	(5,14)
28	Kecamatan Rangsang	620.728.500,00	674.101.704,00	(53.373.204,00)	(7,92)
29	Kecamatan Rangsang Barat	533.325.000,00	565.249.615,00	(31.924.615,00)	(5,65)
30	Kecamatan Merbau	622.057.424,00	570.894.496,00	51.162.928,00	8,96
31	Kecamatan Pulau Merbau	499.056.950,00	488.316.995,00	10.739.955,00	2,20
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	359.282.344,00	313.025.568,00	46.256.776,00	14,78
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	364.992.600,00	319.389.342,00	(24.920.437,00)	(6,39)
34	Kecamatan Tasik Putri Puyu	287.323.200,00	389.913.037,00	(32.066.142,00)	(10,04)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	669.162.305,00	724.405.714,00	(55.243.409,00)	(7,63)
Jumlah		105.465.348.900,17	111.375.615.835,00	(5.910.266.934,83)	(5,31)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ASN

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.668.121.126,00	64.708.209.202,00	(1.040.088.076,00)	(1,61)
2	Dinas Kesehatan	131.520.000,00	250.500.000,00	(118.980.000,00)	(47,50)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.860.000,00	268.100.000,00	(175.240.000,00)	(65,36)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	47.100.000,00	99.960.000,00	(52.860.000,00)	(52,88)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.820.000,00	97.220.000,00	(72.400.000,00)	(74,47)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	38.760.000,00	90.600.000,00	(51.840.000,00)	(57,22)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75.000.000,00	114.780.000,00	(39.780.000,00)	(34,66)
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	34.200.000,00	66.900.000,00	(32.700.000,00)	(48,88)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.400.000,00	52.800.000,00	(26.400.000,00)	(50,00)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35.280.000,00	66.330.000,00	(31.050.000,00)	(46,81)
11	Dinas Perhubungan	74.820.000,00	149.280.000,00	(74.460.000,00)	(49,88)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	26.940.000,00	83.400.000,00	(56.460.000,00)	(67,70)
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	36.480.000,00	80.360.000,00	(43.880.000,00)	(54,60)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.820.000,00	72.920.000,00	(34.100.000,00)	(46,76)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	38.820.000,00	69.240.000,00	(30.420.000,00)	(43,93)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.565.000,00	57.580.000,00	(34.015.000,00)	(59,07)
17	Dinas Perikanan	44.580.000,00	78.740.000,00	(34.160.000,00)	(43,38)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40.440.000,00	74.060.000,00	(33.620.000,00)	(45,40)
19	Sekretariat Daerah	411.230.000,00	582.370.000,00	(171.140.000,00)	(29,39)
20	Sekretariat DPRD	112.680.000,00	253.460.000,00	(140.780.000,00)	(55,54)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	50.640.000,00	101.280.000,00	(50.640.000,00)	(50,00)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	371.230.000,00	450.880.000,00	(79.650.000,00)	17,67
23	Badan Pendapatan Daerah	714.260.000,00	942.515.000,00	(228.255.000,00)	(24,22)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.360.000,00	90.720.000,00	(48.360.000,00)	(53,31)
25	Inspektorat Daerah	40.320.000,00	80.640.000,00	(40.320.000,00)	(50,00)
26	Kecamatan Tebing Tinggi	70.380.000,00	135.200.000,00	(64.820.000,00)	(47,94)
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	36.300.000,00	52.200.000,00	(15.900.000,00)	(30,46)
28	Kecamatan Rangsang	31.800.000,00	56.680.000,00	(24.880.000,00)	(43,90)
29	Kecamatan Rangsang Barat	26.100.000,00	52.200.000,00	(26.100.000,00)	(50,00)
30	Kecamatan Merbau	37.650.000,00	69.300.000,00	(31.650.000,00)	(45,67)
31	Kecamatan Pulau Merbau	21.660.000,00	37.320.000,00	(15.660.000,00)	(41,96)
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	27.500.000,00	46.760.000,00	(19.260.000,00)	(41,19)
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	18.660.000,00	48.910.000,00	(30.250.000,00)	(61,85)
34	Kecamatan Tasik Putri Puyu	20.460.000,00	40.920.000,00	(20.460.000,00)	(50,00)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.060.000,00	56.300.000,00	(11.240.000,00)	100,00
Jumlah		66.576.816.126,00	69.578.634.202,00	(3.001.818.076,00)	(4,31)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Sekretariat DPRD	16.705.899.129,00	16.760.811.432,00	(54.912.303,00)	(0,33)
Jumlah		16.705.899.129,00	16.760.811.432,00	(54.912.303,00)	(0,33)

5. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Sekretariat Daerah	138.676.363,00	173.739.598,00	(35.063.235,00)	(20,18)
Jumlah		138.676.363,00	173.739.598,00	(35.063.235,00)	(20,18)

6. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Sekretariat Daerah	219.560.900,00	304.101.000,00	(84.540.100,00)	(27,80)
2	Sekretariat DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00
Jumlah		421.160.900,00	505.701.000,00	(84.540.100,00)	(16,72)

7. Beban Pegawai BLUD

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	16.924.914.549,77	16.714.454.312,61	210.460.237,16	1,26
Jumlah		16.924.914.549,77	16.714.454.312,61	210.460.237,16	1,26

Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	242.513.888.862,00	239.817.631.596,00	2.696.257.266,00	1,12
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	105.465.348.900,17	63.073.333.282,00	42.392.015.618,17	67,21
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.576.816.126,00	65.914.166.126,00	662.650.000,00	1,01
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	16.705.899.129,00	16.705.899.129,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	138.676.363,00	138.676.363,00	0,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	421.160.900,00	421.160.900,00	0,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	16.924.914.549,77	16.818.007.582,77	106.906.967,00	0,64
Jumlah		448.746.704.829,94	402.888.874.978,77	45.857.829.851,17	11,38

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp448.746.704.829,94. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp45.857.829.851,17 dibandingkan realisasi LRA Tahun 2024 sebesar Rp402.888.874.978,77 disebabkan oleh :

- Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada semua OPD sebesar Rp45.909.318.034,17; dan
- Pelunasan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp51.488.183,00.

Rincian perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2024 untuk setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

6.4.2.a.2. Beban Persediaan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
94.408.426.228,39	104.522.771.557,99	(10.114.345.329,59)	(9,68)

Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam rangka penyajian laporan operasional. Metode pencatatan persediaan secara periodik yang dihitung berdasarkan inventarisasi fisik. Hal tersebut dilakukan dengan menambahkan saldo awal persediaan dengan pembelian atau perolehan persediaan kemudian dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit.

Berikut rincian perbandingan Beban Persediaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	94.187.252.228,39	104.495.771.557,99	(10.308.519.329,59)	(9,87)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	27.000.000,00	(27.000.000,00)	(100,00)
3	Beban Barang Bekas Dipakai	221.174.000,00	0,00	221.174.000,00	100,00
Jumlah		94.408.426.228,39	104.522.771.557,99	(10.114.345.329,59)	(9,68)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp94.408.426.228,39. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.114.345.329,59 atau 9,68% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp104.522.771.557,99.

Beban Persediaan merupakan pemakaian persediaan satu Tahun anggaran 2024 yang merupakan konsolidasi dari akun beban barang pakai habis, dan barang tak habis pakai dan beban barang bekas dipakai.

Perbandingan realisasi Beban Persediaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.462.220.969,00	5.061.636.416,30	400.584.552,70	7,91
2	Dinas Kesehatan	33.466.106.837,11	29.004.337.808,21	4.461.769.028,90	15,38
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	218.510.280,50	1.045.818.685,00	(827.308.404,50)	(79,11)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.779.863.150,00	1.722.181.950,00	57.681.200,00	3,35
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	278.527.900,00	336.418.842,00	(57.890.942,00)	(17,21)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	819.196.400,00	746.405.260,00	72.791.140,00	9,75
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	881.568.179,00	1.007.315.882,00	(125.747.703,00)	(12,48)
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.180.577.012,00	3.409.325.987,00	(1.228.748.975,00)	(36,04)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	555.742.100,00	509.321.599,80	46.420.500,20	9,11
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	207.705.450,00	1.064.723.750,00	(857.018.300,00)	(80,49)
11	Dinas Perhubungan	469.483.609,00	254.971.600,00	214.512.009,00	84,13
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	207.517.900,00	461.085.217,00	(253.567.317,00)	(54,99)
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	3.261.562.280,00	3.239.200.285,00	22.361.995,00	0,69



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.547.395,00	501.317.426,00	(408.770.031,00)	(81,54)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	424.877.120,00	2.054.953.211,38	(1.630.076.091,38)	(79,32)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	205.049.063,12	176.270.024,00	28.779.039,12	16,33
17	Dinas Perikanan	7.135.223.379,00	5.043.802.958,00	2.091.420.421,00	41,47
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	335.453.700,00	461.320.390,00	(125.866.690,00)	(27,28)
19	Sekretariat Daerah	17.271.445.702,33	27.138.001.307,25	(9.866.555.604,92)	(36,36)
20	Sekretariat DPRD	11.121.244.950,00	11.130.161.852,04	(8.916.902,04)	(0,08)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	549.577.347,00	721.357.750,00	(171.780.403,00)	(23,81)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	921.875.043,33	1.995.612.725,00	(1.073.737.681,67)	(53,80)
23	Badan Pendapatan Daerah	861.031.870,00	1.487.828.150,00	(626.796.280,00)	(42,13)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	463.532.500,00	527.804.000,00	(64.271.500,00)	(12,18)
25	Inspektorat Daerah	262.126.350,00	352.548.372,00	(90.422.022,00)	(25,65)
26	Kecamatan Tebing Tinggi	919.537.953,00	686.239.260,00	233.298.693,00	34,00
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	407.402.000,00	629.286.000,00	(221.884.000,00)	(35,26)
28	Kecamatan Rangsang	385.766.039,00	451.738.500,00	(65.972.461,00)	(14,60)
29	Kecamatan Rangsang Barat	359.884.150,00	356.492.750,00	3.391.400,00	0,95
30	Kecamatan Merbau	649.657.000,00	693.294.350,00	(43.637.350,00)	(6,29)
31	Kecamatan Pulau Merbau	479.211.600,00	492.730.800,00	(13.519.200,00)	(2,74)
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	423.515.000,00	387.448.000,00	36.067.000,00	9,31
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	429.239.000,00	498.408.000,00	(69.169.000,00)	(13,88)
34	Kecamatan Tasik Putri Puyu	389.803.000,00	416.973.000,00	(27.170.000,00)	(6,52)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	531.844.000,00	456.439.450,00	75.404.550,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Jumlah	94.408.426.228,39	104.522.771.557,99	(10.114.345.329,59)	(9,68)

Beban Persediaan Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Beban Bahan Pakai Habis

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.253.046.969,00	5.061.636.416,30	191.410.552,70	3,78
2	Dinas Kesehatan	33.466.106.837,11	29.004.337.808,21	4.461.769.028,90	15,38
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	218.510.280,50	1.045.818.685,00	(827.308.404,50)	(79,11)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.779.863.150,00	1.722.181.950,00	57.681.200,00	3,35
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	278.527.900,00	336.418.842,00	(57.890.942,00)	(17,21)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	819.196.400,00	746.405.260,00	72.791.140,00	9,75
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	881.568.179,00	1.007.315.882,00	(125.747.703,00)	(12,48)
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.168.577.012,00	3.382.325.987,00	(1.213.748.975,00)	(35,89)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	555.742.100,00	509.321.599,80	46.420.500,20	9,11
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	207.705.450,00	1.064.723.750,00	(857.018.300,00)	(80,49)
11	Dinas Perhubungan	469.483.609,00	254.971.600,00	214.512.009,00	84,13
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	207.517.900,00	461.085.217,00	(253.567.317,00)	(54,99)
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	3.261.562.280,00	3.239.200.285,00	22.361.995,00	0,69



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.547.395,00	501.317.426,00	(408.770.031,00)	(81,54)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	424.877.120,00	2.054.953.211,38	(1.630.076.091,38)	(79,32)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	205.049.063,12	176.270.024,00	28.779.039,12	16,33
17	Dinas Perikanan	7.135.223.379,00	5.043.802.958,00	2.091.420.421,00	41,47
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	335.453.700,00	461.320.390,00	(125.866.690,00)	(27,28)
19	Sekretariat Daerah	17.271.445.702,33	27.138.001.307,25	(9.866.555.604,92)	(36,36)
20	Sekretariat DPRD	11.121.244.950,00	11.130.161.852,04	(8.916.902,04)	(0,08)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	549.577.347,00	721.357.750,00	(171.780.403,00)	(23,81)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	921.875.043,33	1.995.612.725,00	(1.073.737.681,67)	(53,80)
23	Badan Pendapatan Daerah	861.031.870,00	1.487.828.150,00	(626.796.280,00)	(42,13)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	463.532.500,00	527.804.000,00	(64.271.500,00)	(12,18)
25	Inspektorat Daerah	262.126.350,00	352.548.372,00	(90.422.022,00)	(25,65)
26	Kecamatan Tebing Tinggi	919.537.953,00	686.239.260,00	233.298.693,00	34,00
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	407.402.000,00	629.286.000,00	(221.884.000,00)	(35,26)
28	Kecamatan Rangsang	385.766.039,00	451.738.500,00	(65.972.461,00)	(14,60)
29	Kecamatan Rangsang Barat	359.884.150,00	356.492.750,00	3.391.400,00	0,95
30	Kecamatan Merbau	649.657.000,00	693.294.350,00	(43.637.350,00)	(6,29)
31	Kecamatan Pulau Merbau	479.211.600,00	492.730.800,00	(13.519.200,00)	(2,74)
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	423.515.000,00	387.448.000,00	36.067.000,00	9,31
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	429.239.000,00	498.408.000,00	(69.169.000,00)	(13,88)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
34	Kecamatan Tasik Putri Puyu	389.803.000,00	416.973.000,00	(27.170.000,00)	(6,52)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	531.844.000,00	456.439.450,00	75.404.550,00	100,00
Jumlah		94.187.252.228,39	104.495.771.557,99	(10.308.519.329,59)	(9,87)

2. Beban Barang Tak Habis Pakai

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	27.000.000,00	(27.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	27.000.000,00	(27.000.000,00)	(100,00)

3. Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	209.174.000,00	0,00	209.174.000,00	100,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Jumlah		221.174.000,00	0,00	221.174.000,00	100,00

Perbandingan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	94.187.252.228,39	62.800.290.158,50	31.386.962.069,89	49,98
2	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	221.174.000,00	1.741.592.000,00	(1.520.418.000,00)	(87,30)
Jumlah		94.408.426.228,39	64.541.882.158,50	29.866.544.069,89	46,27

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp94.408.426.228,39. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp29.866.544.069,89 dibandingkan realisasi LRA tahun 2024 sebesar Rp64.541.882.158,50 disebabkan oleh :

- penambahan Utang Belanja Tahun 2024 sebesar Rp14.775.822.281,00;
- Beban Persediaan yang dikapitalisasi menjadi aset sebesar Rp1.459.470.000,00;
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset yang diakui sebagai Beban Persediaan sebesar Rp3.373.273.292,88;
- Beban Jasa yang direklasifikasi menjadi Beban Persediaan sebesar Rp9.384.852.708,33;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Beban Persediaan yang direklasifikasi menjadi Beban Jasa sebesar Rp20.989.870,00;
- f. Pendapatan Hibah yang direklasifikasi menjadi Beban Persediaan sebesar Rp4.336.217.002,60;
- g. Mutasi keluar menjadi Beban Persediaan sebesar Rp142.469.224,00;
- h. Stock Opname Persediaan Tahun 2023 yang diakui sebagai Beban Persediaan sebesar Rp13.918.304.992,55; dan
- i. Stock Opname Persediaan Tahun 2024 yang diakui sebagai Beban Persediaan sebesar Rp14.298.997.113,47.

Rincian perbandingan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan Tahun 2024 untuk setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

6.4.2.a.3. Beban Jasa

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
176.195.374.395,93	180.304.767.491,42	(4.109.393.095,49)	(2,28)

Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp176.195.374.395,93.

Beban Jasa Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	98.780.592.690,00	102.019.586.751,00	(3.238.994.061,00)	(3,17)
2	Beban Jasa Asuransi	7.063.370.046,00	6.449.753.573,00	613.616.473,00	9,51
3	Beban Sewa Tanah	123.000.000,00	175.900.000,00	(52.900.000,00)	(30,07)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.457.190.124,00	10.785.596.722,72	(3.328.406.598,72)	(30,86)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.399.651.500,00	3.037.390.936,00	(637.739.436,00)	(21,00)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	396.949.000,00	1.643.276.000,00	(1.246.327.000,00)	(75,84)
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.820.356.608,75	3.430.410.388,00	(610.053.779,25)	(17,78)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.194.609.540,00	587.897.000,00	606.712.540,00	103,20
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	55.500.000,00	(55.500.000,00)	(100,00)
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	175.000.000,00	25.000.000,00	150.000.000,00	600,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.838.275.540,00	6.725.048.000,00	(1.886.772.460,00)	(28,06)
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	206.400.000,00	336.000.000,00	(129.600.000,00)	(38,57)
13	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	20.948.481.267,00	(20.948.481.267,00)	(100,00)
14	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	20.902.062.110,00	0,00	20.902.062.110,00	100,00
15	Beban Barang dan Jasa BLUD	25.409.176.189,18	21.294.454.092,70	4.114.722.096,48	19,32
16	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.788.950.000,00	2.367.000.000,00	(578.050.000,00)	(24,42)
17	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.639.791.048,00	423.472.761,00	2.216.318.287,00	523,37
Jumlah		176.195.374.395,93	180.304.767.491,42	(4.109.393.095,49)	(2,28)

Realisasi Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp176.195.374.395,93. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.109.393.095,49 atau 2,28% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp180.304.767.491,42.

Perbandingan Beban Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.712.325.540,00	35.666.340.080,00	(2.954.014.540,00)	(8,28)
2	Dinas Kesehatan	51.846.710.953,18	48.663.135.012,70	3.183.575.940,48	6,54
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.699.228.818,50	3.975.908.200,00	(276.679.381,50)	(6,96)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5.998.638.370,25	5.957.202.282,00	41.436.088,25	0,70



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.268.010.953,00	1.119.474.331,00	148.536.622,00	13,27
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.378.925.272,00	5.669.812.280,00	709.112.992,00	12,51
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.590.679.330,00	5.567.138.141,00	23.541.189,00	0,42
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.030.413.038,00	3.023.343.693,00	(992.930.655,00)	(32,84)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	798.046.239,00	768.612.107,00	29.434.132,00	3,83
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	620.851.839,00	571.179.539,00	49.672.300,00	8,70
11	Dinas Perhubungan	9.653.018.387,00	1.481.872.197,00	8.171.146.190,00	551,41
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.154.562.617,00	3.903.528.055,00	(748.965.438,00)	(19,19)
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	449.270.752,00	415.776.762,00	33.493.990,00	8,06
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	430.041.503,00	1.168.870.690,00	(738.829.187,00)	(63,21)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.224.564.605,00	1.677.454.735,00	(452.890.130,00)	(27,00)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	704.478.992,00	584.194.394,00	120.284.598,00	20,59
17	Dinas Perikanan	566.097.311,00	710.945.807,00	(144.848.496,00)	(20,37)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.126.967.538,00	1.435.719.681,00	(308.752.143,00)	(21,51)
19	Sekretariat Daerah	18.801.869.357,00	27.731.176.617,00	(8.929.307.260,00)	(32,20)
20	Sekretariat DPRD	14.467.461.803,00	16.828.090.142,72	(2.360.628.339,72)	(14,03)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.581.970.419,00	905.757.678,00	676.212.741,00	74,66
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.762.163.283,00	4.194.326.213,00	(432.162.930,00)	(10,30)
23	Badan Pendapatan Daerah	1.352.058.083,00	1.167.853.426,00	184.204.657,00	15,77
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.043.313.660,00	1.019.426.762,00	23.886.898,00	2,34
25	Inspektorat Daerah	715.999.155,00	531.893.230,00	184.105.925,00	34,61
26	Kecamatan Tebing Tinggi	2.662.807.275,00	2.218.677.305,00	444.129.970,00	20,02
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	355.309.666,00	399.552.000,00	(44.242.334,00)	(11,07)
28	Kecamatan Rangsang	372.281.661,00	345.773.175,00	26.508.486,00	7,67
29	Kecamatan Rangsang Barat	284.259.148,00	300.983.710,00	(16.724.562,00)	(5,56)
30	Kecamatan Merbau	634.890.000,00	544.235.350,00	90.654.650,00	16,66
31	Kecamatan Pulau Merbau	286.653.828,00	275.828.600,00	10.825.228,00	3,92
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	404.822.000,00	329.020.400,00	75.801.600,00	23,04
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	218.288.000,00	211.384.000,00	6.904.000,00	3,27
34	Kecamatan Tasik Putri Puyu	293.696.000,00	265.602.896,00	28.093.104,00	10,58
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	704.699.000,00	674.678.000,00	30.021.000,00	100,00
Jumlah		176.195.374.395,93	180.304.767.491,42	(4.109.393.095,49)	(2,28)

Beban Jasa Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Beban Jasa Kantor

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.122.280.630,00	14.173.690.463,00	(3.051.409.833,00)	(21,53)
2	Dinas Kesehatan	18.246.041.419,00	19.879.737.800,00	(1.633.696.381,00)	(8,22)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.008.330.631,00	1.904.930.100,00	103.400.531,00	5,43



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5.066.033.808,00	5.107.054.939,00	(41.021.131,00)	(0,80)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	978.360.953,00	1.047.542.332,00	(67.981.379,00)	(6,60)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.314.739.572,00	5.634.904.280,00	679.835.292,00	12,06
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.980.075.312,00	2.857.429.542,00	122.645.770,00	4,29
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.678.507.943,00	2.363.557.302,00	(685.049.359,00)	(28,98)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	775.053.839,00	764.936.908,00	10.116.931,00	1,32
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	582.742.480,00	475.557.551,00	107.184.929,00	22,54
11	Dinas Perhubungan	9.624.961.427,00	1.381.826.337,00	8.243.135.090,00	596,54
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.048.811.017,00	3.711.991.410,00	(663.180.393,00)	(17,87)
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	315.671.952,00	392.896.624,00	(77.224.672,00)	(19,66)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	421.370.703,00	1.010.520.690,00	(589.149.987,00)	(58,30)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	536.457.905,00	813.158.735,00	(276.700.830,00)	(34,03)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	579.616.092,00	551.517.994,00	28.098.098,00	5,09
17	Dinas Perikanan	464.294.911,00	509.504.607,00	(45.209.696,00)	(8,87)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	834.069.738,00	825.259.881,00	8.809.857,00	1,07



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
19	Sekretariat Daerah	11.756.962.309,00	20.886.235.360,00	(9.129.273.051,00)	(43,71)
20	Sekretariat DPRD	8.533.460.796,00	6.828.424.400,00	1.705.036.396,00	24,97
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.454.433.631,00	799.220.878,00	655.212.753,00	81,98
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.707.629.003,00	3.570.905.873,00	136.723.130,00	3,83
23	Badan Pendapatan Daerah	1.321.761.483,00	1.163.609.026,00	158.152.457,00	13,59
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	542.147.720,00	496.198.163,00	45.949.557,00	9,26
25	Inspektorat Daerah	664.223.638,00	455.463.916,00	208.759.722,00	45,83
26	Kecamatan Tebing Tinggi	2.509.966.275,00	2.011.756.005,00	498.210.270,00	24,76
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	279.747.266,00	314.762.000,00	(35.014.734,00)	(11,12)
28	Kecamatan Rangsang	277.953.661,00	252.263.175,00	25.690.486,00	10,18
29	Kecamatan Rangsang Barat	169.678.748,00	172.585.710,00	(2.906.962,00)	(1,68)
30	Kecamatan Merbau	605.599.600,00	510.071.350,00	95.528.250,00	18,73
31	Kecamatan Pulau Merbau	231.450.228,00	230.371.000,00	1.079.228,00	0,47
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	321.322.000,00	196.370.400,00	124.951.600,00	63,63
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	151.788.000,00	131.234.000,00	20.554.000,00	15,66
34	Kecamatan Tasik Putri Puyu	210.348.000,00	200.298.000,00	10.050.000,00	5,02
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	464.700.000,00	393.800.000,00	70.900.000,00	18,00
Jumlah		98.780.592.690,00	102.019.586.751,00	(3.238.994.061,00)	(3,17)

2. Beban Jasa Asuransi

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.822.800,00	23.554.800,00	2.268.000,00	9,63
2	Dinas Kesehatan	6.918.232.745,00	6.285.128.495,00	633.104.250,00	10,07
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.778.000,00	6.734.200,00	1.043.800,00	15,50



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	28.247.400,00	36.808.930,00	(8.561.530,00)	(23,26)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	431.999,00	(431.999,00)	(100,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	16.985.700,00	15.158.000,00	1.827.700,00	12,06
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.509.998,00	4.179.599,00	(669.601,00)	(16,02)
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.147.916,00	9.421.391,00	(3.273.475,00)	(34,75)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.002.400,00	3.675.199,00	(672.799,00)	(18,31)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.448.359,00	971.988,00	1.476.371,00	151,89
11	Dinas Perhubungan	10.056.960,00	7.051.860,00	3.005.100,00	42,61
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.801.600,00	3.337.200,00	464.400,00	13,92
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	1.198.800,00	1.361.877,00	(163.077,00)	(11,97)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.170.800,00	11.600.000,00	(9.429.200,00)	(81,29)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.069.200,00	1.933.200,00	(864.000,00)	(44,69)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.614.900,00	2.516.400,00	98.500,00	3,91
17	Dinas Perikanan	1.782.000,00	2.365.200,00	(583.200,00)	(24,66)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.494.800,00	2.624.400,00	(129.600,00)	(4,94)
19	Sekretariat Daerah	0,00	712.800,00	(712.800,00)	(100,00)
20	Sekretariat DPRD	0,00	10.108.800,00	(10.108.800,00)	(100,00)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian	1.036.788,00	1.036.800,00	(12,00)	(0,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	dan Pengembangan				
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.084.280,00	5.330.340,00	8.753.940,00	164,23
23	Badan Pendapatan Daerah	4.566.600,00	4.244.400,00	322.200,00	7,59
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.684.800,00	1.668.599,00	16.201,00	0,97
25	Inspektorat Daerah	518.400,00	388.800,00	129.600,00	33,33
26	Kecamatan Tebing Tinggi	0,00	4.258.800,00	(4.258.800,00)	(100,00)
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	842.400,00	0,00	842.400,00	100,00
28	Kecamatan Rangsang Barat	680.400,00	648.000,00	32.400,00	5,00
29	Kecamatan Merbau	1.490.400,00	864.000,00	626.400,00	72,50
30	Kecamatan Pulau Merbau	453.600,00	453.600,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	648.000,00	454.896,00	193.104,00	42,45
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	729.000,00	(729.000,00)	(100,00)
Jumlah		7.063.370.046,00	6.449.753.573,00	613.616.473,00	9,51

3. Beban Sewa Tanah

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.000.000,00	9.900.000,00	(3.900.000,00)	(39,39)
2	Dinas Kesehatan	91.000.000,00	166.000.000,00	(75.000.000,00)	(45,18)
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
4	Kecamatan Tasik Putri Puyu	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
Jumlah		123.000.000,00	175.900.000,00	(52.900.000,00)	(30,07)

4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(20,00)
2	Dinas Kesehatan	11.850.000,00	12.550.000,00	(700.000,00)	(5,58)
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.703.600.000,00	2.254.869.000,00	(551.269.000,00)	(24,45)
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.000.000,00	49.400.000,00	(21.400.000,00)	(43,32)
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.500.000,00	36.800.000,00	(24.300.000,00)	(66,03)
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	15.199.445,00	(15.199.445,00)	100,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	82.400.000,00	(82.400.000,00)	(100,00)
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	115.440.000,00	301.464.800,00	(186.024.800,00)	(61,71)
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.200.000,00	17.825.000,00	(3.625.000,00)	(20,34)
11	Sekretariat Daerah	2.606.485.000,00	3.813.849.457,00	(1.207.364.457,00)	(31,66)
12	Sekretariat DPRD	2.653.600.007,00	3.954.362.942,72	(1.300.762.935,72)	(32,89)
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	76.500.000,00	0,00	76.500.000,00	100,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inspektorat Daerah	6.867.117,00	10.939.578,00	(4.072.461,00)	(37,23)
17	Kecamatan Tebing Tinggi	29.400.000,00	33.882.500,00	(4.482.500,00)	(13,23)
18	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	20.520.000,00	26.640.000,00	(6.120.000,00)	(22,97)
19	Kecamatan Rangsang	35.428.000,00	28.760.000,00	6.668.000,00	23,18
20	Kecamatan Rangsang Barat	32.300.000,00	39.500.000,00	(7.200.000,00)	(18,23)
21	Kecamatan Pulau Merbau	15.900.000,00	9.854.000,00	6.046.000,00	61,36
22	Kecamatan Rangsang Pesisir	29.600.000,00	14.700.000,00	14.900.000,00	100,00
23	Kecamatan Tasik Putri Puyu	24.000.000,00	30.000.000,00	(6.000.000,00)	(20,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
24	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	25.500.000,00	13.500.000,00	12.000.000,00	88,89
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	23.100.000,00	(23.100.000,00)	100,00
Jumlah		7.457.190.124,00	10.785.596.722,72	(3.328.406.598,72)	(30,86)

5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	300.610.000,00	221.500.000,00	79.110.000,00	35,72
2	Dinas Kesehatan	79.848.000,00	351.750.000,00	(271.902.000,00)	(77,30)
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	16.700.000,00	24.040.000,00	(7.340.000,00)	(30,53)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	33,33
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	100,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	60.387.000,00	183.560.000,00	(123.173.000,00)	(67,10)
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	120.000.000,00	197.500.000,00	(77.500.000,00)	(39,24)
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.990.000,00	0,00	9.990.000,00	100,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.161.000,00	24.850.000,00	(3.689.000,00)	(14,85)
10	Dinas Perhubungan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	40.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	300,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	28.800.000,00	(28.800.000,00)	(100,00)
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	141.497.500,00	79.131.000,00	62.366.500,00	78,81
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.398.000,00	23.160.000,00	(8.762.000,00)	(37,83)
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	196.150.000,00	270.610.000,00	(74.460.000,00)	(27,52)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
16	Sekretariat Daerah	896.300.000,00	1.182.234.000,00	(285.934.000,00)	(24,19)
17	Sekretariat DPRD	73.200.000,00	43.200.000,00	30.000.000,00	69,44
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	47.500.000,00	22.500.000,00	25.000.000,00	111,11
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40.450.000,00	32.590.000,00	7.860.000,00	24,12
20	Badan Pendapatan Daerah	20.930.000,00	0,00	20.930.000,00	100,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.340.000,00	0,00	7.340.000,00	100,00
22	Inspektorat Daerah	0,00	8.936.936,00	(8.936.936,00)	100,00
23	Kecamatan Tebing Tinggi	33.991.000,00	54.680.000,00	(20.689.000,00)	(37,84)
24	Kecamatan Rangsang Pesisir	0,00	500.000,00	(500.000,00)	100,00
25	Kecamatan Tasik Putri Puyu	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
26	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	189.599.000,00	209.849.000,00	(20.250.000,00)	(9,65)
Jumlah		2.399.651.500,00	3.037.390.936,00	(637.739.436,00)	(21,00)

6. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	1.665.000,00	(1.665.000,00)	(100,00)
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00	10,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.000.000,00	72.117.000,00	(66.117.000,00)	(91,68)
9	Sekretariat Daerah	164.439.000,00	42.000.000,00	122.439.000,00	291,52
10	Sekretariat DPRD	195.670.000,00	1.495.994.000,00	(1.300.324.000,00)	(86,92)
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.500.000,00	6.000.000,00	(3.500.000,00)	(58,33)
12	Inspektorat Daerah	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	100,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)
Jumlah		396.949.000,00	1.643.276.000,00	(1.246.327.000,00)	(75,84)

7. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	254.713.550,00	(254.713.550,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	398.952.600,00	99.164.625,00	299.787.975,00	302,31
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.483.408.987,50	2.014.343.900,00	(530.934.912,50)	(26,36)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	862.657.162,25	783.298.413,00	79.358.749,25	10,13
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	69.987.859,00	0,00	69.987.859,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	74.994.000,00	(74.994.000,00)	(100,00)
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	0,00	4.495.500,00	(4.495.500,00)	(100,00)
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.350.000,00	199.400.400,00	(194.050.400,00)	(97,32)
Jumlah		2.820.356.608,75	3.430.410.388,00	(610.053.779,25)	(17,78)

8. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.711.200,00	49.900.000,00	149.811.200,00	300,22
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	497.482.020,00	0,00	497.482.020,00	100,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	49.741.320,00	0,00	49.741.320,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	49.500.000,00	49.000.000,00	500.000,00	1,02
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	99.800.000,00	0,00	99.800.000,00	100,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.680.000,00	0,00	99.680.000,00	100,00
7	Dinas Perikanan	99.664.000,00	199.076.000,00	(99.412.000,00)	(49,94)
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
9	Sekretariat Daerah	0,00	189.921.000,00	(189.921.000,00)	(100,00)
10	Sekretariat DPRD	99.031.000,00	0,00	99.031.000,00	100,00
Jumlah		1.194.609.540,00	587.897.000,00	606.712.540,00	103,20

9. Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	,00	55.500.000,00	55.500.000,00	100,00
Jumlah		0,00	55.500.000,00	55.500.000,00	100,00

10. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	175.000.000,00	25.000.000,00	150.000.000,00	600,00
Jumlah		175.000.000,00	25.000.000,00	150.000.000,00	600,00

11. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan
Pelatihan

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	305.000.000,00	15.000.000,00	290.000.000,00	1.933,33
2	Dinas Kesehatan	471.900.000,00	234.650.000,00	237.250.000,00	101,11
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	100,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.500.000,00	41.500.000,00	(18.000.000,00)	(43,37)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12.100.000,00	6.250.000,00	5.850.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	186.000.000,00	13.750.000,00	172.250.000,00	1.252,73
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	58.328.000,00	83.400.000,00	(25.072.000,00)	(30,06)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.000.000,00	13.000.000,00	(12.000.000,00)	(92,31)
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.950.000,00	53.500.000,00	(46.550.000,00)	(87,01)
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	125.400.000,00	0,00	125.400.000,00	0,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	35.550.000,00	(35.550.000,00)	(100,00)
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15.600.000,00	3.600.000,00	12.000.000,00	333,33
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.200.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	20,00
14	Dinas Perikanan	356.400,00	0,00	356.400,00	100,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
16	Sekretariat Daerah	162.800.000,00	324.724.000,00	(161.924.000,00)	(49,87)
17	Sekretariat DPRD	2.912.500.000,00	4.496.000.000,00	(1.583.500.000,00)	(35,22)
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	77.000.000,00	(77.000.000,00)	100,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	585.500.000,00	(585.500.000,00)	(100,00)
20	Badan Pendapatan Daerah	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	317.141.140,00	346.560.000,00	(29.418.860,00)	(8,49)
22	Inspektorat Daerah	41.200.000,00	56.164.000,00	(14.964.000,00)	(26,64)
23	Kecamatan Tebing Tinggi	33.250.000,00	42.300.000,00	(9.050.000,00)	(21,39)
24	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	19.000.000,00	20.250.000,00	(1.250.000,00)	(6,17)
25	Kecamatan Rangsang	15.300.000,00	26.250.000,00	(10.950.000,00)	(41,71)
26	Kecamatan Rangsang Barat	37.550.000,00	58.000.000,00	(20.450.000,00)	(35,26)
27	Kecamatan Merbau	3.500.000,00	9.000.000,00	(5.500.000,00)	(61,11)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
28	Kecamatan Pulau Merbau	0,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)	(100,00)
29	Kecamatan Rangsang Pesisir	4.000.000,00	44.600.000,00	(40.600.000,00)	100,00
30	Kecamatan Tasik Putri Puyu	7.000.000,00	14.650.000,00	(7.650.000,00)	(52,22)
31	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	18.000.000,00	31.150.000,00	(13.150.000,00)	(42,22)
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48.900.000,00	44.700.000,00	4.200.000,00	9,40
Jumlah		4.838.275.540,00	6.725.048.000,00	(1.886.772.460,00)	(28,06)

12. Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	206.400.000,00	336.000.000,00	(129.600.000,00)	(38,57)
Jumlah		206.400.000,00	336.000.000,00	(129.600.000,00)	(38,57)

13. Beban Barang dan Jasa BOS

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	20.948.481.267,00	(20.948.481.267,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	20.948.481.267,00	(20.948.481.267,00)	(100,00)

14. Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.902.062.110,00	0,00	20.902.062.110,00	(100,00)
Jumlah		20.902.062.110,00	0,00	20.902.062.110,00	(100,00)

15. Beban Barang dan Jasa BLUD

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	25.409.176.189,18	21.294.454.092,70	4.114.722.096,48	19,32
Jumlah		25.409.176.189,18	21.294.454.092,70	4.114.722.096,48	19,32



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	48.550.000,00	2.000.000,00	46.550.000,00	2.327,50
2	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.600.000,00	4.500.000,00	2.100.000,00	46,67
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.100.000,00	300.000.000,00	(291.900.000,00)	(97,30)
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	262.900.000,00	315.400.000,00	(52.500.000,00)	(16,65)
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sekretariat Daerah	1.132.500.000,00	1.290.500.000,00	(158.000.000,00)	(12,24)
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
12	Kecamatan Tebing Tinggi	56.200.000,00	71.800.000,00	(15.600.000,00)	(21,73)
13	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	35.200.000,00	37.900.000,00	(2.700.000,00)	(7,12)
14	Kecamatan Rangsang	33.100.000,00	32.500.000,00	600.000,00	100,00
15	Kecamatan Rangsang Barat	34.300.000,00	30.250.000,00	4.050.000,00	13,39
16	Kecamatan Merbau	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00
17	Kecamatan Pulau Merbau	30.600.000,00	15.150.000,00	15.450.000,00	101,98
18	Kecamatan Rangsang Pesisir	28.900.000,00	46.000.000,00	(17.100.000,00)	(37,17)
19	Kecamatan Tasik Putri Puyu	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	26.200.000,00	10.200.000,00	16.000.000,00	156,86



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Jumlah	1.788.950.000,00	2.367.000.000,00	(578.050.000,00)	(24,42)

17. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	3.310.000,00	3.700.000,00	(390.000,00)	(10,54)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	222.500.000,00	0,00	222.500.000,00	100,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	153.025.000,00	248.850.000,00	(95.825.000,00)	(38,51)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.600.000,00	18.400.000,00	(6.800.000,00)	(36,96)
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	0,00	14.022.761,00	(14.022.761,00)	(100,00)
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	29.800.000,00	90.650.000,00	(60.850.000,00)	(67,13)
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	970.000,00	1.000.000,00	(30.000,00)	100,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	74.703.000,00	0,00	74.703.000,00	100,00
9	Sekretariat Daerah	2.082.383.048,00	1.000.000,00	2.081.383.048,00	208.138,30
10	Kecamatan Rangsang	10.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	75,00
11	Kecamatan Rangsang Barat	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	100,00
12	Kecamatan Pulau Merbau	8.250.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00	106,25
13	Kecamatan Rangsang Pesisir	21.000.000,00	26.850.000,00	(5.850.000,00)	(21,79)
14	Kecamatan Tasik Putri Puyu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
15	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
	Jumlah	2.639.791.048,00	423.472.761,00	2.216.318.287,00	523,37

Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	98.780.592.690,00	93.004.480.679,00	5.776.112.011,00	6,21
2	Beban Jasa Asuransi	7.063.370.046,00	7.061.057.766,00	2.312.280,00	0,03
3	Beban Sewa Tanah	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.457.190.124,00	7.457.190.124,00	0,00	0,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.399.651.500,00	2.399.651.500,00	0,00	0,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	396.949.000,00	396.949.000,00	0,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.820.356.608,75	2.316.835.203,90	503.521.404,85	21,73
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.194.609.540,00	1.435.017.480,00	(240.407.940,00)	(16,75)
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.838.275.540,00	4.821.719.140,00	16.556.400,00	0,34
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	206.400.000,00	191.200.000,00	15.200.000,00	7,95
12	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.788.950.000,00	1.773.950.000,00	15.000.000,00	0,85
13	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.639.791.048,00	2.521.588.048,00	118.203.000,00	4,69
14	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	20.902.062.110,00	20.902.062.110,00	0,00	0,00
15	Beban Barang dan Jasa BLUD	25.409.176.189,18	43.729.832.275,23	(18.320.656.086,05)	(41,90)
Jumlah		176.195.374.395,93	188.309.533.326,13	(12.114.158.930,20)	(6,43)

Realisasi Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp176.195.374.395,93. Realisasi tersebut lebih rendah Rp12.114.158.930,20 dibandingkan realisasi LRA Tahun 2024 sebesar Rp188.241.545.926,13 disebabkan oleh :

- Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada semua OPD sebesar Rp10.347.226.037,35;
- Pelunasan Utang Belanja Tahun 2023 Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp21.724.438.952,05;
- Pelunasan Utang Belanja Tahun 2023 Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp700.000.717,00;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Beban Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp193.318.000,00;
- e. Beban Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp13.945.000,00;
- f. Beban Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp275.642.536,00;
- g. Beban Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp216.763.000,00..
- h. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang direklasifikasi menjadi Beban Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp662.723.237,50.

Rincian perbandingan Beban Jasa dan Beban Jasa Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

6.4.2.a 4. Beban Pemeliharaan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
26.423.802.057,57	30.104.203.078,00	(3.680.401.020,43)	(12,23)

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp26.423.802.057,57.

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan perbandingan dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.841.696.739,00	4.129.595.611,00	(1.287.898.872,00)	(31,19)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.562.295.327,22	5.529.650.917,00	2.032.644.410,22	36,76
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.978.609.991,35	20.424.956.550,00	(4.446.346.558,65)	(21,77)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	100,00
Jumlah		26.423.802.057,57	30.104.203.078,00	(3.680.401.020,43)	(10,30)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp26.423.802.057,57. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.680.401.020,43 atau 10,30% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp30.104.203.078,00.

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	156.801.992,00	509.678.400,00	(352.876.408,00)	(69,24)
2	Dinas Kesehatan	2.576.222.347,82	279.350.014,00	2.296.872.333,82	822,22
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.215.651.918,97	22.669.587.067,00	(2.453.935.148,03)	(10,82)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	108.900.000,00	140.100.000,00	(31.200.000,00)	(22,27)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64.600.000,00	128.500.000,00	(63.900.000,00)	(49,73)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	55.329.714,00	15.100.000,00	40.229.714,00	266,42
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	53.600.000,00	37.200.000,00	16.400.000,00	44,09
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	44.998.971,00	27.000.000,00	17.998.971,00	66,66
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.500.000,00	22.660.000,00	(12.160.000,00)	(53,66)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.000.000,00	36.850.000,00	(26.850.000,00)	(72,86)
11	Dinas Perhubungan	48.670.000,00	64.356.500,00	(15.686.500,00)	(24,37)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30.300.000,00	32.550.000,00	(2.250.000,00)	(6,91)
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	19.500.000,00	126.375.000,00	(106.875.000,00)	(84,57)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	247.178.400,00	35.195.000,00	211.983.400,00	602,31



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	114.590.000,00	37.830.150,00	76.759.850,00	202,91
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.778.143,00	3.200.000,00	24.578.143,00	768,07
17	Dinas Perikanan	42.800.000,00	19.700.000,00	23.100.000,00	117,26
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	225.983.720,78	27.700.000,00	198.283.720,78	715,83
19	Sekretariat Daerah	1.564.381.000,00	4.531.756.000,00	(2.967.375.000,00)	(65,48)
20	Sekretariat DPRD	274.750.000,00	684.045.000,00	(409.295.000,00)	(59,83)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	102.231.887,00	108.509.645,00	(6.277.758,00)	(5,79)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	101.850.000,00	333.311.000,00	(231.461.000,00)	(69,44)
23	Badan Pendapatan Daerah	62.000.000,00	66.874.000,00	(4.874.000,00)	(7,29)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.700.000,00	16.400.000,00	2.300.000,00	14,02
25	Inspektorat Daerah	13.875.963,00	59.384.302,00	(45.508.339,00)	(76,63)
26	Kecamatan Tebing Tinggi	62.308.000,00	16.500.000,00	45.808.000,00	277,62
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	33.600.000,00	6.000.000,00	27.600.000,00	460,00
28	Kecamatan Rangsang	12.000.000,00	14.200.000,00	(2.200.000,00)	(15,49)
29	Kecamatan Rangsang Barat	37.000.000,00	14.495.000,00	22.505.000,00	155,26
30	Kecamatan Merbau	12.800.000,00	4.496.000,00	8.304.000,00	184,70
31	Kecamatan Pulau Merbau	9.500.000,00	16.600.000,00	(7.100.000,00)	(42,77)
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	34.300.000,00	14.000.000,00	20.300.000,00	145,00
33	Kecamatan Tasik Putri Puyu	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
34	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	8.500.000,00	4.700.000,00	3.800.000,00	80,85
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100,00
Jumlah		26.423.802.057,57	30.104.203.078,00	(3.680.401.020,43)	(10,30)

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Beban Pemeliharaan Tanah

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)
2	Kecamatan Tasik Putri Puyu	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	100,00
Jumlah		25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)

2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.000.000,00	65.475.000,00	(50.475.000,00)	(77,09)
2	Dinas Kesehatan	346.879.061,00	279.350.014,00	67.529.047,00	24,17
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.765.000,00	101.500.000,00	(41.735.000,00)	(41,12)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	92.700.000,00	140.100.000,00	(47.400.000,00)	(33,83)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64.600.000,00	128.500.000,00	(63.900.000,00)	(49,73)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	55.329.714,00	15.100.000,00	40.229.714,00	266,42
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	53.600.000,00	37.200.000,00	16.400.000,00	44,09
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	44.998.971,00	27.000.000,00	17.998.971,00	66,66
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.500.000,00	22.660.000,00	(12.160.000,00)	(53,66)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.000.000,00	36.850.000,00	(26.850.000,00)	(72,86)
11	Dinas Perhubungan	48.670.000,00	64.356.500,00	(15.686.500,00)	(24,37)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30.300.000,00	32.550.000,00	(2.250.000,00)	(6,91)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	19.500.000,00	32.000.000,00	(12.500.000,00)	(39,06)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.480.000,00	35.195.000,00	(7.715.000,00)	(21,92)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	39.600.000,00	7.830.150,00	31.769.850,00	405,74
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.778.143,00	3.200.000,00	24.578.143,00	768,07
17	Dinas Perikanan	42.800.000,00	19.700.000,00	23.100.000,00	117,26
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.000.000,00	20.000.000,00	6.000.000,00	30,00
19	Sekretariat Daerah	1.095.180.000,00	2.175.870.000,00	(1.080.690.000,00)	(49,67)
20	Sekretariat DPRD	274.750.000,00	439.500.000,00	(164.750.000,00)	(37,49)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	52.231.887,00	108.509.645,00	(56.277.758,00)	(51,86)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	91.850.000,00	103.500.000,00	(11.650.000,00)	(11,26)
23	Badan Pendapatan Daerah	62.000.000,00	66.874.000,00	(4.874.000,00)	(7,29)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.700.000,00	16.400.000,00	2.300.000,00	14,02
25	Inspektorat Daerah	13.875.963,00	59.384.302,00	(45.508.339,00)	(76,63)
26	Kecamatan Tebing Tinggi	62.308.000,00	16.500.000,00	45.808.000,00	277,62
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	33.600.000,00	6.000.000,00	27.600.000,00	460,00
28	Kecamatan Rangsang	12.000.000,00	14.200.000,00	(2.200.000,00)	(15,49)
29	Kecamatan Rangsang Barat	37.000.000,00	14.495.000,00	22.505.000,00	155,26
30	Kecamatan Merbau	12.800.000,00	4.496.000,00	8.304.000,00	184,70
31	Kecamatan Pulau Merbau	9.500.000,00	16.600.000,00	(7.100.000,00)	(42,77)
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	34.300.000,00	14.000.000,00	20.300.000,00	145,00
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	8.500.000,00	4.700.000,00	3.800.000,00	80,85



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100,00
Jumlah		2.841.696.739,00	4.129.595.611,00	(1.287.898.872,00)	(31,19)

3. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	141.801.992,00	444.203.400,00	(302.401.408,00)	(68,08)
2	Dinas Kesehatan	2.229.343.286,82	0,00	2.229.343.286,82	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.177.276.927,62	2.143.130.517,00	2.034.146.410,62	94,91
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	0,00	94.375.000,00	(94.375.000,00)	(100,00)
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	219.698.400,00	30.000.000,00	219.698.400,00	100,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74.990.000,00	0,00	44.990.000,00	149,97
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	199.983.720,78	7.700.000,00	192.283.720,78	2.497,19
8	Sekretariat Daerah	469.201.000,00	2.355.886.000,00	(1.886.685.000,00)	(80,08)
9	Sekretariat DPRD	0,00	244.545.000,00	(244.545.000,00)	(100,00)
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	209.811.000,00	(209.811.000,00)	(100,00)
Jumlah		7.562.295.327,22	5.529.650.917,00	2.032.644.410,22	36,76

4. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.978.609.991,35	20.424.956.550,00	(4.446.346.558,65)	(21,77)
Jumlah		15.978.609.991,35	20.424.956.550,00	(4.446.346.558,65)	(21,77)

Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	25.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	150,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.841.696.739,00	2.960.448.739,00	(118.752.000,00)	(4,01)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.562.295.327,22	24.088.919.557,55	(16.526.624.230,33)	(68,61)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.978.609.991,35	17.980.174.892,35	(2.001.564.901,00)	(11,13)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	100,00
Jumlah		26.423.802.057,57	45.039.543.188,90	(18.615.741.131,33)	(41,33)

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp26.423.802.057,57. Realisasi tersebut lebih rendah Rp18.615.741.131,33 dibandingkan realisasi LRA Tahun 2024 sebesar Rp45.039.543.188,90 disebabkan oleh :

- Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp47.200.000,00;
- Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp209.730.600,00;
- Beban Pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp13.388.401.599,00;
- Beban Pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.015.428.366,37;
- Beban Pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.121.186.973,38;
- Beban Pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp245.235.000,00;
- Beban Pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp199.575.758,82;
- Beban Pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp68.765.033,76;
- Beban Pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp185.093.000,00; dan
- Beban Pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp648.986.000,00.

Rincian perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 untuk setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.4.2.a.5. Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
42.742.782.705,00	57.487.820.490,00	(14.745.037.785,00)	(25,65)

Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp42.742.782.705,00.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan perbandingan dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.742.782.705,00	57.360.758.556,00	(14.617.975.851,00)	(25,48)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	127.061.934,00	(127.061.934,00)	100,00
Jumlah		42.742.782.705,00	57.487.820.490,00	(14.745.037.785,00)	(25,65)

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp42.742.782.705,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.745.037.785,00 atau 25,65% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp57.487.820.490,00.

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	575.713.800,00	1.116.366.256,00	(540.652.456,00)	(48,43)
2	Dinas Kesehatan	3.791.587.679,00	4.721.427.577,00	(929.839.898,00)	(19,69)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	696.363.441,00	1.143.358.956,00	(446.995.515,00)	(39,09)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	529.333.389,00	712.468.626,00	(183.135.237,00)	(25,70)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	489.416.141,00	1.348.810.367,00	(859.394.226,00)	(63,71)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	270.537.200,00	310.829.000,00	(40.291.800,00)	(12,96)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	466.048.800,00	703.424.010,00	(237.375.210,00)	(33,75)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	536.429.045,00	597.246.757,00	(60.817.712,00)	(10,18)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	275.289.085,00	210.992.326,00	64.296.759,00	30,47
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	392.350.888,00	469.009.945,00	(76.659.057,00)	(16,34)
11	Dinas Perhubungan	467.332.497,00	562.908.839,00	(95.576.342,00)	(16,98)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	824.023.872,00	1.162.515.000,00	(338.491.128,00)	(29,12)
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	200.561.427,00	427.094.728,00	(226.533.301,00)	(53,04)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	136.459.365,00	291.564.100,00	(155.104.735,00)	(53,20)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	196.653.000,00	254.950.411,00	(58.297.411,00)	(22,87)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	178.962.395,00	121.905.440,00	57.056.955,00	46,80
17	Dinas Perikanan	456.336.400,00	373.351.948,00	82.984.452,00	22,23
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	262.273.028,00	547.222.648,00	(284.949.620,00)	(52,07)
19	Sekretariat Daerah	8.156.786.279,00	10.090.539.172,00	(1.933.752.893,00)	(19,16)
20	Sekretariat DPRD	16.627.669.239,00	23.684.569.754,00	(7.056.900.515,00)	(29,80)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.641.774.372,00	1.792.408.194,00	(150.633.822,00)	(8,40)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.886.708.718,00	2.073.265.210,00	(186.556.492,00)	(9,00)
23	Badan Pendapatan Daerah	620.511.200,00	1.254.952.172,00	(634.440.972,00)	(50,55)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.311.469.869,00	1.320.915.583,00	(9.445.714,00)	0,72
25	Inspektorat Daerah	1.158.509.177,00	1.325.442.255,00	(166.933.078,00)	(12,59)
26	Kecamatan Tebing Tinggi	113.031.960,00	93.231.000,00	19.800.960,00	21,24
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	14.875.000,00	37.125.000,00	(22.250.000,00)	(59,93)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
28	Kecamatan Rangsang	53.675.000,00	58.900.000,00	(5.225.000,00)	(8,87)
29	Kecamatan Rangsang Barat	58.266.000,00	58.352.000,00	(86.000,00)	(0,15)
30	Kecamatan Merbau	31.850.000,00	60.990.000,00	(29.140.000,00)	(47,78)
31	Kecamatan Pulau Merbau	53.190.000,00	55.700.000,00	(2.510.000,00)	(4,51)
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	0,00	59.560.000,00	(59.560.000,00)	(100,00)
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	33.200.000,00	45.690.000,00	(12.490.000,00)	(27,34)
34	Kecamatan Tasik Putri Puyu	26.950.000,00	48.020.000,00	(21.070.000,00)	(43,88)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	208.644.439,00	352.713.216,00	(144.068.777,00)	100,00
Jumlah		42.742.782.705,00	57.487.820.490,00	(14.745.037.785,00)	(25,65)

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Beban Perjalanan Dalam Daerah

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	575.713.800,00	1.116.366.256,00	(540.652.456,00)	(48,43)
2	Dinas Kesehatan	3.791.587.679,00	4.721.427.577,00	(929.839.898,00)	(19,69)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	696.363.441,00	1.143.358.956,00	(446.995.515,00)	(39,09)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	529.333.389,00	712.468.626,00	(183.135.237,00)	(25,70)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	489.416.141,00	1.348.810.367,00	(859.394.226,00)	(63,71)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	270.537.200,00	310.829.000,00	(40.291.800,00)	(12,96)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	466.048.800,00	703.424.010,00	(237.375.210,00)	(33,75)
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	536.429.045,00	597.246.757,00	(60.817.712,00)	(10,18)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	275.289.085,00	210.992.326,00	64.296.759,00	30,47
10	Dinas Pemberdayaan	392.350.888,00	469.009.945,00	(76.659.057,00)	(16,34)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Masyarakat dan Desa				
11	Dinas Perhubungan	467.332.497,00	562.908.839,00	(95.576.342,00)	(16,98)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	824.023.872,00	1.162.515.000,00	(338.491.128,00)	(29,12)
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	200.561.427,00	427.094.728,00	(226.533.301,00)	(53,04)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	136.459.365,00	291.564.100,00	(155.104.735,00)	(53,20)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	196.653.000,00	254.950.411,00	(58.297.411,00)	(22,87)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	178.962.395,00	121.905.440,00	57.056.955,00	46,80
17	Dinas Perikanan	456.336.400,00	373.351.948,00	82.984.452,00	22,23
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	262.273.028,00	547.222.648,00	(284.949.620,00)	(52,07)
19	Sekretariat Daerah	8.156.786.279,00	9.963.477.238,00	(1.806.690.959,00)	(18,13)
20	Sekretariat DPRD	16.627.669.239,00	23.684.569.754,00	(7.056.900.515,00)	(29,80)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.641.774.372,00	1.792.408.194,00	(150.633.822,00)	(8,40)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.886.708.718,00	2.073.265.210,00	(186.556.492,00)	(9,00)
23	Badan Pendapatan Daerah	620.511.200,00	1.254.952.172,00	(634.440.972,00)	(50,55)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.311.469.869,00	1.320.915.583,00	(9.445.714,00)	0,72
25	Inspektorat Daerah	1.158.509.177,00	1.325.442.255,00	(166.933.078,00)	(12,59)
26	Kecamatan Tebing Tinggi	113.031.960,00	93.231.000,00	19.800.960,00	21,24
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	14.875.000,00	37.125.000,00	(22.250.000,00)	(59,93)
28	Kecamatan Rangsang	53.675.000,00	58.900.000,00	(5.225.000,00)	(8,87)
29	Kecamatan Rangsang Barat	58.266.000,00	58.352.000,00	(86.000,00)	(0,15)
30	Kecamatan Merbau	31.850.000,00	60.990.000,00	(29.140.000,00)	(47,78)
31	Kecamatan Pulau Merbau	53.190.000,00	55.700.000,00	(2.510.000,00)	(4,51)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	0,00	59.560.000,00	(59.560.000,00)	(100,00)
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	33.200.000,00	45.690.000,00	(12.490.000,00)	(27,34)
34	Kecamatan Tasik Putri Puyu	26.950.000,00	48.020.000,00	(21.070.000,00)	(43,88)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	208.644.439,00	352.713.216,00	(144.068.777,00)	100,00
Jumlah		42.742.782.705,00	57.360.758.556,00	(14.617.975.851,00)	(25,48)

2. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Sekretariat Daerah	0.00	127.061.934,00	(127.061.934,00)	(100,00)
Jumlah		0.00	127.061.934,00	(127.061.934,00)	(100,00)

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024
dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.742.782.705,00	42.371.581.337,00	371.201.368,00	0,88
Jumlah		42.742.782.705,00	42.371.581.337,00	371.201.368,00	0,88

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp42.742.782.705,00.
Realisasi tersebut lebih tinggi Rp371.201.368,00 dibandingkan realisasi LRA
Tahun 2024 sebesar Rp42.371.581.337,00 disebabkan oleh :

- Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar
Rp59.964.400,00;
- Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Sekretariat Daerah sebesar
Rp235.751.300,00;
- Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar
Rp100.000.000,00;
- Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp10.202.000,00;
- Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Inspektorat Daerah sebesar
Rp80.164.200,00;
- Beban Perjalanan Dinas yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Dinas
Kesehatan sebesar Rp37.200.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- g. Beban Perjalanan Dinas yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp43.109.186,00; dan
- h. Beban Perjalanan Dinas yang dikapitalisasi menjadi aset Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp9.100.000,00.

Rincian perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 untuk setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

6.4.2.a.6. Beban Bunga

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
922.890.122,00	3.281.890.320,00	(2.359.000.198,00)	(71,88)

Beban Bunga Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp922.890.122,00.

Beban Bunga Tahun 2024 dan perbandingan dengan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	922.890.122,00	3.281.890.320,00	(2.359.000.198,00)	(71,88)
Jumlah		922.890.122,00	3.281.890.320,00	(2.359.000.198,00)	(71,88)

Realisasi Beban Bunga Tahun 2024 sebesar Rp922.890.122,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.359.000.198,00 atau 71,88% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp67.009.620,00.

Beban Bunga Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	922.890.122,00	3.281.890.320,00	(2.359.000.198,00)	(71,88)
Jumlah		922.890.122,00	3.281.890.320,00	(2.359.000.198,00)	(71,88)

Perbandingan Beban Bunga dan Belanja Bunga Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	922.890.122,00	922.890.122,00	0,00	0,00
Jumlah		922.890.122,00	922.890.122,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian perbandingan Beban Bunga dan Belanja Bunga Tahun 2024 untuk setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

6.4.2.a.7. Beban Hibah

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
70.061.248.625,48	44.004.436.246,12	26.056.812.379,36	59,21

Beban Hibah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp70.061.248.625,48.

Beban Hibah Tahun 2024 dan perbandingan dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.127.655.790,96	9.090.591.212,53	(5.962.935.421,57)	(65,59)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	57.969.218.484,52	33.696.837.033,59	24.272.381.450,93	72,03
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.251.831.750,00	1.217.008.000,00	34.823.750,00	2,86
4	Belanja Hibah Dana BOSP	7.712.542.600,00	0,00	7.712.542.600,00	100,00
Jumlah		70.061.248.625,48	44.004.436.246,12	26.056.812.379,36	59,21

Realisasi Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp70.061.248.625,48. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp26.056.812.379,36 atau 59,21% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp44.004.436.246,12.

Perbandingan Beban Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.053.345.017,00	17.019.247.629,94	(6.965.902.612,94)	(40,93)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.247.655.790,96	4.796.337.712,53	(1.548.681.921,57)	(32,29)
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	11.268.468.231,52	10.377.620.903,65	890.847.327,87	8,58
4	Dinas Perhubungan	321.300.000,00	0,00	321.300.000,00	100,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika,	250.600.000,00	0,00	250.600.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Statistik dan Persandian				
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	600.000.000,00	750.000.000,00	(150.000.000,00)	(20,00)
7	Sekretariat Daerah	3.651.575.000,00	9.794.222.000,00	(6.142.647.000,00)	(62,72)
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.668.304.586,00	1.267.008.000,00	39.401.296.586,00	3.109,79
Jumlah		70.061.248.625,48	44.004.436.246,12	26.056.812.379,36	59,21

Beban Hibah Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.127.655.790,96	4.611.472.712,53	(1.483.816.921,57)	(32,18)
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	0,00	711.118.500,00	711.118.500,00	(100,00)
3	Sekretariat Daerah	0,00	3.768.000.000,00	3.768.000.000,00	(100,00)
Jumlah		3.127.655.790,96	9.090.591.212,53	(5.962.935.421,57)	(65,59)

2. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.340.802.417,00	17.019.247.629,94	(14.678.445.212,94)	(86,25)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.000.000,00	184.865.000,00	(64.865.000,00)	(35,09)
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	11.268.468.231,52	9.666.502.403,65	1.601.965.827,87	16,57
4	Dinas Perhubungan	321.300.000,00	0,00	321.300.000,00	100,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	250.600.000,00	0,00	250.600.000,00	100,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	600.000.000,00	750.000.000,00	(150.000.000,00)	(20,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
7	Sekretariat Daerah	3.651.575.000,00	6.026.222.000,00	(2.374.647.000,00)	(39,41)
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.416.472.836,00	50.000.000,00	39.366.472.836,00	78.732,95
Jumlah		57.969.218.484,52	33.696.837.033,59	24.272.381.450,93	72,03

3. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.251.831.750,00	1.217.008.000,00	34.823.750,00	2,86
Jumlah		1.251.831.750,00	1.217.008.000,00	34.823.750,00	2,86

4. Beban Hibah Dana BOSP

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.712.542.600,00	0,00	7.712.542.600,00	100,00
Jumlah		7.712.542.600,00	0,00	7.712.542.600,00	100,00

Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.127.655.790,96	1.484.967.453,01	1.642.688.337,95	110,62
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	57.969.218.484,52	54.553.230.816,50	3.415.987.668,02	6,26
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.251.831.750,00	1.251.831.750,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah Dana BOSP	7.712.542.600,00	7.712.542.600,00	0,00	0,00
Jumlah		70.061.248.625,48	65.002.572.619,51	5.058.676.005,97	7,78

Realisasi Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp70.061.248.625,48. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp5.058.676.005,97 dibandingkan realisasi LRA Tahun 2024 sebesar Rp65.002.572.619,51 disebabkan oleh :

- Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp468.118.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.642.688.337,95;
- c. Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp6.997.541.232,02;
- d. Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp337.180.000,00;
- e. Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp100.000.000,00; dan
- f. Penambahan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp4.486.851.564,00.

Rincian perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2024 untuk setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

6.4.2.a.8. Beban Bantuan Sosial

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
8.199.485.379,91	9.462.055.940,69	(1.262.572.560,78)	(13,34)

Beban Bantuan Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp8.199.485.379,91.

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan perbandingan dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	4.868.499.312,14	3.854.387.940,69	1.014.111.371,45	26,31
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.330.986.067,77	5.607.668.000,00	(2.276.681.932,23)	(40,60)
Jumlah		8.199.485.379,91	9.462.055.940,69	(1.262.570.560,78)	(13,34)

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp8.199.485.379,91. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.262.570.560,78 atau 13,34% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp9.462.055.940,69.

Perbandingan Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.519.902.067,77	480.000.000,00	2.039.902.067,77	424,98



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5.417.083.312,14	7.089.655.940,69	(1.672.572.628,55)	(23,59)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	93.400.000,00	(93.400.000,00)	(100,00)
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.197.000.000,00	(1.197.000.000,00)	(100,00)
5	Sekretariat Daerah	262.500.000,00	602.000.000,00	(339.500.000,00)	56,40
Jumlah		8.199.485.379,91	9.462.055.940,69	(1.262.570.560,78)	(13,34)

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Beban Bantuan Sosial kepada Individu

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4.605.999.312,14	3.252.387.940,69	1.353.611.371,45	41,62
2	Sekretariat Daerah	262.500.000,00	602.000.000,00	(339.500.000,00)	(56,40)
Jumlah		4.868.499.312,14	3.854.387.940,69	1.014.111.371,45	26,31

2. Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.519.902.067,77	480.000.000,00	2.039.902.067,77	424,98
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	811.084.000,00	3.837.268.000,00	(3.026.184.000,00)	(78,86)
3	Badan Penanggulang	0,00	93.400.000,00	93.400.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	an Bencana Daerah				
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	(100,00)
Jumlah		3.330.986.067,77	5.607.668.000,00	(2.276.681.932,23)	(40,60)

Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	4.868.499.312,14	964.633.917,46	3.903.865.394,68	404,70
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.330.986.067,77	3.038.368.467,77	292.617.600,00	0,00
Jumlah		8.199.485.379,91	4.003.002.385,23	4.196.482.994,68	104,83

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp8.199.485.379,91. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp4.196.482.994,68 dibandingkan realisasi LRA Tahun 2024 sebesar Rp4.003.002.385,23 disebabkan oleh :

- Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp4.196.482.994,68.

Rincian perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 untuk setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

6.4.2.a.9. Beban Penyusutan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
167.110.683.339,74	263.535.064.492,84	(96.424.381.153,10)	(36,59)

Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp167.110.683.339,74.

Rincian Beban Penyusutan Tahun 2024 untuk setiap jenis sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan	40.284.120.939,68	44.278.865.421,92	(3.994.744.482,24)	(9,02)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Mesin				
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.514.511.974,04	17.154.774.230,47	359.737.743,56	2,10
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	106.807.920.275,01	200.852.034.630,49	(94.044.114.355,48)	(46,82)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.389.517.088,57	1.249.390.209,96	140.126.878,61	11,22
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.114.613.062,44	0,00	1.114.613.062,44	100,00
Jumlah		167.110.683.339,74	263.535.064.492,84	(96.424.381.153,10)	(36,59)

Realisasi Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp167.110.683.339,74. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp96.424.381.153,10 atau 38,54% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp263.535.064.492,84.

Perbandingan Beban Penyusutan Tahun 2024 dan Tahun 2023 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.011.862.977,18	24.197.493.195,21	(185.630.218,03)	(0,77)
2	Dinas Kesehatan	16.506.187.875,47	18.119.490.618,99	(1.613.302.743,52)	(8,90)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.804.640.284,00	195.213.560.126,97	(94.408.919.842,97)	(48,36)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.520.215.917,39	973.327.520,92	546.888.396,47	56,19
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	819.596.965,73	862.495.442,49	(42.898.476,76)	(4,97)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	176.312.825,78	102.691.786,37	73.621.039,41	71,69
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	580.305.250,81	578.180.463,33	2.124.787,48	0,37
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	352.363.905,46	267.702.544,44	84.661.361,02	31,63



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	354.826.222,49	361.278.033,78	(6.451.811,29)	(1,79)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	95.893.706,71	84.266.588,33	11.627.118,38	13,80
11	Dinas Perhubungan	4.442.740.512,08	4.328.952.703,78	113.787.808,30	2,63
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.770.489.197,94	1.714.073.283,27	56.415.914,67	3,29
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	118.716.994,37	91.821.549,69	26.895.444,68	29,29
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.553.225,49	162.669.496,12	(122.116.270,63)	(75,07)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.025.171.271,11	828.869.328,62	196.301.942,48	23,68
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	284.345.650,58	261.180.111,98	23.165.538,60	8,87
17	Dinas Perikanan	370.158.676,58	361.119.973,87	9.038.702,71	2,50
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.438.248.914,48	3.796.479.265,67	(1.358.230.351,18)	(35,78)
19	Sekretariat Daerah	7.253.899.339,73	6.979.335.382,63	274.563.957,11	3,93
20	Sekretariat DPRD	1.452.256.736,99	1.597.773.831,25	(145.517.094,26)	(9,11)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	309.531.869,27	285.710.974,04	23.820.895,22	8,34
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	446.121.650,82	293.934.500,78	152.187.150,04	51,78
23	Badan Pendapatan Daerah	317.294.071,58	316.553.778,98	740.292,60	0,23
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	141.087.708,98	153.562.138,79	(12.474.429,80)	(8,12)
25	Inspektorat Daerah	83.877.617,66	85.496.543,95	(1.618.926,29)	(1,89)
26	Kecamatan Tebing Tinggi	163.253.321,43	185.557.425,22	(22.304.103,80)	(12,02)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	142.138.782,18	148.531.721,18	(6.392.939,00)	(4,30)
28	Kecamatan Rangsang	227.438.642,47	242.250.855,20	(14.812.212,73)	(6,11)
29	Kecamatan Rangsang Barat	230.885.969,01	253.858.695,20	(22.972.726,19)	(9,05)
30	Kecamatan Merbau	156.987.310,00	170.628.260,00	(13.640.950,00)	(7,99)
31	Kecamatan Pulau Merbau	95.779.304,72	104.728.221,38	(8.948.916,66)	(8,54)
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	135.116.735,07	147.474.135,55	(12.357.400,48)	(8,38)
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	104.411.153,93	120.822.966,43	(16.411.812,50)	(13,58)
34	Kecamatan Tasik Putri Puyu	119.004.423,67	130.870.295,08	(11.865.871,41)	(9,07)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.968.328,57	12.322.733,34	6.645.595,23	100,00
Jumlah		167.110.683.339,74	263.535.064.492,84	(96.424.381.153,10)	(36,59)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atau nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*Straight line method*).

6.4.2.a.9.a Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
40.284.120.939,68	44.278.865.421,92	(3.994.744.482,24)	(9,02)

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp40.284.120.939,68.

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Alat Besar	870.220.897,68	876.619.654,94	(6.398.757,27)	(0,73)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.961.600.411,83	4.440.326.782,47	521.273.629,36	11,74
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	111.778.693,30	154.499.250,40	(42.720.557,10)	(27,65)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	13.237.750,00	1.722.206.052,69	(1.708.968.302,69)	(99,23)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.841.256.083,79	10.632.654.963,71	208.601.120,08	1,96
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.122.128.796,42	1.239.628.639,19	(117.499.842,77)	(9,48)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.484.688.184,52	9.483.119.774,22	(1.998.431.589,70)	(21,07)
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.666.608.603,62	1.571.179.756,32	95.428.847,30	6,07
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	6.106.111,11	14.950.000,00	(8.843.888,89)	(59,16)
10	Beban Penyusutan Komputer	12.905.003.306,47	13.825.655.682,38	(920.652.375,91)	(6,66)
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	45.080.650,95	45.080.650,95	0,00	0,00
12	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	67.948.400,00	64.281.733,33	3.666.666,67	5,70
13	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	530.000,00	27.430.822,58	(26.900.822,58)	(98,07)
14	Beban Penyusutan Alat Peraga	1.658.333,33	2.591.666,67	(933.333,33)	(36,01)
15	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	0,00	5.082.897,07	(5.082.897,07)	(100,00)
16	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	33.364.550,00	26.041.775,00	7.322.775,00	28,12
17	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	152.910.166,67	147.515.320,00	5.394.846,67	3,66
Jumlah		40.284.120.939,68	44.278.865.421,92	(3.994.744.482,24)	(9,02)

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut:

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.371.630.666,48	16.064.634.215,53	(693.003.549,05)	(4,31)
2	Dinas Kesehatan	12.606.861.619,05	14.464.723.752,04	(1.857.862.132,99)	(12,84)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	312.833.692,89	230.734.388,84	82.099.304,05	35,58
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	238.573.229,22	219.682.333,96	18.890.895,26	8,60
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	707.480.792,29	746.774.549,05	(39.293.756,76)	(5,26)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	170.801.657,86	99.604.072,38	71.197.585,48	71,48
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	401.339.101,50	449.659.525,77	(48.320.424,27)	(10,75)
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	45.402.834,10	48.899.800,24	(3.496.966,14)	(7,15)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	320.933.385,35	329.435.849,74	(8.502.464,39)	(2,58)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.869.532,19	27.698.528,33	9.171.003,86	33,11
11	Dinas Perhubungan	312.726.819,58	315.762.440,17	(3.035.620,59)	(0,96)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.664.039.170,27	1.607.623.255,59	56.415.914,67	3,51
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	62.304.273,74	36.222.162,49	26.082.111,25	72,01
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.553.225,49	74.495.991,47	(33.942.765,98)	(45,56)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	83.888.334,83	109.244.726,48	(25.356.391,65)	(23,21)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	211.491.408,39	181.364.947,93	30.126.460,46	16,61
17	Dinas Perikanan	127.780.276,32	132.835.615,42	(5.055.339,10)	(3,81)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	392.160.314,65	2.464.732.039,19	(2.072.571.724,54)	(84,09)
19	Sekretariat Daerah	4.777.561.480,55	4.456.935.304,94	320.626.175,61	7,19
20	Sekretariat DPRD	1.233.740.993,22	1.097.116.165,54	136.624.827,68	12,45



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	156.102.170,65	132.514.608,76	23.587.561,89	17,80
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	382.830.681,39	230.643.531,36	152.187.150,03	65,98
23	Badan Pendapatan Daerah	288.113.129,66	287.372.837,06	740.292,60	0,26
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.779.044,18	53.253.473,99	(12.474.429,80)	(23,42)
25	Inspektorat Daerah	61.223.243,22	62.842.169,51	(1.618.926,29)	(2,58)
26	Kecamatan Tebing Tinggi	28.595.970,83	50.900.074,63	(22.304.103,80)	(43,82)
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	42.590.625,00	43.881.500,00	(1.290.875,00)	(2,94)
28	Kecamatan Rangsang	18.530.491,67	33.342.704,40	(14.812.212,73)	(44,42)
29	Kecamatan Rangsang Barat	32.652.029,05	55.624.755,24	(22.972.726,19)	(41,30)
30	Kecamatan Merbau	25.254.450,00	38.895.400,00	(13.640.950,00)	(35,07)
31	Kecamatan Pulau Merbau	18.170.642,86	27.119.559,52	(8.948.916,66)	(33,00)
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	29.211.665,71	41.569.066,19	(12.357.400,48)	(29,73)
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	12.599.139,88	29.010.952,38	(16.411.812,50)	(56,57)
34	Kecamatan Tasik Putri Puyu	20.107.585,71	31.973.457,12	(11.865.871,41)	(37,11)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.387.261,90	1.741.666,67	6.645.595,24	100,00
Jumlah		40.284.120.939,68	44.278.865.421,92	(3.994.744.482,24)	(9,02)

6.4.2.a.9.b Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
17.514.511.974,04	17.154.774.230,47	359.737.743,56	2,10

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp17.514.511.974,04.

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	17.266.784.108,07	16.933.306.372,50	333.477.735,57	1,97
2	Beban Penyusutan Monumen	34.938.811,86	34.938.811,86	0,00	0,00
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	13.383.572,28	13.383.572,28	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	199.405.481,82	173.145.473,84	26.260.007,99	15,17
Jumlah		17.514.511.974,04	17.154.774.230,47	359.737.743,56	2,10

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023 Per OPD
dapat dirincikan sebagai berikut:

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.825.785.014,27	7.465.889.929,58	359.895.084,69	4,82
2	Dinas Kesehatan	3.801.427.498,63	3.592.230.609,17	209.196.889,46	5,82
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	597.052.647,39	511.386.425,31	85.666.222,08	16,75
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	239.762.662,49	239.762.662,49	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93.487.373,44	97.092.093,44	(3.604.720,00)	(3,71)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.511.167,92	3.087.713,99	2.423.453,93	78,49
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	148.878.582,54	94.152.554,82	54.726.027,72	58,12
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	77.239.568,46	77.239.568,46	0,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.892.837,14	31.842.184,04	2.050.653,10	6,44
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	59.024.174,52	56.568.060,00	2.456.114,52	4,34
11	Dinas Perhubungan	95.510.777,46	95.620.179,33	(109.401,87)	(0,11)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	85.659.941,90	85.659.941,90	(0,00)	(0,00)
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	56.412.720,63	55.599.387,20	813.333,43	1,46



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	88.173.504,65	(88.173.504,65)	(100,00)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	719.796.242,53	718.956.502,14	839.740,38	0,12
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71.820.708,86	78.781.630,72	(6.960.921,86)	(8,84)
17	Dinas Perikanan	86.459.268,76	81.107.883,04	5.351.385,72	6,60
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.167.423.148,17	1.158.063.774,82	9.359.373,35	0,81
19	Sekretariat Daerah	663.222.456,89	650.403.790,73	12.818.666,16	1,97
20	Sekretariat DPRD	205.262.824,39	487.404.746,34	(282.141.921,95)	(57,89)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	141.419.698,62	141.186.365,29	233.333,33	0,17
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	56.143.486,10	56.143.486,09	0,01	0,00
23	Badan Pendapatan Daerah	29.180.941,92	29.180.941,92	(0,00)	(0,00)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.308.664,80	100.308.664,80	0,00	0,00
25	Inspektorat Daerah	22.654.374,44	22.654.374,44	0,00	0,00
26	Kecamatan Tebing Tinggi	134.657.350,60	134.657.350,60	(0,00)	(0,00)
27	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	99.548.157,18	104.650.221,18	(5.102.064,00)	(4,88)
28	Kecamatan Rangsang	195.164.700,80	195.164.700,80	0,00	0,00
29	Kecamatan Rangsang Barat	198.233.939,96	198.233.939,96	0,00	0,00
30	Kecamatan Merbau	131.732.860,00	131.732.860,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Pulau Merbau	77.608.661,86	77.608.661,86	0,00	0,00
32	Kecamatan Rangsang Pesisir	103.520.669,36	103.520.669,36	0,00	0,00
33	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	91.812.014,05	91.812.014,05	0,00	0,00
34	Kecamatan Tasik Putri Puyu	98.896.837,96	98.896.837,96	0,00	0,00
Jumlah		17.514.511.974,04	17.154.774.230,47	359.737.743,56	2,10



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.4.2.a 9.c Beban Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
106.807.920.275,01	200.852.034.630,49	(94.044.114.355,48)	(46,82)

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp106.807.920.275,01.

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	100.479.683.821,61	184.189.576.536,55	(83.709.892.714,94)	(45,45)
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	1.770.304.117,17	11.985.818.621,33	(10.215.514.504,16)	(85,23)
3	Beban Penyusutan Instalasi	3.044.168.428,86	3.320.215.434,76	(276.047.005,90)	(8,31)
4	Beban Penyusutan Jaringan	1.513.763.907,37	1.356.424.037,85	157.339.869,52	11,60
Jumlah		106.807.920.275,01	200.852.034.630,49	(94.044.114.355,48)	(46,82)

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.790.475,00	5.432.380,00	1.358.095,00	25,00
2	Dinas Kesehatan	44.086.531,01	39.104.031,00	4.982.500,01	12,74
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.516.107.702,62	194.110.644.444,87	(94.594.536.742,25)	(48,73)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.041.880.025,67	513.882.524,47	527.997.501,21	102,75
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26.087.983,44	34.368.382,74	(8.280.399,30)	(24,09)
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	72.600.309,07	91.845.559,07	(19.245.250,00)	(20,95)
7	Dinas Perhubungan	3.967.910.442,57	3.863.536.090,82	104.374.351,76	2,70



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20.790.085,78	20.790.085,78	0,00	0,00
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	668.100,00	668.100,00	0,00	0,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.033.533,33	1.033.533,33	0,00	0,00
11	Dinas Perikanan	155.919.131,50	147.176.475,41	8.742.656,09	5,94
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	172.350.785,00	172.350.785,00	0,00	0,00
13	Sekretariat Daerah	1.733.156.917,30	1.802.663.985,31	(69.507.068,01)	(3,86)
14	Sekretariat DPRD	13.252.919,38	13.252.919,37	0,00	0,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12.010.000,00	12.010.000,00	0,00	0,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.147.483,33	7.147.483,33	0,00	0,00
17	Kecamatan Rangsang	13.743.450,00	13.743.450,00	0,00	0,00
18	Kecamatan Rangsang Pesisir	2.384.400,00	2.384.400,00	0,00	0,00
Jumlah		106.807.920.275,01	200.852.034.630,49	(94.044.114.355,48)	(46,82)

6.4.2.a.9.d Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1.389.517.088,57	1.249.390.209,96	140.126.878,61	11,22

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.389.517.088,57.

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Alat Musik	15.058.270,83	14.634.729,17	423.541,67	2,89
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	1.374.458.817,74	1.234.755.480,79	139.703.336,95	11,31
Jumlah		1.389.517.088,57	1.249.390.209,96	140.126.878,61	11,22

Perbandingan Beban Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	773.485.992,23	661.536.670,10	111.949.322,13	16,92
2	Dinas Kesehatan	23.432.226,78	23.432.226,78	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	378.346.241,10	360.794.867,96	17.551.373,14	4,86
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.628.800,00	18.628.800,00	0,00	0,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	49.717.616,67	49.717.616,67	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	54.033.993,47	54.033.993,47	0,00	0,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.332.666,67	1.332.666,66	0,00	0,00
8	Sekretariat Daerah	79.958.484,99	69.332.301,65	10.626.183,34	15,33
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.581.066,67	10.581.066,67	0,00	0,00
Jumlah		1.389.517.088,57	1.249.390.209,96	140.126.878,61	11,22

6.4.2.a.9.e Beban Penyusutan Aset Lain-Lain

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1.114.613.062,44	0,00	1.114.613.062,44	100,00

Beban Penyusutan Aset Lain-Lain Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.389.517.088,57.

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain - Aset Rusak Berat/Usang	859.632.233,24	0,00	859.632.233,24	100,00
2	Beban Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-Lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	254.980.829,20	0,00	254.980.829,20	100,00
Jumlah		1.114.613.062,44	0,00	1.114.613.062,44	100,00

Perbandingan Beban Aset Lain-Lain Tahun 2024 dan Tahun 2023 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.170.829,20	0,00	34.170.829,20	100,00
2	Dinas Kesehatan	30.380.000,00	0,00	30.380.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.999.583,33	0,00	3.999.583,33	100,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	107.403.577,16	0,00	107.403.577,16	100,00
6	Dinas Perhubungan	12.558.479,00	0,00	12.558.479,00	100,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	220.818.593,75	0,00	220.818.593,75	100,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	704.982.000,00	0,00	704.982.000,00	100,00
Jumlah		1.114.613.062,44	0,00	1.114.613.062,44	100,00

6.4.2.a.10. Beban Amortisasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
214.765.023,14	238.078.972,38	(23.313.949,24)	(9,79)

Beban Amortisasi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp214.765.023,14.

Beban Amortisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	23.289.878,24	23.289.878,24	0,00	0,00
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	191.475.144,90	214.789.094,14	(23.313.949,24)	(10,85)
Jumlah		214.765.023,14	238.078.972,38	(23.313.949,24)	(9,79)

Perbandingan Amortisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	80.850.883,23	97.694.083,33	(16.843.200,10)	(17,24)
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.759.600,00	14.759.600,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	23.289.878,24	23.289.878,24	0,00	0,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	38.140.000,00	38.140.000,00	0,00	0,00
5	Sekretariat DPRD	31.926.803,28	31.926.803,28	0,00	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.977.966,59	8.966.949,88	(2.988.983,29)	(33,33)
7	Badan Pendapatan Daerah	13.292.000,00	19.938.000,00	(6.646.000,00)	(33,33)
8	Inspektorat Daerah	6.527.891,80	3.363.657,65	3.164.234,15	94,07
Jumlah		214.765.023,14	238.078.972,38	(23.313.949,24)	(9,79)

6.4.2.a.11. Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1.753.870.546,47	1.539.505.338,52	214.365.207,95	13,92

Beban Penyisihan piutang Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.753.870.546,47.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/V ideotron/Megatron	34.980.748,46	4.567.754,50	30.412.993,96	665,82
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.550.355.986,91	1.493.108.622,02	57.247.364,89	3,83
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.774.870,03	0,00	14.774.870,03	100,00
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	36.953.565,00	(36.953.565,00)	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Bunga	2.295,64	0,00	2.295,64	100,00
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	0,00	4.875.397,00	(4.875.397,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
7	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak	152.216.645,44	0,00	152.216.645,44	100,00
8	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	100,00
Jumlah		1.753.870.546,47	1.539.505.338,52	214.365.207,95	13,92

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.753.870.546,47, Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp214.365.207,95 atau 13,92% dari Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp1.539.505.338,52.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan berikut ini :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	14.774.820,03	4.875.397,00	9.899.423,03	203,05
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	36.953.565,00	(36.953.565,00)	(100,00)
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	153.758.941,08	0,00	153.758.941,08	100,00
4	Badan Pendapatan Daerah	1.585.336.735,37	1.497.676.376,52	87.660.358,85	5,85
Jumlah		1.753.870.546,47	1.539.505.338,52	214.365.207,95	13,92

6.4.2.a.12. Beban Transfer

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
63.906.374.400,00	161.183.742.900,00	(97.277.368.500,00)	(60,35)

Beban Transfer Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp63.906.374.400,00. Beban Transfer Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	0,00	98.162.430.900,00	(98.162.430.900,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	63.906.374.400,00	63.021.312.000,00	885.062.400,00	1,40
Jumlah		63.906.374.400,00	161.183.742.900,00	(97.277.368.500,00)	(60,35)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp63.906.374.400,00, Realisasi tersebut lebih rendah Rp97.277.368.500,00 atau 60,35% dari Realisasi Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp161.183.742.900,00.

Beban Transfer Tahun 2024 berdasarkan OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	63.906.374.400,00	161.183.742.900,00	(97.277.368.500,00)	(60,35)
Jumlah		63.906.374.400,00	161.183.742.900,00	(97.277.368.500,00)	(60,35)

Perbandingan Beban Transfer Tahun 2024 dengan Belanja Bantuan Keuangan LRA dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi LO 2024	Realisasi LRA 2024	Selisih	%
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa ...	0,00	97.240.042.000,00	(97.240.042.000,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa ...	63.906.374.400,00	38.164.000.000,00	25.742.374.400,00	67,45
Jumlah		63.906.374.400,00	135.404.042.000,00	(71.497.667.600,00)	(52,80)

Realisasi Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp63.906.374.400,00 lebih rendah Rp71.497.667.600,00 dibanding Belanja Bantuan Keuangan LRA sebesar Rp135.404.042.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penambahan Utang belanja transfer Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp25.742.374.400,00; dan
- Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tidak diakui sebagai Beban Transfer sebesar Rp97.240.042.000,00.

Rincian perbandingan Beban Transfer dan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 untuk setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

6.4.2.a.13. Beban Lain-Lain

Tahun 2024	Tahun 2023	KenaikanPenurunan	%
0,00	1.157.248,25	1.157.248,25	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Lain-lain adalah beban pemerintah daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.

Beban Lain-lain Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Beban Lain-lain Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Lain-Lain	0,00	1.157.248,25	(1.157.248,25)	(100,00)
Jumlah		0,00	1.157.248,25	(1.157.248,25)	(100,00)

Realisasi Beban Lain-lain Tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.157.248,25 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.157.248,25.

6.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Dalam kegiatan operasional Tahun 2024, realisasi Pendapatan disajikan sebesar Rp1.053.535.901.049,89 dan realisasi Beban sebesar Rp1.100.686.407.653,57. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami Defisit sebesar Rp47.150.506.603,68 yang dapat dirincikan sebagai berikut :

- Pendapatan LO sebesar Rp1.053.535.901.049,89
- Beban sebesar Rp1.100.686.407.653,57
- Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp 47.150.506.603,68

Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

6.4.3.a Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
0,00	14.540.333,33	(14.540.333,33)	(100,00)

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	14.540.333,33	(14.540.333,33)	(100,00)
Jumlah		0,00	14.540.333,33	(14.540.333,33)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.540.333,33 atau 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp14.540.333,33.

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	14.540.333,33	(14.540.333,33)	(100,00)
Jumlah		0,00	14.540.333,33	(14.540.333,33)	(100,00)

6.4.3.b Surplus/Defisit Non Operasional

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
(15.677.856.031,39)	(53.197.374.930,02)	37.519.518.898,63	(70,53)

Surplus/Defisit Non Operasional Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar minus Rp15.677.856.031,39. Surplus/Defisit Non Operasional Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(15.677.856.031,39)	(53.197.374.930,02)	37.519.518.898,63	(70,53)
Jumlah		(15.677.856.031,39)	(53.197.374.930,02)	37.519.518.898,63	(70,53)

Realisasi Surplus/Defisit Non Operasional Tahun 2024 sebesar minus Rp15.677.856.031,39. Saldo tersebut merupakan Defisit Non Operasional terkait penghapusan aset tetap pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang, dan Kecamatan Rangsang Barat.

6.4.4. Pos Luar Biasa

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
912.393.832,00	746.785.200,00	165.608.632,00	22,18

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran;
- Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- Kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah.

6.4.4.a Beban Luar Biasa

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
912.393.832,00	746.785.200,00	165.608.632,00	22,18

Beban Luar Biasa Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp912.393.832,00. Beban Luar Biasa Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Luar Biasa	912.393.832,00	746.785.200,00	165.608.632,00	22,18
Jumlah		912.393.832,00	746.785.200,00	165.608.632,00	22,18

Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp912.393.832,00, Realisasi tersebut lebih tinggi Rp165.608.632,00 atau 22,18% dari Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp746.785.200,00.

Beban Luar Biasa Tahun 2024 dan Tahun 2023 Per OPD dapat dirincikan sebagai berikut :

No	OPD	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	912.393.832,00	746.785.200,00	165.608.632,00	22,18
Jumlah		912.393.832,00	746.785.200,00	165.608.632,00	22,18

Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp 912.393.832,00 lebih rendah Rp9.971,00 dibandingkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp912.403.803,00 yang disebabkan oleh :

No	Uraian	Nilai
1	Biaya Administrasi Bank BRI	(4.971,00)
2	Biaya Administrasi Bank BSI Pada BLUD RSUD	(5.000,00)
Jumlah		(9.971,00)

Rincian perbandingan Beban Luar Biasa dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 untuk setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 15**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.4.5. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
(63.740.756.467,07)	(136.829.349.308,00)	73.088.592.840,93	(53,42)

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Defisit Laporan Operasional Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebesar Rp63.740.756.467,07 mengalami penurunan sebesar Rp73.088.592.840,93 atau 53,42% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp136.829.349.308,00.

Defisit Laporan Operasional disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- Beban lebih tinggi dari pada pendapatan daerah; dan
- Pemerintah Kepulauan Meranti memperoleh pendapatan hibah lebih rendah dibandingkan Tahun lalu.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.5 Penjelasan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti disusun berdasarkan pendapatan yang benar-benar telah diterima dan belanja yang telah terealisasi / yang telah dipertanggungjawabkan. Laporan Arus Kas meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

6.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
190.512.479.179,32	166.936.304.936,25	23.576.174.243,07	14,12

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti selama satu periode akuntansi.

Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi senilai Rp190.512.479.179,32 merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun 2024, sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp166.936.304.936,25 mengalami peningkatan senilai Rp23.576.174.243,07 atau sebesar 14,12%. Adapun rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023
1.	Arus Kas Masuk	1.139.908.805.098,36	1.180.084.185.490,32
2.	Arus Kas Keluar	949.396.325.919,04	1.013.147.880.554,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		190.512.479.179,32	166.936.304.936,25

6.5.1.a Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1.139.908.805.098,36	1.180.084.185.490,32	(40.175.380.391,96)	(3,40)

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang berasal dari aktivitas penerimaan kas yang merupakan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi tahun 2024.

Rincian arus masuk kas dari aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

Arus Masuk Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Penerimaan Pajak Daerah	18.679.998.295,01	16.671.383.937,45	2.008.614.357,56	12,05



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Arus Masuk Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Penerimaan Retribusi Daerah	64.919.566.355,04	1.337.128.750,00	63.582.437.605,04	4755,1
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.524.546.677,00	12.246.453.249,00	(2.721.906.572,00)	(22,23)
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	4.817.826.258,31	114.496.582.021,87	(109.678.755.763,56)	(95,79)
Penerimaan Dana Bagi Hasil				
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	92.098.608.000,00	86.789.666.959,00	5.308.941.041,00	6,12
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	88.305.177.000,00	143.216.165.923,00	(54.910.988.923,00)	(38,34)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	433.071.545.428,00	422.381.067.892,00	10.690.477.536,00	2,53
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	143.879.146.253,00	79.250.197.369,00	64.628.948.884,00	81,55
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	110.718.033.180,00	105.553.555.813,00	5.164.477.367,00	4,89
Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	97.240.042.000,00	98.162.430.900,00	(922.388.900,00)	(0,94)
Penerimaan Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	75.528.250.652,00	94.461.552.676,00	(18.933.302.024,00)	(20,04)
Penerimaan Dana Bantuan Keuangan	1.056.240.000,00	5.518.000.000,00	(4.461.760.000,00)	(80,86)
Penerimaan Hibah	69.825.000,00	0,00	69.825.000,00	100,00
Penerimaan dan Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.139.908.805.098,36	1.180.084.185.490,32	(40.175.380.391,96)	(3,40)

Tabel di atas menunjukkan arus masuk kas dari aktivitas operasi Tahun 2024 senilai Rp1.139.908.805.098,36. Sedangkan Tahun 2023 senilai Rp1.180.084.185.490,32 dan mengalami penurunan senilai Rp40.175.380.391,96 atau sebesar 3,40%.

6.5.1.b Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
949.396.325.919,04	1.013.147.880.554,07	(63.751.554.635,03)	(6,29)

Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang berasal dari aktivitas pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi Tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Arus Keluar Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pembayaran Pegawai	402.888.874.978,77	414.521.101.134,61	(11.632.226.155,84)	(2,81)
Pembayaran Barang dan Jasa	340.262.540.010,53	377.920.490.812,65	(37.657.950.802,12)	(9,96)
Pembayaran Bunga	922.890.122,00	3.281.890.320,00	(2.359.000.198,00)	(71,88)
Pembayaran Hibah	65.002.572.619,51	45.352.775.246,12	19.649.797.373,39	43,33
Pembayaran Bantuan Sosial	4.003.002.385,23	10.141.094.940,69	(6.138.092.555,46)	(60,53)
Pembayaran Tak Terduga	912.403.803,00	746.785.200,00	165.618.603,00	22,18
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	135.404.042.000,00	161.183.742.900,00	(25.779.700.900,00)	(15,99)
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya- Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	949.396.325.919,04	1.013.147.880.554,07	(63.751.554.635,03)	(6,29)

Tabel di atas yang menunjukkan arus keluar kas dari aktivitas operasi Tahun 2024 senilai Rp949.396.325.919,04 Sedangkan Tahun 2023 senilai Rp1.013.147.880.554,07 dan mengalami penurunan senilai Rp63.751.554.635,03 atau sebesar 6,29%

6.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
(176.830.375.813,82)	(134.241.913.647,45)	(42.588.462.166,37)	31,73

Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2024 senilai minus Rp176.830.375.813,82 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp134.241.913.647,45 mengalami penurunan senilai Rp42.588.462.166,37 atau sebesar 31,73% terdiri dari:

No	Uraian	2024	2023
1.	Arus Kas Masuk	0,00	38.805.000,00
2.	Arus Kas Keluar	176.830.375.813,82	134.280.718.647,45



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(176.830.375.813,82)	(134.241.913.647,45)

6.5.2.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
0,00	38.805.000,00	(38.805.000,00)	(100)

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi merupakan nilai kas yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk perolehan dan pelepasan aset tetap. Nilai arus kas masuk Tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Keluar Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	24.357.000,00	(24.357.000,00)	(100)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	14.448.000,00	(14.448.000,00)	(100)
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	38.805.000,00	(38.805.000,00)	(100)

6.5.2.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
176.830.375.813,82	134.280.718.647,45	42,549,657,166.37	31.69

Arus Kas Keluar merupakan nilai kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperoleh aset tetap dan Investasi lainnya dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti. Nilai arus kas keluar Tahun 2024 adalah senilai Rp176.830.375.813,82 dan Tahun 2023 senilai Rp134.280.718.647,45 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Arus Keluar Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	44.748.275.224,00	21.521.539.986,91	23.226.735.237,09	107,92
Perolehan Gedung dan Mesin	59.476.677.697,29	34.372.784.234,70	25.103.893.462,59	73,03
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Bangunan	68.476.709.950,53	70.281.954.225,84	(1.805.244.275,31)	(2,57)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.116.234.600,00	3.104.440.200,00	1.011.794.400,00	32,59
Perolehan Aset Lainnya	12.478.342,00	0,00	12.478.342,00	100
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100)
Jumlah	176.830.375.813,82	134.280.718.647,45	42.549.657.166,37	31,69

6.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
(20.775.896.319,38)	(35.233.807.450,08)	14.457.911.130,70	(41,03)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan Tahun 2024 senilai minus Rp20.775.896.319,38 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai minus Rp35.233.807.450,08 maka mengalami peningkatan senilai Rp14.457.911.130,70 atau sebesar 41,03%, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2024	2023
1.	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
2.	Arus Kas Keluar	20.775.896.319,38	35.233.807.450,08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(20.775.896.319,38)	(35.233.807.450,08)

6.5.3.a Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023

(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan merupakan nilai kas yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhubungan dengan penerimaan Pinjaman dalam negeri dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2024 nilai arus kas masuk dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah senilai Rp0,00. sedangkan Tahun 2023 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut

Arus Masuk Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

6.5.3.b Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
20.775.896.319,38	35.233.807.450,08	(14.457.911.130,70)	(41,03)

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan merupakan nilai kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhubungan dengan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah. Pada Tahun 2024 nilai arus kas keluar dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah senilai Rp20.775.896.319,38. sedangkan Tahun 2023 senilai Rp35.233.807.450,08 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Keluar Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Arus Keluar Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	20.775.896.319,38	35.233.807.450,08	(14.457.911.130,70)	(41,03)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	20.775.896.319,38	35.233.807.450,08	(14.457.911.130,70)	(41,03)

6.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
457.784.386,00	10.590.004.412,72	(10.132.220.026,72)	(95,68)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja dan pendanaan pemerintah, namun mempengaruhi nilai kas. Arus kas dari aktivitas transitoris antar lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan Kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. Selama Tahun 2024 aktivitas Transitoris yang terjadi berupa penerimaan serta pengeluaran berupa pengembalian uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun sebelumnya, biaya administrasi, dan PFK.

Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris Tahun 2024 senilai Rp457.784.386,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp10.590.004.412,72 mengalami penurunan senilai Rp10.132.220.026,72 atau sebesar 95,68%, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2024	2023
1.	Arus Kas Masuk	68.892.658.738,15	91.121.674.486,45
2.	Arus Kas Keluar	68.434.874.352,15	80.531.670.073,73
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		457.784.386,00	10.590.004.412,72



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.5.4.a Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
68.892.658.738,15	91.121.674.486,45	(22.229.015.748,30)	(24,39)

Arus Masuk Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	68.260.858.373,00	59.644.462.253,60	8.616.396.119,40	14,45
Pemindahbukuan	616.245.717,00	31.111.264.411,00	(30.495.018.694,00)	(98,02)
Penerimaan Biaya Administrasi	15.554.648,15	17.813.903,85	(2.259.255,70)	(12,68)
Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya	0,00	348.133.918,00	(348.133.918,00)	(100)
Penerimaan Sisa UP Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kas Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	68.892.658.738,15	91.121.674.486,45	(22.229.015.748,30)	(24,39)

6.5.4.a.1 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
68.260.858.373,00	59.644.462.253,60	8.616.396.119,40	14,45

Penerimaan Perhitungan pihak ketiga (PFK) senilai Rp68.260.858.373,00 dengan rincian sebagai berikut:

PFK	Tahun 2024
BPJS/ASKES	12.227.970.964,00
IWP	14.763.998.653,00
PPN	24.560.519.340,00
PPh 21	11.697.093.274,00
PPh 22	1.386.710.169,00
PPh 23	525.770.145,00
PPh Final (Pasal 4 ayat 2)	3.098.795.828,00
Denda Keterlambatan	0,00
Penerimaan PFK Satdik BOS	0,00
Jumlah	68.260.858.373,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.5.4.a.2 Pemindahbukuan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
616.245.717,00	31.111.264.411,00	(30.495.018.694,00)	(98,02)

Pemindahbukuan senilai Rp616.245.717,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pemindahbukuan	Tahun 2024
Bank Riau Kepri Syariah - Pemindahbukuan dari Rekening Kasda Bank BRI (BPHTB)	568.000.684,00
Bank Riau Kepri Syariah - Pemindahbukuan Bagi Hasil Rekening Bend. Khusus Penerimaan	7.733.503,00
BLUD Puskesmas- Pemindahbukuan Bagi Hasil Rekening Puskesmas	17.406.058,00
Bank Riau Kepri Syariah – Pemindahbukuan dari Bagi Hasil Rekening BOS	22.845.099,00
Bank Riau Kepri Syariah- Pencairan Deposito	0,00
Bank Riau Kepri Syariah – Pemindahbukuan dari Bagi Hasil Rekening BOP	260.373,00
Jumlah	616.245.717,00

6.5.4.a.3 Penerimaan Biaya Administrasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
15.554.648,15	17.813.903,85	(2.259.255,70)	(12,68)

Penerimaan Biaya Administrasi senilai Rp15.554.648,15 adalah biaya administrasi atau pajak Rekening Kasda BRI (BPHTB), Rekening Kas BLUD dan Rekening Kas lainnya BOK dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Biaya Administrasi	Tahun 2024
Biaya Administrasi/ Pajak Rekening BRI Penampung BPHTB	4.971,00
Biaya Administrasi BLUD RSUD	5.000,00
Biaya Administrasi BLUD Puskesmas	862.500,00
Biaya Administrasi BLUD UPT RSUD	3.497.000,00
Biaya Administrasi BOK	11.185.177,15
Jumlah	15.554.648,15



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.5.4.a.4 Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
0,00	348.133.918,00	(348.133.918,00)	(100)

Sisa UP Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00 dan Penerimaan Sisa UP Tahun 2023 sebesar Rp348.133.918,00.

6.5.4.b Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
68.434.874.352,15	80.531.670.073,73	(12.096.795.721,58)	(15,02)

Arus Keluar Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.803.073.373,00	59.320.564.438,60	8.482.508.934,40	14.30
Pemindahbukuan	616.245.717,00	21.113.497.663,00	(20.497.251.946,00)	(97,08)
Biaya-biaya Administrasi	15.554.648,15	17.938.045,85	(2.383.397,70)	(13,29)
Koreksi Kas Di BOSP	614,00	0,00	614,00	100
Pengeluaran / Pelunasan PFK tahun sebelumnya	0,00	79.669.926,28	(79.669.926,28)	(100)
Jumlah	68.434.874.352,15	80.531.670.073,73	(12.096.795.721,58)	(15,02)

6.5.4.b.1 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
67.803.073.373,00	59.320.564.438,60	8.482.508.934,40	14,30

Pengeluaran Perhitungan pihak ketiga (PFK) senilai Rp67.803.073.373,00 dengan rincian sebagai berikut:

PFK	Tahun 2024
BPJS/ASKES	11.602.749.604,00
IWP	14.608.240.898,00
PPN	24.560.519.340,00
PPh 21	11.697.093.274,00
PPh 22	1.386.710.169,00
PPh 23	525.770.145,00
PPh Pasal 4 ayat 2	3.098.795.828,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Denda Keterlambatan	0,00
Pengeluaran PFK BPJS dan IWP	310.785.243,00
Pengeluaran PFK Satdik BOS	12.408.872,00
Jumlah	67.803.073.373,00

6.5.4.b.2 Pemindahbukuan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
616.245.717,00	21.113.497.663,00	(20.497.251.946,00)	(97,08)

Pemindahbukuan senilai Rp616.245.717,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pemindahbukuan	Tahun 2024
Bank Riau Kepri Syariah - Penempatan Deposito	0,00
Bank Riau Kepri Syariah - Pemindahbukuan Bagi Hasil Rekening Bendahara Penerimaan BUD	7.733.503,00
Bank BRI - Pemindahbukuan BPHTB	568.000.684,00
Bank Riau - Pemindahbukuan Bagi Hasil Rekening BLUD Puskesmas	17.406.058,00
Bank Riau - Pemindahbukuan Bagi Hasil Rekening BOS	22.845.099,00
Bank Riau - Pemindahbukuan Bagi Hasil Rekening BOP	260.373,00
Koreksi Pengembalian Kesalahan Pendebetan Bank	0,00
Jumlah	616.245.717,00

6.5.4.b.3 Biaya administrasi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
15.554.648,15	17.938.045,85	(2.383.397,70)	(13,29)

Pengeluaran Biaya Administrasi	Tahun 2024
Biaya Administrasi Rekening BOK	11.185.177,15
Biaya Administrasi Rekening BLUD Puskesmas	862.500,00
BRI –Biaya Administrasi Pajak	4.971,00
Biaya Administrasi Rekening BLUD	3.502.000,00
Jumlah	15.554.648,15



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.5.4.b.4 Pengeluaran PFK Tahun Sebelumnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
0,00	79.669.926,28	(79.669.926,28)	(100)

Pelunasan Utang PFK tahun 2024 senilai Rp0,00. Pada Tahun 2024 Pengeluaran PFK Tahun Sebelumnya atau pelunasan Utang PFK dimasukan ke bagian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga.

6.5.4.b.5 Koreksi Kas kasda

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
614,00	0,00	614,00	100

Koreksi Kas di Kasda Tahun 2024 sebesar Rp614,00 merupakan koreksi kas di BOSP (Paud) Swasta KB Akasia tahun 2023.

6.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
(6.636.008.567,88)	8.050.588.251,45	(14.686.596.819,34)	(182,43)

Kenaikan/Penurunan bersih kas per 31 Desember 2024 adalah senilai minus Rp6.636.008.567,88. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp8.050.588.251,45 mengalami penurunan senilai Rp14.686.596.819,34 atau sebesar 182,43%. Kenaikan (Penurunan) kas merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2024 senilai Rp190.512.479.179,32 dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2024 senilai minus Rp176.830.375.813,82 dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2024 senilai minus Rp20.775.896.319,38 serta arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2024 senilai Rp457.784.386,00.

6.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas FKTP, BLUD dan BOS

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
9.985.388.911,16	1.934.800.659,71	8.050.588.251,45	416,09

Saldo Awal Kas di BUD, BOS, FKTP dan kas di BLUD Tahun 2024 senilai Rp9.985.388.911,16 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp1.934.800.659,71 mengalami peningkatan senilai Rp8.050.588.251,45 atau sebesar 419,09%. Saldo awal kas merupakan saldo akhir Tahun 2023 yang terdiri dari Saldo awal kas Daerah senilai Rp7.797.367.769,45, Kas BOSP senilai Rp1.745.740,00, Kas FKTP senilai Rp260.797.244,00, Kas di BLUD senilai Rp451.766.016,31, Kas Dana BOK senilai Rp936.089.955,00 dan Kas Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

senilai Rp328.060.815,40, Kas bendahara Penerimaan sebesar Rp17.763.100,00 dan Kas Bendahara Pengeluaran Rp191.798.271,00

6.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas BLUD, BOS

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
3.349.380.343,28	9.985.388.911,16	(6.636.008.567,88)	(66,46)

Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BOS, dan Kas BLUD Tahun 2024 senilai Rp3.349.380.343,28 merupakan penjumlahan Saldo Awal Kas di BUD, FKTP, BOS dan Kas BLUD tahun 2024 senilai Rp9.985.388.911,16 ditambah dengan Kenaikan/Penurunan Kas senilai minus Rp6.636.008.567,88.

6.5.8 Setara Kas

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo akhir Kas Setara Kas berupa Deposito di Bank Riau Kepri Syariah Tahun 2024 senilai Rp0,00. Sedangkan Tahun 2023 Setara Kas Senilai Rp0,00.

6.5.9 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
156.551.674,00	191.798.271,00	(35.246.597,00)	(18,38)

Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran Tahun 2024 senilai Rp156.551.674,00 merupakan saldo kas di bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kasda. Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran Tahun 2024 dengan rinciannya sebagai berikut;

Saldo Kas Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024
UYHD Sekretariat Daerah	156.107.694,00
UYHD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	443.980,00
Jumlah	156.551.674,00

Untuk Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat perbedaan Rekening Koran di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.dengan BKU, perbedaan ini disebabkan oleh SP2D yang belum diposting oleh Bank (outstanding) SP2D dengan Nomor 000108/LS/1.06.2.08.2.14.01.0000/P5/12/2024 dengan rincian Pembayaran Belanja Jasa Honorarium Tenaga Keamanan dan Tenaga Juru Masak untuk Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023

(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

November s/d Desember 2024 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (DAK NON FISIK - KB) dan 000109/LS/1.06.2.08.2.14.01.0000/P5/12/2024 dengan rincian Pembayaran Belanja Honorarium Dukungan Manajemen Pengelolaan (DAK NON FISIK BOKB) Pada Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan.

6.5.10 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
0,00	17.763.100,00	(17.763.100,00)	(100)

Saldo akhir kas di bendahara penerimaan tahun 2024 senilai Rp0,00. Tahun 2023 kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp17.763.100,00.

6.5.11 Saldo Akhir Kas

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
3.349.380.343,28	9.985.388.911,16	(6.636.008.567,88)	(66,46)

Saldo Akhir Kas senilai Rp3.349.380.343,28 merupakan penjumlahan saldo akhir kas di Kasda senilai Rp79.033.064,53, Kas BOSP senilai Rp98.474.268,00, Kas lainnya BOK senilai Rp982.620.625,00, Utang PFK (kas lainnya) sebesar Rp785.845.815,40 dan Kas di BLUD senilai Rp1.246.854.896,35 Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp156.551.674,00, dan Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp0,00.

No.	Rincian	Saldo Akhir kas Per 31 Desember 2024	Saldo Akhir kas Per 31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	79.033.064,53	7.797.367.769,45
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	156.551.674,00	191.798.271,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	17.763.100,00
4	Kas di BLUD RSUD	367.197.531,35	451.766.016,31
5	Puskesmas Alah Air	1.223.867,00	1.053,00
6	Puskesmas Alai	78.444.372,00	490,00
7	Puskesmas Selatpanjang	488.800.082,00	205.526.470,00
8	Puskesmas Kedabu Rapat	1.456,00	10.397.660,00
9	Puskesmas Anak Setatah	1.301,00	1.765,00
10	Puskesmas Pulau Merbau	201.405,00	965,00
11	Puskesmas Bandul	38,00	48,00
12	Puskesmas Tanjung Samak	216.341.661,00	3.070,00
13	Puskesmas Teluk Belitung	94.640.003,00	44.857.452,00
14	Puskesmas Sungai Tohor	3.180,00	8.271,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Rincian	Saldo Akhir kas Per 31 Desember 2024	Saldo Akhir kas Per 31 Desember 2023
15	Kas di BOS	0,00	0,00
16	Kas Dana Kapitasi FKTP	0,00	0,00
17	Kas Lainnya	785.845.815,40	328.060.815,40
18	Kas di BOSP	98.474.268,00	1.745.740,00
19	Kas BOK Puskesmas	982.620.625,00	936.089.955,00
20	Kas Setara Kas	0,00	0,00
	Jumlah	3.349.380.343,28	9.985.388.911,16



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2024. Kabupaten Kepulauan Meranti menyajikan laporan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif oleh Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 disajikan secara komparatif dengan tahun 2023.

6.6.1 Ekuitas Awal

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
2.586.439.653.782,65	2.724.187.270.096,02	(137.747.616.313,37)	(5,06)

Ekuitas awal adalah ekuitas akhir tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 pada Neraca Audited Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp2.586.439.653.782,65 dan menjadi saldo ekuitas awal pada 1 Januari 2024.

6.6.2 Surplus / Defisit LO

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
(63.740.756.467,07)	(136.829.349.308,00)	73.088.592.840,94	(53,42)

Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama tahun 2024, setelah perhitungan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus / Defisit LO masing-masing SKPD sebagai berikut:

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(314.342.770.368,18)	(300.108.683.633,45)	(14.234.086.734,73)	4,74
Dinas Kesehatan	(128.702.724.561,82)	(117.374.820.207,41)	(11.327.904.354,41)	9,65
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(136.710.337.231,24)	(283.474.903.349,53)	146.764.566.118,29	(51,77)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	(28.576.049.318,30)	(28.660.075.034,26)	84.025.715,96	(0,29)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(4.917.603.498,73)	(5.726.543.010,49)	808.939.511,76	(14,13)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(11.352.653.010,78)	(10.319.616.453,37)	(1.033.036.557,41)	10,01



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	(10.845.392.487,81)	(11.439.591.292,33)	594.198.804,52	(5,19)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(10.347.876.866,46)	(9.802.994.190,44)	(544.882.676,02)	5,56
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(6.919.558.798,49)	(7.330.098.417,58)	410.539.619,09	(5,60)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(3.342.958.447,71)	(4.205.202.167,33)	862.243.719,62	(20,50)
Dinas Perhubungan	(24.461.180.072,61)	(10.378.024.593,25)	(14.083.155.479,36)	135,70
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(8.032.209.302,18)	(8.910.081.487,50)	877.872.185,32	(9,85)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	(6.144.277.490,37)	(6.416.898.014,69)	272.620.524,32	(4,25)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(3.029.131.614,49)	(4.146.506.716,12)	1.117.375.101,63	(26,95)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(6.419.012.942,11)	(8.036.679.023,01)	1.617.666.080,90	(20,13)
Dinas Perpustakaan dan Arsip	(3.216.096.168,70)	(3.046.430.661,44)	(169.665.507,26)	5,57
Dinas Perikanan	(10.589.899.760,58)	(8.598.547.864,87)	(1.991.351.895,71)	23,16
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(7.147.205.873,26)	(8.818.312.040,67)	1.671.106.167,40	(18,95)
Sekretariat Daerah	(71.251.487.964,23)	(99.536.875.602,88)	28.285.387.638,64	(28,42)
Sekretariat DPRD	(63.412.899.674,27)	(73.735.814.211,29)	10.322.914.537,02	(14,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(8.824.103.096,85)	(8.157.684.641,92)	(666.418.454,93)	8,17
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	882.883.349.819,41	919.960.425.545,15	(37.077.075.725,74)	(4,03)
Badan Pendapatan Daerah	10.138.726.723,20	7.597.991.393,12	2.540.735.330,08	33,44
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(6.062.996.479,98)	(6.007.648.215,79)	(55.348.264,19)	0,92
Inspektorat Daerah	(7.961.185.753,46)	(8.298.555.261,58)	337.369.508,12	(4,07)
Kecamatan Tebing Tinggi	(7.475.599.495,43)	(6.752.590.511,41)	(723.008.984,02)	10,71



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	(5.853.616.815,18)	(3.354.408.695,59)	(2.499.208.119,59)	74,51
Kecamatan Rangsang	(2.902.929.212,47)	(3.071.068.624,20)	168.139.411,73	(5,47)
Kecamatan Rangsang Barat	(2.804.552.187,01)	(2.556.768.091,20)	(247.784.095,81)	9,69
Kecamatan Merbau	(3.239.193.511,00)	(3.204.357.272,00)	(34.836.239,00)	1,09
Kecamatan Pulau Merbau	(2.336.822.823,72)	(2.405.770.912,87)	68.948.089,15	(2,87)
Kecamatan Rangsang Pesisir	(2.046.889.101,07)	(1.824.535.525,55)	(222.353.575,52)	12,19
Kecamatan Tasik Putri Puyu	(1.553.668.817,92)	(1.771.049.467,43)	217.380.649,51	(12,27)
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	(1.866.202.288,67)	(1.957.915.295,08)	91.713.006,41	(4,68)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(44.073.747.974,57)	(4.958.715.759,74)	(39.115.032.214,83)	788,81
Jumlah	(63.740.756.467,07)	(136.829.349.308,00)	73.088.592.840,94	(53,42)

6.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
(50.386.247.981,80)	(918.267.005,37)	(49.467.980.976,43)	5.387,10

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar yang terdiri dari 13 akun yang disebabkan oleh perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
a	Koreksi Kas	(614,00)	0,00	(614,00)	(100,00)
b	Koreksi Nilai Persediaan	1.236.831.777,68	1.820.677.473,00	(583.845.695,32)	(32,07)
c	Koreksi Piutang Pajak	(371.249.292,00)	(5.795.087.887,00)	5.423.838.595,00	(93,59)
d	Koreksi Piutang Retribusi	(48.400,00)	0,00	(48.400,00)	(100,00)
e	Koreksi Piutang Lainnya	0,00	(30.000,00)	30.000,00	(100,00)
f	Koreksi Penyisihan Piutang Pajak	424.296.907,23	3.288.535.813,04	(2.864.238.905,81)	(87,10)
g	Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi	7.437.022,00	26.730.000,00	(19.292.978,00)	(72,18)
h	Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya	6.000.000,00	18.642.020,50	(12.642.020,50)	(67,81)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
i	Koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya	23.454.721.581,60	0,00	23.454.721.581,60	100,00
j	Koreksi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Tahun Sebelumnya	(76.744.544.055,12)	(1.579.614.243,83)	(75.164.929.811,28)	4.758,44
k	Koreksi Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi	1.431.101.311,53	0,00	1.431.101.311,53	100,00
l	Koreksi Utang Tahun Sebelumnya	169.205.779,28	1.329.547.826,52	(1.160.342.047,24)	(87,27)
m	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	0,00	(27.668.007,59)	27.668.007,59	(100,00)
	Jumlah	(50.386.247.981,80)	(918.267.005,37)	(49.467.980.976,43)	5.387,10

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada masing-masing akun dirinci menurut OPD sebagai berikut:

6.6.3.a Koreksi Kas

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
(614,00)	0,00	(614,00)	(100,00)

Koreksi Kas tahun 2024 sebesar minus Rp614,00 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00 yang mana pada tahun 2024 merupakan koreksi kas BOSP milik PAUD Swasta tahun-tahun sebelumnya.

6.6.3.b Koreksi Nilai Persediaan

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1.236.831.777,68	1.820.677.473,00	(583.845.695,32)	(32,07)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Kesehatan	1.236.831.777,68	0,00	1.236.831.777,68	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	0,00	2.102.761.900,00	(2.102.761.900,00)	(100,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	(282.084.427,00)	282.084.427,00	(100,00)
Jumlah	1.236.831.777,68	1.820.677.473,00	(583.845.695,32)	(32,07)

Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp1.236.831.777,68 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.820.677.473,00.

6.6.3.c Koreksi Piutang Pajak

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
(371.249.292,00)	(5.795.087.887,00)	5.423.838.595,00	(93,59)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Badan Pendapatan Daerah	(371.249.292,00)	(5.795.087.887,00)	5.423.838.595,00	(93,59)
Jumlah	(371.249.292,00)	(5.795.087.887,00)	5.423.838.595,00	(93,59)

Koreksi Piutang Pajak tahun 2024 sebesar minus Rp371.249.292,00 dan tahun 2023 sebesar minus Rp5.795.087.887,00 yang mana pada tahun 2024 merupakan koreksi piutang sebesar minus Rp371.249.292,00 dikarenakan adanya pemutakhiran data PBB-P2 tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 dan tahun 2023.

6.6.3.d Koreksi Piutang Retribusi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
(48.400,00)	0,00	(48.400,00)	(100,00)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Kesehatan	(48.400,00)	0,00	(48.400,00)	(100,00)
Jumlah	(48.400,00)	0,00	(48.400,00)	(100,00)

Koreksi Piutang Retribusi tahun 2024 sebesar minus Rp48.400,00 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00 yang mana pada tahun 2024 merupakan koreksi Piutang Retribusi BLUD pada Dinas Kesehatan dikarenakan piutang retribusi non kapitasi BPJS tidak sesuai dengan pengajuan pada Puskesmas Alai.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.6.3.e Koreksi Piutang Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
0,00	(30.000,00)	30.000,00	(100,00)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Kesehatan	0,00	(30.000,00)	30.000,00	(100,00)
Jumlah	0,00	(30.000,00)	30.000,00	(100,00)

Koreksi Piutang Lainnya tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun 2023 sebesar minus Rp30.000,00.

6.6.3.f Koreksi Penyisihan Piutang Pajak

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
424.296.907,23	3.288.535.813,04	(2.864.238.905,81)	(87,10)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Badan Pendapatan Daerah	424.296.907,23	3.288.535.813,04	(2.864.238.905,81)	(87,10)
Jumlah	424.296.907,23	3.288.535.813,04	(2.864.238.905,81)	(87,10)

Koreksi Penyisihan Piutang Pajak tahun 2024 sebesar Rp424.296.907,23 dan tahun 2023 sebesar Rp3.288.535.813,04 yang mana pada tahun 2024 merupakan koreksi penyisihan piutang yang terbayarkan dari pajak reklame dan pajak PBB-P2 sebesar Rp53.062.540,23 dan koreksi penyisihan piutang PBB-P2 karna adanya pemutakhiran data pada piutangnya sebesar Rp371.234.367,00.

6.6.3.g Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
7.437.022,00	26.730.000,00	(19.292.978,00)	(72,18)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Kesehatan	4.875.397,00	0,00	4.875.397,00	100,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.561.625,00	26.730.000,00	(24.168.375,00)	(90,42)
Jumlah	7.437.022,00	26.730.000,00	(19.292.978,00)	(72,18)

Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2024 sebesar Rp7.437.022,00 dan tahun 2023 sebesar Rp26.730.000,00 yang mana pada tahun 2024 merupakan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penyisihan yang terbayarkan dari piutang BLUD tahun 2023 sebesar Rp4.875.397,00 dan piutang menara telekomunikasi tahun 2023 sebesar Rp2.561.625,00.

6.6.3.h Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
6.000.000,00	18.642.020,50	(12.642.020,50)	(67,81)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Kesehatan	0,00	12.642.020,50	(12.642.020,50)	(100,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.000.000,00	18.642.020,50	(12.642.020,50)	(67,81)

Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya tahun 2024 sebesar Rp6.000.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp18.642.020,50 yang mana pada tahun 2024 merupakan penyisihan pembayaran dana bergulir sebesar Rp6.000.000,00.

6.6.3.i Koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
23.454.721.581,60	0,00	23.454.721.581,60	100,00

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Kesehatan	13.363.048.831,00	0,00	13.363.048.831,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.736.095.000,00	0,00	8.736.095.000,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	100,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.265.577.750,60	0,00	1.265.577.750,60	100,00
Jumlah	23.454.721.581,60	0,00	23.454.721.581,60	100,00

Koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp23.454.721.581,60 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00 yang mana pada tahun 2024 koreksi atas kesalahan pencatatan pendapatan hibah atas hibah Aset Tetap yang didukung BAST tahun-tahun sebelumnya, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. pada Dinas Kesehatan sebesar Rp13.363.048.831,00 dikarenakan hibah aset tetap dari Kementerian Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.477.598.160,00 dan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau berupa Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan masing-masing sebesar Rp325.000.000,00 dan Rp9.560.450.671,00. Koreksi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup berupa aset peralatan dan mesin sebesar Rp90.000.000,00, dan Koreksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Bangunan dan Gedung sebesar Rp134.617.750,60 dan Tanah sebesar Rp1.130.960,00

Koreksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.736.095.000,00 dikarenakan aset berupa Gedung Bangunan sebesar Rp191.191.000,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.544.904.000,00 tahun sebelumnya yang belum dicatat.

6.6.3.j Koreksi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Tahun Sebelumnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
(76.744.544.055,12)	(1.579.614.243,83)	(75.164.929.811,28)	4.758,44

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(581.216.578,73)	3.033.000,00	(584.249.578,73)	19.263,09
Dinas Kesehatan	(29.684.614.058,13)	(2.035.868.953,86)	(27.648.745.104,27)	1.358,08
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(20.171.505.794,45)	0,00	(20.171.505.794,45)	100,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	(3.214.285,71)	0,00	(3.214.285,71)	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(459.683.656,49)	0,00	(459.683.656,49)	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(185.418.824,11)	0,00	(185.418.824,11)	100,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	(38.293.230,79)	110.005.332,54	(148.298.563,33)	(134,81)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(2.633.372.352,38)	17.250.528,00	(2.650.622.880,38)	(15.365,46)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(54.210.983,99)	0,00	(54.210.983,99)	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.436.144,00	0,00	5.436.144,00	100,00
Dinas Perhubungan	(188.576.548,50)	2.711.003,44	(191.287.551,94)	(7.055,97)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	82.936.018,98	(82.936.018,98)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(35.640.000,00)	0,00	(35.640.000,00)	100,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(2.428.910.000,00)	0,00	(2.428.910.000,00)	100,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	(265.794.714,33)	0,00	(265.794.714,33)	100,00
Dinas Perikanan	(96.169.216,92)	0,00	(96.169.216,92)	100,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(16.609.303.295,37)	(102.251.360,93)	(16.507.051.934,44)	16.143,60
Sekretariat Daerah	(2.288.008,99)	23.158.692,53	(25.446.701,51)	(109,88)
Sekretariat Dewan	(148.003.819,48)	295.110.828,80	(443.114.648,28)	(150,15)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(8.650.833,34)	24.200.000,00	(32.850.833,34)	(135,75)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(134.898.685,03)	0,00	(134.898.685,03)	100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(3.197.553,75)	100.666,67	(3.298.220,42)	(3.276,38)
Inspektorat Daerah	(12.259.133,89)	0,00	(12.259.133,89)	100,00
Kecamatan Tebing Tinggi	(84.999.775,32)	0,00	(84.999.775,32)	100,00
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	(776.370.677,57)	0,00	(776.370.677,57)	100,00
Kecamatan Rangsang Barat	(71.429.276,93)	0,00	(71.429.276,93)	100,00
Kecamatan Merbau	(1.394.397.700,00)	0,00	(1.394.397.700,00)	100,00
Kecamatan Tasik Putri Puyu	(677.561.194,92)	0,00	(677.561.194,92)	100,00
Jumlah	(76.744.544.055,12)	(1.579.614.243,83)	(75.164.929.811,28)	4.758,44



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Koreksi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Tahun Sebelumnya tahun 2024 sebesar minus Rp76.744.544.055,12 dan tahun 2023 sebesar minus Rp1.579.614.243,83 yang mana pada tahun 2024 merupakan koreksi nilai penyusutan yang disebabkan adanya aset tetap yang baru dicatat dan kesalahan perhitungan penyusutan tahun sebelumnya serta akumulasi penyusutan aset lain-lain yang baru dicatat.

6.6.3.k Koreksi Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1.431.101.311,53	0,00	1.431.101.311,53	(100,00)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.512.766,98	0,00	50.512.766,98	100,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.030.214.895,77	0,00	1.030.214.895,77	100,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	394.771,84	0,00	394.771,84	100,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	82.991.076,37	0,00	82.991.076,37	100,00
Dinas Perikanan	9.320.000,00	0,00	9.320.000,00	100,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
Sekretariat DPRD	232.667.800,57	0,00	232.667.800,57	100,00
Jumlah	1.431.101.311,53	0,00	1.431.101.311,53	100,00

Koreksi Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi tahun 2024 sebesar Rp1.431.101.311,53 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00 yang mana pada tahun 2024 merupakan koreksi saldo awal atas dari Aset Lainnya- Tuntutan Ganti Rugi atas nilai kerugian daerah yang sudah ditetapkan SKTJM sejak TA 2015.

6.6.3.l Koreksi Utang Tahun Sebelumnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
169.205.779,28	1.329.547.826,52	(1.160.342.047,24)	(87,27)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	154.405.779,28	1.629.637.826,52	(1.475.232.047,24)	(90,53)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	20.310.000,00	(20.310.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	0,00	(320.400.000,00)	320.400.000,00	(100,00)
Jumlah	169.205.779,28	1.329.547.826,52	(1.160.342.047,24)	(87,27)

Koreksi Utang tahun sebelumnya tahun 2024 sebesar Rp169.205.779,28, dan tahun 2023 sebesar Rp1.329.547.826,52 yang mana pada tahun 2024 merupakan koreksi utang pada Dinas Pendidikan dikarenakan utang tersebut telah dibayar pada tahun 2021 sebesar Rp14.800.000,00 dan Dinas Kesehatan dikarenakan koreksi utang BLUD RSUD sebesar Rp154.400.874,28, utang BLUD Puskesmas Alai sebesar Rp2.875,00 dan utang BLUD Puskesmas Selatpanjang sebesar Rp2.030,00.

6.6.3.m Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
0,00	(27.668.007,59)	27.668.007,59	(100,00)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Perhubungan	0,00	(4.456.328,76)	4.456.328,76	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	(23.211.678,83)	23.211.678,83	(100,00)
Jumlah	0,00	(27.668.007,59)	27.668.007,59	(100,00)

Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun 2023 sebesar minus Rp27.668.007,59.

6.6.4 Ekuitas Akhir

Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
2.472.312.649.333,78	2.586.439.653.782,65	(114.127.004.448,87)	(4,41)

Ekuitas Akhir merupakan selisih antara ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/ koreksi kesalahan mendasar.

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(2.156.068.064.469,53)	(1.843.010.890.289,59)	(313.057.174.179,94)	16,99
Dinas Kesehatan	(868.538.642.521,41)	(724.920.047.286,41)	(143.618.595.235,00)	19,81



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(482.997.538.703,44)	(335.952.487.430,66)	(147.045.051.272,78)	43,77
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	(138.717.309.039,14)	(110.048.440.206,96)	(28.668.868.832,17)	26,05
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(58.718.750.175,02)	(53.193.669.499,80)	(5.525.080.675,23)	10,39
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(102.177.187.785,60)	(90.639.115.950,70)	(11.538.071.834,89)	12,73
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	(103.994.116.013,20)	(95.568.527.474,37)	(8.425.588.538,83)	8,82
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(163.812.243.091,27)	(150.830.993.872,43)	(12.981.249.218,84)	8,61
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(68.055.167.703,02)	(61.313.568.920,54)	(6.741.598.782,48)	11,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(48.050.817.300,23)	(44.794.234.996,52)	(3.256.582.303,71)	7,27
Dinas Perhubungan	137.330.523.123,45	163.597.848.966,56	(26.267.325.843,11)	(16,06)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(18.592.448.180,97)	(10.645.791.580,16)	(7.946.656.600,81)	74,65
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	(13.609.942.420,42)	(5.007.567.750,28)	(8.602.374.670,14)	171,79
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(53.297.965.822,93)	(50.233.194.208,44)	(3.064.771.614,49)	6,10
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(51.709.185.193,49)	(42.036.614.553,81)	(9.672.570.639,68)	23,01
Dinas Perpustakaan dan Arsip	(30.923.093.413,59)	(28.402.168.942,42)	(2.520.924.471,17)	8,88



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Dinas Perikanan	(85.710.114.689,63)	(75.203.365.712,13)	(10.506.748.977,50)	13,97
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(85.468.066.108,31)	(63.149.928.210,28)	(22.318.137.898,03)	35,34
Sekretariat Daerah	(805.141.985.499,39)	(734.281.457.319,60)	(70.860.528.179,80)	9,65
Sekretariat DPRD	(523.252.981.096,74)	(459.924.745.403,56)	(63.328.235.693,18)	13,77
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(87.988.725.591,48)	(79.155.971.661,29)	(8.832.753.930,19)	11,16
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.425.792.388.944,72	7.542.255.679.183,46	883.536.709.761,26	11,71
Badan Pendapatan Daerah	279.476.350.495,80	269.241.892.541,10	10.234.457.954,70	3,80
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(66.812.833.045,92)	(60.746.639.012,20)	(6.066.194.033,73)	9,99
Inspektorat Daerah	(65.638.534.218,21)	(57.665.089.330,86)	(7.973.444.887,35)	13,83
Kecamatan Tebing Tinggi	(63.840.655.507,96)	(56.280.056.237,21)	(7.560.599.270,75)	13,43
Kecamatan Tebing tinggi Barat	(21.196.142.342,42)	(12.644.491.849,67)	(8.551.650.492,75)	67,63
Kecamatan Rangsang	(26.760.695.103,25)	(23.857.765.890,78)	(2.902.929.212,47)	12,17
Kecamatan Rangsang Barat	(15.447.683.924,96)	(12.571.702.461,03)	(2.875.981.463,93)	22,88
Kecamatan Merbau	(17.232.833.950,33)	(12.599.242.739,33)	(4.633.591.211,00)	36,78
Kecamatan Pulau Merbau	(19.928.135.230,46)	(17.591.312.406,74)	(2.336.822.823,72)	13,28
Kecamatan Rangsang Pesisir	(17.662.104.452,41)	(15.615.215.351,34)	(2.046.889.101,07)	13,11
Kecamatan Tasik Putri Puyu	(16.424.840.645,14)	(14.193.610.632,30)	(2.231.230.012,84)	15,72
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	(18.347.827.554,52)	(16.481.625.265,84)	(1.866.202.288,67)	11,32
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(74.169.982.435,79)	(30.096.234.461,22)	(44.073.747.974,57)	146,44
Jumlah	2.472.312.649.333,78	2.586.439.653.782,65	(114.127.004.448,87)	(4,41)



BAB VII

PENGUNGKAPAN INFORMASI LAINNYA

7.1 Sejarah Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Desember 2008. Atas dasar hukum yang melandasi berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 16 Januari 2009.

Beberapa landasan hukum yang sangat penting dan menjadi sejarah panjang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis;
2. Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008;
4. Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
7. Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Didasarkan pada beberapa landasan hukum tersebut, membuktikan bahwa telah dilakukan pengkajian yang mendalam mengenai kelayakan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga secara resmi ditetapkanlah tanggal 19 Desember 2008 sebuah Kabupaten baru di Provinsi Riau oleh Pemerintah, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti.



7.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 berjumlah 35 OPD yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
13. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja;
14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Dinas Perikanan;
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
19. Sekretariat Daerah;
20. Sekretariat DPRD;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
22. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
23. Badan Pendapatan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat Daerah;
26. Kecamatan Tebing Tinggi;
27. Kecamatan Tebing Tinggi Barat;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. Kecamatan Rangsang;
29. Kecamatan Rangsang Barat;
30. Kecamatan Merbau;
31. Kecamatan Pulau Merbau;
32. Kecamatan Rangsang Pesisir;
33. Kecamatan Tasik Putri Puyu;
34. Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Entitas pelaporan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sementara entitas akuntansi adalah OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

7.3 Pengungkapan Penting Lainnya

7.3.1 Rekening Pemerintah

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tiga rekening pemerintah, yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Daftar Rekening Pemerintah Daerah

No.	Nama Bank	Nama Rekening	No. Rekening
1.	Bank Riau Kepri Syariah	Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	105-02-10376
2.	Bank Riau Kepri Syariah	Bendahara Khusus Penerimaan	105-02-10393
3.	Bank BRI	Penampungan BPHTB Pemkab Kepulauan Meranti	0171-01-000338-305

7.3.2 Rekening Satuan Pendidikan Dana BOS

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 menyatakan bahwa Dana BOS pada tahun 2024 dianggarkan pada APBD tahun 2024. Dana BOS terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan dana BOS dianggarkan pada kelompok Pendapatan Transfer, jenis Dana Transfer - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Sedangkan belanja Dana BOS di APBD tahun 2024 terdiri dari Belanja Belanja Barang Dan Jasa



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. Adapun penerima Dana BOS di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebar pada 197 SDN dan SMPN dan 22 SD Swasta dan SMP Swasta, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.2
Daftar Rekening Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Negeri

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	NO. REKENING
A.	SD NEGERI			
1	SD NEGERI 1 SELATPANJANG KOTA	TEBING TINGGI	BANK RIAU	105-38-00055
2	SD NEGERI 2 SELATPANJANG KOTA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00057
3	SD NEGERI 3 SELATPANJANG TIMUR	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00059
4	SD NEGERI 5 SELATPANJANG SELATAN	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00061
5	SD NEGERI 6 SELAT PANJANG SELATAN	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00062
6	SD NEGERI 7 SELATPANJANG SELATAN	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00063
7	SD NEGERI 8 SELATPANJANG SELATAN	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00064
8	SD NEGERI 9 SELATPANJANG TIMUR	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00065
9	SD NEGERI 10 SELATPANJANG TIMUR	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00066
10	SD NEGERI 11 SELATPANJANG TIMUR	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00067
11	SD NEGERI 12 SELATPANJANG SELATAN	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00068
12	SD NEGERI 13 SELATPANJANG KOTA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00069
13	SD NEGERI 14 BANGLAS	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00070
14	SD NEGERI 15 BANGLAS	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00071
15	SD NEGERI 16 BANGLAS BARAT	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00072
16	SD NEGERI 17 ALAHAIR TIMUR	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00073



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	NO. REKENING
17	SD NEGERI 18 SEMULUT	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00078
18	SD NEGERI 19 ALAHAIR TIMUR	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00079
19	SD NEGERI 20 SELATPANJANG TIMUR	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00080
20	SD NEGERI 21 SESAP	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00082
21	SD NEGERI 22 ALAHAIR	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00084
22	SD NEGERI 24 SELATPANJANG KOTA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00087
23	SD NEGERI 25 SELATPANJANG SELATAN	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00088
24	SD NEGERI 27 ALAHAIR TIMUR	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00090
25	SD NEGERI 1 SUNGAI TOHOR	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00074
26	SD NEGERI 2 TANJUNG SARI	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00075
27	SD NEGERI 3 NIPAH SENDANU	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00076
28	SD NEGERI 4 TANJUNG GADAI	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00077
29	SD NEGERI 5 KEPAU BARU	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00081
30	SD NEGERI 6 LUKUN	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00083
31	SD NEGERI 7 SUNGAI TOHOR BARAT	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00085
32	SD NEGERI 8 TELUK BUNTAL	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00091
33	SD NEGERI 9 KEPAU BARU	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00092
34	SD NEGERI 10 LUKUN	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00093
35	SD NEGERI 11 SENDANU DARUL IHSAN	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00094
36	SD NEGERI 12 TANJUNG GADAI	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00095
37	SD NEGERI 1 INSIT	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00104
38	SD NEGERI 2 ALAI	TEBING TINGGI BARAT	BRK	105-38-00105



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	NO. REKENING
			SYARIAH	
39	SD NEGERI 3 BATANG MALAS	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00106
40	SD NEGERI 4 TANJUNG	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00107
41	SD NEGERI 5 TANJUNG KATUNG	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00108
42	SD NEGERI 6 TANJUNG PERANAP	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00109
43	SD NEGERI 7 INSIT	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00110
44	SD NEGERI 8 TENAN	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00111
45	SD NEGERI 9 ALAI	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00112
46	SD NEGERI 10 MAINI	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00113
47	SD NEGERI 11 TENAN	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00114
48	SD NEGERI 12 MENGKIKIP	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00115
49	SD NEGERI 13 INSIT	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00116
50	SD NEGERI 14 MEKONG	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00117
51	SD NEGERI 15 TANJUNG	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00118
52	SD NEGERI 16 TANJUNG PERANAP	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00225
53	SD NEGERI 17 KUNDUR	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00256
54	SD NEGERI 1 TANJUNG SAMAK	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00119
55	SD NEGERI 2 TANJUNG SAMAK	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00141
56	SD NEGERI 3 TELUKSAMAK	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00125
57	SD NEGERI 4 DWI TUNGGAL	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00124
58	SD NEGERI 5 DWI TUNGGAL	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00139
59	SD NEGERI 6 CITRA DAMAI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00127



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	NO. REKENING
60	SD NEGERI 7 CITRA DAMAI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00143
61	SD NEGERI 8 WONO SARI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00142
62	SD NEGERI 9 TANJUNG GEMUK	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00128
63	SD NEGERI 10 TANJUNG MEDANG	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00120
64	SD NEGERI 11 TANJUNG MEDANG	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00136
65	SD NEGERI 12 TOPANG	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00121
66	SD NEGERI 13 TOPANG	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00130
67	SD NEGERI 14 TOPANG	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00140
68	SD NEGERI 15 SUNGAI GAYUNG KIRI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00134
69	SD NEGERI 16 GEMALASARI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00131
70	SD NEGERI 17 PENYAGUN	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00122
71	SD NEGERI 18 PENYAGUN	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00126
72	SD NEGERI 19 REPAN	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00133
73	SD NEGERI 20 TEBUN	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00144
74	SD NEGERI 1 BANTAR	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00145
75	SD NEGERI 2 PERMAI	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00146
76	SD NEGERI 3 SIALANG PASUNG	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00147
77	SD NEGERI 4 BOKOR	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00148
78	SD NEGERI 5 SUNGAI CINA	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00149
79	SD NEGERI 6 SEGOMENG	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00150
80	SD NEGERI 7 MELAI	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00152
81	SD NEGERI 8 BANTAR	RANGSANG BARAT	BRK	105-38-00155



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	NO. REKENING
			SYARIAH	
82	SD NEGERI 9 MELAI	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00156
83	SD NEGERI 10 BINA MAJU	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00157
84	SD NEGERI 11 BOKOR	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00158
85	SD NEGERI 12 SEGOMENG	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00159
86	SD NEGERI 13 LEMANG	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00161
87	SD NEGERI 14 ANAK SETATAH	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00162
88	SD NEGERI 15 LEMANG	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00165
89	SD NEGERI 16 MEKAR BARU	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00166
90	SD NEGERI 17 BOKOR	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00167
91	SD NEGERI 18 TELAGA BARU	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00169
92	SD NEGERI 1 SONDE	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00153
93	SD NEGERI 2 SONDE	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00163
94	SD NEGERI 3 BUNGUR	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00123
95	SD NEGERI 4 BUNGUR	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00135
96	SD NEGERI 5 BUNGUR	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00137
97	SD NEGERI 6 BUNGUR	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00216
98	SD NEGERI 7 BETING	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00129
99	SD NEGERI 8 KAYU ARA	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00154
100	SD NEGERI 9 KEDABU RAPAT	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00151
101	SD NEGERI 10 TANJUNG KEDABU	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00132
102	SD NEGERI 11 SENDAUR	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00160



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	NO. REKENING
103	SD NEGERI 12 SOKOP	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00138
104	SD NEGERI 13 TANAH MERAH	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00164
105	SD NEGERI 14 TANAH MERAH	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00168
106	SD NEGERI 1 TELUK BELITUNG	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00001
107	SD NEGERI 2 MAYANG SARI	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00002
108	SD NEGERI 3 PELANTAI	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00003
109	SD NEGERI 4 MERANTI BUNTING	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00006
110	SD NEGERI 5 LUKIT	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00011
111	SD NEGERI 6 TANJUNG KULIM	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00012
112	SD NEGERI 7 TELUK BELITUNG	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00013
113	SD NEGERI 8 TELUK BELITUNG	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00021
114	SD NEGERI 9 BAGAN MELIBUR	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00025
115	SD NEGERI 10 PELANTAI	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00027
116	SD NEGERI 11 SUNGAI TENGAH	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00032
117	SD NEGERI 12 LUKIT	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00036
118	SD NEGERI 13 MEKAR SARI	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00038
119	SD NEGERI 14 TELUK BELITUNG	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00039
120	SD NEGERI 15 TELUK BELITUNG	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00048
121	SD NEGERI 16 LUKIT	MERBAU	BRK SYARIAH	185-20-00098
122	SD NEGERI 1 KUALA MERBAU	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00007
123	SD NEGERI 2 CENTAI	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00008
124	SD NEGERI 3 KETAPANG	PULAU MERBAU	BRK	105-38-00009



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	NO. REKENING
	PERMAI		SYARIAH	
125	SD NEGERI 4 TELUK KETAPANG	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00010
126	SD NEGERI 5 BARAN MELINTANG	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00017
127	SD NEGERI 6 RENAK DUNGUN	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00018
128	SD NEGERI 7 SEMUKUT	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00022
129	SD NEGERI 8 RENAK DUNGUN	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00024
130	SD NEGERI 9 SEMUKUT	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00028
131	SD NEGERI 10 KUALA MERBAU	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00031
132	SD NEGERI 11 PANGKALAN BALAI	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00035
133	SD NEGERI 12 BATANG MERANTI	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00040
134	SD NEGERI 13 TELUK KETAPANG	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00043
135	SD NEGERI 14 BARAN MELINTANG	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00044
136	SD NEGERI 15 TANJUNG BUNGA	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00045
137	SD NEGERI 16 TANJUNG BUNGA	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00049
138	SD NEGERI 17 RENAK DUNGUN	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00223
139	SD NEGERI 18 KUALA MERBAU	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00051
140	SD NEGERI 19 BATANG MERANTI	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00221
141	SD NEGERI 1 BANDUL	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00004
142	SD NEGERI 2 KUDAP	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00005
143	SD NEGERI 3 MENGKOPOT	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00014
144	SD NEGERI 4 MEKAR DELIMA	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00015
145	SD NEGERI 5 DEDAP	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	NO. REKENING
146	SD NEGERI 6 SELAT AKAR	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00019
147	SD NEGERI 7 BANDUL	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00020
148	SD NEGERI 8 TANJUNG PISANG	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00023
149	SD NEGERI 9 KUDAP	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00026
150	SD NEGERI 10 PUTRI PUYU	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00029
151	SD NEGERI 11 MENGKIRAU	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00030
152	SD NEGERI 12 DEDAP	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00033
153	SD NEGERI 13 MENGKIRAU	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00034
154	SD NEGERI 14 BANDUL	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00037
155	SD NEGERI 15 TANJUNG PADANG	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00041
156	SD NEGERI 16 SELAT AKAR	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00042
157	SD NEGERI 17 TANJUNG PADANG	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00046
158	SD NEGERI 18 PUTRI PUYU	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00047
B.	SMP NEGERI			
159	SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00183
160	SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00184
161	SMP NEGERI 3 TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00185
162	SMP NEGERI 4 TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00186
163	SMP NEGERI 5 TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00188
164	SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI BARAT	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00199
165	SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI BARAT	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00200
166	SMP NEGERI 3 TEBING TINGGI BARAT	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00201



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	NO. REKENING
167	SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI TIMUR	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00187
168	SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI TIMUR	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00189
169	SMP NEGERI SATU ATAP LUKUN	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00190
170	SMP NEGERI 1 RANGSANG	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00202
171	SMP NEGERI 2 RANGSANG	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00203
172	SMP NEGERI 3 RANGSANG	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00205
173	SMP NEGERI 4 RANGSANG	RANGSANG	BRK SYARIAH	167-20-00032
174	SMP NEGERI 1 RANGSANG BARAT	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00210
175	SMP NEGERI 2 RANGSANG BARAT	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00211
176	SMP NEGERI 3 RANGSANG BARAT	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00214
177	SMP NEGERI 1 RANGSANG PESISIR	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00213
178	SMP NEGERI 2 RANGSANG PESISIR	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00212
179	SMP NEGERI 3 RANGSANG PESISIR	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00204
180	SMP NEGERI SATU ATAP SOKOP	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00206
181	SMP NEGERI 1 MERBAU	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00171
182	SMP NEGERI 2 MERBAU	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00176
183	SMP NEGERI 3 MERBAU	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00179
184	SMP NEGERI 4 MERBAU	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00255
185	SMP NEGERI 1 PULAU MERBAU	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00172
186	SMP NEGERI 2 PULAU MERBAU	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00174
187	SMP NEGERI 3 PULAU MERBAU	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00177



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	NO. REKENING
188	SMP NEGERI 1 TASIK PUTRI PUYU	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00170
189	SMP NEGERI 2 TASIK PUTRI PUYU	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00173
190	SMP NEGERI 3 TASIK PUTRI PUYU	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00175
191	SMP NEGERI 4 TASIK PUTRI PUYU	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00178
192	SMP NEGERI 5 TASIK PUTRI PUYU	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	185-20-00156
193	SMP NEGERI SATU ATAP TANJUNG SARI	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00191
194	SMP NEGERI SATU ATAP KEPAU BARU	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00222
195	SMP NEGERI SATU ATAP TOPANG	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00207
196	SMP NEGERI SATU ATAP TANJUNG BUNGA	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00224
197	SMP NEGERI SATU ATAP GAYUNG KIRI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-20-01006
197	SMP NEGERI SATU ATAP GAYUNG KIRI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-20-01006
197	SMP NEGERI SATU ATAP GAYUNG KIRI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-20-01006

Tabel 7.3

Daftar Rekening Sekolah Swasta

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	No. REK BRK SYARIAH
	SD SWASTA			
1	SD SWASTA YOS SUDARSO	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00096
2	SD SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00097
3	SD SWASTA PATRIA DHARMA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00098
4	SD SWASTA KASIH MAITREYA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00099
5	SD SWASTA MUHAMMADIYAH	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00100
6	SD SWASTA AL - MUWAHHIDIN	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00101



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	No. REK BRK SYARIAH
7	SD SWASTA ISLAM AL-HIKMAH	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00102
8	SD SWASTA EKA EDUKASI CAHAYA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00218
9	SDIT PERMATA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00219
10	SD SWASTA USWATUN HASANAH	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00054
11	SD SWASTA WJS. POERWADARMINTA	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00053
12	SD SWASTA MEKAR DELIMA	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105.20.02889
	SMP SWASTA			
13	SMP SWASTA PATRIA DHARMA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00192
14	SMP SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00195
15	SMP SWASTA KASIH MAITREYA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00196
16	SMP MUHAMMADIYAH	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00197
17	SMP SWASTA YOS SUDARSO	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00193
18	SMP SWASTA BAHRUL ULUM	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00194
19	SMP IT DARUL FIKRI BOARDING SCHOOL	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00280
20	SMP SWASTA BATANG MERANTI	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00182
21	SMP IT PERMATA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	820-21-43113
22	SMP SWASTA EKA EDUKASI CAHAYA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00293

Tabel 7.4

Daftar Rekening Pengelolaan BOP Kesetaraan

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	No. REK
1	PKBM BINA BANGSA	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00473
2	PKBM BINA INSANI	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00474



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	No. REK
3	PKBM DAYA GUNA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00470
4	PKBM RIAU SEJATI	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00472
5	PKBM SEJAHTERA ALAI	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00471
6	SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TENGGU SOELOENG TJANTIK	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00518

Tabel 7.5
Daftar Rekening Pengelolaan BOP PAUD

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	No. REK
1	TK NEGERI PEMBINA SLP TIMUR	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00303
2	TK NEGERI PERTIWI SELATPANJANG	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00304
3	TK ADHYAKSA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00295
4	TK AFIDA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00297
5	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00296
6	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00314
7	TK AL-MUAWANAH	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00298
8	TK EKA EDUKASI CAHAYA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00299
9	TK KASIH MAITREYA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00300
10	TK KEMALA BHAYANGKARI	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00301
11	TK KRISTEN KALAM KUDUS	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00302
12	TK NEGERI PEMBINA SLP TIMUR	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00303
13	TK NEGERI PERTIWI SELATPANJANG	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00304



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	No. REK
14	TK PATRIA DHARMA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00305
15	TK PERMATA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00294
16	TKYAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SLP	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00306
17	TK YOS SUDARSO	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00307
18	KB AISIYIAH	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00308
19	KB AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00309
20	KB AL-ISTIQOMAH	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00310
21	KB AL-MUAWANAH	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00311
22	KB BESTARI	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00312
23	KB BINA INSANI	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00315
24	KB BINA TERAMPIL	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00316
25	KB BUAH HATI BUNDA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00317
26	KB EKA EDUKASI CAHAYA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00318
27	KB HARAPAN BUNDA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00319
28	KB HASANAH	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00320
29	KB KASIH MAITREYA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00321
30	KB KRISTEN KALAM KUDUS	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00322
31	KB MUSLIMAT NU. 1	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00323
32	KB MUSLIMAT NU. 2	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00324
33	KB MUSLIMAT NU. 4	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00325
34	KB MUSLIMAT NU. 9	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00326
35	KB PERMATA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00327
36	KB PERTIWI	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00328
37	KB SALSABILA KIDS	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00329
38	KB SIDOMULYO	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00476
39	KB USAHA MANDIRI	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00477
40	TPA AFIDA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00313
41	TPA AISIYIAH	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00478



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	No. REK
42	TPA PERMATA	TEBING TINGGI	BRK SYARIAH	105-38-00479
43	TK NEGERI TEBING TINGGI BARAT	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00340
44	TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00330
45	TK AL - MANAR	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00331
46	TK AN NAJAH	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00332
47	TK FATHIMAH	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00333
48	TK HARAPAN BUNDA	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00334
49	TK MAWAR	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00336
50	TK MELATI	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00337
51	TK MUTIARA KASIH	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00338
52	TK PERTIWI	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00341
53	TK RAUDATUL QURAN	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00342
54	KB AISYIAH	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00343
55	KB AL-FATIH	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00344
56	KB AL-MANAR	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00345
57	KB AL-MUSTOFA	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00346
58	KB AL-MUTTAQIN	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00347
59	KB BINA BANGSA	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00348
60	KB HARAPAN BUNDA	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00349
61	KB KAMPUNG BALAK	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00350
62	KB MAWAR	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00351
63	KB MAWAR PUTIH	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00335
64	KB MUTIARA KASIH	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00480
65	KB PERMATA HATI	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00498
66	KB PERTIWI	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00481



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	No. REK
67	KB SEJAHTERA	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00482
68	KB TUNAS BARU	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00483
69	SPS SENANGIN II	TEBING TINGGI BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00484
70	TK NEGERI SUNGAI TOHOR	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00488
71	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00485
72	TK AL-HIDAYAH	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00486
73	TK CERDAS CERIA	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00487
74	TK NURUL IMAN	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00489
75	KB AISIYAH	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00490
76	KB AISIYAH	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00491
77	KB AL-HIKMAH	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00492
78	KB CERDAS CERIA	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00493
79	KB HARAPAN KASIH BUNDA	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00494
80	KB MEKAR SARI HIJAU	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00495
81	KB MUSLIMAT NU VI	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00496
82	KB NURUL IMAN	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00497
83	KB PELITA HATI	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00381
84	KB TUNAS BANGSA	TEBING TINGGI TIMUR	BRK SYARIAH	105-38-00382
85	TK NEGERI TANJUNG SAMAK	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00355
86	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00383
87	TK CITRA FAJAR	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00384
88	TK DARUL KAROMAH	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00352
89	TK KASIH BUNDA	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00353
90	TK MELATI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00354
91	TK PELANGI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00356



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	No. REK
92	TK TUT WURI HANDAYANI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00357
93	KB AISIYIAH	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00358
94	KB AKASIA	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00359
95	KB ANAK DESA	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00360
96	KB ANAK NEGERI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00361
97	KB ANAK SEHAT	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00362
98	KB ANANDA	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00363
99	KB CINTA BUNDA	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00364
100	KB HAYATUL HUSNA	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00365
101	KB MELATI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00366
102	KB MUSLIMAT NU 11	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00367
103	KB MUSLIMAT NU. 3	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00368
104	KB MUSLIMAT NU. 5	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00369
105	KB MUSLIMAT NU. 8	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00370
106	KB PELANGI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00376
107	KB PERMATA HATI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00371
108	KB SAYANG ANAK	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00372
109	KB SEJAHTERA	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00373
110	KB SEROJA	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00374
111	KB TUAH PERMATA BUNDA	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00375
112	KB TUT WURI HANDAYANI	RANGSANG	BRK SYARIAH	105-38-00377
113	TK NEGERI RANGSANG BARAT	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00390
114	TK ADALWIS	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00378
115	TK AIDIL HIDAYAT	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00379
116	TK AL - MUSLIHUN	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00380
117	TK BATIN GALANG	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00391
118	TK BUDI UTOMO	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00386
119	TK DHINI	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00387
120	TK KASIH BUNDA	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00388



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	No. REK
121	TK MUTIARA	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00389
122	TK NURUL IMAN	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00392
123	TK SEKAR ANAK SETATAH	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00393
124	TK YASMIN	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00394
125	KB ADALWIS	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00395
126	KB AIDIL HIDAYAT	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00401
127	KB BATIN GALANG	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00396
128	KB BUDI UTOMO	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00397
129	KB DHINI	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00398
130	KB KASIH BUNDA	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00399
131	KB NURUL IMAN	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00400
132	KB SEKAR	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00402
133	KB YASMIN	RANGSANG BARAT	BRK SYARIAH	105-38-00403
134	TK MELATI	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00404
135	TK MUAWANAH	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00405
136	TK MUTIARA	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00406
137	TK MUTIARA BUNDA	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00407
138	TK PERMATA	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00408
139	KB INTAN	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00409
140	KB MELATI	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00410
141	KB MUAWANAH	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00411
142	KB MUTIARA BUNDA	RANGSANG PESISIR	BRK SYARIAH	105-38-00412
143	TK NEGERI TELUK BELITUNG	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00415
144	TK AL-MUNAWARAH	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00413
145	TK MUTIARA	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00414



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	No. REK
	BANGSA			
146	KB AL-MUNAWAROH	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00416
147	KB BINA MULIA	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00417
148	KB KARTIKA	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00418
149	KB KARTINI	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00419
150	KB KASIH IBU	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00420
151	KB MUTIARA BANGSA	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00421
152	KB MUTIARA HATI	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00422
153	KB NUSA CERIA	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00423
154	KB PELITA HATI	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00424
155	KB PERMATA HATI	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00425
156	KB TUNAS BANGSA	MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00426
157	TK NEGERI KUALA MERBAU	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00429
158	TK DANG MERDU	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00427
159	TK DARUSSALAM AL-HAYYI	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00428
160	KB AL MUQORROBIN	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00430
161	KB ANGGREK	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00431
162	KB BINA ASIH	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00432
163	KB BINTANG PERMATA	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00433
164	KB BUNDA SAYANG	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00434
165	KB CAHAYA BUNDA	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00435
166	KB CAHAYA HATI	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00436
167	KB DANG MERDU	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00437
168	KB HARAPAN BUNDA	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00438
169	KB HARAPAN BUNDA	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00439
170	KB HIDAYATUL UMMI	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00440
171	KB KASIH BUNDA	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00441
172	KB MUARA KASIH	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00442
173	KB MUTIARA HATI	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00443
174	KB NUR AZZAHRA	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00444
175	KB PERMATA BUNDA	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00445



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	No. REK
176	KB PERMATA DELIMA	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00446
177	KB SETIA BUNDA	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00447
178	KB TARBIYATUL HASANAH	PULAU MERBAU	BRK SYARIAH	105-38-00448
179	TK NEGERI MENGKIRAU	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00451
180	TK DARUN NAIM	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00449
181	TK FAJAR HARAPAN	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00450
182	TK NUR INSANI	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00452
183	TK PERMATA BUNDA	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00453
184	TK PERMATA IBU	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00454
185	TK RAUDHOTUL HASANAH	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00455
186	KB BELAHAN JIWA	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00456
187	KB BINA ASIH	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00457
188	KB BINA INSANI	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00458
189	KB BINA INSANI	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00459
190	KB DARUN NAIM	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00460
191	KB HIDAYATUL ILMI	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00461
192	KB INTAN PAYUNG	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00462
193	KB JUNIOR	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00463
194	KB JUNJUNGAN JIWA	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00464
195	KB KARTINI	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00465
196	KB MUARA KASIH BUNDA	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00466
197	KB NUR INSANI	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00467
198	KB RAUDHOTUL HASANAH	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00468
199	TK NEGERI KEDABURAPAT	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00515



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA BANK	No. REK
200	TK ISLAMIYAH	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00521
201	TK IT IKHLAS HATI IBU 1	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00516
202	KB DAYUNG SEREMPAK	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105.38.00514
203	KB TUNAS CERDAS BUMI ASRI	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00513
204	TK MUTIARA HATI BUNDA	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00519
205	KB FATHIMAH	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00522
206	KB HASYIFA	TASIK PUTRI PUYU	BRK SYARIAH	105-38-00520

7.4. Basis dalam Pencatatan Laporan Keuangan

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan pencatatan basis *akrual* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

7.5. Opini Laporan Keuangan BUMD dan BLUD

Tabel 7.6
Daftar Opini Laporan Keuangan BUMD dan BLUD

No.	BUMD/BLUD	OPINI LAPORAN KEUANGAN	No. Laporan	Uraian
1	PT. BUMI MERANTI	WDP	0020/2.1184/AU.2/05/1398- 3/I/IV/2024	KAP Yaniswar dan Rekan
2	BLUD UPT RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	WTP	00005/2.1401/AU/5/05/1871- 1/1/III/2024	KAP Eljufri
3	BLUD UPT PUSKESMAS ALAH AIR	WTP	00009/2.1401/AU.5/11/1871- 1/1/IV/2024	KAP Eljufri
4	BLUD UPT PUSKESMAS SELATPANJANG	WTP	00010/2.1401/AU.5/11/1871- 1/1/IV/2024	KAP Eljufri
5	BLUD UPT PUSKESMAS	WTP	00011/2.1401/AU.5/11/1871-	KAP Eljufri



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	BUMD/BLUD	OPINI LAPORAN KEUANGAN	No. Laporan	Uraian
	KEDABU RAPAT		1/1/IV/2024	
6	BLUD UPT PUSKESMAS ANAK SETATAH	WTP	00012/2.1401/AU.5/11/1871-1/1/IV/2024	KAP Eljufri
7	BLUD UPT PUSKESMAS ALAI	WTP	00013/2.1401/AU.5/11/1871-1/1/IV/2024	KAP Eljufri
8	BLUD UPT PUSKESMAS TANJUNGSAMAK	WTP	00014/2.1401/AU.5/11/1871-1/1/IV/2024	KAP Eljufri
9	BLUD UPT PUSKESMAS TELUK BELITUNG	WTP	00015/2.1401/AU.5/11/1871-1/1/IV/2024	KAP Eljufri
10	BLUD UPT PUSKESMAS BANDUL	WTP	00016/2.1401/AU.5/11/1871-1/1/IV/2024	KAP Eljufri
11	BLUD UPT PUSKESMAS PULAU MERBAU	WTP	00017/2.1401/AU.5/11/1871-1/1/IV/2024	KAP Eljufri
12	BLUD UPT PUSKESMAS SUNGAI TOHOR	WTP	00018/2.1401/AU.5/11/1871-1/1/IV/2024	KAP Eljufri



BAB VIII

PENUTUP

Laporan Keuangan ini dibuat sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikonversi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selama Tahun 2024 dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

8.1 Permasalahan

1. Terbatasnya kemampuan SDM aparatur untuk mengidentifikasi tugas-tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing unit kerja untuk menata Organisasi Perangkat Daerah yang rasional sesuai kebutuhan daerah;
2. Terbatasnya aparatur pengelolaan barang milik daerah mengakibatkan pengelolaan barang daerah belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk pengelolaan barang;
4. Belum maksimalnya sistem pengelolaan barang yang dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat tentang kondisi barang, sehingga menyebabkan laporan mengenai inventaris barang daerah baik yang bergerak maupun yang tidakbergerak belum dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar; dan
5. Keterbatasan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

8.2 Pemecahannya

1. Perlu ditingkatkan SDM aparatur khususnya di bidang kelembagaan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan agar terwujudnya postur organisasi yang efisiensi, efektivitas dan profesional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
2. Perlu dilakukan pembinaan teknis pengelolaan barang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada setiap pemegang barang dan pengurus barang dari setiap unit kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
3. Diperlukan adanya suatu sistem penanganan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem manajemen akuntansi daerah guna mengakomodir kegiatan pengelolaan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

keuangan daerah dengan menggunakan program aplikasi secara terstruktur dan terintegrasi sehingga memudahkan penanganan dan monitoring serta pengawasan.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI



AKBP (Purno) L. ASMAR